BADAN POM

BALAI BESAR POM DI BANDUNG
WBK
ZONA INTEGRITAS

Lapkin

LAPORAN KINERJA 2023

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

WBK BBPOM BANDUNG JUARA! GOES TO WBBM

TOLAK! GRATIFIKASI, KORUPSI & SUAP

bandung.pom.go.id bpom.bandung bpombandung Balai Besar POM di Bandung KABAYAN +62 811-9900-533

KATA PENGANTAR

Kepala Balai Besar POM di Bandung

"Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung selaku Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM RI senantiasa selalu berkomitmen menjamin mutu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat"

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2023 dapat diselesaikan. Tahun 2023, merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024. Pada tahun 2023, terjadi beberapa isu strategis baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja Balai Besar POM di Bandung. Namun, hal-hal tersebut tidak menjadi hambatan tetapi dijadikan sebagai tantangan untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka "menjamin mutu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat".

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 maka disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN) Tahunan Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2023 ini. LAPKIN disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Addendun Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar/Balai POM.

LAPKIN Tahunan Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2023 disusun pada akhir Tahun 2023 pelaksanaan program/kegiatan yang memiliki dua fungsi utama yaitu (1) merupakan sarana bagi Balai Besar POM di Bandung untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (2) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang *(performance improvement)*, baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung.

Berbagai kendala dan hambatan dialami dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, namun dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada serta kerjasama yang baik maka target kinerja dapat dicapai.

bandung.pom.go.id BPOMBandung @bpombandung @BPOMBandung BalaiBesarPOMdiBandung

1500533 HALOBPOM

Akhir kata, kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2023 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada pemberi mandat dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Badan POM serta Balai Besar POM di Bandung di triwulan berikutnya.

Bandung, 28 Februari 2024
Kepala Balai Besar POM di Bandung,

Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt

bandung.pom.go.id BPOMBandung @bpombandung @BPOMBandung BalaiBesarPOMdiBandung

1500533 HALOBPOM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

Bab 1
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1.3 Struktur Organisasi

1.4 Isu Strategis

Bab 2
Perencanaan Kinerja

2.1 Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2022

2.5 Metode Pengukuran

Bab 3
Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Sasaran Kegiatan Ke-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung

3.1.2 Sasaran Kegiatan Ke-2: Meningkatnya Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

3.1.3 Sasaran KegiatanKe-3: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung

3.1.4 Sasaran KegiatanKe-4: Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung

3.1.5 Sasaran KegiatanKe-5: Meningkatnya efektivitas Pemeriksaan Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung

3.1.6 Sasaran KegiatanKe-6: Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan

3.1.7 Sasaran KegiatanKe-7: Meningkatnya Pengujian Obat dan Makanan BBPOM di Bandung yang optimal

bandung.pom.go.id BPOMBandung @bpombandung @BPOMBandung BalaiBesarPOMdiBandung

1500533 HALOBPOM

3.1.8 Sasaran KegiatanKe-8: Meningkatnya Efektivitas Penindakan Tindak Pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung

3.1.9 Sasaran KegiatanKe-10: Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang Berkinerja Optimal

3.1.10 Sasaran KegiatanKe-11: Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK BBPOM di Bandung yang Terintegrasi dan Adaptif

3.1.11 Sasaran KegiatanKe-12: Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel

3.2 Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Kegiatan

Bab 4
Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

bandung.pom.go.id BPOMBandung @bpombandung @BPOMBandung BalaiBesarPOMdiBandung

1500533 HALOBPOM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahunan Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2023 sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya selama Tahunan tahun 2023. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja Tahunan Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2023 ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Bandung selama Tahunan tahun 2023 yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di triwulan berikutnya.

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 ditetapkan. Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, yaitu 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan. 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu. 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan. 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

bandung.pom.go.id BPOMBandung @bpombandung @BPOMBandung BalaiBesarPOMdiBandung

1500533 HALOBPOM

SASARAN KEGIATAN

- Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung
- 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung
- 3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung
- 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung
- 5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan M0akanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung
- 6. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan M0akanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung
- 7. Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung
- 8. Terwujudnya organisasi BBPOM di Bandung yang efektif
- 9. Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal
- 10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
- 11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel

Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Balai Besar POM di Bandung dalam merumuskan sasaran kegiatan, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Bandung Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2023, telah ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan yang harus dicapai oleh Balai Besar POM di Bandung.

Pengukuran kinerja yang tercantum dalam dokumen Kinerja Tahunan Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai Besar POM di Bandung yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2022. Perjanjian kinerja tersebut merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2023. Pada sasaran kegiatan kesatu yaitu **"Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung "** diperoleh capaian indikator kinerja dengan kategori Sangat Baik sebanyak 2 (dua) indikator, yaitu Persentase Makanan yang memenuhi syarat sebesar 104,96%, Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 106,17%. 2 (dua) indikator kategori Cukup yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat 99,35% dan Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 99,67%, dan. 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori tidak dapat disimpulkan yaitu Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat 125,13%.

bandung.pom.go.id BPOMBandung @bpombandung @BPOMBandung BalaiBesarPOMdiBandung

1500533 HALOBPOM

Sasaran kegiatan kedua yaitu **"Meningkatnya Kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung"** diperoleh capaian indicator dengan kategori Sangat Baik yaitu Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT sebesar 111,13%.

Sasaran kegiatan ketiga yaitu **"Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung"** diperoleh capaian indicator dengan kategori Sangat Baik sebanyak 3 (tiga) indikator kegiatan, yaitu Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan sebesar 104,18%, Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan sebesar 101,33%, dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM sebesar 101,38%.

Sasaran kegiatan keempat yaitu **"Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan public di wilayah kerja BBPOM di Bandung"** diperoleh capaian indicator sebanyak 6 (enam) indikator kinerja dengan kategori Sangat Baik, yaitu Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 102,04%, Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 115,33%, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 105,80%, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 100,40%, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 103,57% dan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sebesar 105,49%. Dan 1 (satu) indicator dengan kategori Cukup yaitu, dan Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung sebesar 94,09%.

Sasaran kegiatan kelima yaitu **"Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan"** diperoleh capaian indikator sebanyak 1 (satu) indikator dengan kriteria Sangat Baik, yaitu, Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandung sebesar 100,05%. 3 (tiga) indicator dengan kriteria Baik yaitu Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman sebesar 100,00%, Jumlah desa pangan aman sebesar 100,00% dan Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya sebesar 100,00%.

Sasaran kegiatan keenam yaitu **"Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung"** diperoleh capaian indicator sebanyak 2 (dua) indicator dengan kategori Cukup yaitu, Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 99,07%, dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 99,66%.

Sasaran kegiatan ketujuh yaitu **"Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung"** diperoleh capaian indikator kinerja

bandung.pom.go.id BPOMBandung @bpombandung @BPOMBandung BalaiBesarPOMdiBandung

1500533 HALOBPOM

dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan, yaitu Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan 121,26%.

Sasaran kegiatan kedelapan yaitu **"Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal"** diperoleh capaian indikator kinerja dengan kategori 1 (satu) indikator dengan kategori Sangat Baik yaitu Indeks RB BBPOM di Bandung sebesar 107,87% dan 1 (satu) indicator dengan kategori Cukup yaitu Nilai AKIP BBPOM di Bandung sebesar 93,57%.

Sasaran kegiatan kesembilan yaitu **"Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal"** diperoleh capaian indikator kinerja dengan kategori Sangat Baik sebanyak 1 (satu) yaitu Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung sebesar 111,00%.

Sasaran kegiatan kesepuluh yaitu **"Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan"** diperoleh capaian 2 (dua) indikator kinerja dengan 1 (satu) kategori Sangat Baik yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal sebesar 102,86%. Dan 1 (satu) indicator dengan kategori Cukup yaitu Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP sebesar 97,75%.

Sasaran kegiatan kesebelas yaitu **"Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel"** diperoleh capaian untuk 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori Cukup, yaitu Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung sebesar 92,34%.

Pada tahun 2023 Balai Besar POM di Bandung memperoleh anggaran sebesar Rp 73.084.519.000,- Realisasi anggaran pada Tahun 2023 dengan presentase 99,50% yaitu sebesar Rp. 72.717.111.983,- dan Tingkat Efisiensi sebesar 0,04 (Efisien). Dari sasaran kegiatan yang telah dilaksanakan diperoleh tingkat efisiensi tertinggi, yaitu Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat sebesar 0,26. Sedangkan tingkat efisiensi terendah adalah pada Sasaran Kegiatan Nilai AKIP BBPOM di Bandung sebesar -0,06.

Kegiatan BBPOM di Bandung yang dilakukan selama tahun 2023 telah dilaksanakan dengan cukup efisien. Meskipun demikian pada triwulan berikutnya di tahun 2023 akan terus ditingkatkan sesuai dengan pedoman Renstra Balai Besar POM tahun 2020-2024.

bandung.pom.go.id BPOMBandung @bpombandung @BPOMBandung BalaiBesarPOMdiBandung

1500533 HALOBPOM

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1.3 STRUKTUR ORGANISASI
1.4 ISU STRATEGIS

1.1 LATAR BELAKANG

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandung selama tahun 2023, yang merupakan ke empat pelaksanaan renstra ini, menghadapi berbagai tantangan, antara lain : 1) aspek kesehatan-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) aspek ekonomi-mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi Obat dan Makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan Obat dan Makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk illegal dan palsu, serta memperluas pengunaan teknologi dalam pengawasan Obat dan Makanan; 4) aspek keamanan nasional meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme; dan 5) aspek teknologi-meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informai untuk menghadapi peningkatan tren peredaran Obat dan Makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Balai Besar POM di Bandung telah menetapkan tujuan organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu.

5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Bandung bulan Januari s.d. Desember atau Tahunan Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 dan tahun ketiga dari Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai tujuan serta visi organisasi. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Balai Besar POM di Bandung.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah

mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sebagai tindaklanjut, maka diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM sebanyak 21 (dua puluh satu); b.

Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM sebanyak 13 (tiga belas); dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM sebanyak 39 (tiga puluh sembilan).

KEDUDUKAN

UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

TUGAS

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Balai Besar POM di Bandung mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;

k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

TABEL 1.1

WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

UPT	Kedudukan	Wilayah Kerja
BBPOM di Bandung	Alamat Jl. Pasteur No. 25 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung	1. Kota Bandung 2. Kabupaten Subang 3. Kabupaten Cianjur 4. Kabupaten Garut 5. Kabupaten Bandung Barat 6. Kabupaten Majalengka 7. Kabupaten Sumedang 8. Kabupaten Bandung 9. Kabupaten Karawang 10. Kota Bekasi 11. Kabupaten Bekasi 12. Kabupaten Sukabumi 13. Kota Cimahi 14. Kota Sukabumi

UPT	Kedudukan	Wilayah Kerja
		15. Kabupaten Purwakarta 16. Kabupaten Cirebon 17. Kota Cirebon, 18. Kabupaten Indramayu 19. Kabupaten Kuningan

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Bandung disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diundangkan pada tanggal 7 September 2020.

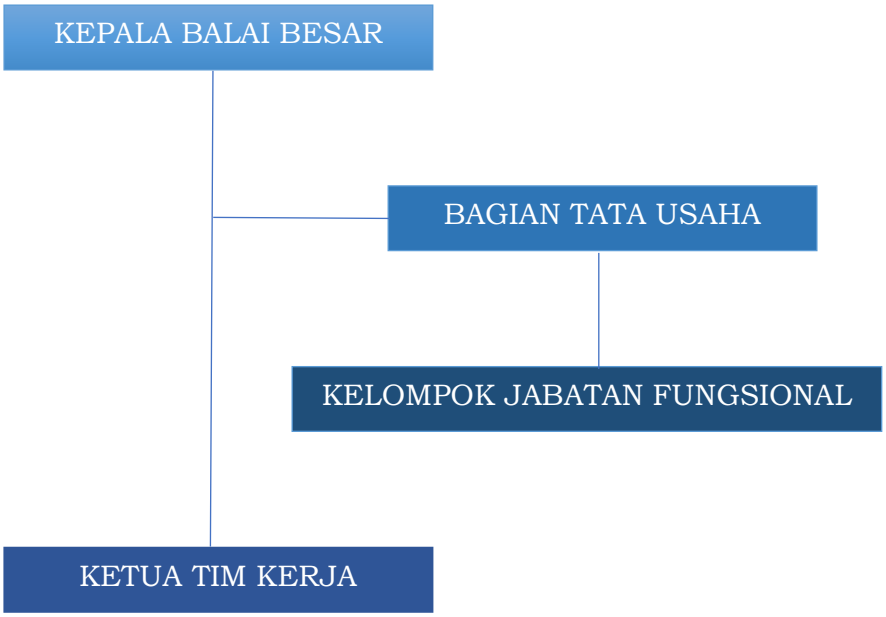

1.4 ISU STRATEGIS

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada Tahun kerja 2023 maka muncul beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja, antara lain:

ISU INTERNAL

Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPOM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Perpres tersebut di atas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan fungsi penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diberi kewenangan intelijen dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sumberdaya Manusia

Balai Besar POM di Bandung memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuandan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan. Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan–pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK).

Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). sarana dan prasarana kerja; 2). Alat Laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari Ruang kerja, Ruang penunjang dalam gedung, Ruang/ fasilitas penunjang luar gedung, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan operasional.

Luas lahan Balai Besar POM di Bandung seluas 4.268 m2 dengan luas lantai bangunan sebesar 5.686 m2. Bangunan yang ada selain memiliki fungsi sebagai area perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Pemenuhan terhadap kebutuhan sarana prasarana adalah 78,1% yang terdiri dari pemenuhan alat laboratorium 61,7% dan pemenuhan sarana prasarana kerja 94,6%, sehingga masih diperlukan tambahan untuk penambahan alat laboratorium.

Peralatan Laboratorium

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandung. Laboratorium Balai Besar POM di Bandung telah mendapat sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji dari Komite Akreditasi Nasional dengan nomor sertifikat LP-173-IDN. Ilmu dan teknologi terus berkembang, begitu pula dengan proses pengujian. Untuk itu,laboratorium harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara optimal. Untuk melakukan pengujian, laboratorium telah dilengkapi dengan peralatan yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya. Namun, dibandingkan terhadap Standar Minimum Laboratorium Balai Besar POM di Bandung, masih terdapat gap sehingga pengadaan peralatan laboratorium terus dilakukan. Pada tahun 2023, pemenuhan Standar Minimum Alat Laboratorium adalah sebesar 62,4%.

Regionalisasi Laboratorium

Dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis serta mendukung daya saing produk obat dan makanan maka pada

tahun 2023 BPOM menerapkan sistem manajemen laboratorium yang baru yaitu 'Regionalisasi Laboratorium'. Setiap BB/Balai POM telah memiliki laboratorium pengujian kimia untuk obat dan nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan, serta pengujian biologi. Beberapa laboratorium telah dilengkapi instrument dengan teknologi tinggi, seperti LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS. Beberapa BB/Balai POM memiliki fasilitas uji sterilitas dan atau fasilitas uji DNA, sehingga menjadi Balai unggulan BPOM untuk uji sterilitas dan uji DNA. Metode pendekatan yang komplementer atau saling melengkapi satu sama lain merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas laboratorium pengujian. Regionalisasi laboratorium dikelompokkan ke dalam tujuh region. Balai Besar POM di Bandung masuk ke dalam Region 3 dengan Koordinator BBPOM di DKI Jakarta, dan anggota terdiri dari BBPOM di Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Serang. Manfaat dari system manajemen regionalisasi laboratorium ini adalah efisiensi biaya pembelian instrumen, biaya pemeliharaan, fasilitas, baku pembanding, bahan pendukung, dan lain-lain, serta mengurangi timeline pengujian atau waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan.

ISU EKSTERNAL

Secara garis besar, isu bersifat eksternal yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandung adalah sebagai berikut :

Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (IV)

perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Sebagaimana tertuang dalam PP no.72 Tahun 2012 tersebut, maka Balai Besar POM di Bandung sebagai salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi, dan makanan, dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan baik *pre-market* maupun *post-market* Obat dan Makanan sehingga dapat menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Balai Besar POM di Bandung,yaitu melalui :

a. Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar mulai dari pengawasan, pelaksanaan regulasi, pembinaan, penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, serta;
b. Upaya terkait kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan.

Fokus sistem kesehatan nasional tahun 2021 dengan berkaca pada terjadinya Pandemi covid-19 menurut Bappenas akan menjadi salah satu *major project* dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Adapun fokus penguatan Sistem Kesehatan Nasional di 2021 antara lain penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS), penguatan ketahanan kesehatan dan penguatan sumber daya melalui pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan. Balai Besar POM di Bandung sebagai UPT dari Badan POM memegang peranan penting di ketiga fokus penguatan ini, diantaranya dalam memberikan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) untuk mengkampanyekan GERMAS pada masyarakat, memperkuat sistem pengawasan dengan penguatan kapasitas dan jejaring laboratorium serta pengawalan dalam pemenuhan vaksin dan obat, termasuk vaksin covid-19

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya

kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan demand terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Tingginya permintaan obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran Balai Besar POM di Bandung akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB dan post- market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar. Seiring dengan penerapan JKN, akan banyak industri farmasi yang harus melakukan resertifikasi CPOB yang berlaku 5 (lima) tahun. Dari sisi penyediaan (supply side) JKN, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian BPOM harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji dan inspektur), serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan naiknya beban kerja.

Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan. Dampak dari pengaruh

lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional yang memungkinkan terbentuknya suatu kawasan bebas perdagangan. Hal ini membuka peluang produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional. Oleh karena itu diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu meningkatkan daya saing terhadap produk luar negeri. Hal tersebut juga berdampak pada pertumbuhan sektor industri Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2023 terdapat 85 industri farmasi, 43 industri Obat Tradisional, 103 industri kosmetik, 44 industri suplemen makanan, 60 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), 609 Industri Pangan dan 23.774 Industri Rumah Tangga Pangan. Hal tersebut merupakan potensi bagi Balai Besar POM di Bandung dalam pemantapan stakeholder untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha.

Pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan . Hal ini menjadi peluang bagi Balai Besar POM di Bandung untuk ikut serta dalam meningkatkan daya saing industri tersebut dalam menghadapi pasar global. Namun disisi lain, timbul permasalahan era perdagangan bebas yaitu masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Apabila dibandingkan pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan dengan SDM yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung, sampai dengan tahun 2014 presentase pemenuhan SDM sesuai beban kerja hanya 76,97%. Sedangkan pemenuhan SDM sesuai beban kerja tahun 2015 berdasarkan Renstra tahun 2015-2019 hanya sebesar 44,48 %. Jumlah SDM yang tidak sebanding ini menjadi tantangan yang sangat besar dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan hal ini, Balai Besar POM di Bandung harus menyusun strategi agar kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dapat terlaksana secara optimal,

dan juga menerapkan sistem manajemen kinerja secara optimal sehingga lebih efektif dan efisien. Namun demikian, Balai Besar POM di Bandung memiliki kelebihan yang dapat dipergunakan, yaitu adanya pedoman pengawasan yang jelas sebagai acuan dan standar baku dalam pengawasan atas Obat dan Makanan. Selain itu, Balai Besar POM di Bandung telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015, SNI ISO/IEC 17025: 2017 dan SNI ISO 37001:2016

Perubahan Iklim

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia. Selain dari sisi pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut diantaranya virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu negara ke negara lain.

Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Research Center for Climate Change University of Indonesia (RCCC-UI) tahun 2013, dalam pelaksanaan kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim, terdapat tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan iklim dan perkembangan vektor yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) dan penyakit batu ginjal.

Di dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023, salah satu misinya memiliki tujuan meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan.

Hal ini merupakan tindak lanjut pemerintah daerah dalam mencapai target yang ditetapkan dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) di sektor kesehatan yaitu diantaranya mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan, serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air dan penyakit menular lainnya. Untuk mencapai target tersebut pasti akan diimbangi dengan peningkatan jenis dan jumlah obat terkait penyakit-penyakit tersebut, dan ini semakin nyata dengan terjadinya Pandemi covid-19 sejak 2020 yang lalu.

Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim, diperlukan peran dari Balai Besar POM di Bandung dalam mengawasi peredaran varian obat baru dari jenis penyakit tersebut. Selain dari obat kimia, varian obat baru ini juga diikuti pula dengan varian obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari Balai Besar POM di Bandung dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan produksi dan peredaran obat tersebut.

Perubahan Demografi, Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Kemajuan dari ekonomi suatu provinsi dapat dilihat dari indikator makro- ekonomi, yakni pendapatan per kapita. Pada tahun 2018 PDRB per kapita atas harga berlaku Provinsi Jawa Barat sebesar 40,30 juta rupiah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar 37,18 juta atau naik sebesar 8,41 persen. Persentase jumlah penduduk miskin Jawa Barat juga mengalami penurunan dari tahun 2017 (7,86%) menjadi tahun 2018 (7,27%).

Hal ini menunjukan adanya peningkatan daya beli masyarakat yang secara teori dan fakta, bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memiliki standar dan kualitas. Faktor tersebut dapat menyebabkan kecenderungan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi jumlah dan jenis produk Obat dan Makanan tanpa diimbangi

dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan dapat menimbulkan penurunan derajat kesehatan.

Pada tahun 2020, penduduk Jawa Barat berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 yaitu sebanyak 48,27 juta jiwa, menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia dalam hal jumlah penduduk terbesar. Terdiri atas laki-laki sebanyak 24,51 juta jiwa dan perempuan sebanyak 23,76 juta jiwa (Sumber: Badan Pusat Statistik - Jawa Barat dalam Angka 2020), menjadi tantangan bagi BBPOM di Bandung dalam perannya memberikan informasi dan edukasi publik mengenai produk Obat dan Makanan yang aman.

Pertumbuhan jumlah penduduk dan bergesernya pola hidup masyarakat umum menjadi tantangan Balai Besar POM di Bandung untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin banyak jenis dan jumlahnya. Hal tersebut juga harus disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas edukasi terhadap masyarakat di Provinsi Jawa Barat mengenai produk Obat dan Makanan yang aman.

Tuntutan masyarakat

Tuntutan masyarakat terhadap pangan yang semula hanya pada aspek harga, rasa dan tren gaya hidup, pada saat ini telah bergeser lebih kepada keamanan dan mutu pangan. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan semakin banyaknya lembaga perlindungan konsumen serta media informasi baik offlie maupun online yang memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam memilih produk serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Sistem Desentralisasi ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang

pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Bandung berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintahan pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dengan pihak swasta.

Disisi lain, pengakuan stakeholder akan keberadaan Balai Besar POM di Bandung semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena Balai Besar POM di Bandung tidak hanya telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal tetapi juga berperan aktif didalam berbagai forum instansi lainnya dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa diantaranya adalah Badan POM termasuk Balai Besar POM di Bandung sebagai Kelompok Kerja Keamanan Pangan Nasional di dalam Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT), Program Pembinaan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah, Program Pasar Aman dsari Bahan Berbahaya, Program Gerakan Keamanan Pangan Desa, dan sebagai narasumber dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Balai Besar POM di Bandung juga melayani pengujian produk Obat dan Makanan dari pihak ketiga. Secara umum, pengujian dari pihak ketiga berasal dari instansi pemerintah dan masyarakat umum, antara lain kepolisian dan pelaku usaha. Hal tersebut menjadi peluang, khususnya bagi Laboratorium Balai Besar POM di Bandung dalam menjalin kerjasama dengan stakeholder sekaligus mendukung peningkatan daya saing pelaku usaha.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan teknologi, baik teknologi produksi, distribusi dan pengembangan jenis produk, akan membawa dampak perubahan secara terus-menerus pada produk Obat dan

Makanan. Hal ini harus menjadi perhatian dan antisipasi Balai Besar POM di Bandung untuk terus berinovasi dalam menghadapi perkembangan dan tuntutan yang ada. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai Besar di Bandung untuk dapat melakukan pelayanan online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Namun, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Bandung terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan yang dilakukan secara online, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi.

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan dan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan manajemen dan juga kegiatan teknis laboratorium. Laboratorium merupakan tulang punggung dari pengawasan Obat dan Makanan, oleh karenanya diperlukan sarana dan prasarana laboratorium yang lengkap mulai dari metode analisa, baku pembanding, reagensia sampai kepada peralatan yang memadai. Peralatan yang dimiliki masih belum memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan. Adalah fakta bahwa kemampuan dan kapasitas uji laboratorium Badan POM, termasuk Balai Besar POM di Bandung, belum memadai jika dibandingkan dengan beban kerja pengawasan Obat dan Makanan. Dengan perkembangan teknologi saat ini, tentu juga terkait erat dengan perkembangan teknologi di bidang pengujian, sehingga menjadi suatu tantangan tersendiri untuk laboratorium Balai Besar POM di Bandung. Laboratorium dituntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada terkait dengan produk dan metode analisis.

Implementasi Program Fortifikasi Pangan

Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi diantaranya dengan dukungan fortifikasi mikronutrien penting. Fortifikasi pangan merupakan salah

satu cara dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit, mengingat juga masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurang yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh Balai Besar POM di Bandung. Hasil pengawasan garam beryodium dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015– 2019) menunjukkan tren penurunan terhadap hasil uji yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu pada tahun 2015 jumlah sampel garam yang TMS sebesar 85% dan hingga tahun 2017 menjadi 81,62%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan signifikan menjadi 54,82%. Sedangkan hasil pengawasan tepung terigu dan minyak goreng sawit dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2015- 2019) menunjukkan relatif semua sampel yang diuji memenuhi syarat (MS).

Kegiatan intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (compliance) maupun surveilan keamanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana distribusi serta penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan. Kegiatan lainnya yaitu pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian.

Jejaring Kerja

Balai Besar POM di Bandung menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu Balai Besar POM di Bandung mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM, maka Balai Besar POM di Bandung sebagai bagian dari beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki BPOM yaitu Jejaring

Keamanan Pangan Nasional/Daerah, *Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed* (INRASFF), Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah), *Indonesia Criminal Justice System* (ICJS), dan Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI). Di tingkat regional maupun internasional, BPOM memiliki jejaring kerja dengan *ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed* (ARASFF), *World Health Organization* (WHO), *Codex Alimentarius Commission*, Forum Kerjasama Asia Pasifik dalam harmonisasi regulasi bidang obat (RHSC), *ASEAN Referrences Laboratories* (AFL), *Pharmaceutical Inspection Conventionand Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme* (PIC/S), dan *International Crime Police Organization Interpol.*

Balai Besar POM di Bandung melakukan pengembangan dan penguatan program pemberdayaan masyarakat melaui Food Safety Masuk Desa, PJAS, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Selain itu, dilakukan pengembangan jejaring komunikasi melalui peningkatan komunikasi sosial melalui kegiatan Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) bersaman tokoh masyarakat serta Iklan Layanan Masyarakat.

Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM di Bandung melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai Besar POM di Bandung merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB dengan membentuk tim POKJA dalam area Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai wujud pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Transisi Pandemik Covid-19 ke Endemik

Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi, termasuk Provinsi Jawa Barat, Setelah Pemerintah Pronvinsi Jawa Barat mengakhiri pembatasan social berskala besar (PSBB) pada bulan Juni 2020 dan mulai menerapkan tatanan new normal, penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Jawa Barat alami peningkatan yang cukup tajam. Selama masa pandemik tersebut menjadi tantangan besar bagi BBPOM di Bandung dapat turut berkontribusi dalam percepatan penanganan covid-19 dan menjalankan tugas pengawasan Obat dan Makanan dalam masa pandemik-Covid-19 dengan membuat berbagai inovasi seperti layanan publik berbasis digital.

Namun pada awal tahun 2022, banyaknya tren indikator pengendalian pandemi yang terus menunjukkan ke hal yang positif, sehingga Indonesia sudah mulai bersiap-siap membuat langkah menuju ke arah endemik. Di sis lain pada tanggal 30 Desember 2022 kebijakan PPKM di Indonesia Resmi Dicabut oleh presiden yang mengarah kepada

transisi pandemik menuju ke arah endemik dengan sejumlah indikator, antara lain laju penularan harus kurang dari 1, angka positivity rate harus kurang dari 5%, kemudian tingkat perawatan rumah sakit harus kurang dari 5%, angka fatality rate harus kurang dari 3%, dan level PPKM berada pada transmisi lokal level tingkat 1. Kondisi – kondisi ini harus terjadi dalam rentang waktu tertentu misalnya 6 bulan. Proses transisi itu sejalan dengan kebijakan pelonggaran-pelonggaran yang diputuskan pemerintah. Pelonggaran tersebut dilakukan antara lain dengan menurunkan level PPKM menjadi level 2, menghapuskan antigen dan PCR sebagai syarat melakukan perjalanan domestik menggunakan transportasi laut, darat maupun udara bagi masyarakat yang sudah vaksin hingga dosis ke-2. Dengan adanya transisi endemik, tugas pengawasan Obat dan Makanan akan lebih optimal, namun inovasi yang telah dibuat harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan, banyak respon positif dari lintas sektor dan masyarakat terhadap inovasi khususnya layanan publik berbasis digital yang telah dilakukan di masa pandemik Covid 19. Hal ini, menjadi peluang sekaligus tantangan bagi BBPOM di Bandung untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

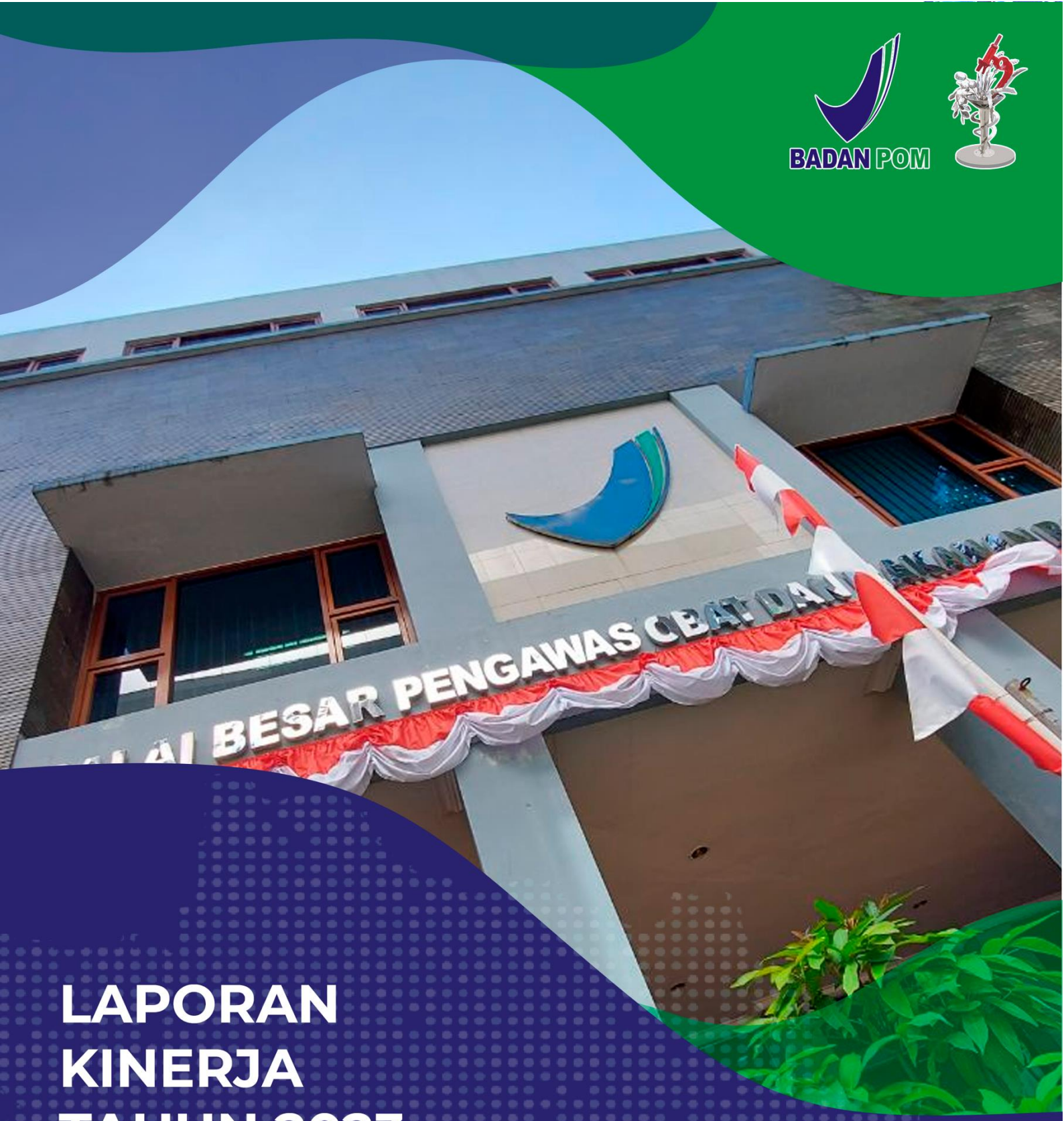

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022
2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2022
2.5 METODE PENGUKURAN

2.1 REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Rencana strategis BPOM Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 serta dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2020-2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia. Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi.

Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2020-2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target outcome dan output akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai *impact assessment.*

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Bandung sesuai dengan

tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia khususnya Propinsi Jawa Barat sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Serta adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka BPOM telah melakukan reviu terhadap Rencana Stategis BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung perlu melakukan reviu Rencana Stategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024, sehingga berbagai kebijakan dan strategi yang ditetapkan BPOM dapat teroperasionalisasikan dan diimplementasikan dengan baik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.02.12A.12A5.12.21.110 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024. Selain itu, telah dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 berdasarkan hasil reviu Rencana Strategis tersebut. Berdasarkan hasil reviu ***Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024***, karena tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan BPOM. Visi, Misi dan Tujuan BPOM masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetititf di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing". Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Balai Besar POM di Bandung telah menetapkan Visi 2020-2024 yaitu: –

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong"

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman	:	Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
Bermutu	:	Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
Berdaya Saing	:	Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

MISI

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Balai Besar POM di Bandung sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara *full spectrum* pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat lex spesialis yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (Good Regulatory Practise);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindaklanjut hasil pengawasan;

4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan people, process, infrastructure;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada outcome dan i

   Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Balai Besar POM di Bandung sebagai berikut:

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan, melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Gambar 2.1 Misi Balai Besar POM di Bandung 2020-2024

SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Bandung dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Bandung. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Bandung akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Balai Besar POM di Bandung yang berdasarkan hasil reviu dirubah menjadu sebagai berikut:

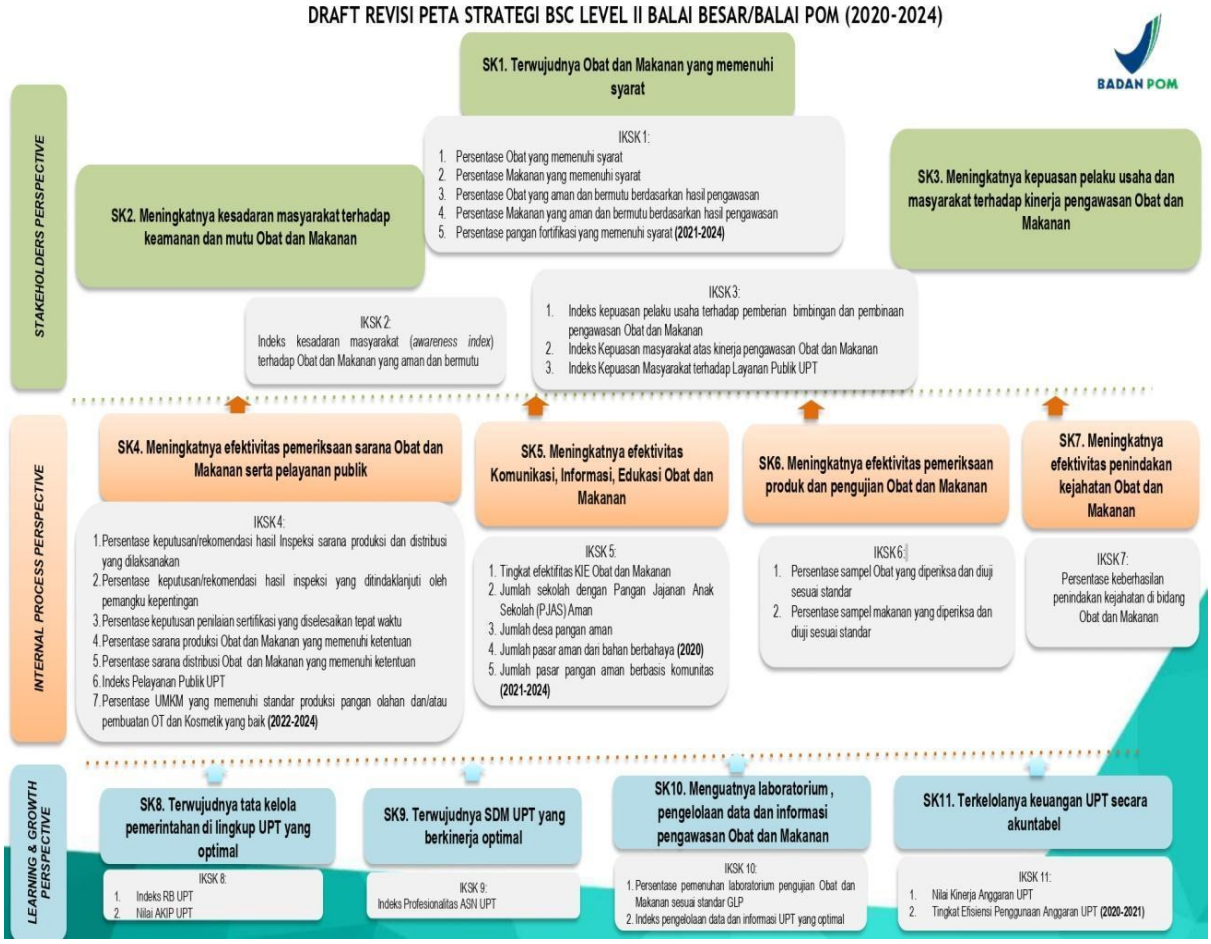

Gambar 2.2 Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Bandung

Sumber: Konsensus BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, BBPOM di Bandung menetapkan sasaran Kegiatan, indikator kegiatan dan target yang telah dilakukan reviu, perubahannya menjadi sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Perubahan
Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target BBPOM di Bandung
Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Target Kinerja (Menjadi)			
	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE									
SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3	97	97.5	98	98.5
2. Persentase Makanan yang Memenuhi syarat	78	80	82	84	86	80	82	84	86
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91	92	93	94	95	95.5	96	94
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78	70	72	74	76
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat						70	72	74	76
SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan	72	75	78	81	83	71	74	77	80

Makanan aman dan bermutu									
SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	85	86	87,5	89	91.1	92.3	93.4	94.6
8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83	77.83	80.22	82.62	85.01
9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	88,5	90,5	91	91,5	92	89,50	90,50	91,00	92,00
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
10. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95	96	97	98	99
11. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,9	63,9	70,9	78	85	64	71	78	85
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97	88	91	94	97
13. Persentase sarana produksi Obat dan	50	55	60	65	70	57	61	66	70

Makanan yang memenuhi ketentuan									
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	78	80	81	82	74	76	78	80
15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,7	3,75	3,81	4,16	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55
16. Persentase UMKM yang memenuhi standar						-	77	79	81
SK5. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83	92	93.8	95.7	97.6
18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	42	62	82	104	42	76	112	150
19. Jumlah desa pangan aman	9	19	28	37	47	19	28	37	47
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	8	13	18	23	8	13	18	23
SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94	100	100	100	100
22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	84	86	88	90	100	100	100	100
SK7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
23. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74	78	82	86	90	65	67	69	71
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE									
SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal									

24. Indeks RB BBPOM di Bandung	91	92	93	94	95	82.8	83.8	84.8	85.8
25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81	85	90	91	92	83	85.5	88	90.5
SK9. Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal									
26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	77	80	82	85	79	80	81	82
SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan									
27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	79	81	85	90	79	84	89	94
28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3	2	2.25	2.5	3
SK11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel									
29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93	94	95	96	97	95.1	95.3	95.6	95.9
30. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (95%)	-	-	-

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2023 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2023 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Bandung Tahun 2023 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor PR.04.12A.12A5.07.22.106 Tahun 2022 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan BBPOM di Bandung

Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	98
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	84
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	96
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	78
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	78
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78	78
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan	86	93.4

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		
		8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77	82.62
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	91	91.00
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	98
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,9	78
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91	94
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	66
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80	78
		15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,81	4,40
		16. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	-	95,70
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	77	95.7
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	62	112

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		19. Jumlah desa pangan aman	28	37
		20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13	18
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	88	100
		22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	23. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82	70
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di Bandung	93	84.8
		25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	90	88
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	80	81
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81	89
		28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2,26	2.80
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95	95.60
		30. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	-

Disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berdasarkan RKT Tahun 2023 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp. 75.260.350.000,-.

Pada tanggal 22 Juli 2023 ditetapkan DIPA Balai Besar POM di Bandung menjadi Rp. 72.498.161.000,-.

Tabel 2.3

Perubahan Perjanjian Kinerja BBPOM di Bandung

Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	98
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	78
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93.4
		8. Indeks Kepuasan masyarakat atas	82.62

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(5)
	kerja BBPOM di Bandung	kinerja pengawasan Obat dan Makanan	
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	91.00
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
		15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	4,40
		16. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	95,70
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.7
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	112
		19. Jumlah desa pangan aman	37

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(5)
		20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	18
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	23. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di Bandung	84.8
		25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	88
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	81
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89
		28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2.80
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95.60
		30. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	-

Kegiatan : **Anggaran (Menjadi)**

Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	Rp.72.498.161.000,-

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2023

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2023 menyajikan target triwulan dan per bulan yang tercantum dalam Perubahan PK Balai Besar POM di Bandung beserta anggarannya sebagaimana tabel tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Tahun 2023

Sasaran Strategis	RK	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) *(menggunakan koma dan tanpa satuan%)*												Anggaran
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	532.995.540
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	144.966.250
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	274.573.460
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78.058.750
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	28.810.000
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	78,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	78,00	602.235.000
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	93,40	436.811.000

pengawasan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT																
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	82,62	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	82,62	520.808.000
Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	91,00	550.875.000
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	234.500.000
	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	215.746.000
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	550.875.000
	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	854.099.000
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	1.104.440.000
	15	Indeks Pelayanan Publik	4,40	-	-	-	-	-	-	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	74.900.000
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan	79,00	10,00	15,00	20,00	30,00	40,00	50,00	55,00	65,00	75,00	85,00	95,00	79,00	130.548.000

		OT dan Kosmetik yang baik														
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,70	-	-	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	95,70	22.958.692.000
	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	112,00	0,00	10,00	20,00	30,00	30,00	35,00	40,00	50,00	60,00	70,00	85,00	112,00	1.005.602.000
	19	Jumlah desa pangan aman	37,00	0,00	10,00	15,00	20,00	40,00	45,00	60,00	75,00	85,00	90,00	95,00	37,00	1.149.720.000
	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	100,00	3,00	10,00	20,00	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	348.351.000
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	3,00	10,00	20,00	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	839.020.000
	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	8,00	15,00	22,00	28,00	32,00	38,00	44,00	49,00	56,00	62,00	66,00	100,00	654.232.000
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,00	8,00	15,00	22,00	28,00	32,00	38,00	44,00	49,00	56,00	62,00	66,00	70,00	1.251.111.000
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	84,80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	84,80	4.648.173.000
	25	Nilai AKIP UPT	88,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	88,00	481.840.000
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	81,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	81,00	22.048.011.000
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	89,00	8.816.300.000
	28	Indeks pengelolaan data	2,80	-	-	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	300.400.000

pengawasan obat dan makanan		dan informasi UPT yang optimal															
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	95,60	0,00	25,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,60	1.661.468.000

2.5 METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar POM Di Bandung merupakan Indikator Kegiatan Utama. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja dan dilaporkan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM, dengan rincian sebagai berikut

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran **INDIKATOR POSITIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\ Capaian = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}\ X\ 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\ Capaian = \frac{1 + (1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}}\ X\ 100\%$$

Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari

sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja (X) yang digunakan adalah sebagai berikut:

TABEL 2.5

KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Tidak Dapat Disimpulkan	**Sangat Baik**	**Baik**	**Cukup**	**Kurang**
X >120%	100% ≤ x ≤ 120%	=100%	70% ≤ x < 100%	X < 70%

B. REALISASI ANGGARAN

- Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran
- Realisasi anggaran per Sasaran Strategis/Kegiatan.
- Evaluasi dan Analisis Anggaran berisikan mengenai rencana dan realisasi penyerapan pendanaan per program/ kegiatan pada tahun yang bersangkutan baik yang berasal dari DIPA maupun Hibah dan analisis tingkat pencapaiannya.
- Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IE} = \frac{\%\text{Capaian Output}}{\%\text{Rencana Capaian Output}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TE} = \frac{\text{IE} - \text{SE}}{\text{SE}}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut

TABEL 2.6

KRITERIA TINGKAT EFISIENSI

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

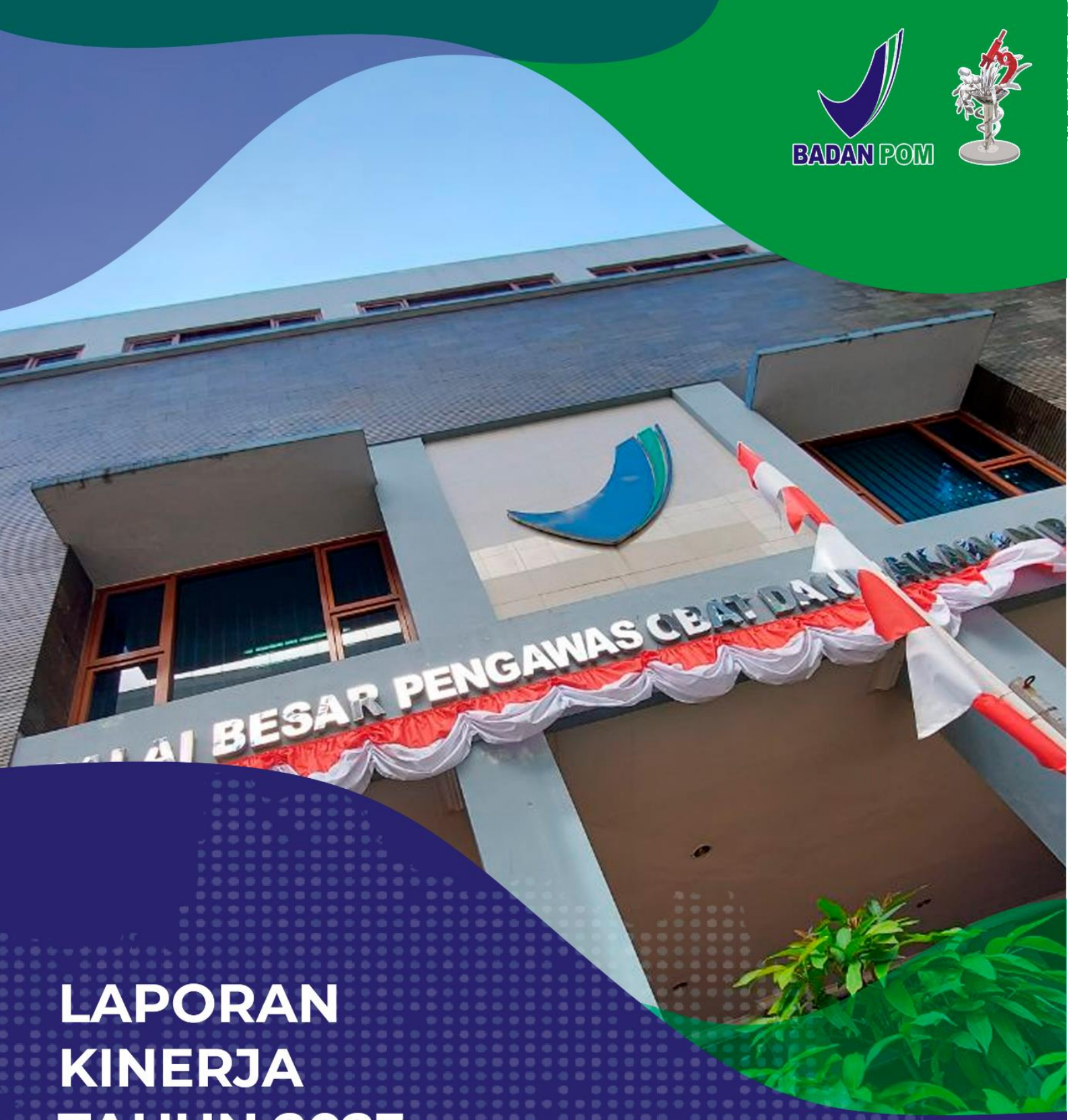

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.2 REALISASI ANGGARAN

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja Balai Besar POM di Bandung tahun 2023 memuat 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Pencapaian keseluruhan sasaran kegiatan Balai Besar POM di Bandung pada triwulan 2 tahun 2023 secara lengkap adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TAHUN 2023

SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	KRITERIA	
1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	106,03	SANGAT BAIK	
2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	111,13	SANGAT BAIK	
3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	102,30	SANGAT BAIK	
4. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	103,82	SANGAT BAIK	
5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	100,01	SANGAT BAIK	
6. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	99,37	CUKUP	
7. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH	121,26	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	

SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	KRITERIA	
KERJA BBPOM DI BANDUNG			
8. TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL	100,72	SANGAT BAIK	
9. TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG BERKINERJA OPTIMAL	111,00	SANGAT BAIK	
10. MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	102,86	SANGAT BAIK	
11. TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG SECARA AKUNTABEL	92,34	CUKUP	

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 29 indikator kinerja utama. Perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini:

TABEL 3.2
PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2023 (%) Kecuali*	REALISASI 2023 (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2023 (%)	KRITERIA CAPAIAN	
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja	1.Persentase obat yang memenuhi syarat	98	97,36	99,35%	CUKUP	
		2.Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	88,17	104,96%	SANGAT BAIK	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2023 (%) Kecuali*	REALISASI 2023 (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2023 (%)	KRITERIA CAPAIAN	
	BBPOM di Bandung	3.Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	95,68	99,67%	CUKUP	
		4.Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	82,81	106,17%	SANGAT BAIK	
		5.Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	78	97,6	125,13%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**106,03%**	**SANGAT BAIK**	
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung	6.Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78	86,68	111,13%	SANGAT BAIK	
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**111,13%**	**SANGAT BAIK**	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2023 (%) Kecuali*	REALISASI 2023 (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2023 (%)	KRITERIA CAPAIAN	
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	7.Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4	97,3	104,18%	SANGAT BAIK	
		8.Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	82,62	83,72	101,33%	SANGAT BAIK	
		9.Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung	91	92,26	101,38%	SANGAT BAIK	
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**102,30**	**SANGAT BAIK**	
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di	10. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	98	100	102,04%	SANGAT BAIK	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2023 (%) Kecuali*	REALISASI 2023 (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2023 (%)	KRITERIA CAPAIAN	
	wilayah kerja BBPOM di Bandung	11. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78	89,96	115,33%	SANGAT BAIK	
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	99,45	105,80%	SANGAT BAIK	
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66,26	100,40%	SANGAT BAIK	
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	80,79	103,57%	SANGAT BAIK	
		15. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	4,4	4,14	94,09%	CUKUP	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2023 (%) Kecuali*	REALISASI 2023 (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2023 (%)	KRITERIA CAPAIAN	
		16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	83,33	105,48%	SANGAT BAIK	
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**103,82%**	**SANGAT BAIK**	
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,7	95,75	100,05%	SANGAT BAIK	
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	112	112	100,00%	BAIK	
		19. Jumlah desa pangan aman	37	37	100,00%	BAIK	
		20. Jumlah pasar panga naman berbasis komunitas	18	18	100,00%	BAIK	
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**100,01%**	**SANGAT BAIK**	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2023 (%) Kecuali*	REALISASI 2023 (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2023 (%)	KRITERIA CAPAIAN	
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	99,07	99,07%	CUKUP	
		22. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	99,66	99,66%	CUKUP	
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**99,37%**	**CUKUP**	
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70	84,88	121,26%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**120,00%**	**TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**	
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di Bandung	84,8	91,47	107,87%	SANGAT BAIK	
		25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	88	82,34	93,57%	CUKUP	
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**100,72%**	**SANGAT BAIK**	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2023 (%) Kecuali*	REALISASI 2023 (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2023 (%)	KRITERIA CAPAIAN	
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	81	89,91	111,00%	SANGAT BAIK	
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**111,00%**	**SANGAT BAIK**	
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89	87	97,75%	CUKUP	
		28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2,8	2,88	102,86%	SANGAT BAIK	
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**102,86%**	**SANGAT BAIK**	
11.	Terkelolanya keuangan BBPOM di Bandung secara akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95,6	88,28	92,34%	CUKUP	
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**92,34%**	**CUKUP**	

Pada Tahun 2023, terdapat sembilan (9) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Sangat Baik, dua (2) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Cukup. Secara rinci setiap sasaran kegiatan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Bandung pada Tahun 2023 berdasarkan Perspective Balance Score Card memiliki Nilai Kinerja Stakeholder Perspective (106,48); Nilai Kinerja Internal Process Perspective (105,80) dan Nilai Kinerja Learning and Growth Perspective (101,73), secara rinci sebagaimana tabel 3.3 berikut:

TABEL 3.3
NILAI KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN
PERSPECTIVE BALANCE SCORE CARD
TAHUN 2023

PERSPECTIVE	**SASARAN KEGIATAN**	**NILAI PENCAPAIAN SASARAN**	**NILAI PENCAPAIAN PERSPECTIVE**		
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE	1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	106,03	**106,48**	**ISTIMEWA**	
	2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	111,13			
	3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	102,30			
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE	4. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	103,82	**105,80**	**ISTIMEWA**	

	5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	100,01			
	6. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	99,37			
	7. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	120,00			
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE	8. TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL	100,72	**101,73**	**ISTIMEWA**	
	9. TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG BERKINERJA OPTIMAL	111,00			
	10. MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	102,86			
	11. TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG SECARA AKUNTABEL	92,34			
NILAI KINERJA ORGANISASI			**104,67**	**ISTIMEWA**	

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun Anggaran 2023 pada aplikasi Simetris adalah sebagai berikut :

Unit Kerja	: BBPOM di Bandung	NPSS	: 104,67 %
Nama Pejabat	: Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.	Pagu	: Rp. 0.00
Jabatan	: Kepala Balai Besar POM di Bandung	Realisasi Anggaran	: Rp. 0.00
		Realisasi Anggaran (%)	: nan %

Stakeholder

(106,48 %)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat 106,03 (%)	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan 111,13 (%)	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan 102,30 (%)

Internal Process

(105,80 %)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik 103.82 %	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan 100.01 %	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan 99.37 %	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan 120.00 %

Learning & Growth

(101,73 %)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal 100,72 %	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal 111,00 %	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan 102,86 %	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel 92,34 %

Penjelasan mengenai kendala pencapaian dan upaya perbaikan untuk pencapaian target dapat dilihat pada penjelasan indikator kinerja di sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN KE-1

TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keempat indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **106,13%** dengan kriteria **SANGAT BAIK**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.4.

TABEL 3.4
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-1
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TA 2023	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KRITERIA	
1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	98.00%	97,36%	99,35%	CUKUP	
2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	84.00%	88,17%	104,96%	SANGAT BAIK	
3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	96.00%	95,68%	99,67%	CUKUP	
4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	78.00%	82,81%	106,17%	SANGAT BAIK	
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	78.00%	97,6%	120,00%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**106,13%**	**SANGAT BAIK**	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

1. PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT

Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2023 dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2023. Sampel Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Sampel acak adalah sampel yang disampling terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun 2023.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila termasuk poin 4, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

TABEL 3.5
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT"
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TA 2023	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KRITERIA	
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	98.00%	97,36%	99,35%	CUKUP	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 98,00%. Sebanyak 1857 sampel Obat acak telah diperiksa dan diuji dengan rincian sebanyak 1808 sampel memenuhi syarat, 49 sampel tidak memenuhi syarat.

TABEL 3.6
RINCIAN HASIL PENGUJIAN OBAT PER KOMODITI
TAHUN 2023

No	Jenis Komoditi	MS	TMS	TOTAL	KET
1	Obat	573	10	583	Parameter uji disolusi sebanyak 4 sampel, penetapan kadar zat aktif sebanyak 5 sampel dan batas mikroba sebanyak 1 sampel
2	Obat Tradisional	349	33	382	TMK penandaan sebanyak 4 sampel, TMS mutu pengujian dengan parameter uji kadar air sebanyak 3 sampel, ALT, AKK, Enterobacteraceae sebanyak 22 sampel serta kadar air, AKK dan ALT sebanyak 4 sampel
3	Suplemen Kesehatan	99	2	101	TMS Mutu Kadar Air
4	Kuasi	23	2	25	TMK penandaan sebanyak 1 sampel dan TMS mutu pengujian parameter uji mikrobiologi AKK dan *Pseudomonas Aeruginosa* sebanyak 1 sampel
5	Kosmetik	763	2	765	TMK Penandaan sebanyak 1 sampel dan TMS uji Identifikasi metanol sebanyak 1 sampel
TOTAL		1857	49	1808	

Persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 97,36%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **99,35%** dengan kriteria **CUKUP.**

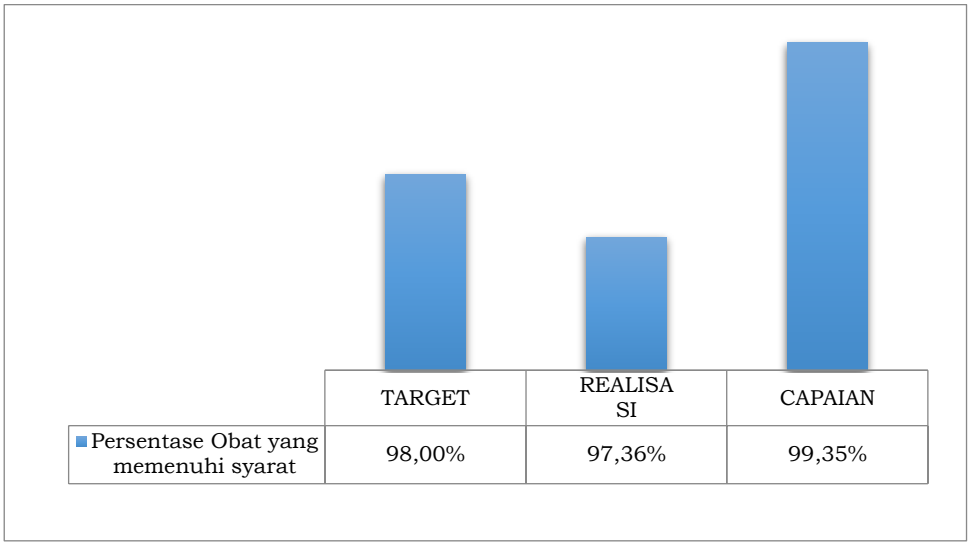

Gambar 3.1

Perbandingan target dengan realisasi kinerja Tahun 2023

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020, 2021, DAN 2022

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan jumlah sampel TMS dari evaluasi penandaan. Penandaan sampel obat tidak memenuhi ketentuan (TMK) memberikan kontribusi terbesar terhadap tidak tercapainya target dari persentase obat yang memenuhi syarat. Pada tahun 2023 terdapat perubahan kategorisasi TMK Penandaan untuk sampel obat tradisional, suplemen kesehatan, kuasi dan kosmetik. Hasil evaluasi penandaan kategori TMK Minor dapat disimpulkan memenuhi ketentuan (MK) sehingga pada tahun 2023 terjadi penurunan sangat signifikan terhadap sampel TMK penandaan (tahun 2023 sebanyak 6 sampel, tahun 2022 sebanyak 205 sampel dan tahun 2021 sebanyak 37 sampel). Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.2.

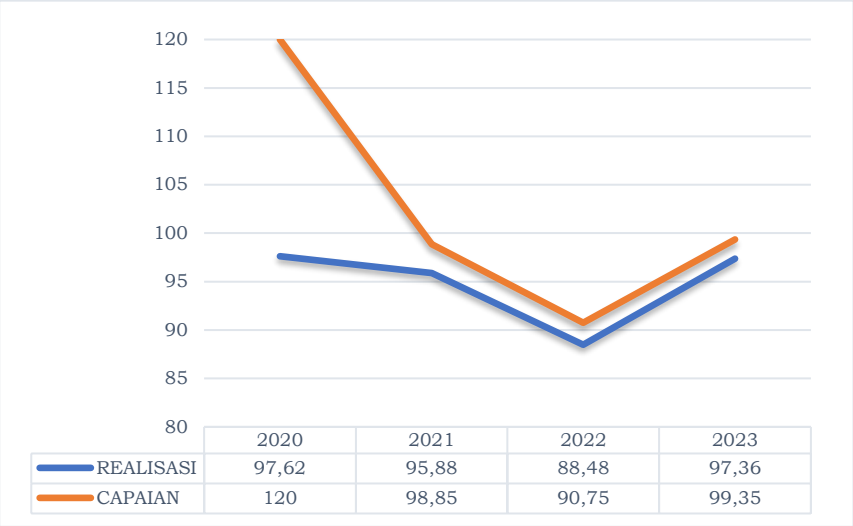

Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Tahun 2020 - 2023

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

TABEL 3.7

PERBANDINGAN REALISASI

"PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT"

TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI TA 2023	CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	98.50%	97,36%	98,84%	AKAN TERCAPAI	▲

Jika dibandingkan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 98,84% dengan kategori Akan Tercapai. Untuk dapat mencapai target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

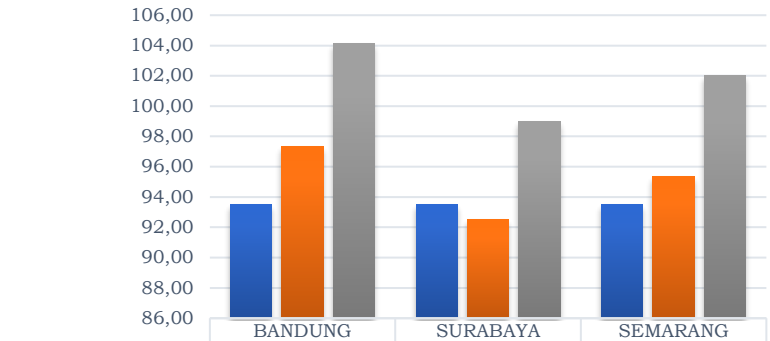

	BANDUNG	SURABAYA	SEMARANG
TARGET NASIONAL	93,50	93,50	93,50
REALISASI	97,36	92,54	95,36
CAPAIAN	104,13	98,97	101,99

Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi yarat Tahun 2023 dengan Balai Lain dan Target Nasional

Jika dibandingkan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada tahun 2023 dengan target nasional (93.50%), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Bandung (104.13%), Balai Besar POM di Semarang (101.99%) dan Balai Besar POM di Surabaya (98.97%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kegagalan dan penurunan kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat disebabkan antara lain:

- Pada Tahun 2023 pengujian Obat yang TMS sebanyak 49 sampel yaitu 10 sampel obat (TMS mutu pengujian dengan parameter uji disolusi dan penetapan kadar zat aktif), sampel obat tradisional sebanyak 37 sampel (TMK penandaan, TMS mutu pengujian dengan parameter uji kadar air, ALT dan AKK) dan 2 sampel kosmetik TMS mutu pengujian identifikasi metanol.

- Kepatuhan produsen Obat terhadap pedoman yang telah ditetapkan dengan hasil sarana produksi Obat yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023, capaian kinerjanya sebesar 100,40%.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut ke depan antara lain :

- Peningkatan pengawasan dan pembinaan sarana produksi dan distribusi obat dalam pemenuhan CPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.
- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder diantaranya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat, Dana Alokasi Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan, Narasumber dan pengawasan bersama.
- Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana pelayanan kefarmasian, pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, masyarakat tentang Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Pembinaan juga dilakukan saat pengawasan rutin di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan memberikan informasi mengenai cek klik
- Melakukan peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap GMP dan GDP melalui desk CAPA, Bimbingan teknis serta sosialisasi peraturan perundang-undangan

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

TABEL 3.8
ANALISIS EFISIENSI DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	CAPAIAN TE
		Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	99,35%	534.083.220	527.584.445	98,78%	1,01	0,01	EFISIEN

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- Pengambilan contoh sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung dilakukan tepat waktu sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.
- Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan secara rutin oleh BBPOM di Bandung, meliputi sarana Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Kosmetik, dan Industri Suplemen Kesehatan. Sampai dengan Tahun 2023 jumlah sarana produksi Obat yang diperiksa sejumlah 176 sarana (sarana IF belum masuk).
- Pada program implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan, Tim manajemen Risiko BBPOM Bandung, sudah melakukan identifikasi Risiko dan menetapkan Daftar Risiko dalam pemcapaian IKU ini. Selanjutnya, dilakukan penilaian Risiko dan melakukan pengendalian terhadap Risiko tersebut, dengan hasil evaluasi tahun 2023 sebagai berikut :

TABEL 3.9
IDENTIFIKASI RISIKO
PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT

No.	Kegiatan/ Proses Bisnis	Sumber Risiko	Issue ISO 9001:2015		Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Aktivitas Pengendalian saat ini		Level Risiko Residu
			Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko		Aktivitas Pengendalian	Simpulan Efektifitas Pengendalian	
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Internal	Masih ada sarana produksi dan distribusi yang belum diperiksa	Belum optimalnya Analisis Risiko terhadap Pemeriksaan Sarana	Terhambatnya proses Ijin Edar	Analisis Risiko Sarana	Efektif	14
2	Persentase Obat yang memenuhi	Internal	Pengambilan contoh sampel obat, obat	Belum optimalnya Analisis Risiko	Target Kinerja tidak tercapai	Analisis Risiko Sarana	Efektif	14

	syarat		tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung dilakukan tidak tepat waktu sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling	terhadap Prioritas Sampling dan Renlak Sampling				

Dari hasil evaluasi Risiko Tahun 2023 tersebut, dapat diketahui bahwa Risiko yang ditemukan memiliki level Risiko residual yang cukup tinggi walaupun sudah dilakukan pengendalian. Untuk itu perlu dilakukan penilaian ulang terhadap Risiko yang ditemukan, melakukan mitigasi Risiko, dan melakukan pemutakhir daftar Risiko secara berkala, dengan melakukan identifikasi Risiko lain.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

TABEL 3.10
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
"PRESENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT"
TAHUN 2023

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
a	Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dalam pemenuhan CPOB, CPOTB termasuk fokus khusus penandaan obat tradisional terhadap sarana produksi Obat Tradisional,	Telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Pangan secara luring dan daring sesuai dengan target yang telah	-	-	Tingginya tingkat peredaran produk Obat yang tidak	Peredaran produk Obat yang tidak memenuhi syarat

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	pemenuhan CPKB dan CDOB.	ditetapkan.			memenuhi syarat	menurun
b	Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha.	Dilakukan Desk CAPA kepada para pelaku usaha yang sedang berproses sebagai bentuk monitoring dan evaluasi serta untuk mempercepat waktu penyelesaian dokumen	-	-	Pelaku usaha tidak menerapkan Cara Produksi yang Baik sehingga resiko produk Tidak Memenuhi Sayrat yang dihasilkan menjadi Tinggi	Pelaku usaha sudah emnerapkan Cara Produksi yg Baik, sehingga produk yang dihasilkan akan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan
c	Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan pemberian layanan informasi tentang Obat secara daring maupun tatap muka.	Telah dilakukan KIE bersama Tokoh Masyarakat, pemberian layanan informasi secara daring dan tatap muka.	-	-	Masyarakat sebagai konsumen yang belum teredukasi akan memilih produk Obat yang tidak memenuhi	Masyarakat sebagai konsumen yang telah teredukasi tidak akan memilih produk Obat yang TMS sehingga Produk

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
					Syarat sehingga peredaran Obat TMS tersebut masih ada di peredaran	TMS tersebut tidak akan dapat bersaing dan hilang dari peredaran
d	Peningkatan kegiatan sosialisasi (KIE) tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning Obat yang diterbitkan oleh Badan POM. KIE tentang obat juga dilakukan melalui Media Sosial serta KIE yang dilaksanakan melalui Webinar Warta POPA yang dilaksanakn setiap bulan.	Melakukan peningkatan pengetahuan Pelaku Usaha melalui KIE dan pemberian layanan informasi secara daring dan tatap muka	-	-	Pelaku usaha terutama di sarana distribusi yang tidak mengetahui ketentuan dan produk yang TMS, akan selalu menyediakan produk TMS tersebut	
e	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab./Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.	Melakukan pertemuan intensif dengan pemangku kepentingan melalui Kegiatan Penguatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Bersama Pimpinan Daerah dan Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat	-	-	Sinergitas dalam melakukan pengawasan Produk Obat yang TMS masih	Sinergitas dalam melakukan pengawasan Produk Obat yang TMS akan baik dan tingkat

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
		dan Makanan.			rendah, karena lintas sektor belum mengetahui peredaran dan bahayanya produk TMS	efektifitas pengawasan akan meningkat, sehingga akan menurangi peredaran produk Obat TMS
f	Pro justicia memiliki arti demi hukum, untuk hukum atau undang-undang. Secara formal sanksi administrative pro justicia menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum adalah tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Pembinaan dan penyebaran informasi mengenai penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar dilakukan melalui tatap muka maupun daring menggunakan Media sosial	Telah dilaksanakan tindak lanjut terhadap sarana yang mengedarkan produk Tidak Memenuhi Ketentuan sesuai pedoman Tindak Lanjut	-	-	Tidak ada penindakan kepada Pelaku Usaha illegal akan meningkatkan peredaran produk Obat TMS dipasaran	Dengan adanya operasi penindakan terhadap pelaku usaha illegal, akan menurunkan peredaran produk Obat TMS yang diproduksinya

Rekomendasi	Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
dan media elektronik.					

I. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Untuk monitoring ketepatan jenis, jumlah dan waktu sampling dibuat system informasi kinerja yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, seperti membuat kegiatan, baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

- Fungsi Inspeksi melakukan inovasi monitoring ketepatan jenis, jumlah dan waktu sampling.
- Fungsi Pengujian melakukan perkuatan sistem secara internal untuk menunjang proses bisnis yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Kegiatan yang telah dilakukan, yaitu :
  - Di laboratorium Kimia membuat aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi untuk komodisti lainnya. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan
  - Di laboratorium mikrobiologi membuat aplikasi IFTE (Integrated Form for Tools & Equipment) yang merupakan e-form terintegrasi untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrumen. Setiap peralatan di Laboratorium mikrobiologi diberikan nomor dan QR Code, sehingga untuk penggunaannya personel pengujian tinggal melakukan scan QR Code untuk check in, dan akan secara otomatis tersimpan data penggunaannya dalam sistem. Selain itu di laboratorium mikrobiologi ini juga membuat aplikasi Kartu Stock Online menggunakan google appsheet. Aplikasi ini digunakan untuk

pembuatan, penggunaan dan mengontrol media/reagen, sehingga lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik dan aman, akibatnya penggunaan media/reagen akan lebih efektif dan efisien.

- Pemanfaatan capaian kinerja untuk penentuan target tahun selanjutnya.

2. PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2023 dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2023. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan, dengan kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung satu sampel TMS.

TABEL 3.11
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT"
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TA 2023	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KRITERIA	
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	84,00%	88,17%	104,96%	SANGAT BAIK	

Sampel makanan acak yang telah disampling pada tahun 2023 adalah sebanyak 770 sampel, dengan rincian 678 sampel MS, 91 sampel TMS dan 1 sampel TIE. Sampel TMS terdiri dari 11 sampel TMK Mayor, 56 sampel TMS kimia dan 24 sampel TMS mikrobiologi. Keterangan TMS secara lengkap dapat dilihat pada Table 3.12.

TABEL 3.12
JUMLAH SAMPEL DAN JENIS PARAMETER TMS
"PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT"
TAHUN 2023

Jenis PU		Total
Penandaan		
1	TMK Mayor	11
Kimia		
1	Pewarna FCF	1
2	R.Pemanis	3
3	Propionat	1
4	Protein	1
5	Lemak	2
6	Logam	6
7	HMF-Diastase	18
8	R.Pengawet	4
9	PK.Air	2
10	Rodamin	1
11	Benzoat-Sorbat	11
12	Pemanis -Pengawet	2

13	Siklamat	1
14	Sulfit	1
15	Nitrofuran	2
Mikro		
1	Alt-AKK	6
2	Alt	0
3	Enterobacter	11
4	AKK	6
5	E.Coli	1
TOTAL TMS :		91

Terdapat penerimaan sampel regionalisasi pangan dari Balai Besar POM di Jakarta sebanyak 55 sampel, Balai Besar POM di Serang sebanyak 5 sampel, Balai Besar POM di Yogyakarta sebanyak 33 sampel, Balai POM Tangerang sebanyak 2 sampel, sehingga total sampel regional yang diterima sampai dengan tahun 2023 sebanyak 95 sampel. Dengan hasil uji sebanyak 56 sampel MS dan 39 sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.13.

TABEL 3.13
JUMLAH SAMPEL TERHADAP HASIL UJI
"PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT"
TAHUN 2023

Sampel Makanan Memenuhi Syarat	**Kesimpulan Hasil Uji**			**Total Sampel**
	TIE	**TMS**	**MS**	
Bandung	1	91	678	770
Regional DKI		20	35	95
Regional Balai Serang		3	2	
Regional Balai Jogja		16	17	
Regional Balai Tangerang		0	2	
Total Hasil Uji	1	56	39	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 84,00%. Realisasi pada tahun 2023 sebesar 88,17%, dengan rincian 678 sampel memenuhi syarat dan 91 sampel tidak memenuhi syarat. Total sampel acak yang diperiksa dan diuji sebanyak 769 sampel, 1 sampel TIE sehingga tidak dilakukan pengujian. Dengan demikian capaian indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **104,96 %** dengan kriteria **SANGAT BAIK.**

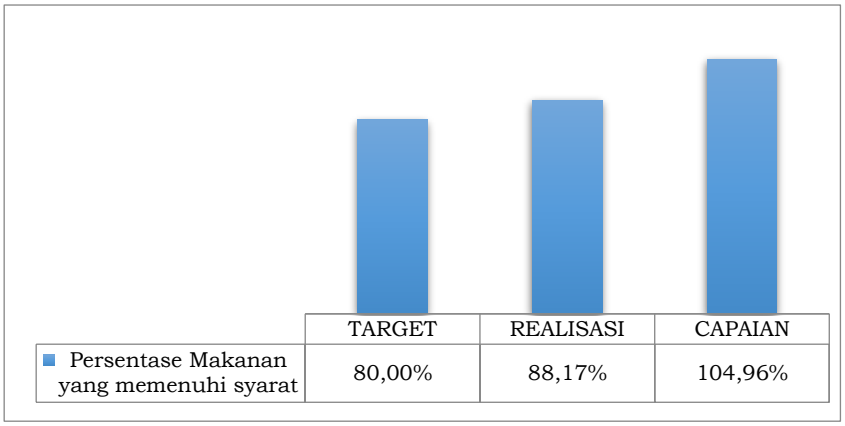

Gambar 3.4 Perbandingan Target Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2020, 2021, DAN 2022

Pada tahun 2023, terjadi penurunan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022, hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan jumlah sampel TMS pada tahun 2023 sebanyak 91 sampel dari 769 sampel yang diuji, tahun 2021 sebanyak 63 sampel dari 487 sampel yang disampling dan tahun 2022 sebanyak 79 sampel dari 747 sampel yang disampling.. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.5.

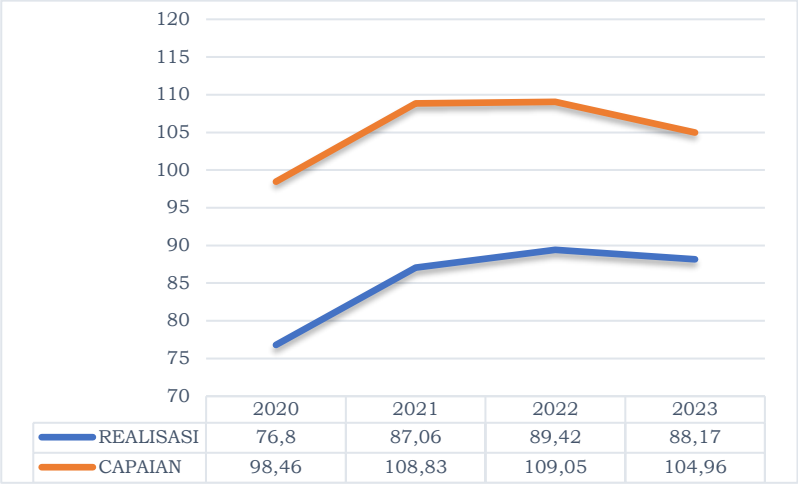

Gambar 3.5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Tahun 2020 - 2023

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

TABEL 3.14
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
"PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT"
TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI TA 2023	CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	86.00%	88,17%	102,52%	TERCAPAI	▲

Target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 86,00%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2023 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada tahun 2023 sebesar 102,52% dengan kategori **TERCAPAI**.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

Realisasi kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Semarang (108.98%), Balai Besar POM di Surabaya (107.88%) dan Balai Besar POM di Bandung (104.96%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (86,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Semarang (106,44%). Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.6.

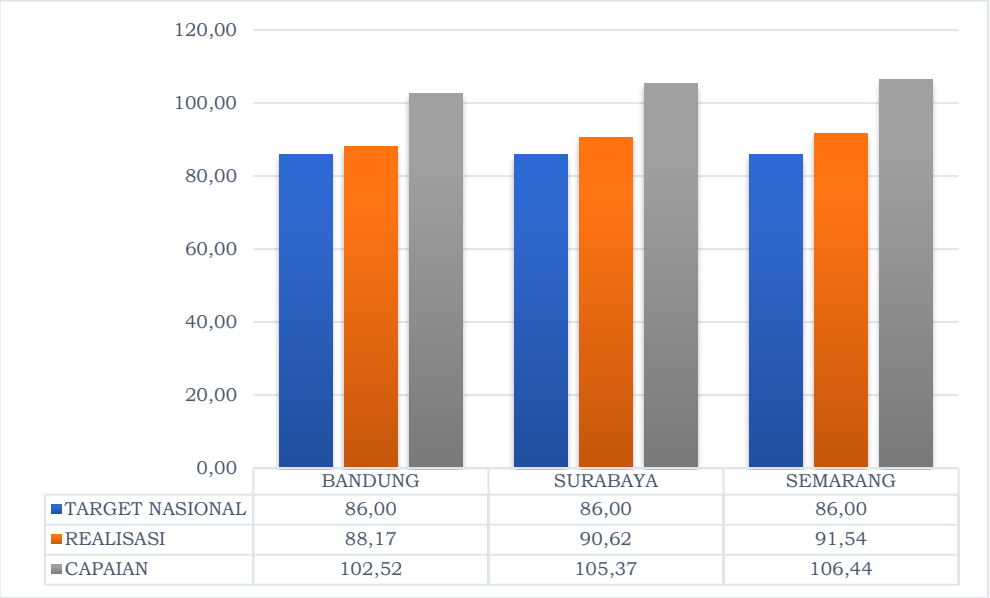

Gambar 3.6 Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi yarat Tahun 2023 dengan Balai Lain dan Target Nasional

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS CAPAIAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keberhasilan capaian kinerja indikator ini pada Tahun 2023 ini disebabkan oleh:

- Pada tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020, 2021 dan 2022, hal tersebut terjadi karena adanya penurunan jumlah sampel TMS pada tahun 2020 sebanyak 142 sampel dari 612 sampel yang disampling, tahun 2021 sebanyak 63 sampel dari 487 sampel

yang disampling, tahun 2022 sebanyak 79 sampel dari 747 sampel yang disampling dan pada tahun 2023 sebanyak 91 sampel dari 769 sampel.

- Selama periode tahun 2020 - 2023 sampel TMS Pengujian berasal dari parameter uji mikrobiologi (MPN E. coli, Enterobacteriaceae, ALT dan Kapang Khamir) dan parameter uji kimia (Bahan Tambahan Pangan, HMF dan Enzim Diastase).
- Peningkatan pengawasan dan pembinaan sarana produksi dan distribusi Makanan dalam pemenuhan CPPOB, CPP-IRTP dan SMKPO
- Terdapat sedikit penurunan jumlah sarana produksi makanan yang memenuhi ketentuan yang diperiksa sampai dengan Tahun 2023. Pada Tahun 2023 dari 189 sarana yang diperiksa, sebanyak 107 sarana memenuhi ketentuan (56,61). Adanya penurunan ini karena adanya penelusuran kasus-kasus di sarana produksi pangan yang terjadi pada Tahun 2023.

Alternatif solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui KIE yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media sosial berupa infografis dan IG Live Kelom Geulis maupun elektronik berupa Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bekerjasama dengan Radio serta SMS Blast tentang Obat dan Makanan.
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui KIE yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media sosial berupa infografis dan IG Live Kelom Geulis maupun elektronik berupa Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bekerjasama dengan Radio.
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Peningkatan koordinasi dengan stakeholder (Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota setempat)

terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.

- Penerapan sanksi pidana terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan makanan Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar. Sanksi ini berkaitan dengan pelanggaran Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pada Tahun 2023 dilakukan pengawasan melalui patroli siber terkait produksi/distribusikan pangan yang dilarang beredar. Untuk tindak lanjut dari patroli siber yang sudah dilakukan adalah melaporkan hasil patroli siber dan kemudian akan dilakukan take down oleh Badan POM Pusat.
- Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram dan Twitter), media masa melalui Iklan Layanan Masyarakat bekerjasama dengan radio. Bekerjasama dengan stakeholder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat).

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

TABEL 3.15
ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	CAPAIAN TE
		Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
1	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	104,96 %	148.250.700	147.327.407	99,38%	1,06	0,06	EFISIEN

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja:

- Pengambilan contoh sampel Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung dilakukan tepat waktu sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi pangan
- Pengawasan dan pembinaan sarana produksi makanan yang dilakukan secara rutin oleh Balai Besar POM di Bandung meliputi sarana Industri Pangan Olahan MD, Industri Pangan yang memproduksi Suplemen Kesehatan dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Sampai dengan Tahun 2023, jumlah sarana produksi yang diperiksa sejumlah 189 sarana, semakin banyak sarana yang dibina akan meningkatkan peerdaran produk Makanan yang memenuhi syarat.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut :

- Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, *Public Warning* Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Twitter), media masa melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bekerjasama dengan radio.
- Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB yang masih belum memenuhi ketentuan, sebanyak 56 sarana pada Tahun 2023.
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang belum memenuhi ketentuan, yaitu sebanyak 55 sarana distribusi pada Tahun 2023.
- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan) terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.

TABEL 3.16
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
"PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT"
TAHUN 2023

	Rekomendasi	**Tindaklanjut**			**Kondisi Sebelum rencana Aksi**	**Kondisi Setelah Rencana Aksi**
		Selesai	**Belum**			
			Rencana Aksi	**Timeline**		
a	Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Twitter), media masa melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bekerjasama dengan radio				Masyarakat sebagai konsumen yang belum teredukasi akan memilih produk Obat yang tidak memenuhi Syarat sehingga peredaran Obat TMS tersebut masih ada di peredaran	Masyarakat sebagai konsumen yang telah teredukasi tidak akan memilih produk Obat yang TMS sehingga Produk TMS tersebut tidak akan dapat bersaing dan hilang dari peredaran
b	Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB yang masih belum memenuhi ketentuan, sebanyak 56 sarana pada Tahun 2023.				Pelaku usaha tidak menerapkan Cara Produksi yang Baik sehingga resiko produk Tidak Memenuhi Sayrat yang	Pelaku usaha sudah emnerapkan Cara Produksi yg Baik, sehingga produk yang dihasilkan akan

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
					dihasilkan menjadi Tinggi	memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan
c	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang belum memenuhi ketentuan, yaitu sebanyak 55 sarana distribusi pada Tahun 2023		Melakukan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui KIE bersama Tokoh Masyarakat, pemberian layanan informasi secara daring dan tatap muka	Desember 2023	Masyarakat sebagai konsumen yang belum teredukasi akan memilih produk Obat yang tidak memenuhi Syarat sehingga peredaran Obat TMS tersebut masih ada di peredaran	Masyarakat sebagai konsumen yang telah teredukasi tidak akan memilih produk Obat yang TMS sehingga Produk TMS tersebut tidak akan dapat bersaing dan hilang dari peredaran
e	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab./Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.	1.	Melakukan monev tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang	Desember 2023	Sinergitas dalam melakukan pengawasan Produk Obat yang TMS masih rendah,	Sinergitas dalam melakukan pengawasan Produk Obat yang TMS akan baik dan tingkat

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
			disampaikan kepada instansi terkait		karena lintas sektor belum mengetahui peredaran dan bahayanya produk TMS	efektifitas pengawasan akan meningkat, sehingga akan mengurangi peredaran produk Obat TMS

I. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

- Untuk monitoring ketepatan jenis, jumlah dan waktu sampling dibuat
- Fungsi Pengujian melakukan perkuatan sistem secara internal untuk menunjang proses bisnis yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Kegiatan yang telah dilakukan, yaitu :
    - Di laboratorium Kimia membuat aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi untuk komodisti lainnya. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan

- Di laboratorium mikrobiologi membuat aplikasi IFTE (Integrated Form for Tools & Equipment) yang merupakan e-form terintegrasi untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrumen. Setiap peralatan di Laboratorium mikrobiologi diberikan nomor dan QR Code, sehingga untuk penggunaannya personel pengujian tinggal melakukan scan QR Code untuk check in, dan akan secara otomatis tersimpan data penggunaannya dalam sistem. Selain itu di laboratorium mikrobiologi ini juga membuat aplikasi Kartu Stock Online menggunakan google appsheet. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan, penggunaan dan mengontrol media/reagen, sehingga lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik dan aman, akibatnya penggunaan media/reagen akan lebih efektif dan efisien.

3. PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted yang memenuhi syarat tahun 2023 dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji tahun 2023.

Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive tahun 2023. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka., Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; (2) Produk kadaluwarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung

berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.17.

TABEL 3.17
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU
BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN"
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TA 2023	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KRITERIA	
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.00%	95,68%	99,67%	CUKUP	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini sebesar 96.00%. Sampel targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 694 sampel dengan rincian sebanyak 664 sampel memenuhi syarat dan 30 sampel tidak memenuhi syarat.

TABEL 3.18
RINCIAN HASIL PENGUJIAN OBAT PER KOMODITI
TAHUN 2023

No	Jenis Komoditi	MS	TMS	TOTAL	KET
1	Obat	145	2	147	TMS Penetapan Kadar zat aktif dan Disolusi
2	Obat Tradisional	141	23	164	TMK penandaan sebanyak 2 sampel, tms mutu pengujian kimia kadar air sebanyak 1 sampel, turunan sildenafil sebanyak 9 sampel, TMS mutu mikrobiologi ALT, AKK dan Enterobacteraiceae sebanyak 11 sampel
3	Suplemen	43	1	44	TMS mutu pengujian kimia kadar kofein

	Kesehatan				
4	Kuasi	11	0	11	-
5	Kosmetik	324	4	328	(TIE sebanyak 1 sampel, TMK penandaan sebanyak 1 sampel dan tms mutu pengujian mikrobiologi ALT dan AKK sebanyak 2 sampel)

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh sebesar 99.67%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **99.67%** dengan kategori **CUKUP**.

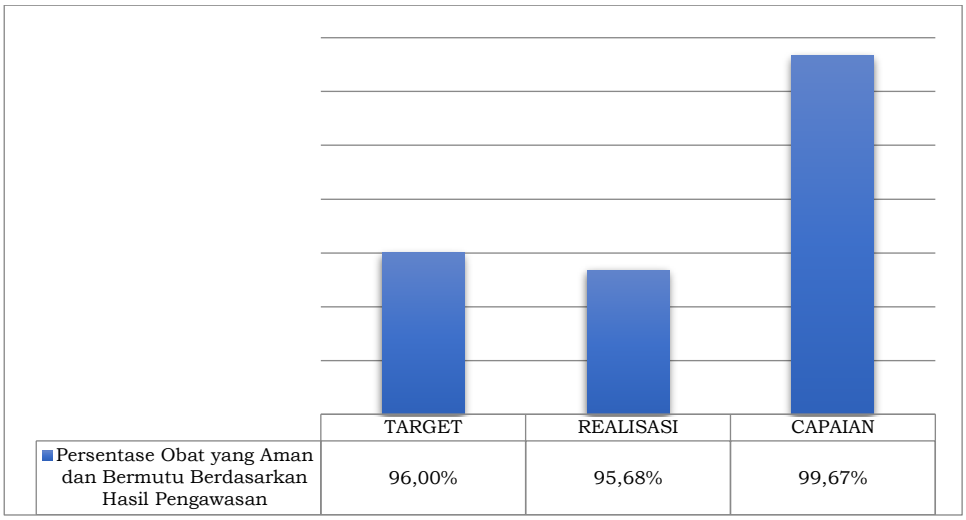

Gambar 3.7 Perbandingan target dengan realisasi kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2023

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020, 2021, DAN 2022

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020, 2021 dan 2022. Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan jumlah sampel TMS dari evaluasi penandaan. Penandaan sampel obat tidak memenuhi ketentuan (TMK) memberikan kontribusi terbesar terhadap tidak tercapainya target dari persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Pada tahun 2023 terdapat perubahan kategorisasi TMK Penandaan untuk sampel obat

tradisional, suplemen kesehatan, kuasi dan kosmetik. Hasil evaluasi penandaan kategori TMK Minor dapat disimpulkan memenuhi ketentuan (MK) sehingga pada tahun 2023 terjadi penurunan sangat signifikan terhadap sampel TMK penandaan (tahun 2020 sebanyak 23 sampel, tahun 2021 sebanyak 30 sampel, tahun 2022 sebanyak 69 sampel dan tahun 2023 sebanyak 4 sampel). Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.8.

Gambar 3.8 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berddasarkan Hasil Pengawasan Tahun

2020 – 2023

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET TAHUN 2023

TABEL 3.19
PERBANDINGAN REALISASI
"PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU
BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN"
TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI TA 2023	CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50%	95,68%	99,15%	AKAN TERCAPAI	▲

Jika dibandingkan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 99,15% dengan kategori Akan Tercapai. Untuk dapat mencapai target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

Jika dibandingkan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun 2023 dengan target nasional (89.50%), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Bandung (106.91%), Balai Besar POM di Surabaya (105.93%) dan Balai Besar POM di Semarang (101.66%).

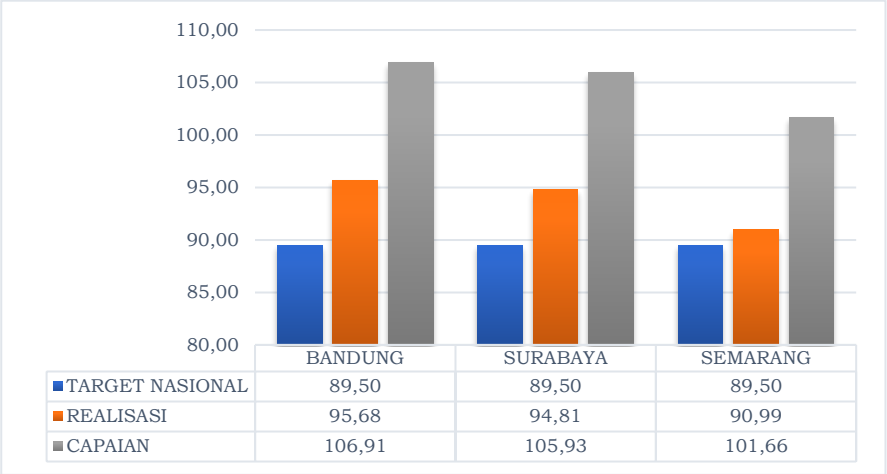

Gambar 3.9 Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Balai Lain dan Target Nasional

E. ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN ATAS PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kegagalan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Tahun 2023 disebabkan antara lain:

- Pengambilan contoh sampel obat, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling.
- Pada tahun 2023 dari 694 sampel yang diperiksa dan diuji terdapat 30 sampel TMS, terdiri dari sampel obat sebanyak 2 sampel (TMS Penetapan Kadar dan Disolusi) obat tradisional dan suplemen Kesehatan sebanyak 24 sampel TMS (TMK penandaan, tms mutu pengujian (kadar air, Angka Lempeng Total, Angka Kapang Khamir dan Enterobacteraiceae) dan sampel kosmetika sebanyak 4 sampel TMS (TIE, TMK penandaan dan tms mutu pengujian mikrobiologi Angka Lempeng Total dan Angka Kapang Khamir).

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Twitter), media masa melalui iklan layanan masyarakat bekerjasama dengan radio.
- Bekerjasama dengan stake holder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat) melaksanakan KIE.
- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.
- Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tradisional dan kosmetik Tanpa Ijin Edar (TIE)/ tidak memenuhi standar yang dilarang beredar. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Penerapan sanksi pidana diharapkan mampu memberikan efek jera bagi masyarakat luas.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

TABEL 3.20
ANALISIS EFISIENSI DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN
TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	CAPAIAN TE
		Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
1	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	99,67%	275.133.780	271.785.926	98,78%	1,01	0,01	EFISIEN

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- Pengambilan contoh sampel obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung, dilakukan sesuai perencanaan pada triwulan IV. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi obat terkait pengambilan sample produk yang mengandung cemaran etilenglikol dan dietilenglikol.
- Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan secara rutin oleh BBPOM di Bandung, meliputi sarana Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Kosmetik, dan Industri Suplemen Kesehatan. Sampai Tahun 2023 sarana produksi yang diperiksa sejumlah 158 sarana.
- Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran. Sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian meliputi, Pedagang Besar Farmasi,

Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Toko Obat, Klinik, Puskesmas, dan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, serta suplemen kesehatan. Sampai Tahun 2023 jumlah sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian yang diperiksa sejumlah 1221 sarana.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

TABEL 3.21
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
"PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN"
TAHUN 2023

Rekomendasi		**Tindaklanjut**			**Kondisi Sebelum rencana Aksi**	**Kondisi Setelah Rencana Aksi**
		Selesai	**Belum**			
			Rencana Aksi	**Timeline**		
a	Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dalam pemenuhan CPOB, CPOTB termasuk fokus khusus penandaan obat tradisional terhadap sarana produksi Obat Tradisional, pemenuhan CPKB dan CDOB.	Telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Pangan secara luring dan daring sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	Pengawasan sarana Produksi dan Distribusi sesuai target yang ditetapkan	Triwulan IV	Tingginya tingkat peredaran produk Obat yang tidak memenuhi syarat	Peredaran produk Obat yang tidak memenuhi syarat menurun
b	Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha.	Dilakukan Desk CAPA kepada para pelaku usaha yang sedang berproses			Pelaku usaha tidak menerapkan Cara Produksi yang Baik sehingga	Pelaku usaha sudah emnerapkan Cara Produksi yg Baik, sehingga

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
		sebagai bentuk monitoring dan evaluasi serta untuk mempercepat waktu penyelesaian dokumen			resiko produk Tidak Memenuhi Sayrat yang dihasilkan menjadi Tinggi	produk yang dihasilkan akan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan
c	Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan pemberian layanan informasi tentang Obat secara daring maupun tatap muka.	Melakukan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui KIE bersama Tokoh Masyarakat, pemberian layanan informasi secara daring dan tatap muka			Masyarakat sebagai konsumen yang belum teredukasi akan memilih produk Obat yang tidak memenuhi Syarat sehingga peredaran Obat TMS tersebut masih ada di peredaran	Masyarakat sebagai konsumen yang telah teredukasi tidak akan memilih produk Obat yang TMS sehingga Produk TMS tersebut tidak akan dapat bersaing dan hilang dari peredaran
d	Peningkatan kegiatan sosialisasi (KIE) tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public	Melakukan peningkatan pengetahuan Pelaku Usaha melalui KIE dan pemberian layanan			Pelaku usaha terutama di sarana distribusi yang tidak mengetahui ketentuan dan produk yang	

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Warning Obat yang diterbitkan oleh Badan POM. KIE tentang obat juga dilakukan melalui Media Sosial serta KIE yang dilaksanakan melalui Webinar Warta POPA yang dilaksanakn setiap bulan.	informasi secara daring dan tatap muka			TMS, akan selalu menyediakan produk TMS tersebut	
e	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab./Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.	Melakukan monev tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang disampaikan kepada instansi terkait			Sinergitas dalam melakukan pengawasan Produk Obat yang TMS masih rendah, karena lintas sektor belum mengetahui peredaran dan bahayanya produk TMS	Sinergitas dalam melakukan pengawasan Produk Obat yang TMS akan baik dan tingkat efektifitas pengawasan akan meningkat, sehingga akan mengurangi peredaran produk Obat TMS
f	Pro justicia memiliki arti demi hukum, untuk hukum atau undang-undang. Secara formal sanksi administrative pro justicia menunjukkan bahwa tindakan yang				Tidak ada penindakan kepada Pelaku Usaha illegal akan meningkatkan peredaran	Dengan adanya operasi penindakan terhadap pelaku usaha illegal, akan menurunkan

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	diambil oleh aparat penegak hukum adalah tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Pembinaan dan penyebaran informasi mengenai penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar dilakukan melalui tatap muka maupun daring menggunakan Media sosial dan media elektronik.				produk Obat TMS dipasaran	peredaran produk Obat TMS yang diproduksinya

I. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Untuk monitoring ketepatan jenis, jumlah dan waktu sampling dibuat sistem informasi kinerja yang mendukung pencapaian kinerja tersebut. seperti membuat inovasi kegiatan, baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

- Fungsi Inspeksi melakukan inovasi monitoring ketepatan jenis, jumlah dan waktu sampling.
- Fungsi Pengujian melakukan perkuatan sistem secara internal untuk menunjang proses bisnis yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Kegiatan yang telah dilakukan, yaitu :

- Di laboratorium Kimia membuat aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi untuk komodisti lainnya. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan
- Di laboratorium mikrobiologi membuat aplikasi IFTE (Integrated Form for Tools & Equipment) yang merupakan e-form terintegrasi untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrumen. Setiap peralatan di Laboratorium mikrobiologi diberikan nomor dan QR Code, sehingga untuk penggunaannya personel pengujian tinggal melakukan scan QR Code untuk check in, dan akan secara otomatis tersimpan data penggunaannya dalam sistem. Selain itu di laboratorium mikrobiologi ini juga membuat aplikasi Kartu Stock Online menggunakan google appsheet. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan, penggunaan dan mengontrol media/reagen, sehingga lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik dan aman, akibatnya penggunaan media/reagen akan lebih efektif dan efisien.

4. PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted memenuhi syarat pada tahun 2023 dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji pada tahun 2023.

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling kecuali sampel

pangan fortifikasi. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Sampel targeted yang telah disampling pada tahun 2023 adalah sebanyak 192 sampel, yang meliputi sampel PJAS 68 sampel, sampel kasus 48 sampel dan sampel UMKM 47 sampel, sampel Kemasan Pangan sebanyak 9 sampel, Sampel Mie sebanyak 3 sampel, sampel AMIU sebanyak 2 sampel, Air baku sebanyak 2 sampel, sampel Kajian sebanyak 8 sampel, Ruang Lingkup sebanyak 1 sampel dan DNA Porcine sebanyak 3 sampel. lokal spesifik 1 sampel. Dari 192 sampel yang diuji terdapat 11 sampel TMS kimia yaitu sampel PJAS (siklamat), kemasan pangan (BPA), UMKM (kadar air), kasus pemeriksaan (nor tadalafil, allura) dan 22 sampel TMS Mikrobiologi untuk sampel PJAS (E.coli), UMKM (B.cereus, S.aureus, Salmonella, P.aeruginosa, Coliform), AMIU (E.coli), pemahit (E. coli), kasus pemeriksaan (AKK, B.cereus, E.coli), air baku (E.coli). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.22.

TABEL 3.22
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU
BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN"
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TA 2023	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KRITERIA	
Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	78,00%	82,81%	106,17%	SANGAT BAIK	●

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 78,00%. Persentase Realisasi Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun

2023 sebesar 82.81%, dengan rincian sebanyak 159 sampel targeted memenuhi syarat dan 33 sampel targeted tidak memenuhi syarat dari total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 192 sampel targeted. Sampel yang tidak memenuhi syarat Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **106.17%** dengan kriteria **SANGAT BAIK.**

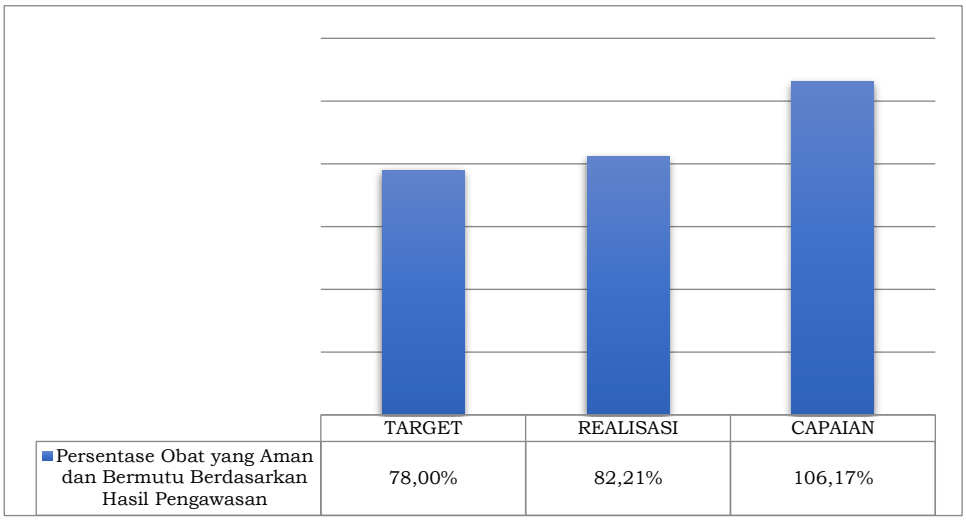

Gambar 3.10 Perbandingan target dengan realisasi kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2023

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2020, 2021 DAN 2022

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, hal tersebut terjadi karena adanya penurunan jumlah sampel TMS pengujian pada tahun 2020 sebanyak 132 sampel dari 403 sampel, tahun 2021 sebanyak 69 sampel dari 267 sampel. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi penurunan realisasi dan capaian kinerja dimana pada tahun 2022 sampel TMS adalah 48 dari 260 sampel Targetted sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 33 sampel dari 192 sampel Targetted. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.11.

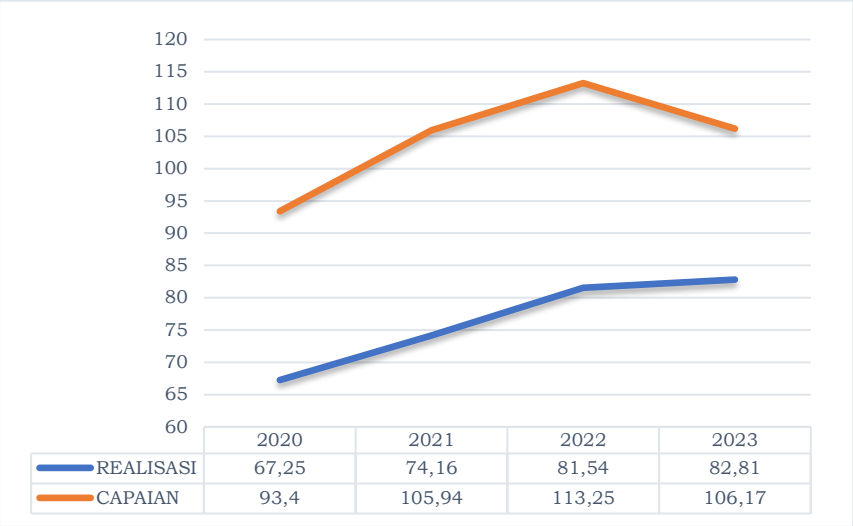

Gambar 3.11 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berddasarkan Hasil Pengawasan Tahun

2020 - 2023

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

TABEL 3.23
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU
BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN"
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI TA 2023	CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78.00%	8221%	105,40%	TERCAPAI	▲

Target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 78,00%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2023 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 105,40% dengan kategori **Tercapai**.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

Realisasi kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Surabaya (116,44%), Balai Besar POM di Bandung (106,17%) dan Balai Besar POM di Semarang (100.06%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (81,50%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Surabaya (104,29%) . Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.12.

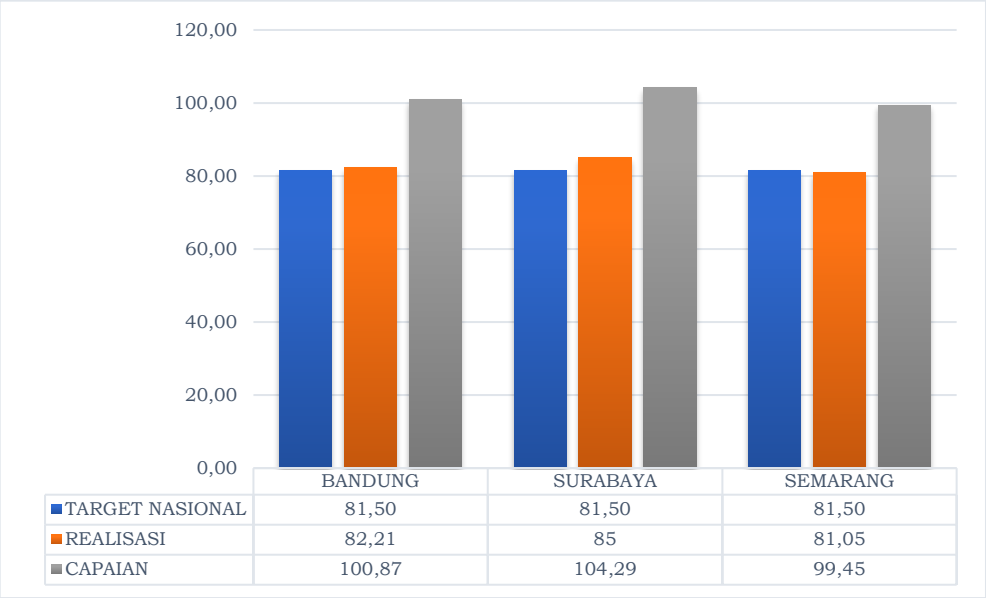

Gambar 3.12 Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Balai Lain dan Target Nasional

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Tahun 2023 disebabkan antara lain:

- Sampel Targetted yang telah disampling pada tahun 2023 adalah sebanyak 192 sampel yang meliputi sampel PJAS, sampel kemasan, sampel kasus pemeriksaan (minuman kekinian, kurma, produk cereal dan minuman kopi stamina), DNA porcine dan sampel UMKM.

- Pada tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, hal tersebut terjadi karena adanya penurunan jumlah sampel TMS pengujian pada tahun 2020 sebanyak 132 sampel dari 403 sampel Targetted, tahun 2021 sebanyak 69 sampel dari 267 sampel Targetted dan terjadi penurunan realisasi dan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun 2022 dimana pada tahun 2022 sebanyak 48 sampel TMS dari 260 sampel Targetted sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 33 sampel dari 192 sampel Targetted.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB melalui pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Twitter) serta iklan layanan masyarakat bekerjasama dengan radio.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

TABEL 3.24
ANALISIS EFISIENSI DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN
TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	CAPAIAN TE
		Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
1	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	106,17 %	79.827.300	79.330.142	99,38%	1,0	0,07	EFISIEN

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- Telah dilaksanakannya Sebagian tahapan kegiatan program nasional keamanan pangan yang meliputi PJAS Aman, Gerakan Keamanan Pangan Desa dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di dua Kabupaten /Kota

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut :

TABEL 3.25
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
"PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN SD TAHUN 2023"

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
a	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi syarat melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung atau melalui media sosial Instagram, Facebook dan Twitter.	KIE rutin yang telah dilaksanakan melalui sosialisasi langsung atau melalui media sosial Instagram, Facebook dan Twitter.			Masyarakat sebagai konsumen yang belum teredukasi akan memilih produk Obat yang tidak memenuhi Syarat sehingga peredaran Obat TMS tersebut masih ada di	Masyarakat sebagai konsumen yang telah teredukasi tidak akan memilih produk Obat yang TMS sehingga Produk TMS tersebut tidak akan dapat bersaing dan hilang dari peredaran

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
					peredaran	
b	Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB dan meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi syarat.	Pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi			Pelaku usaha tidak menerapkan Cara Produksi yang Baik sehingga resiko produk Tidak Memenuhi Sayrat yang dihasilkan menjadi Tinggi	Pelaku usaha sudah emnerapkan Cara Produksi yg Baik, sehingga produk yang dihasilkan akan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan
c	Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.	Monitoring dan evaluasi CAPA hasil pemeriksaan secara berkala			Pelaku usaha belum melakukan perbaikan sehingga belum menerapkan ketentuan, akibatnya produk	Pelaku usaha sudah melakukan perbaikan sehingga penerapan ketentaun dan persyaratannya lebih baik, akibatnya

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
					yang dihasilkan akan berisko TMS	dapat menjaga kualitas produk yang dihasilkan
d	Melakukan pertemuan intensif dengan pemangku kepentingan melalui Kegiatan Penguatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Bersama Pimpinan Daerah dan Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan.	Pertemuan dengan lintas sektor terkait penyampaian dan evaluasi hasil pengawasan Obat dan Makanan lebih efektif				
e	Melakukan komunikasi pada saat pemeriksaan sarana produksi dan distribusi terkait penyampaian hasil tindak lanjut dari Balai Besar POM di Bandung	Melakukan pembinaan saat pemeriksaan dan verifikasi atas CAPA yang disampaikan			Pelaku usaha belum melakukan perbaikan sehingga belum menerapkan ketentuan, akibatnya produk yang dihasilkan akan berisko	Pelaku usaha sudah melakukan perbaikan sehingga penerapan ketentaun dan persyaratannya lebih baik, akibatnya dapat menjaga kualitas produk yang

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
					TMS	dihasilkan

I. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

- Untuk monitoring ketepatan jenis, jumlah dan waktu sampling dibuat
- Fungsi Pengujian melakukan perkuatan sistem secara internal untuk menunjang proses bisnis yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Kegiatan yang telah dilakukan, yaitu :
    - Di laboratorium Kimia membuat aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi untuk komodisti lainnya. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan

- Di laboratorium mikrobiologi membuat aplikasi IFTE (Integrated Form for Tools & Equipment) yang merupakan e-form terintegrasi untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrumen. Setiap peralatan di Laboratorium mikrobiologi diberikan nomor dan QR Code, sehingga untuk penggunaannya personel pengujian tinggal melakukan scan QR Code untuk check in, dan akan secara otomatis tersimpan data penggunaannya dalam sistem. Selain itu di laboratorium mikrobiologi ini juga membuat aplikasi Kartu Stock Online menggunakan google appsheet. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan, penggunaan dan mengontrol media/reagen, sehingga lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik dan aman, akibatnya penggunaan media/reagen akan lebih efektif dan efisien.

5. PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2023 dibandingkan dengan total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji pada tahun 2023.

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Pengambilan keputuan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

Sampel pangan Fortifikasi yang telah disampling pada tahun 2023 adalah sebanyak 125 sampel yang terdiri dari sampel garam beryodium sebanyak 70 sampel dan sampel minyak goreng sebanyak 35 sampel dan sampel terigu sebanyak 20 sampel. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.26.

TABEL 3.26
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT"
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TA 2023	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KRITERIA	
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	78,00%	97,6%	125,13%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 78,00%. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2023 sebesar 125.13%, dengan rincian sebanyak 122 sampel pangan fortifikasi memenuhi syarat dari total sampel yang diperiksa dan diuji sebanyak 125 sampel pangan fortifikasi. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 125,13% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

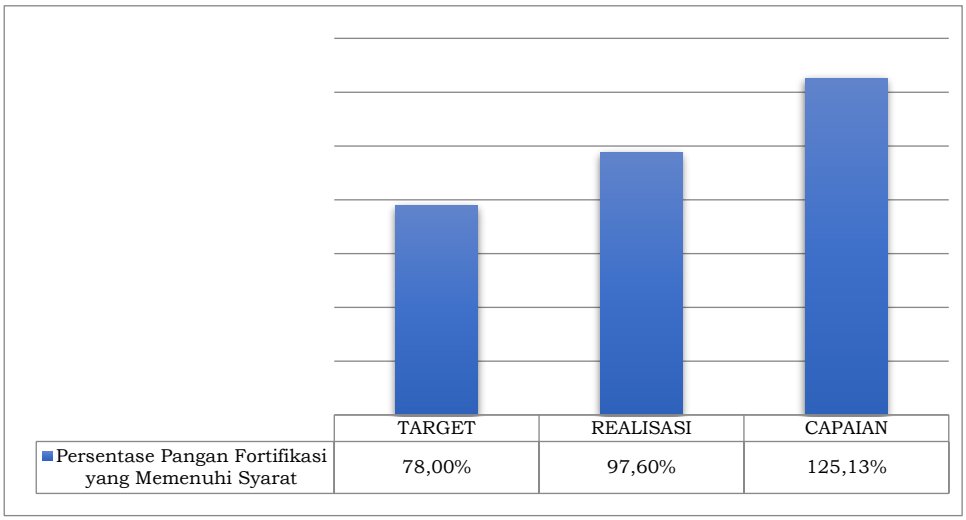

Gambar 3.13 Perbandingan target dengan realisasi kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2021 DAN 2022

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022, hal tersebut terjadi karena adanya penurunan jumlah sampel TMS pengujian pada tahun 2023 sebanyak 3 sampel dari total sampel yang diuji sebanyak 125 sampel.

Untuk tahun 2020 sampel fortifikasi belum termasuk ke dalam indikator kinerja persentase sampel makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.14.

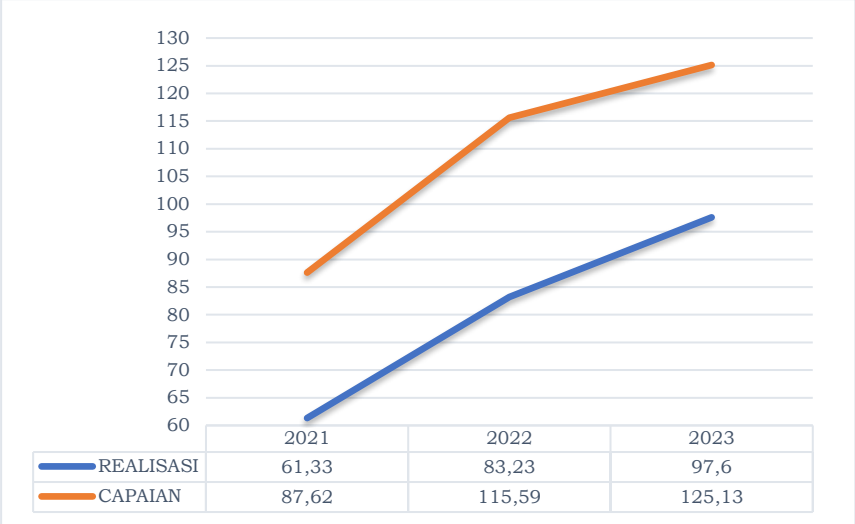

Gambar 3.14 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 - 2023

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

TABEL 3.27
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
"PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT"
TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI TA 2023	CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	76.00%	97,6%	128,42%	TERCAPAI/MELAMPAUAI	▲

Target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 76,00%. Jika dibandingkan Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 128,42% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL

Realisasi kinerja persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu : Balai Besar POM di Bandung (108,44%%), Balai Besar POM di Semarang (104,51%), dan Balai Besar POM di Surabaya (92,22%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (90,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Bandung (108,44%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.15.

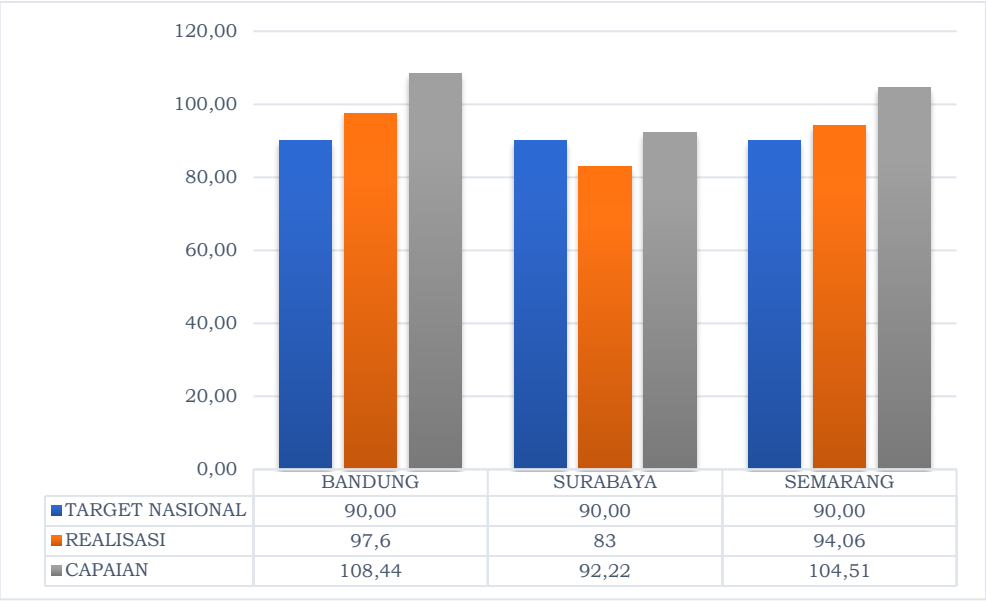

Gambar 3.15 Perbandingan Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Balai Lain dan Target Nasional

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2023 disebabkan antara lain :

- Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha terhadap penambahan fortifikan yang memenuhi standar. Pada tahun 2023 hasil pengujian sampel makanan yang TMS berasal dari sampel fortifikasi tepung terigu, yaitu mengandung vitamin B1, B2, asam folat yang substandard. Akan tetapi sampel fortifikasi secara keseluruhan yaitu sampel garam, tepung terigu dan minyak goreng sawit terjadi peningkatan sampel memenuhi syarat.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan, terutama sarana produksi garam terkait pemenuhan CPPOB melalui pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Twitter) serta iklan layanan masyarakat bekerjasama dengan radio.
- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan serta melakukan advokasi pengawasan pangan fortifikasi secara langsung di tempat produsen.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

TABEL 3.28
ANALISIS EFISIENSI DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN
TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	CAPAIAN TE
		Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
1	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	125,13 %	28.810.000	28.657.599	99,47%	1,26	0,26	EFISIEN

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- Meningkatnya pemahaman dari pelaku usaha tentang aspek CPPOB serta kesadaran untuk mempertahankan pemenuhan aspek CPPOB tidak hanya pada saat di inspeksi namun sudah menjadi kebijakan yang harus ditaati sarana produksi.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Indikator ini baru ditambahkan di triwulan I sehingga belum ada rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

I. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut:

- Untuk monitoring ketepatan jenis, jumlah dan waktu sampling dibuat

- Fungsi Pengujian melakukan perkuatan sistem secara internal untuk menunjang proses bisnis yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Kegiatan yang telah dilakukan, yaitu :
    - Di laboratorium Kimia membuat aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi untuk komodisti lainnya. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan
    - Di laboratorium mikrobiologi membuat aplikasi IFTE (Integrated Form for Tools & Equipment) yang merupakan e-form terintegrasi untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrumen. Setiap peralatan di Laboratorium mikrobiologi diberikan nomor dan QR Code, sehingga untuk penggunaannya personel pengujian tinggal melakukan scan QR Code untuk check in, dan akan secara otomatis tersimpan data penggunaannya dalam sistem. Selain itu di laboratorium mikrobiologi ini juga membuat aplikasi Kartu Stock Online menggunakan google appsheet. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan, penggunaan dan mengontrol media/reagen, sehingga lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik dan aman, akibatnya penggunaan media/reagen akan lebih efektif dan efisien.

SASARAN KEGIATAN KE-2

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yaitu : Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu. Pengukuran indikator tersebut merupakan hasil survey oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM yang dilakukan pada akhir tahun anggaran. Dari perhitungan indicator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 111,13% dengan kriteria Sangat Baik. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.29.

TABEL 3.29
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-2
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TA 2023	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KRITERIA	
6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78	86,68	111,13%	SANGAT BAIK	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**111,13%**	**SANGAT BAIK**	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (*AWARENESS INDEX*) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu: (1) Pengetahuan (Knowledege) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat; (2) Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk

peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan; dan (3) Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Interprestasi indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu mengacu pada skala 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

TABEL 3.30
KATEGORI INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX)
TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU

SKOR	INTERPRESTASI
≤ 45,00	TIDAK BAIK
45,01 – 60,00	KURANG BAIK
60,01 – 75,00	CUKUP BAIK
75,01 – 90,00	BAIK
≥ 90,01	SANGAT BAIK

TABEL 3.31
INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TA 2023	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KRITERIA	
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78	86,68	111,13%	SANGAT BAIK	●

J. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 78, Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan

Makanan aman dan bermutu adalah 86,68. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **111,13%** dengan kriteria **SANGAT BAIK.**

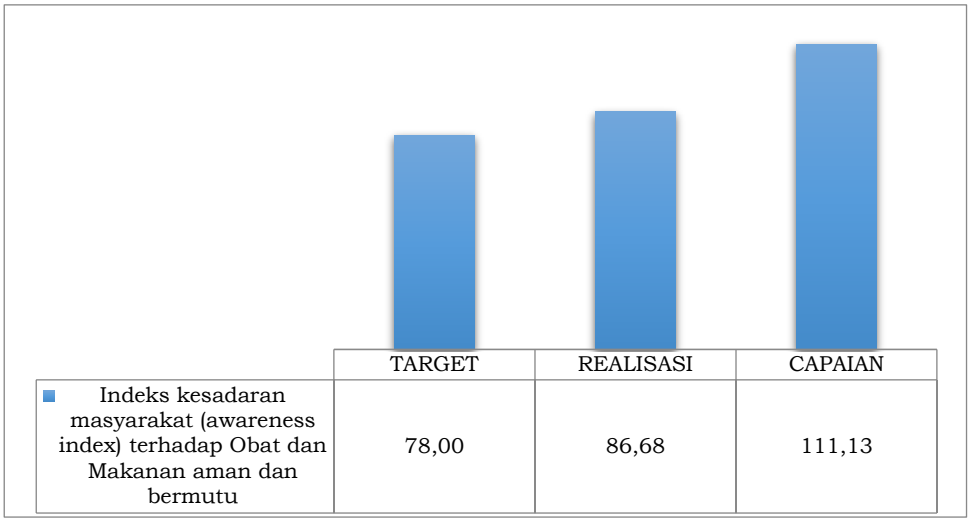

Gambar 3.16 Perbandingan target dengan realisasi kinerja Tahun 2023

TABEL 3.32
INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) PER KOMODITI
TAHUN 2023

No	Komoditi	Indeks
1.	Obat	88,59
2.	Obat Tradisional	85,83
3.	Suplemen Kesehatan	85,24
4.	Kosmetik	85,76
5.	Pangan Olahan	86,88
	Indeks Gabungan	86,86

TABEL 3.33

ASPEK PENYUSUSN INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX)

TAHUN 2023

No	Komoditi	Indeks
1.	Pengetahuan	90.94
2.	Sikap	89.74
3.	Perilaku	79.38

K. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020, 2021, DAN 2022

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020. 2021, dan 2022. Disebabkan oleh publikasi informasi Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara berkala, serta seluruh rekomendasi telah dilaksanakan. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.2.

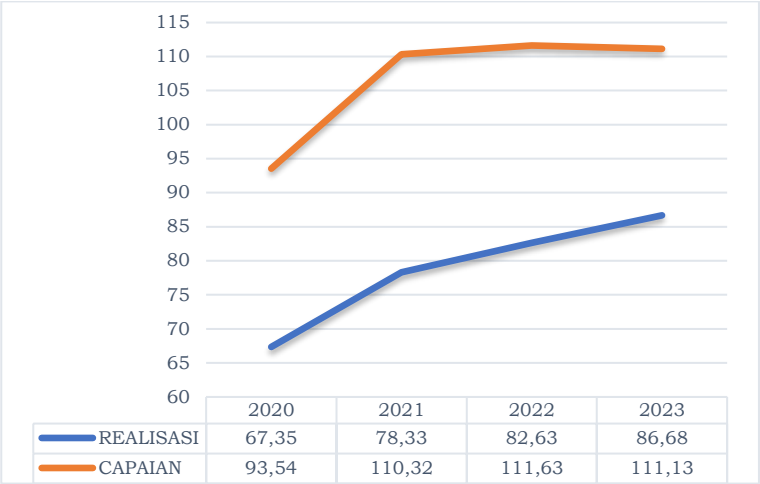

Gambar 3.17 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2020 - 2023

L. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

TABEL 3.34
PERBANDINGAN REALISASI
"INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU"
TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI TA 2023	CAPAIAN	KATEGORI	
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80	86,68	108,35%	TERCAPAI	▲

Jika dibandingkan Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu pada tahun 2023 terhadap target akhir

Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 108,35% dengan kategori **Tercapai**. Untuk dapat mencapai target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

M. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

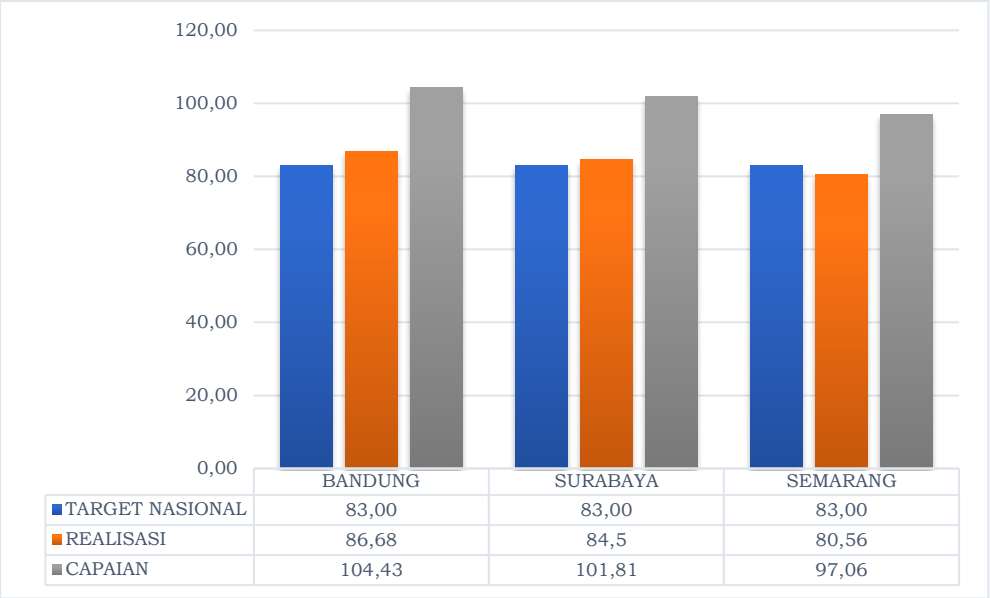

	BANDUNG	SURABAYA	SEMARANG
TARGET NASIONAL	83,00	83,00	83,00
REALISASI	86,68	84,5	80,56
CAPAIAN	104,43	101,81	97,06

Gambar 3.18 Perbandingan Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Tahun 2023 dengan Balai Lain dan Target Nasional

Jika dibandingkan Realisasi Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu pada tahun 2023, maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Bandung (104,43%), Balai Besar POM di Surabaya (101,81%), dan Balai Besar POM di Semarang (97,06%).

N. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Indeks kesadaran masyarkat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 masuk dalam kategori Baik (86,68), yang artinya sudah adanya kesadaran masyarakat di Provinsi Jawa Barat mengenai obat dan makanan aman dan bermutu, namun perlu ditingkatkan. Keberhasilan atas peningkatan kinerja ini disebabkan antara lain:

- Publikasi tentang Obat dan Makanan terutama komoditi obat dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan.
- Kerjasama dengan stakeholder untuk mensosialisasikan program dan layanan yang disediakan BBPOM di Bandung telah meningkat.
- Pembaharuan website BBPOM di Bandung lebih menarik dan user friendly bagi masyarakat.
- Peningkatan penggunaan media sosial dengan penyampaian pesan disesuaikan dengan usia dan platform media sosial.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM Nomor B-RK.02.2.14.12.23.970 tanggal 29 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha, Indeks Kesadaran Masyarakat, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha dan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

- Meningkatkan sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dan bekerjasama mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskankan informasi keamanan Obat dan Makanan.:
  - Melibatkan perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi, komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, Kader dsb), media, dan influencer yang memiliki pengaruh dan jangkauan luas di kalangan masyarakat.
  - Menguatkan kemitraan dan mengedukasi kelompok/komunitas olahraga/pemuda/remaja pada agar dapat menjadi peer educator untuk menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan melalui pesan cek

KLIK seperti pada SAKA Pramuka, kegiatan pengabdian masyarakat (KKN) mahasiswa.

- Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.:

  Dalam menyusun strategi pelaksanaan KIE dapat mengacu pedoman strategi KIE Obat dan Makanan dan mempertimbangkan hasil survei kesadaran pada masing-masing wilayah, baik dari sisi komoditi, aspek pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat maupun demografi. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:

  - Memfokuskan tujuan dan tema/materi/pesan KIE dengan mempertimbangkan segmentasi target audience seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah.
  - Penyampaian KIE dengan memperhatikan prioritas kebutuhan informasi masyarakat, media yang tepat dan banyak diakses oleh masyarakat disesuaikan dengan target/kelompok sasaran penerima KIE. Media yang banyak diakses antara lain media televisi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, kemasan produk dengan cara pemberian informasi adanya Nomor Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Izin Edar (NIE) atau 2D Barcode pada kemasan produk Obat dan Makanan, media sosial yang disesuaikan dengan usia dan platform, media sosial serta media luar ruang.
  - Mengembangkan program yang kreatif dan inovatif disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
  - Peningkatan Publikasi terkait Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu di berbagai media cetak, media elektronik, media luar ruang dan media online.

O. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

TABEL 3.35
ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA
"INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU"

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	CAPAIAN TE
		Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	111,13 %	614.646.000	609.002.116	99,08	1,12	0,12	EFISIEN

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu sebesar 0.12 dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung akan melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

P. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- Pembuatan publikasi Obat dan Makanan media luar ruang berupa baliho di Kota Bekasi.

Gambar 3.19 Publikasi Informasi Media Luar ruang Baliho di Kota Bekasi

- Pembuatan publikasi Obat dan Makanan menggunakan media alat transportasi dilaksanakan di Kabupaten dan Kota Cirebon.

Gambar 3.20 Publikasi Informasi menggunakan Alat Transportasi di Kabupaten dan Kota Cirebon

- Pembuatan Publikasi Obat dan Makanan pada media cetak. Tema publikasi berdasarkan data Indeks Kesadaran Obat dan Makanan tahun 2022, selain itu tema ditentukan berdasarkan waktu tertentu.

Gambar 3.21 Publikasi Informasi Menggunakan Media Cetak

- Publikasi Informasi tentang Obat dan Makanan melalui media sosial

Gambar 3.22 Publikasi Informasi Menggunakan Media Cetak

- Publikasi informasi Obat dan Makanan melaui radio berupa Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Pelaksanaan ILM pada bulan Mei sampai Desember 2023.

TABEL 3.36
TEMA IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DI RADIO
TAHUN 2023

Bulan	Materi
Mei	Layanan Publik BBPOM di Bandung
	Cek Klik
	Tips Memilih Obat Tradisional yang Aman
Juni	Cek Klik

Bulan	Materi
	Layanan Telekonsultasi Si Iteung
	Keamanan Pangan
	Tips Belanja Online
	Tips Memilih Kosmetika yang Aman
Juli	Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar
	5 Kunci Keamanan Pangan
	Kata BPOM
Agustus	Keamanan Pangan
	Kata BPOM
	Serba Serbi Suplemen Kesehatan
September	Kata BPOM
	Tips Memilih Kosmetika yang Aman
	Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar
Oktober	Serba Serbi Suplemen Kesehatan
	Tips Memilih Obat Tradisional yang Aman
	Layanan 1 Nomor BBPOM di Bandung
November	Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar
	5 Kunci Keamanan Pangan
	Layanan 1 Nomor BBPOM di Bandung
Desember	Himbauan Natal dan Tahun Baru
	Serba Serbi Suplemen Kesehatan
	Kata BPOM
	Layanan Pengaduan BBPOM di Bandung

- Publikasi informasi Obat dan Makanan melaui *sms blast.* Pesan singkat tentang Obat dan Makanan yang aman, tentang pelayanan publik BBPOM Bandung

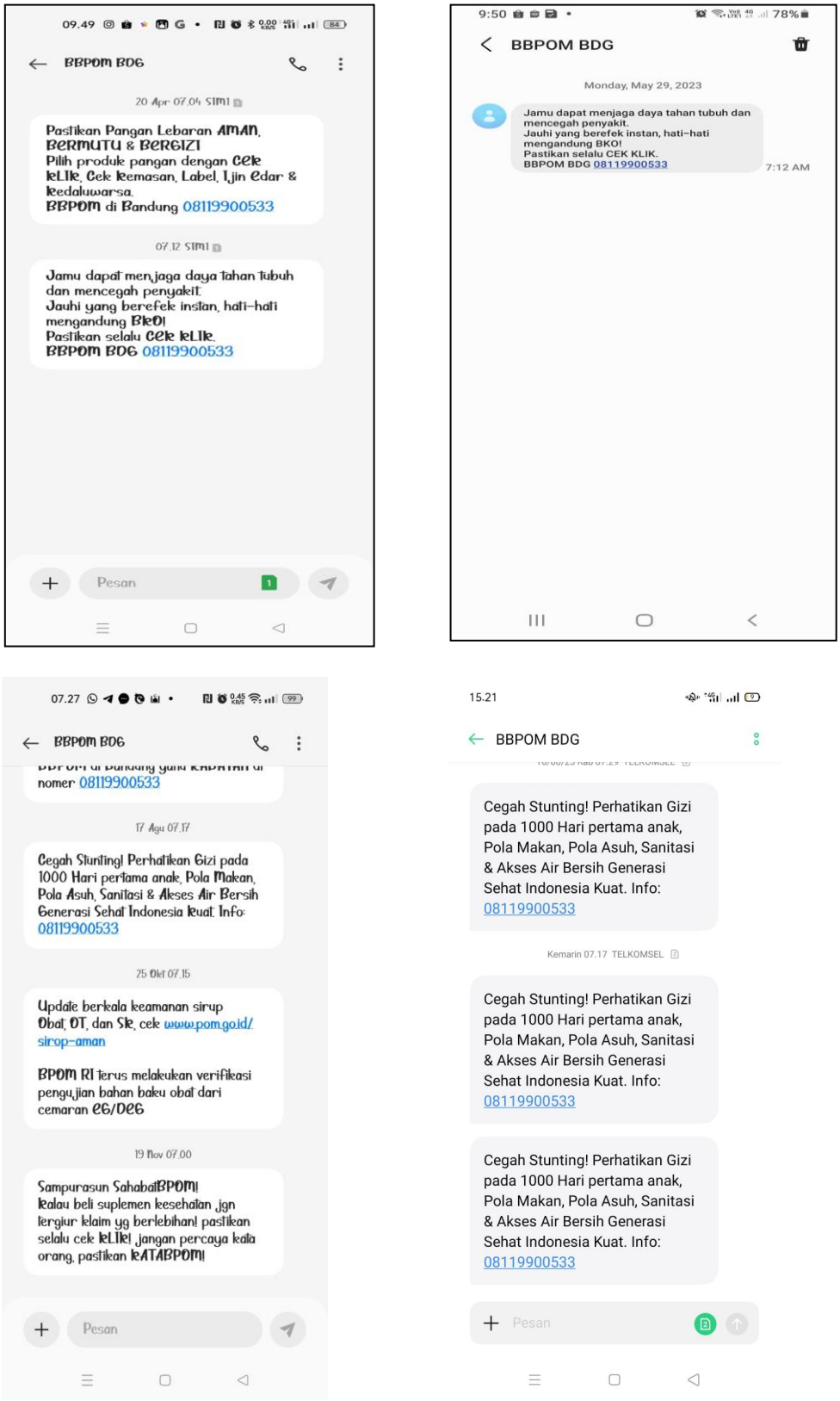

Gambar 3.23 SMS Blast Informasi Obat dan Makanan

- Publikasi informasi Obat dan Makanan melaui media sosial. Kelom Geulis merupakan salah satu publikasi informasi Obat dan Makanan melalui *live IG* sehingga masyarakat bisa tanya langsung.

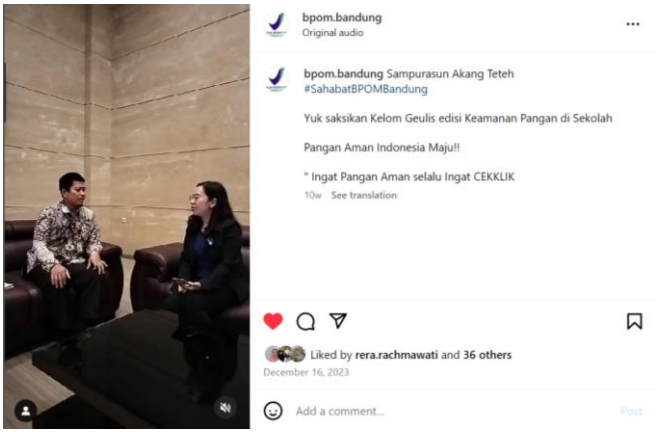

Gambar 3.24 Kelom Geulis dengan Tema Keamanan pangan Jajanan Anak Sekolah

Q. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

TABEL 3.37

MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI

"INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU"

TAHUN 2023

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
a	Meningkatkan kerjasam melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan	Telah dilakukan kerjasama kemitraan denga pemangku kepentinga	-	-	Kemitraan dengan pemangku kepentingan masih kurang	Kemitraan dengan pemangku kepentingan meningkat

	Makanan	n dan partisipasi masayarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui audiensi, advokasi dengan lintas sektor terkait, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, PD IAI Jawa Barat				
b	Meningkatkan strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan dengan cara: (1) memfokuskan tujuan KIE; (2) menentukan materi/pesan secara terpusat dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia; (3) mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing; (4)	Telah dilakukan peningkatan strategi publikasi sesuai dengan tujuan. Telah terdapat tema materi/pesan untuk media	-	-	-	Penentuan tema publikasi sesuai tujuan. Tema materi/pesan media sosial sesuai dengan ketentuan BPOM Penggunaanmedia yang diakses banyak

	menggunakan media yang banyak diakses masyarakat al. Media TV, Media sosial dan internet, Sosialisasi websit, Media luar ruang seperti spanduk, banner, reklame, stiker, postery.	sosial secara nasional Telah dilakukan upaya untuk mengguna kan media yang diakses banyak masyaraka t yaitu melalui media sosial, media online, media luar ruang (baliho, melalui alat transporta si)				masyarakat yaitu melalui media sosial, media online, media luar ruang (baliho, melalui alat transportasi)
c	Melakukan Upaya persuasive yang menyentuh sisi emosi dan dekat dengan gaya hidup, kepercayaan, budaya, Bahasa maupun nilai-nilai yang dianut masyarakat untuk	Telah dilakukan upaya dengan pendekatan persuasive agar dapat memberikan sikap positif	-	-	-	Peningkatan sikap tentang Obat dan Makanan

	membentuk sikap yang lebih positif mengenai pentingnya memperhatikan petunjuk penyimpanan produk yang benar dan membeli produk dengan kemasan yang masih baik/bagus. Kedua informasi tersebut perlu ditingkatkan kepada masyarakat untuk seluruh kategori produk. Upaya persuasif dapat dilakukan melalui penggunaan Bahasa daerah dalam penyampaian materi KIE dan lebih interaktif.	terhadap Obat dan Makanan yang aman.				
d	Menyusun konten/materi informasi dan edukasi tentang produk Obat dan Makanan yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat Konten dari program KIE BPOM dapat dirumuskan dengan berbagai topik, seperti menampilkan berbagai	Telah disusun materi/konten yang mudah dipahami	-	-	-	Peningkatan pengetahuan tentang Obat dan Makanan

	berita aktual, foto foto kegiatan pimpinan BPOM, edukasi masyarakat tentang pentingnya memperhatikan nomor izin edar logo obat label obat dan tanggal k e dalu warsa yang tercantum pada kemasan produk yang dibeli/dikonsumsi.					
e	Meningkatkan upaya untuk membentuk sikap yang lebih positif khususnya untuk produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan terkait kebiasaan membaca petunjuk penggunaan dan mencari tahu tentang efek samping yang mungkin timbul dari produk yang digunakan/dikonsums	Telah dilakukan upaya dengan pendekatan persuasive agar dapat memberikan sikap positif terhadap Obat dan Makanan yang aman.	-	-	-	Peningkatan aspek sikap
f	Mendorong terciptanya perilaku yang lebih baik terkait pemilihan/penggunaan /konsumsi produk obat dan makanan dengan focus sebagai berikut : (a) Untuk seluruh	Telah dilakukan upaya dengan pendekatan persuasive agar dapat memberikan	-	-	-	Peningkatan indeks kesadaran

	kategori produk,prioritas upaya pembentukan perilaku yang lebih baik perlu difokuskan diantaranya pada: menumbuhkan kebiasaan untuk membaca pentunjuk penyimpanan produk sesuai dengan informasi yang tertera pada label, membaca informasi pada label/ kemasan sebelum menggunakan, dan membeli/menggunakan produk yang terdaftar di BPOM dan (b) Pada produk Pangan Olahan dan Kosmetik, perlu difokuskan pembentukan perilaku yang lebih baik dengan membeli produk yang kemasannya baik.	perilaku positif terhadap Obat dan Makanan yang aman.				
g	Prioritas daerah dengan Indeks kesadaran yang masih rendah dengan meningkatkan intensitas KIE. Fokus utama adalah pemberian pengetahuan dan pembentukan sikap yang positif dan bijak dalam memilih/	Telah dilakukan publikasi pada wilayah dengan indeks kesadaran yang masih rendah	-	-	-	Peningkatan indeks kesadaran

	membeli/mengonsumsi Obat dan Makanan Upaya edukasi perlu diutamakan untuk lebih menyentuh pada aspek emosi, perasaan, dan kepercayaan yang akan mempengaruhi kesadaran terhadap obat dan makanan. Media edukasi dan bentuk kegiatan yang dilakukan perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat untuk meningkatkan kemungkinan penyerapan informasi yang diberikan					

R. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal. Dengan informasi kinerja tersebut, fungsi Informasi dan Komunikasi telah membuat aplikasi dan kegiatan, sebagai berikut :

- Pembentukan 60 orang anggota SAKA POM, yang akan meningkatkan efektifitas penyebaran informasi Obat dan Makanan untuk peningkatan kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
- Kegiatan nge-BAP (Ngobrol Seru Bareng Agen Perubahan BBPOM di Bandung) berupa kegiatan penyebaran informasi melalui podcast.

- Informasi tentang indeks kesadaran masyarakat tentang Obat dan Makanan dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk menyusun target tahun 2024.

SASARAN KEGIATAN KE-3

MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 3 (tiga) indikator yaitu: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; (2) Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan; dan (3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM.

Pengukuran indikator tersebut merupakan hasil survey oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dan Inspektorat Utama Badan POM. Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **102.30%** dengan kriteria **SANGAT BAIK**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.38

TABEL 3.38
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-3
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TA 2023	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KRITERIA	
1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4	97,3	104,18%	SANGAT BAIK	
2. Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan	82,62	83,72	101,33%	SANGAT BAIK	
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	91	92,26	101,38%	SANGAT BAIK	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**102,30**	**SANGAT BAIK**	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan ketiga, sebagai berikut:

1. **INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

Indeks kepuasan pelaku usaha merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/ pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/coaching clinic, konsultasi, focus group discussion (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportitr, sarana pelayanan.

Aspek pengukuran dalam survey ini adalah: (1). Aspek bimbingan dan pembinaan; (2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan; (3). Aspek penanganan saran dan masukan; (4). Aspek manfaat; (5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan; dan (6). Aspek pengetahuan dan pemahaman.

TABEL 3.39
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN"
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KRITERIA	
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	93.40	97,30	104,18%	SANGAT BAIK	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA 2023

Pada Tahun 2023, Target Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan sebesar 93,40% dan Realisasi Tahun 2023 sebesar 97,30%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar **104,18%** dengan kriteria **SANGAT BAIK**.

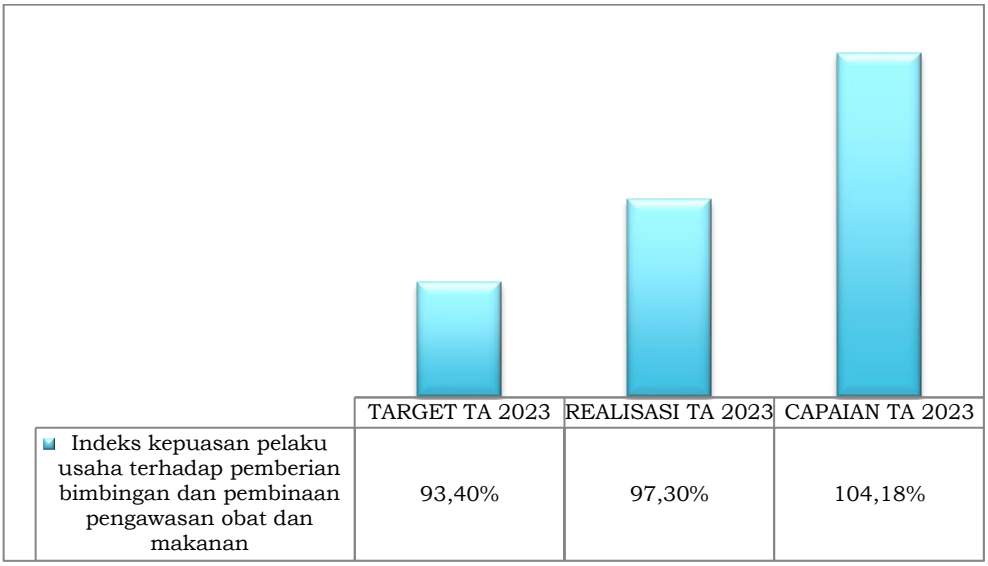

Gambar 3.25 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan

Tahun 2023

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020, 2021, DAN 2022

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 93,40% sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2023. Apabila dibandingkan realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Tahun 2023 terhadap realisasi tahun 2022, terjadi kenaikan. Persentase capaian tahun 2023 naik sebesar 1,88% dibandingkan dengan tahun 2022. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.26.

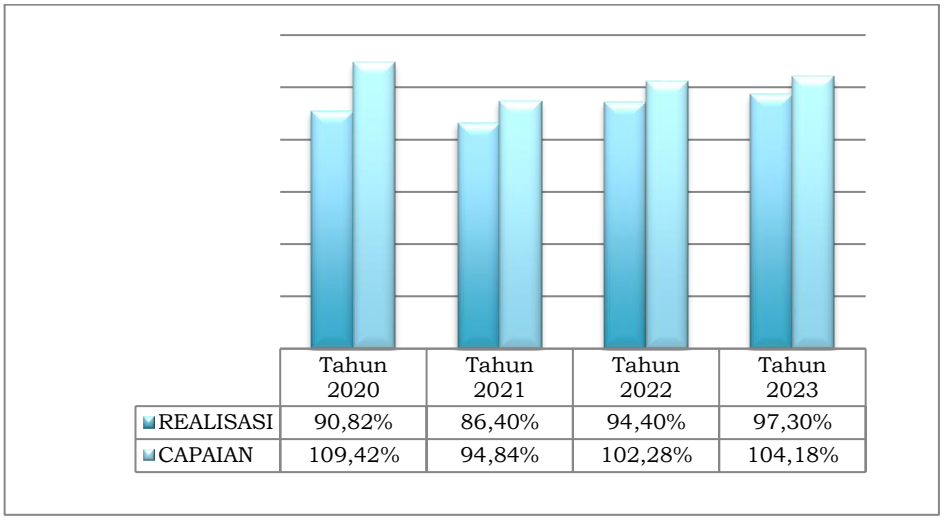

Gambar 3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya 2020, 2021, dan 2022

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

TABEL 3.40
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN"
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KATEGORI	
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	94,6	97,30	102,85%	TERCAPAI	▲

Jika dibandingkan realisasi yang dilaksanakan pada tahun 2023 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 102,85% dengan kriteria Tercapai. Untuk dapat mencapai target akhir tahun Renstra Tahun

2020-2024, perlu dilakukan kembali upaya-upaya untuk pencapaian target sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN BALAI LAIN SEJENIS

Jika realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dibandingkan dengan Balai lain yang setara, maka pencapaian kinerja dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Surabaya (112,49%), Balai Besar POM di Semarang (106,05%), dan Balai Besar POM di Bandung (104,18%).

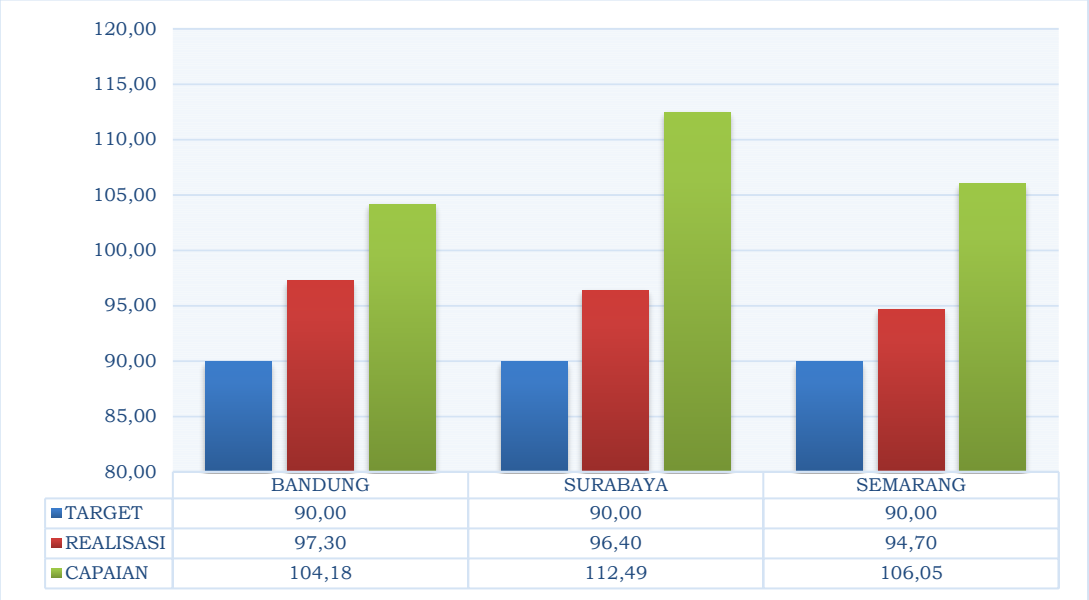

Gambar 3.27 Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan Tahun 2023 dengan Balai Lain dan Target Nasional

E. ANALISIS KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Keberhasilan pencapaian pada Tahun 2023 ini disebabkan oleh:

- Peningkatan pemahaman dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai peraturan yang berlaku melalui pelaksanaan berbagai program Bimbingan Teknis di Bidang Obat dan

Makanan kepada pelaku usaha yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung secara rutin.

- Peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui Program Desk CAPA yang rutin dilakukan sehingga membantu pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil audit dalam rangka sertifikasi atau inspeksi.
- Peningkatan kemudahan pelaku usaha dalam mendapatkan izin edar pangan olahan melalui Program Sosialisasi dalam rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2023, antara lain :

- Meningkatkan pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, Diseminasi, Pendampingan dan Desk pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui.
- Bimbingan dan sosialisasi terhadap pelaku usaha terkait Obat dan Makanan lebih fokus pada materi atau aspek yang berdampak langsung pada percepatan perijinan/sertifikasi pelaku usaha.
- Meningkatkan pelaksanaan program pendampingan bagi pelaku usaha bagi UMKM sehingga diperoleh kemudahan dalam mendapatkan izin edar BPOM.
- Mengadakan Desk Registrasi Kosmetik dan Obat Tradisional.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

TABEL 3.40
INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	CAPAIAN TE
		Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian	104,18%	405.938.000	405.843.350	99,98%	1,04	0,04	EFISIEN

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	CAPAIAN TE
		Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
	bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan							

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

- Kegiatan Bimtek Pelaku Usaha dan Desk Evaluasi Dokumen yang diikuti oleh 42 orang pelaku usaha pada tanggal 16-17 Maret 2023, yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat dan sedang mengurus Sertifikat Izin Penerapan CPPOB hadir dan diberikan pendampingan secara langsung oleh petugas BBPOM di Bandung. Output dari kegiatan Bimtek dan Desk ini adalah telah berhasil menerbitkan 12 Sertifikat Izin Penerapan CPPOB yang meliputi antara lain jenis pangan daging olahan beku, minuman buah, konsentrat minuman buah, air minum dalam kemasan, makanan siap saji, bumbu siap saji, dan lain sebagainya.

Gambar 3.28 Kegiatan Bimtek dan Desk kepada pelaku usaha

- Bimtek Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha terutama bagi UMKM Pangan di Jawa Barat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang kemanan pangan, mengetahui tata cara sertifikasi produksi pangan untuk

menghasilkan produk olahan pangan yang aman dan bermutu sesuai dengan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

- Kegiatan Desk CAPA terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan pada sarana pelayanan kefarmasian. Desk CAPA dilaksanakan dalam rangka meningkatkan respon tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian serta untuk penjaminan keamanan distribusi obat di masyarakat.
- Kegiatan Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan kolaborasi antara Balai Besar POM di Bandung dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan pada tanggal 26-27 Juni 2023. Output dari kegiatan tersebut yaitu telah brhasil menerbitkan 20 Nomor izin Edar dan 10 akun Perusahaan.

Gambar 3.29 Kegiatan Sosialisasi dan Desk Registrasi

- Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Cara Distribusi Obat yang Baik pada tanggal 7 Agustus 2023 kepada pelaku usaha dan Apoteker Penanggung Jawab pada sarana Distribusi Obat yaitu Pedagang Besar Farmasi di Kota Bandung. Kegiatan ini diharapkan mampu menjalin sinergitas terkait pelaku usaha dan organisasi profesi untuk melindungi masyarakat.

Gambar 3.30 Kegiatan Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan terkait Cara Distribusi Obat yang Baik

- Kegiatan Desk CAPA dan Evaluasi Dokumen dalam Rangka Percepatan Perizinan Sarana Obat dan Makanan pada tanggal 2Oktober 2023 kepada pelaku usaha di wilayah Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan inovasi yang dilakukan untuk memberikan kemudahan pelayanan terbaik dalam proses Sertifikasi Sarana Obat dan Makanan.

Gambar 3.31 Kegiatan Desk CAPA dan Evaluasi Dokumen

- Kegiatan Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan kolaborasi antara Balai Besar POM di Bandung dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan pada tanggal 16-17 November 2023. Selama dua hari pelaksanaan acara, kegiatan Sosialisasi dan Desk dalam rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan - Booster UMKM Juara Tahun 2023 ini dikuti oleh 50 (lima puluh) orang pelaku usaha UMK pangan olahan yang sudah memiliki izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) dan sedang

berproses dalam pengajuan registrasi produk, baik sedang mengajukan akun maupun sedang mengajukan pendaftaran produk di sistem ereg RBA.

Gambar 3.32 Kegiatan Sosialisasi dan Desk Registrasi

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

TABEL 3.41
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
"INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN"

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
a	Meningkatkan monitoring, evaluasi dan tindaklanjut atas hasil survey atau hasil pengukuran indeks	Melakukan monev bulanan pada Rapat Manajemen Kinerja Bulanan	-	-	Capaian IKEPU belum maksimal	Tercapainya nilai IKEPU sesuai target yang ditetapkan
b	Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi	Menyusun Laporan Monev terkait Masukan pada hasil	-	-		

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan BPOM.	IKEPU tahun 2023				
c	Melakukan identifikasi/pemetaan responden survei IKEPU untuk meminimalkan irisan dengan survei lainnya	Menetapkan dan memberikan sosialiasi jenis survei dari tiap responden	-	-		
d	Melakukan inovasi atau perbaikan untuk mengatasi isu kecukupan waktu, layanan pasca KBP, video/infografis materi, media komunikasi dengan pelaku usaha, Teknik komunikasi sesuai karakteristik pelaku usaha dengan mempertimbangkan tingkat literasi,	Mengupload layanan informasi yang berhubungan dengan alur perizinan di Badan POM melalui IG	-	-		

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	dan cakupan pelaku usaha yang mendapatkan KBP.					

I. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

- Fungsi sertifikasi membuat program Bimtek Pelaku Usaha dan desk Evaluasi Dokumen yang dilaksanakan setiap semester. Kegiatan ini merupakan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha baru yang sedang melakukan proses registrasi pendafataran produk Obat dan Makanan. Dengan program ini proses perbaikan dan pemenuhan persyaratan oleh Pelaku Usaha menjadi lebih cepat dan baik, sehingga waktu yang diperlukan pelaku usaha dalam proses registrasi menjadi lebih cepat dan mudah. Dengan program ini kepuasan Pelaku Usaha terhadap program BBPOM di Bandung menjadi lebih meningkat.
- Sebagai informasi dalam menentukan kebutuhan pelaku usaha dalam proses perizinan Obat dan Makanan diantaranya membuat aplikasi SISTER UMKM (Sistem Informasi Terpadu UMKM).

2. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil

pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles, realibility, responsiveness, assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu: (1). Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*); dan (2). Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

TABEL 3.42
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN"
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	82.62	83.72	101.33%	Sangat baik	

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 82.62, sedangkan realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan sebesar 83.72. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 101.33% dengan kriteria **sangat baik.**

TABEL 3.43
VARIABEL INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN"
TAHUN 2023

No	Variabel	Indeks
1.	Upaya Pengawasan	84.15
2.	Upaya Penindakan	83.81
3.	Pemberian Informasi	83.29
4.	Jaminan Keamanan	83.63

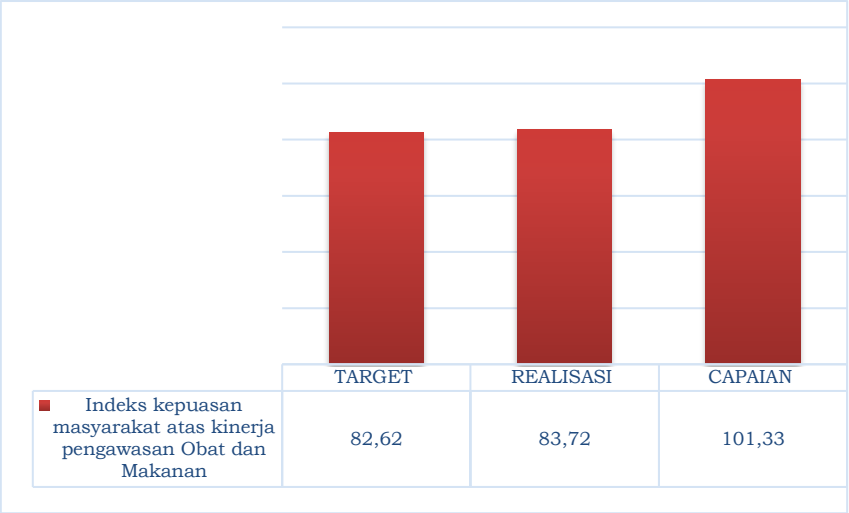

Gambar 3.33 Perbandingan target dengan realisasi kinerja

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 202O, 2021, dan 2022

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, dan 2022. Realisasi tahun 2023 meningkat sebesar 11% dibandingkan tahun 2020, 21% dibandingkan tahun 2021 dan 8% dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan capaian ini disebabkan adanya berbagai kegiatan publikasi berbagai aktivitas BBPOM di Bandung yang memperhatikan kebutuhan masyarakat, sosialisasi hasil pengawasan yang telah dilaksanakan menjangkau

seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Jawa Barat, selain iu juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh rekomendasi pengukuran indeks dan menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan untuk peningkatan kinerja.

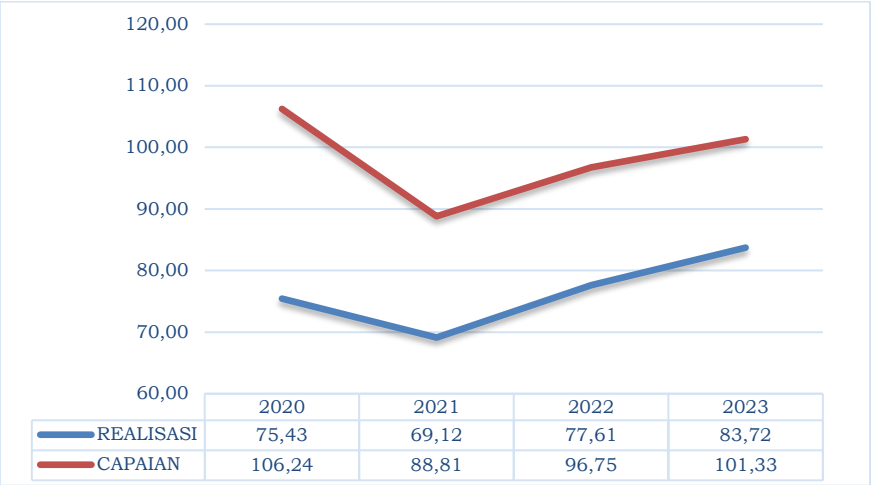

Gambar 3.34 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020 sd 2022

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

TABEL 3.44
PERBANDINGAN REALISASI "INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN" TAHUN 2023
DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	85.01	83.72	101.33%	TERCAPAI	▲

Jika dibandingkan realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2023 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 98,48% dengan kriteria

TERCAPAI. Untuk dapat mencapai target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

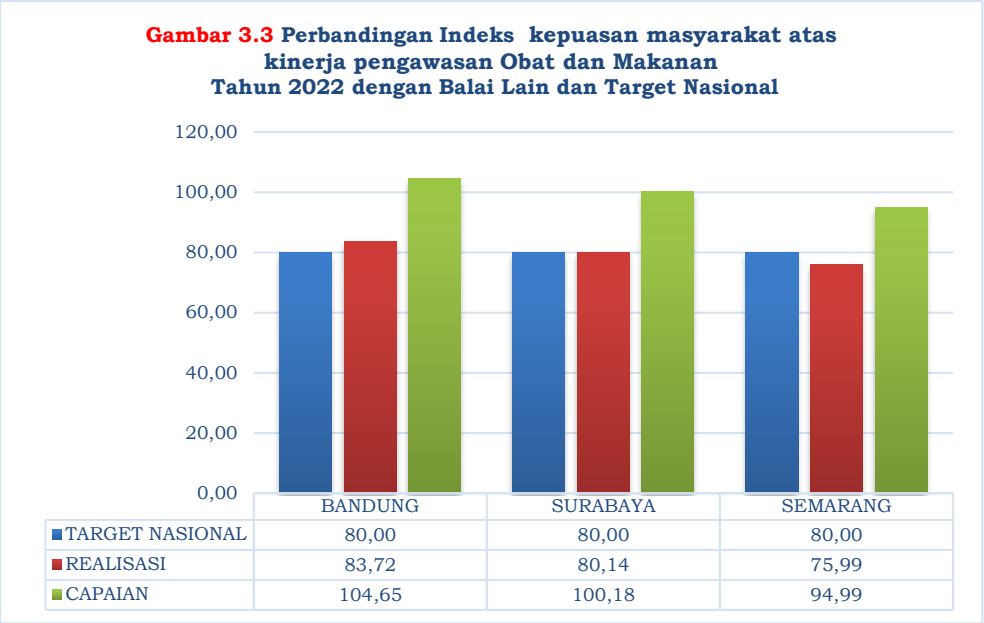

Gambar 3.35 Perbandingan Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Balai Lain dan Target Nasional

Jika dibandingkan realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2023 dengan target nasional (80.00), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Surabaya (100,18%), Balai Besar POM di Bandung (104,65%), dan Balai Besar POM di Semarang (94,99%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Keberhasilan atas pencapaian kinerja disebabkan antara lain:

- Peningkatan penggunaan media sosial dan website dalam publikasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Bandung.

Gambar 3.36 Foto Publikasi Kegiatan Perkuatan Koordinasi dengan Lintas Sektor

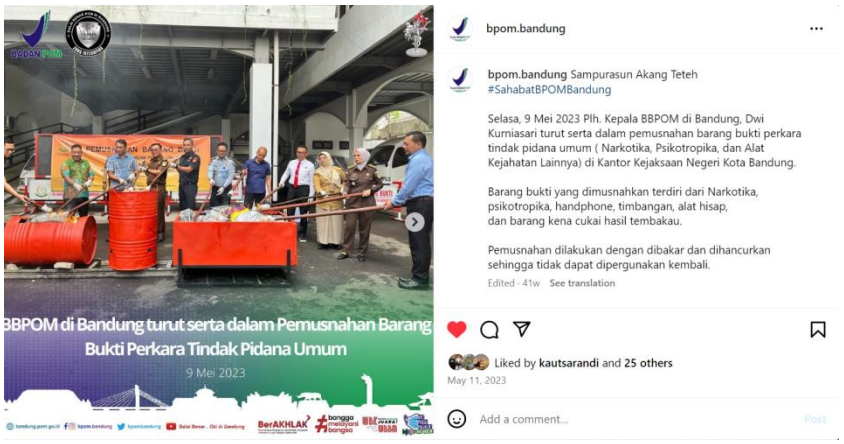

Gambar 3.37 Publikasi Kegiatan BBPOM Bandung dalam Pemusnahan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum

Gambar 3.38 Publikasi Kegiatan BBPOM Bandung dalam Pengawasan Pangan Takjil di Bulan Ramadan

- Peningkatan kompetensi petugas yang dapat membuat materi publikasi kegiatan pengawasan lebih menarik untuk dibaca dan mudah dipahami oleh msyarakat.

Gambar 3.39 Publikasi Kegiatan BBPOM Bandung dalam Pengawasan yang dikemas menarik

- Keberhasilan program kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh BBPOM Bandung.
- Peningkatan pengguna media sosial dan media online yang mengikuti akun media sosial BBPOM Bandung
- Peningkatan engagement medsos Instagram.

TABEL 3.45

"ENGANGEMENTS MEDIA SOSIAL TAHUN 2023"

No	Bulan	Engagements	Engagement Rate
1.	Januari	2058	0,29%
2.	Februari	6318	0,90%
3.	Maret	1.791	0,25%

No	Bulan	Engagements	Engagement Rate
4.	April	846	11,79%
5.	Mei	660	0,09%
6.	Juni	668	0,09%
7.	Juli	934	0,13%
8.	Agusutus	774	0,10%
9.	September	726	0,09%
10.	Oktober	725	0,09%
11.	November	1556	0,20%
12.	Desember	855	0,11%

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM Nomor B-RK.02.2.14.12.23.970 tanggal 28 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha, Indeks Kesadaran Masyarakat, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha, dan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023, antara lain:

- Meningkatkan kegiatan *public relation* dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM melalui berbagai media.
- Meningkatkan kegiatan yang terkait dengan pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media promos.
- Meningkatkan enggagement dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja.

- Meningkatkan kompetensi petugas dalam membuat informasi publik Obat dan Makanan
- Meningkatkan penggunaan media sosial dan subsite dalam mempublikasikan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM Bandung.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

TABEL 3.46
ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA
"INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN"
TAHUN 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	80.22	77.61	96.75	34,880,000	34,880,000	100.00	0.97	-0.03	75 %

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja indikator tersebut sebesar -0.03 (75.00%) dengan kriteria kurang efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih besar dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Karenanya Balai Besar POM di Bandung perlu melakukan upaya perbaikan sesuai rekomendasi yang telah disusun sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan capaian kinerjanya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sebagai berikut:

- Peningkatan upaya pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh BBPOM Bandung
- Peningkatan upaya penindakan pelanggaran terkait Obat dan Makanan pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh BBPOM Bandung
- Peningkatan pemberian informasi Obat dan Makanan yang dilakukan melalui media sosial, website.
- Hasil evaluasi risiko tahun 2023, dapat diketahui bahwa risiko yang diidentifikasi, setelah dilakukan pengendalian, memiliki level risiko residual 7. Perlu dilakukan penilaian ulang terhadap efektifitas pengendalian yang dilakukan, dan menambah bentuk pengendalian yang lain untuk memastikan bahwa risiko telah dikendalikan, melakukan mitigasi Risiko, dan melakukan pemutakhir daftar risiko secara berkala, dengan melakukan identifikasi risiko lain.

TABEL 3.47
IDENTIFIKASI RISIKO
KEGIATAN LAYANAN PEMBERIAN INFORMASI

No.	Kegiatan/ Proses Bisnis	Sumber Risiko	Issue ISO 9001:2015		Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Aktivitas Pengendalian saat ini		Level Risiko Residu
			Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko		Aktivitas Pengendalian	Simpulan Efektifitas Pengendalian	
1	Layanan Pemberian Informasi dan pengaduan.	Eksternal	Masyarakat tidak mendapatkan layanan informasi secara langsung	Kondisi force majour yang tidak memungkinkan dilakukan layanan secara tatap muka secara	Kepercayaan masyarakat kepada BBPOM Bandung berkurang karena masyarakat merasa tidak mendapatkan akses langsung	1. Sosialisasi perubahan layanan melalui media sosial 2. Pemberian layanan informasi dialihkan menjadi melalui wa Kabayan, SI	Tidak Efektif	7

				langsung misalnya kondisi pandemi Covid 19 yang terjadi sejak	kepada BBPOM di Bandung.	Iteung (layanan telekonsultasi), email, telepon, media sosial		

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

TABEL 3.48
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
"INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN"

Rekomendasi		**Tindaklanjut**			**Kondisi Sebelum rencana Aksi**	**Kondisi Setelah Rencana Aksi**
		Selesai	**Belum**			
			Rencana Aksi	**Timeline**		
a	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan BPOM melalui kegiatan public relation dan publikasi liputan (media massa) berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan	Telah diselenggarakannya berbagai kegiatan publikasi dan KIE sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui berbagai media.	-	-	Indeks kepuasan masayakat terhadap kinerja BPOM 2022 yang belum memenuhi target	Peningkatan Indeks kepuasan masyakat terhadap kinerja BPOM Tahun 2023

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	masyarakat, seperti razia obat dan makanan yang kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar dan produk illegal. Pesan tema utama yang disampaikan adalah BPOM melindungi masyarakat	Telah diselenggarakan kegiatan Penindakan dan penertiban tehadap produk Obat dan Makanan yang TMS.				

J. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

- Sebagai salah satu dasar penyesuaian target 2024
- Sebagai dasar dalam menentukan desain berita melalui media sosial dan website
- KAHARTOS (Kamus Hasil Informasi Terkait Medsos) merupakan pemberian informasi terkait pengawasan BBPOM Bandung melalui media sosial

3. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM

Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Pada tahap interprestasi, untuk memudahkan penafsiran dan mengacu pada pengelompokan kinerja unit pelayanan berdasarkan PemanPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, indeks yang diperoleh dikelompokan sebagai berikut:

TABEL 3.49
NILAI KONVERSI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM

NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan Surat Inspektorat Utama Badan POM Nomor B-OT.03.04.2.22.11.23.893 Tanggal 24 November 2023 Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPOM Tahun 2023, diperolah Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Balai Besar POM di Bandung sebesar 92,26 dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 3.50
HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP BBPOM DI BANDUNG
TAHUN 2023

No	Aspek	Nilai
U1	Persyaratan	89,98
U2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	91,08
U3	Waktu Penyelesaian	91,82
U4	Biaya/Tarif	91,43
U5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	91,43
U6	Kompetensi Pelaksana	93,94
U7	Perilaku Pelaksana	95,86
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	93,59
U9	Sarana dan Prasarana	91,20
INDEKS		92,26

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

TABEL 3.51
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDUNG"
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA EFEKTIVITAS	
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung	91	92.26	101.38%	SANGAT BAIK	

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 91, sedangkan realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung sebesar 92.26. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar

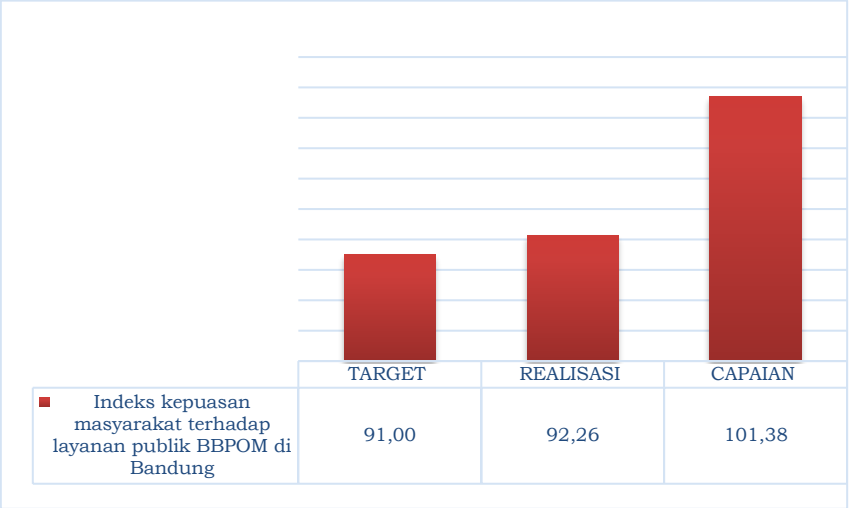

Gambar 3.40 Perbandingan target dengan realisasi kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung Tahun 2023

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 202O, 2021, DAN 2022

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, dan 2022. Realisasi tahun 2023 meningkat sebesar 7,00% dibandingkan tahun 2020, menurun sebesar 1,00% dibandingkan dengan tahun 2021, meningkat sebesar 0,02% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan capaian ini disebabkan adanya berbagai upaya pemenuhan terhadap standar pelayanan publik Badan POM. Perilaku pelaksana dan kompetensi pelaksana merupakan unsur yang berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung

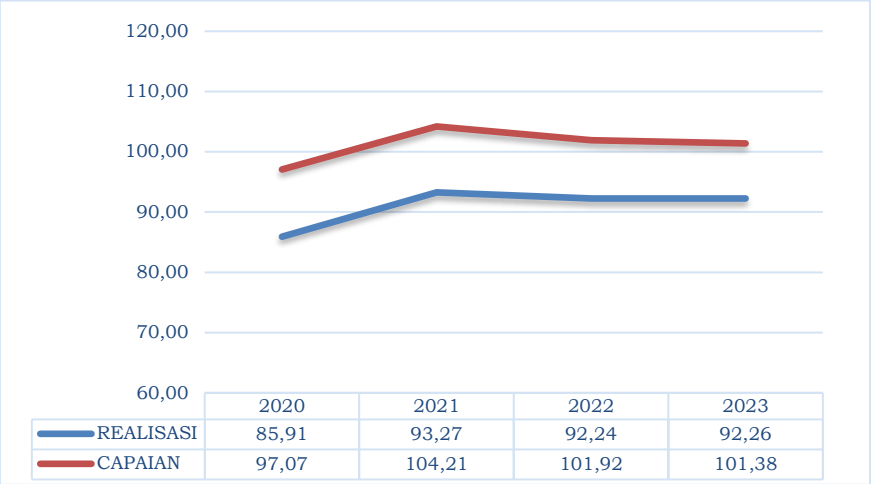

Gambar 3.41 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung Tahun 2020 sd 2022

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

TABEL 3.52
PERBANDINGAN REALISASI
"INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDUNG" TAHUN 2023
DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung	92.00	92.24	100.26%	TERCAPAI	▲

Jika dibandingkan realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2023 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 100.26% dengan kriteria **tercapai**. Meskipun demikian perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan

rekomendasi yang telah disusun untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja. Selain itu, perlu dilakukan reviu terhadap Renstra Tahun 2020-2024.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

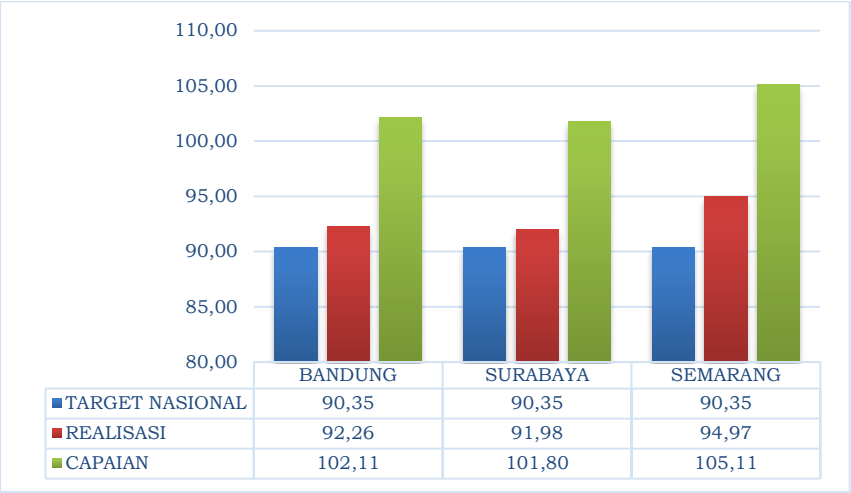

	BANDUNG	SURABAYA	SEMARANG
TARGET NASIONAL	90,35	90,35	90,35
REALISASI	92,26	91,98	94,97
CAPAIAN	102,11	101,80	105,11

Gambar 3.42 Perbandingan Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung Tahun 2023 dengan Balai Lain dan Target Nasional

Jika dibandingkan realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2023 dengan target nasional (90,35), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Semarang (105.11%), Balai Besar POM di Bandung (102.11%), dan Balai Besar POM di Surabaya (101,80%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Keberhasilan atas pencapaian kinerja disebabkan antara lain:

- Seluruh kegiatan pelayanan publik BBPOM di Bandung mengacu pada standar pelayanan publik yang ditetapkan.

- Peningkatan motivasi petugas layanan publik yang konsisten dilaksanakan dalam bentuk briefing sebelum mulai layanan.
- Peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik.
- Keterlibatan Pelayanan Publik BBPOM Bandung di MPP Kab/Kota di Prov Jawa Barat
- Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang sudah memadai

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

- Meningkatkan pemahaman pengguna layanan publik terhadap persyaratan pelayanan.
- Meningkatkan sosialisasi standar pelayanan publik BBPOM Bandung melalui media cetak, media elektronik dan media sosial.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

TABEL 3.53
TINGKAT EFISIENSI
"INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDUNG"
TAHUN 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90.50	92.24	101.92	33,817,500	33,817,500	100.00	1.02	0.02	100 %

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja indikator tersebut sebesar 0.02 (100.00%) dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian

kinerja. Meskipun demikian Balai Besar POM di Bandung tetap perlu melakukan upaya perbaikan sesuai rekomendasi yang telah disusun sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan capaian kinerjanya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sebagai berikut:

- Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk mendapatkan masukan dari Masyarakat dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik, yang diselenggarakan setiap tahun.

Gambar 3.43 Forum Konsultasi Publik (FKP) pada tanggal 31 Juli 2023

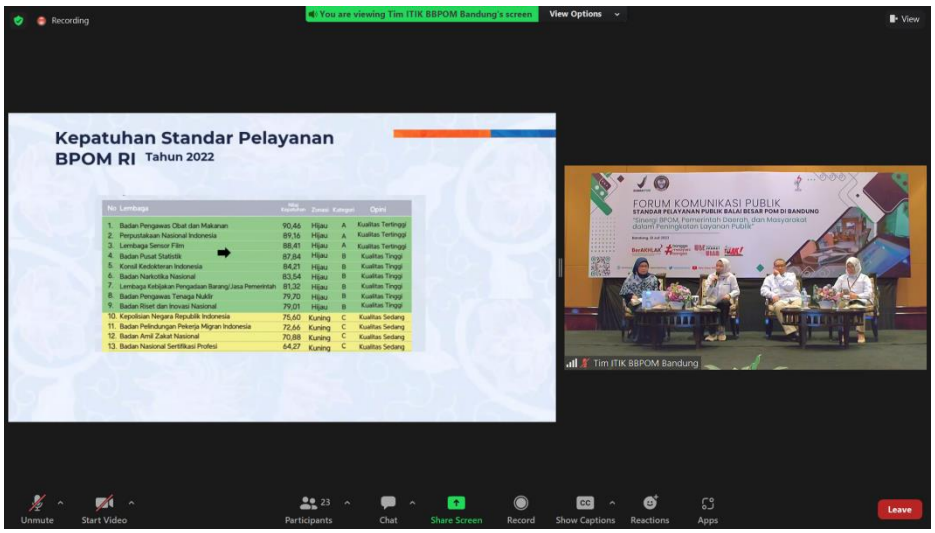

Gambar 3.44 Forum Konsultasi Publik (FKP) dilaksanakan secara *hybrid*

- Inovasi pelayanan publik BBPOM Bandung, berupa :
  - "KABAYAN" yaitu penggunaan satu nomor whatsapp dalam pelayanan publik secara daring.
  - "Si ITEUNG", yaitu pelayanan publik berupa konsultasi secara daring menggunakan platform google.meet. Si ITEUNG merupakan salah satu upaya mengatasi kendala waktu dan jarak bagi masyarakat yang akan melakukan konsultasi.

Gambar 3.45 Pelayanan publik berupa konsultasi secara daring menggunakan platform google.meet (Si ITEUNG)

- Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik BBPOM di Bandung
- Briefing YanBlik, merupakan kegiatan peningkatan motivasi petugas layanan publik yang dilaksanakan setiap hari sebelum layanan di buka.
- Pelayanan publik BBPOM Bandung berkontribusi pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi

Gambar 3.46 Kegiatan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP)

Hasil evaluasi risiko tahun 2023, dapat diketahui bahwa risiko yang diidentifikasi, setelah dilakukan pengendalian, memiliki level risiko residual 11. Perlu dilakukan penilaian ulang terhadap efektifitas pengendalian yang dilakukan, dan menambah bentuk pengendalian yang lain untuk memastikan bahwa risiko telah dikendalikan, melakukan mitigasi Risiko, dan melakukan pemutakhir daftar risiko secara berkala, dengan melakukan identifikasi risiko lain.

TABEL 3.54
IDENTIFIKASI RISIKO
KEGIATAN LAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DAN PENGADUAN.

No.	Kegiatan/ Proses Bisnis	Sumber Risiko	Issue ISO 9001:2015		Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Aktivitas Pengendalian saat ini		Level Risiko Residu
			Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko		Aktivitas Pengendalian	Simpulan Efektifitas Pengendalian	
1	Layanan Pemberian Informasi dan pengaduan.	Eksternal	Belum dilakukan verifikasi atas layanan permintaan informasi	Petugas verifikator terlambat melakukan verfikasi	Data permintaan informasi dan pengaduan konsumen	Membuat jadwal verifikasi layanan informasi dan pengaduan	Efektif	11

			dan pengaduan pada aplikasi Simpel LPK.telah diintervensi.		tidak terverifikasi.	setiap minggu		

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

TABEL 3.55
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI TRIWULAN III
"INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM"

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi sebelum	Kondisi setelah
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
a	Menyusun Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	Telah disusun Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	-	-	Belum tersusun dengan baik tindaklanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Terdapat rencana aksi tindaklanjut tahun 2023
b	Melaksanakan seluruh Rencana Aksi Tindaklanjut	Pelaksanaan Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survei	-	-	Belum terlaksanan dengan baik	Terlaksanaanya rencana aksi tindak

	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023.	Kepuasan Masyarakat			Pelaksanaan Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	lanjut tahun 2023
c	Monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023.	Monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	-	-	Belum dilakukan dengan baik monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Terlaksanaanya monitoring dan evaluasi seluruh Tindaklanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

I. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

- “KABAYAN” yaitu penggunaan satu nomor whatsapp dalam pelayanan publik secara daring
- “Si ITEUNG”, yaitu pelayanan publik berupa konsultasi secara daring menggunakan platform google.meet
- Briefing YanBlik, merupakan kegiatan peningkatan motivasi petugas layanan publik yang dilaksanakan setiap hari sebelum layanan di buka
- Informasi mengenai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini menjadi salah satu dasar penyusunan Standar Pelayanan Publik BBPOM Bandung Tahun 2024.

SASARAN KEGIATAN

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 7 (tujuh) indikator yang seluruhnya Merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keenam indikator diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **103,82%** dengan kriteria **SANGAT BAIK**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.56.

TABEL 3.56

CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-4

TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TA 2023	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KRITERIA	
1. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	98,00 %	100 %	102,04%	SANGAT BAIK	
2. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00%	89.96%	115.33%	SANGAT BAIK	
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94,00%	99,45%	105,80%	SANGAT BAIK	
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%	66,26%	100,40%	SANGAT BAIK	

INDIKATOR	TARGET TA 2023	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KRITERIA	
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,00%	80,79%	103,57%	SANGAT BAIK	
6. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	4,40	4,14	94,09%	CUKUP	
7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79.0%	83.33%	105,49%	SANGAT BAIK	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**103,82%**	**SANGAT BAIK**	

1. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diukur dari nilai rata-rata persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT, persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) Tahun 2023.

TABEL 3.57

Capaian Kinerja Indikator

"Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan"

Tahun 2023

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	98,00 %	100 %	102,04 %	SANGAT BAIK	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023 sebesar 100%, dengan rincian persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100% (A); persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100% (B); persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain sebesar 100% (C); dan persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100% (D). Secara lengkap keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 3.17.

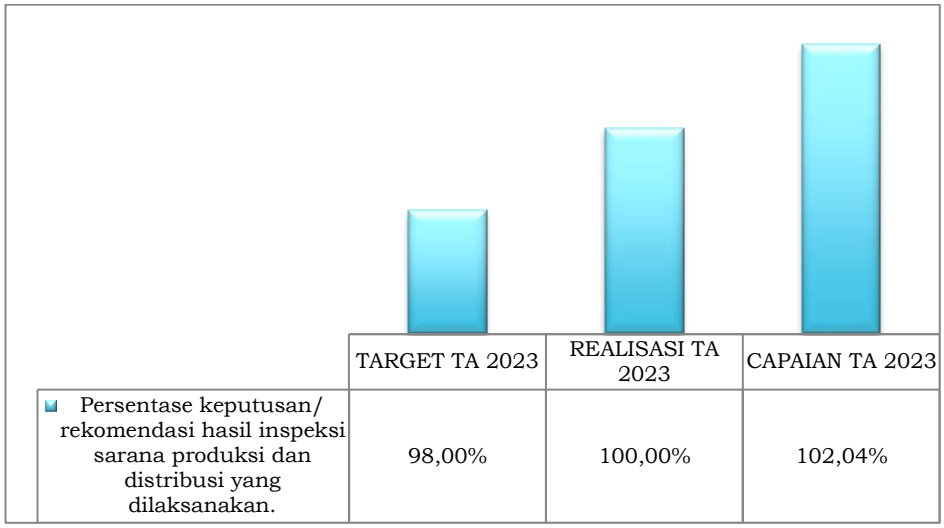

Gambar 3.47 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2023

TABEL 3.58

"PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN"

TAHUN 2023

Keputusan/ Rekomendasi	**Jumlah Surat Tindak Lanjut**	**Jumlah yang telah Ditindaklanjuti**	**% Realisasi**
A	1207	1207	100,00%
B	89	89	100,00%
C	99	99	100,00%
D	62	62	100,00%
Rata-Rata			100,00%

Target yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 98%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 102,04% dengan kriteria **SANGAT BAIK.**

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2020, TAHUN 2021, DAN TAHUN 2022

Apabila dibandingkan realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pusat/UPT lain Tahun 2023 terhadap realisasi tahun 2022, terjadi kenaikan. Persentase capaian tahun 2023 turun sebesar 1,31% dibandingkan dengan tahun 2022.

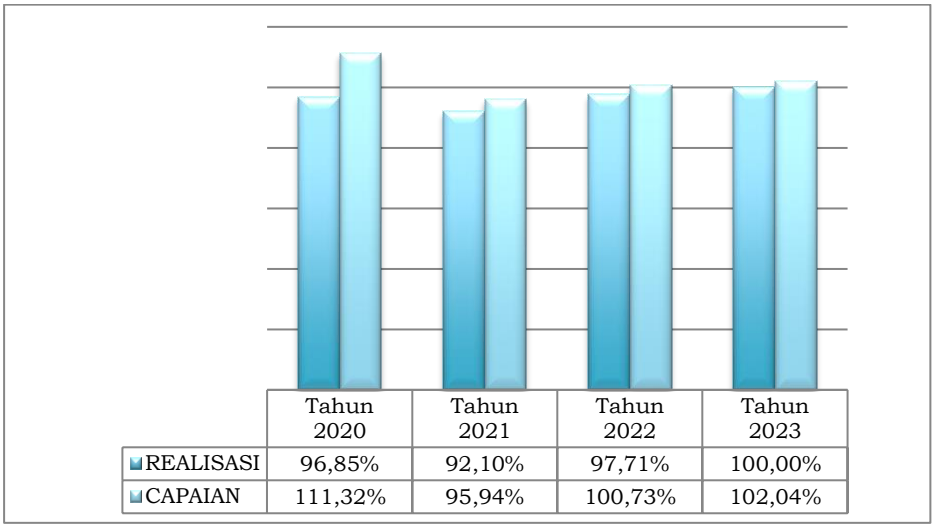

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
REALISASI	96,85%	92,10%	97,71%	100,00%
CAPAIAN	111,32%	95,94%	100,73%	102,04%

Gambar 3.48 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2023 dengan Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

C. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2020-2024

TABEL 3.59

Capaian Kinerja Indikator

"Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Diilaksanakan"

Tahun 2023

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KATEGORI	
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	99,00 %	100 %	101,01%	TERCAPAI	

Jika dibandingkan realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2023 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 101,01% dengan kriteria TERCAPAI. Walaupun capaian tahun 2023 sudah melebihi target Renstra Tahun 2020-2024, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan capaian yang telah diperoleh.

D. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS TERHADAP TARGET NASIONAL

Jika realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2023 dibandingkan dengan Balai lain yang setara, maka persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2023, Realisasi Balai Besar POM di Bandung

dan Balai Besar POM di Surabaya sebesar 100%, sedangkan Balai Besar POM di Semarang sebesar 97,3%.

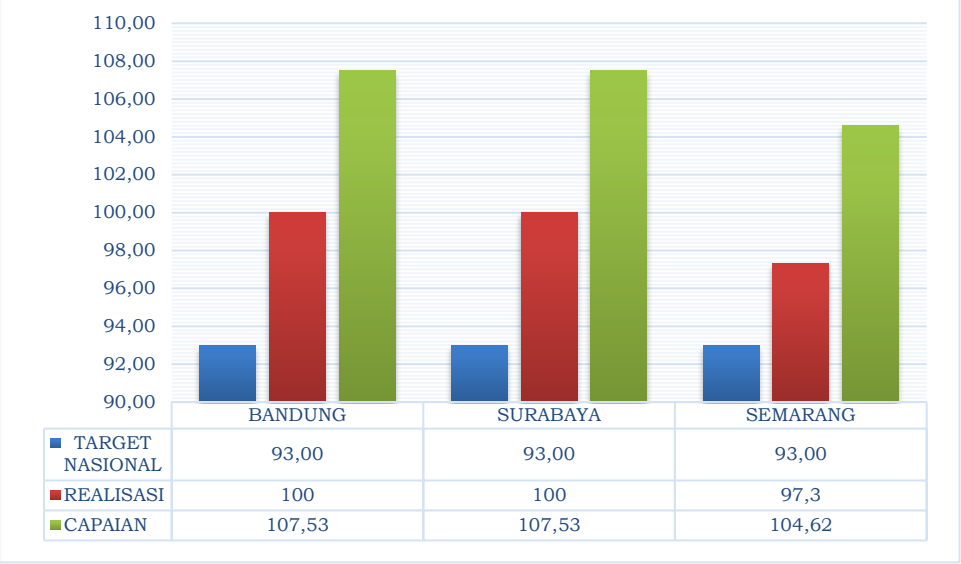

Gambar 3.49 Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2023 dengan Balai Lain dalam satu klister

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Keberhasilan atas peningkatan kinerja disebabkan antara lain:

- Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan sudah dilaksanakan secara efektif.
- Koordinasi internal dan eksternal lebih intens.
- Pengumpulan dan pengolahan data sudah dilakukan secara sistematis.
- Rekonsiliasi data oleh Petugas setiap awal bulan.

Rekomendasi yang akan digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya antara lain:

- Kegiatan koordinasi dengan pemangku kepentingan yang sudah terjalin terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan terus ditingkatkan sehingga dapat berjalan efisien dan efektif.
- Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan terus dilaksanakan lebih komprehensif.
- Koordinasi dan komunikasi dengan pusat atau UPT lain terus ditingkatkan, baik melalui komunikasi formal dan informal.

F. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja:

- Monitoring dan evaluasi terhadap surat tindak lanjut yang diterbitkan dilakukan secara terus menerus sehingga tindak lanjut yang dilaksanakan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan dan menjamin pelaksanaan tindak lanjut yang tepat.
- Pemberian sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada lintas sektor terkait pelaksanaan tindak lanjut dilaksanakan secara konsisten. Sosialisasi dan Bimbingan teknis yang telah dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain :

  a) Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, sebagai Narasumber.

  b) Sosialisasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek di Kota Bandung, sebagai Narasumber..

c) Narasumber dalam kegiatan Desk CAPA Hasil Pengawasan Apotek dan Toko Obat di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung dengan peserta penanggung jawab apotek dan toko obat.

d) Narasumber kegiatan Pelatihan Cara Distribusi Obat yang Baik yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Jawa Barat dan Gabungan Pengusaha Farmasi Kota Cirebon.

e) Narasumber Kegiatan Workshop Pengelolaan Psikotropika yang diselenggarakan oleh urus Cabang Ikatan Apoteker Kota Bandung, Pengurus Cabang Ikatan Dokter Indonesia Kota Bandung.

- Kerjasama dan koordinasi dengan sesama UPT BPOM dan Kedeputian BPOM serta lintas sektor terus ditingkatkan secara berkelanjutan baik secara formal maupun informal.

Gambar 3.50. Kerjasama dan Koordinasi dengan Kedeputian BPOM

G. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

TABEL 3.60

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

PERSENTASE KEPUTUSAN/ REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	CAPAIAN TE
		Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	102,04%	170.743.000	170.523.000	99,87%	1,02	0,02	**EFISIEN**

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.61

Matriks Tindaklanjut Rekomendasi

"Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan"

Tahun 2023

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
a	Kegiatan Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Sangkuriang) lebih ditingkatkan	Desk CAPA secara daring dan luring	-	-	Hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi belum ditindaklanjuti secara maksimal	Hasil inspeksi Sarana produksi dan distribusi sudah ditindaklanjuti secara maksimal
b	Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.	Monitoring tindak lanjut yang dilakukan petugas atas hasil pengawasan, dan permohonan tindaklanjut dari UPT lain/pusat serta lintas sektor telah dilaksanakan secara konsisten melalui system yang dibangun sehingga dapat memenuhi timeline yang ditetapkan.	-	-	Tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi belum ada monitoring sehingga ada hasil inspeksi yang belum ditindaklanjuti	Tindak lanjut hasil inspeksi sarana sudah termonitor, sehingga semua inspeksi dapat ditindaklanjuti sesuai timeline yang ditetapkan
c	Peningkatan Kompetensi Petugas	- Penyamaan persepsi pedoman	-	-	Petugas memiliki pemahaman	Petugas memiliki pemahaman

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
		tindak lanjut Pengawasan Obat - Pelatihan CDOB Dasar - FGD Regulasi Pengawasan ONPP - Pelatihan FI Dasar Untuk Inspektur			yang berbeda sehingga tindak lanjut nya bervariasi	yang sama terhadap pedoman tindak lanjut, sehingga hasil inspeksi dapat ditindaklanjuti
d	Sosialisasi, Bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait GDP	- Sosialisasi kepada PBF tentang peraturan CDOB aspek pengelolaan Psikotropika dan Obat-obat tertentu - Refreshment CDOB Pedoman Pengelolaan Obat di Sarana Pelayanan Kefarmasian yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Cirebon	-	-	Pelaku usaha belum memahami cara distribusi yang baik, sehingga tindak lanjut perbaikan hasil inspeksi masih belum memenuhi ketentuan	Pelaku usaha sudah memahami cara distribusi yang baik, sehingga tindak lanjut perbaikan hasil inspeksi dapat memenuhi ketentuan
e	Menyempurnakan aplikasi Digital Monitoring Hasil	Integrasi pengawasan sarana dengan aplikasi manajemen kinerja	-	-	Monev hasil pemeriksaan belum efektif	Monev hasil pemeriksaan sudah efektif

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Pemeriksaan (DMP) untuk monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan	Membangun database melalui pengisian google form data kunjungan dan pengisian bersama pada gdrive rekap data kunjungan. Selain itu sedang dikembangkan aplikasi SATU POM JABAR. Sampai dengan akhir tahun 2023, aplikasi ini dalam proses pengembangan. Diharapkan dengan aplikasi ini, semua hasil inspeksi akan terlihat progres tindak lanjut dari pelaku usaha atau lintas sektor, sehingga proses pembinaan dan progresnya lebih mudah dimonitor dan dievaluasi. -			sehingga perbaikan pelaku usaha dalam implementasi GDP tidak efektif	sehingga perbaikan pelaku usaha dalam implementasi GDP lebih efektif

I. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal. Dengan informasi kinerja tersebut, fungsi Pemeriksaan telah membuat aplikasi dan kegiatan, sebagai berikut :

- Membuat dan menyempurnakan aplikasi Digital Monitoring Hasil Pemeriksaan (DMP) untuk melakukan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan. Aplikasi DMP ini di tahun 2023 dikembangkan menjadi aplikasi yang terintegrasi dengan SATU POM JABAR. Sampai dengan akhir tahun 2023, aplikasi ini dalam proses pengembangan. Diharapkan dengan aplikasi ini, semua hasil inspeksi akan terlihat progres tindak lanjut dari pelaku usaha atau lintas sektor, sehingga proses pembinaan dan progresnya lebih mudah dimonitor dan dievaluasi.
- Kegiatan SANGKURIANG (Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) berupa kegiatan pertemuan dan koordinasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha membahas terkait tindak lanjut hasil pengawasan. Dari kegiatan ini akan meningkatkan komitmen lintas sektor dan pelaku usaha dalam menindaklajuti hasil pengawasan.

2. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diukur dari rata-rata persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Tahun 2023.

TABEL 3.62

Capaian Kinerja Indikator

"Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan"

Tahun 2023

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00%	89,96%	115,33%	SANGAT BAIK	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang dilaksanakan Tahun 2023 sebesar **89,96%**, dengan rincian persentase keputusan hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebesar 79,92% (**A**); persentase keputusan hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor sebesar 100% (**B**). Secara lengkap perincian keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor dapat dilihat pada tabel 3.63.

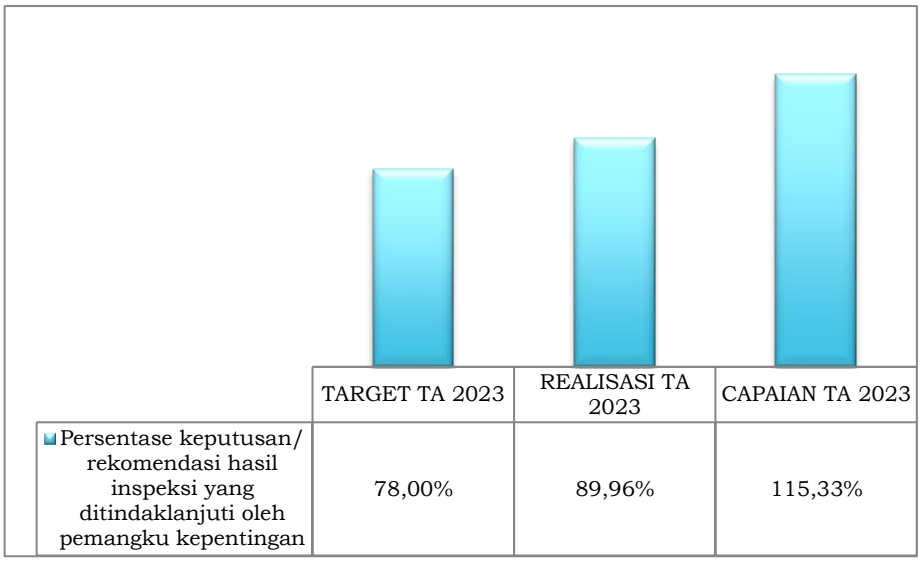

Gambar 3.51 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2023

TABEL 3.63

Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Keputusan/ Rekomendasi	**Jumlah Surat Tindak Lanjut**	**Jumlah yang telah Ditindaklanjuti**	**% Realisasi**
A	816	1021	79,92%
B	23	23	100,00%
Rata-Rata			**89,96%**

Target yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar **78%**. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar **115,33%** dengan kriteria **SANGAT BAIK.**

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2020, TAHUN 2021, DAN TAHUN 2022

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022. Persentase capaian tahun 2023 naik sebesar 1,85% dibandingkan dengan tahun 2022.

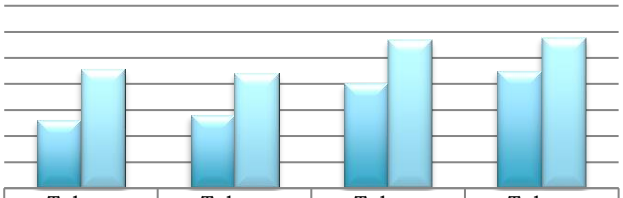

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
REALISASI	51,89%	56,14%	80,40%	89,96%
CAPAIAN	91,20%	87,72%	113,24%	115,33%

Gambar 3.52 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2023 dengan Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

C. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2020-2024

TABEL 3.64

Capaian Kinerja Indikator

"Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan"

Tahun 2023

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85,00%	89,96%	105,84%	SANGAT BAIK

Jika dibandingkan realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2023 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 105,84% dengan kriteria **SANGAT BAIK**.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA

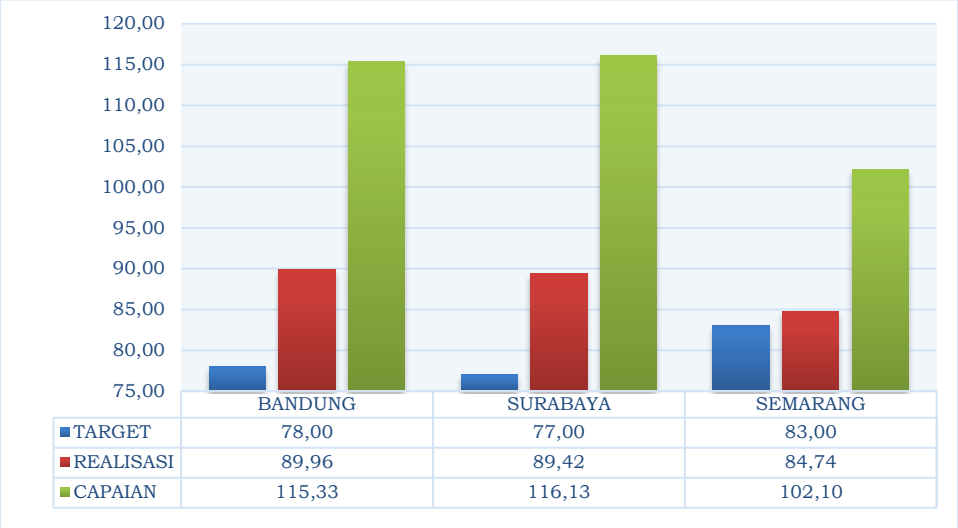

	BANDUNG	SURABAYA	SEMARANG
TARGET	78,00	77,00	83,00
REALISASI	89,96	89,42	84,74
CAPAIAN	115,33	116,13	102,10

Gambar 3.53 Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2023 dengan Balai Lain dan Target Nasional

Jika realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2023 dibandingkan dengan Balai lain yang setara, maka persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2023, Balai Besar POM di Bandung memperoleh capaian tertinggi yaitu 89,96%, diikuti Balai Besar POM di Surabaya 89,42% dan Balai Besar POM di Semarang 84,74%.

Namun apabila dibandingkan dengan target masing-masing Balai, capaian tertinggi adalah Balai Besar POM di Surabaya (116,13%), Balai Besar POM di Bandung (115,33%), Balai Besar POM di Semarang (102,10%)

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA UPAYA PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Keberhasilan dan peningkatan capaian kinerja pada triwulan II tahun 2023 disebabkan antara lain:

- Adanya inovasi **SANGKURIANG**, yaitu : **Sinergitas Penguatan Kerjasama Untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**. Suatu inovasi yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandung dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menyelesaikan ketidaksesuaian hasil temuan pemeriksaan, baik sarana produksi maupun distribusi

- Respon dari *stakeholder* terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan semakin meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan karena pemahaman pelaku usaha dan *stakeholder* terkait kebutuhan pemenuhan CAPA sebagai salah satu *tools* yang mereka perlukan untuk pengawalan mutu produk yang didistribusikan/diproduksi di sarana. Selain itu status CAPA-closed dari evaluator BBPOM merupakan salah satu syarat perpanjangan registrasi nomor izin MD/sertifikat CDOB dan pengajuan Ijin Penerapan CPPOB

- Adanya layanan jemput bola terhadap pemenuhan status CAPA-Closed oleh BBPOM Bandung dengan diadakannya kegiatan Desk CAPA Hasil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang diselenggarakan pada bulan September 2023

- Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan semakin efektif. Peningkatan monitoring ini dilakukan melalui:

  a) Rekonsiliasi data oleh petugas setiap akhir bulan.

b) Adanya kontribusi aktif dari petugas BBPOM Bandung dengan mengirimkan surat permohonan penyampaian CAPA kepada pelaku usaha yang belum mengirimkan CAPA.

c) Membuat dan menyempurnakan aplikasi Digital Monitoring Hasil Pemeriksaan (DMP) untuk melakukan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan. Aplikasi DMP ini di tahun 2023 dikembangkan menjadi aplikasi yang terintegrasi dengan SATU POM JABAR. Sampai dengan akhir tahun 2023, aplikasi ini dalam proses pengembangan. Diharapkan dengan aplikasi ini, semua hasil inspeksi akan terlihat progres tindak lanjut dari pelaku usaha atau lintas sektor, sehingga proses pembinaan dan progresnya lebih mudah dimonitor dan dievaluasi.

- Peningkatan respon dari lintas sektor terhadap keputusan hasil inspeksi menjadi lebih efektif. Hal ini dipengaruhi karena keputusan hasil inspeksi untuk ditindaklanjuti oleh lintas sektor disampaikan melalui surat elektronik (*email*) dan ditujukan langsung kepada personil penanggung jawab / pengelola program di Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat

Rekomendasi yang akan digunakan untuk mempertahankan capaian kinerja antara lain:

- Pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha melalui kegiatan Desk CAPA terus dilaksanakan secara periodik, dengan tema CAPA tematik.

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dalam pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.

- Melakukan komunikasi pada saat pemeriksaan sarana produksi dan distribusi terkait penyampaian hasil tindak lanjut dari Balai Besar POM di Bandung

- Monitoring dan evaluasi internal terkait data CAPA yang disampaikan oleh pelaku usaha terus menerus dilaksanakan, sehingga dapat mengawal CAPA tersebut sampai CLOSED

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

TABEL 3.65

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

PERSENTASE KEPUTUSAN/ REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN

TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	CAPAIAN TE
		Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	115,33%	319.856.000	318.921.150	99,71	1,16	0,16	**EFISIEN**

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang telah dilakukan tahun 2023 yaitu :

- Diadakannya kegiatan Desk CAPA Hasil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan pada bulan September 2023 sebagai bentuk layanan jemput bola BBPOM Bandung terhadap pemenuhan status CAPA-Closed.

Gambar 3.54. Desk CAPA

- Pemberian sosialisasi kepada lintas sektor terkait pelaksanaan tindak lanjut dilaksanakan secara konsisten. Sosialisasi dan Bimbingan teknis yang telah dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain :

  a) Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

  b) Narasumber kegiatan Sosialisasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek di Kota Bandung.

  c) Narasumber dalam kegiatan Desk CAPA Hasil Pengawasan Apotek dan Toko Obat di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung dengan peserta penanggung jawab apotek dan toko obat.

  d) Narasumber kegiatan Pelatihan Cara Distribusi Obat yang Baik yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Jawa Barat dan Gabungan Pengusaha Farmasi Kota Cirebon.

e) Narasumber Kegiatan Workshop Pengelolaan Psikotropika yang diselenggarakan oleh urus Cabang Ikatan Apoteker Kota Bandung, Pengurus Cabang Ikatan Dokter Indonesia Kota Bandung

- Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektor dilaksanakan secara berkelanjutan baik secara formal maupun informal.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.66

MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI

"PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN"

TAHUN 2023

Rekomendasi		**Tindaklanjut**			**Kondisi Sebelum rencana Aksi**	**Kondisi Setelah Rencana Aksi**
		Selesai	**Belum**			
			Rencana Aksi	**Timeline**		
a	Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.	Monitoring dan evaluasi CAPA hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan dalam bentuk kegiatan Desk CAPA	-	-	Monitoring pelaksanaan CAPA tidak efektif sehingga masih ada CAPA yang belum selesai	Monitoring pelaksanaan CAPA sudah lebih efektif sehingga dapat mengetahui masalah dalam CAPA yang belum selesai, sehingga dapat diintervensi dan CAPA nya

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
						selesai
b	Melakukan pertemuan intensif dengan pemangku kepentingan melalui Kegiatan Penguatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Bersama Pimpinan Daerah dan Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan.	Pertemuan dengan lintas sektor terkait penyampaian dan evaluasi hasil pengawasan Obat dan Makanan lebih efektif	-	-	Pemahaman dan informasi hasil pengawasan Obat dan Makanan dari lintas sektor masih kurang sehingga sinergitasnya rendah	Pemahaman dan informasi hasil pengawasan Obat dan Makanan sudah baik, sehingga menciptakan komitmen dan sinergitas lintas sektor
c	Meningkatkan komunikasi pada saat pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, serta pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan form Corrective Action Preventive Action	• Melakukan pembinaan saat pemeriksaan dan verifikasi atas CAPA yang disampaikan • Informasi email kantor dicantumkan dalam surat TL • Pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha sarana distribusi baik secara daring ataupun luring	-	-	Pelaku usaha tidak dapat memberikan perbaikan / Tindak lanjut dari hasil inspeksi, karena tidak memahami ketentuan dan cara perbaikannya	Pelaku usaha memahami dan mengetahui cara pembuatan CAPA, sehingga dapat melakukan Tindak Lanjut dari hasil inspeksi

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	(CAPA) dan kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.	terkait kewajiban untuk compliance terhadap peraturan dan bagaimana menindaklanjuti temuan hasil pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan				

I. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal. Dengan informasi kinerja tersebut, fungsi Pemeriksaan telah membuat aplikasi dan kegiatan, sebagai berikut :

- Membuat dan menyempurnakan aplikasi Digital Monitoring Hasil Pemeriksaan (DMP) untuk melakukan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan. Aplikasi DMP ini di tahun 2023 dikembangkan menjadi aplikasi yang terintegrasi dengan SATU POM JABAR. Sampai dengan akhir tahun 2023, aplikasi ini dalam proses pengembangan. Diharapkan dengan aplikasi ini, semua hasil inspeksi akan terlihat progres tindak lanjut dari pelaku usaha atau lintas sektor, sehingga proses pembinaan dan progresnya lebih mudah dimonitor dan dievaluasi.

- Kegiatan SANGKURIANG (Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) berupa kegiatan pertemuan dan koordinasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha membahas terkait tindak lanjut hasil pengawasan. Dari kegiatan ini akan meningkatkan komitmen lintas sektor dan pelaku usaha dalam menindaklajuti hasil pengawasan.

3. PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diukur dengan membandingkan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n dengan jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: (1). Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; (2). Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; (3). Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; (4). Surat rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem esertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; (5). Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang; (6). Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil; (7). Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru dan sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; (8). Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; (9). Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka

pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; (10) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik; (11). Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; dan (12) Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga.

TABEL 3.67
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI
YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU"
TAHUN 2023

INDIKATOR	**TARGET TA 2023**	**REALISASI TA 2023**	**CAPAIAN TA 2023**	**KRITERIA**	
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94,00%	99.45%	105,80%	SANGAT BAIK	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 94%. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2023 sebesar 99,45%. Dengan rincian jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) sebanyak 2.554 keputusan dan jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) sebanyak 2.540 permohonan. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **105,80 %** dengan kriteria **Sangat Baik**.

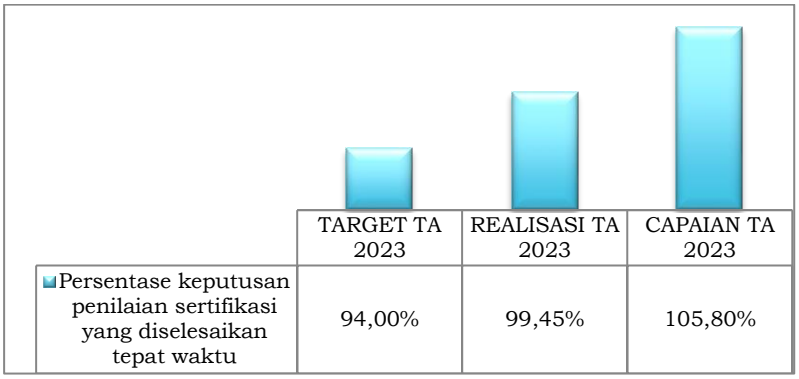

Gambar 3.55 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Tahun 2023

TABEL 3.68

Hasil Penilaian Sertifikasi

Tahun 2023

No.	Rekomendasi	Satuan	Jumlah Permohonan	Jumlah sertifikat yang diterbitkan tepat waktu	% sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
1	Rekomendasi Pemenuhan Aspek CPOTB Bertahap	Rekomendasi	32	31	96,88
2	Rekomendasi Pemenuhan Aspek CPKB	Rekomendasi	24	24	100
3	Rekomendasi Penerbitan IP CPPOB Produsen Skala Usaha Besar dan Menengah	Rekomendasi	199	197	98.99
4	Penerbitan IP CPPOB Produsen Skala Usaha Mikro dan Kecil	Sertifikat	218	218	100

No.	Rekomendasi	Satuan	Jumlah Permohonan	Jumlah sertifikat yang diterbitkan tepat waktu	% sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
5	Hasil Pemeriksaan Verifikasi Penerbitan IP CPPOB Skala Usaha Mikro dan Kecil	Laporan	99	99	100
6	Hasil Pemeriksaan Audit Surveilan SMKPO	Laporan	13	13	100
7	Hasil Pemeriksaan PBF dan Evaluasi CAPA Sertifikasi CDOB	Sertifikat	73	71	97,26
8	Rekomendasi Pemohon Notifikasi Kosmetika	Rekomendasi	52	50	96,15
9	Penerbitan SKI/ SKE Produk Pangan Olahan	Surat Keterangan	783	776	99,11
10	Sertifikat Hasil Pengujian Pihak Ketiga	Sertifikat	1.061	1.061	100
TOTAL			2.554	2.540	99,45

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2020, TAHUN 2021, DAN TAHUN 2022

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, sertifikat yang masuk sebanyak 1916 permohonan, sertifikat yang diterbitkan tepat waktu 1916 sertifikat (100%). Dan pada tahun 2021, sertifikat yang diterbitkan tepat waktu sebanyak 2066 sertifikat, sedangkan permohonan yang masuk sebanyak 2024 permohonan (117,25%), sedangkan tahun 2023 permohonan yang masuk sebanyak 2.554 permohonan, sertifikat yang diterbitkan tepat waktu 2.540 sertifikat (99.45%). Turunnya capaian kinerja dikarenakan meningkatnya permohonan yang masuk tidak diikuti dengan penambahan personil yang ada dan adanya penurunan dari jumlah permohonan yang masuk dari permohonan SKE, (tahun 2021 : 1537, tahun 2022 : 858; tahun 2023 : 783). Selain itu, mulai tahun 2022 ada perubahan proses sertifikasi pangan olahan melihat dari risiko berdasarkan skala usaha. Usaha mikro kecil hanya berdasarkan evaluasi dokumen, sedangkan usaha menengah dan besar, setelah evaluasi dokumen dilanjutkan dengan proses pemeriksaan sarana. Hal ini menyebabkan adanya tambahan waktu untuk evaluasi dokumen yang diajukan. Namun demikian, timeline penerbitan sertifikat sebagian besar masih sesuai dengan standar yang ditetapkan.

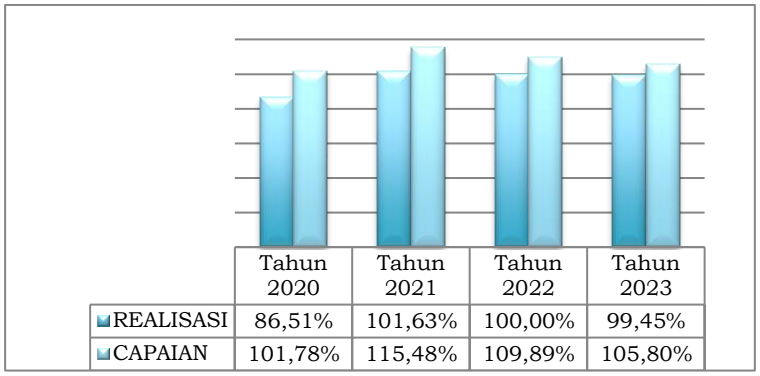

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
REALISASI	86,51%	101,63%	100,00%	99,45%
CAPAIAN	101,78%	115,48%	109,89%	105,80%

Gambar 3.56 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023 dengan Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2020-2024

TABEL 3.69

Capaian Kinerja Indikator

"Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi

Yang Diselesaikan Tepat Waktu"

Tahun 2023

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KATEGORI	
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94,00%	99.45%	105,80%	TERCAPAI	▲

Target tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 94,00%. Jika realisasi kinerja pada Tahun 2023 sebesar 99,45% dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Tahun 2023 sebesar 105,80% dengan kriteria TERCAPAI.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS

Jika dibandingkan realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 dengan Balai Besar Lainnya yang sejenis, maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Bandung (105,80%), Balai Besar POM di Semarang (100.37%), dan Balai Besar POM di Surabaya (96.51%).

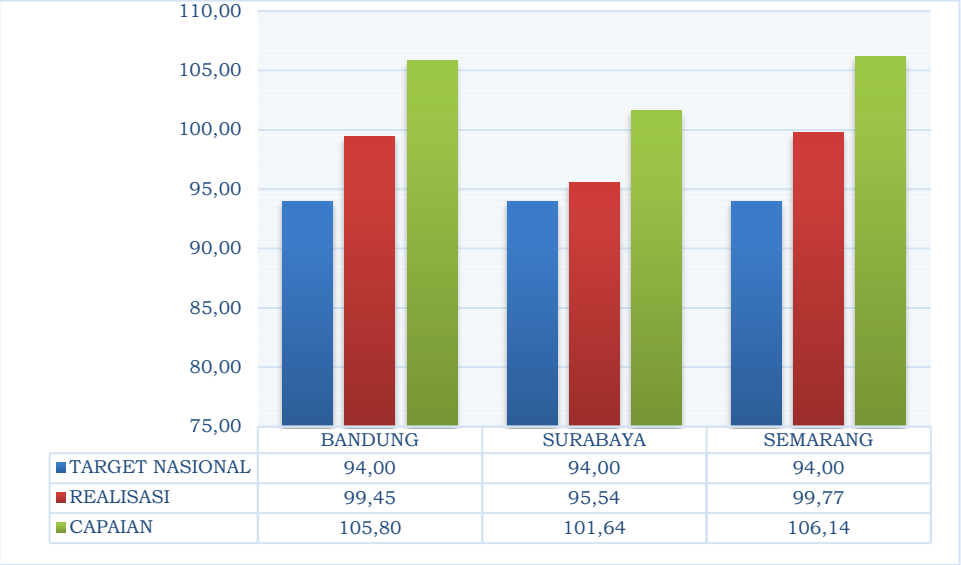

Gambar 3.57 Perbandingan Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023 dengan Balai Lain dan Target Nasional

E. ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Capaian kinerja pada Tahun 2023 masih diatas dari target yang ditetapkan namun terdapat penurunan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut dibandingkan tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan antara lain :

- Meningkatnya jumlah permohonan pada tahun 2023 seiring dengan kemudahan perizinan dan telah habisnya masa peralihan untuk izin penerapan Cara Penerapan Pangan Olahan yang Baik pada tahun ini.
- Peningkatan jumlah permohonan tidak diimbangi dengan penambahan jumlah personil sehingga terdapat beberapa permohonan sertifikasi yang melebihi timeline yang ditetapkan.
- Terbatasnya personil evaluator SKE dimana pelaksanaan evaluasi sering dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan sarana dilapangan.

Rekomendasi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis yang dipersyaratkan melalui pelatihan/*workshop*/bimtek/ diseminasi/webinar mengenai CPPOB dan CPKB sehingga seluruh personil Tim Kerja Sertifikasi terpenuhi seluruhnya.
- Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/ Penggalangan Komitmen.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

TABEL 3.70
ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU
TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	CAPAIAN TE
		Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
1	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	105,80%	560.815.500	558.257.336	99,54	1,06	0,06	EFISIEN

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- Meningkatkan monitoring CAPA sebagai bentuk tindaklanjut pengawasan dengan cara membuat sistem monitoring timeline beserta progressnya.

- Kegiatan Bimtek Pelaku Usaha dan Desk Evaluasi Dokumen bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 16-17 Maret 2023 dan tanggal 28-29 Agustus 2023 di Kota Bandung dengan mengundang para pelaku usaha UMK Pangan Olahan.

Gambar 3.58 Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM Kosmetika dan Obat Tradisional

- Sosialisasi kepada para pelaku usaha bersama lintas sektor, diantaranya pada tanggal 20 Agustus 2023 bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat memberikan layanan konsultasi perijinan obat dan makanan pada kegiatan pemberdayaan UMKM pada kegiatan DIGIFEST 2023.

- Kegiatan Desk CAPA dan Evaluasi Dokumen dalam Rangka Percepatan Perizinan Sarana Obat dan Makanan pada periode bulan Oktober, November, dan Desember kepada pelaku usaha di wilayah Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan inovasi yang dilakukan untuk memberikan kemudahan pelayanan terbaik dalam proses Sertifikasi Sarana Obat dan Makanan.

Gambar 3.59 Kegiatan Desk CAPA dan Evaluasi Dokumen

- Pendampingan/fasilitasi sertifikasi melalui layanan KABAYAN ataupun telekonsultasi kepada pelaku usaha terkait penyelesaian CAPA Hasil Pemeriksaan.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.71
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
"PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI
YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU"

Rekomendasi		**Tindaklanjut**			**Kondisi Sebelum rencana Aksi**	**Kondisi Setelah Rencana Aksi**
		Selesai	**Belum**			
			Rencana Aksi	**Timeline**		
a	Kompetensi SDM terus ditingkatkan, terutama personil baru sesuai dengan standar kompetensi teknis yang	Personil baru mengikuti pelatihan pembentukan inspektur junior OT/SK serta pelatihan	-	-	Kompetensi SDM yang masih kurang mengakibatkan proses evaluasi	Kompetensi SDM yang sesuai dengan standar dapat mempercepat

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	dipersyaratkan melalui pelatihan/workshop/ bimtek/ diseminasi/seminar mengenai CPPOB, CPOTB, CPKB, dan CDOB.	evaluasi audit internal di sarana peredaran pangan olahan bagi evaluator SMKPO.			menjadi lambat	proses evaluasi dan ketepatan putusan penilaian
b	Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha.	Dilakukan Bimtek Pelaku Usaha dan Desk Evaluasi Dokumen kepada para pelaku usaha yang sedang berproses sebagai bentuk monitoring dan evaluasi serta untuk mempercepat waktu penyelesaian dokumen sertifikasi	-	-	Pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan dan ketentuan sertifikasi masih rendah sehingga proses perbaikan dan pemenuhan persyaratan memerlukan waktu yang lebih lama	Pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan dan ketentuan sertifikasi sudah lebih baik sehingga proses perbaikan dan pemenuhan persyaratan memerlukan waktu yang lebih cepat
c	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi bulanan terhadap perencanaan yang dibuat pada awal tahun.	-	-	Tidak adanya monitoring dan pengendalian terhadap program kegiatan,	Monev yang dilaksanakan secara rutin dapat mengendalikan pelaksanaan

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
					sehingga pelaksanaannya tidak efektif dan efisien	kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan efisien

I. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut:

- Fungsi sertifikasi membuat program Bimtek Pelaku Usaha dan desk Evaluasi Dokumen yang dilaksanakan setiap semester. Kegiatan ini merupakan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha baru yang sedang melakukan proses registrasi pendaftaran produk Obat dan Makanan. Dengan program ini proses perbaikan dan pemenuhan persyaratan oleh Pelaku Usaha UMKM menjadi lebih cepat dan baik, sehingga waktu yang diperlukan pelaku usaha dalam proses registrasi menjadi lebih cepat dan mudah. Dengan program ini pemenuhan persyaratan sertifikasi oleh pelaku usaha menjadi lebih cepat, sehingga penilaian sertifikasi dapat diselesaikan oleh petugas sesuai dengan waktunya.
- Pembuatan aplikasi monitoring timeline (MOTORIK – Monitoring Timeline Optimalkan Indikator Kinerja) pengajuan permohonan sertifikasi dan evaluasi

CAPA sehingga petugas dapat melakukan monitoring timeline secara update untuk menentukan prioritas pekerjaan sehingga pemenuhan kinerja penerbitan sertifikat yang dilakukan tepat waktu dapat tercapai.

4. PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada tahun 2023.

TABEL 3.72
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN"
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%	66,26%	100,40%	SANGAT BAIK	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan sebesar 66.00%. Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 sebesar **66,26%**. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **100.40%** dengan kriteria **SANGAT BAIK**. Dengan rincian jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebanyak 273 sarana dari 412 sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa berdasarkan hasil kajian resiko pada tahun 2023.

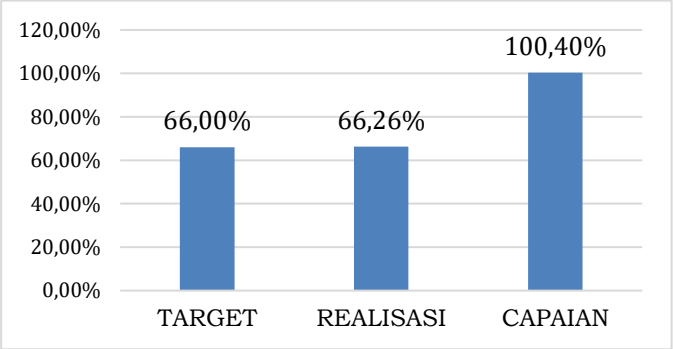

Gambar 3.60 Capaian Kinerja Indikator "Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan" Tahun 2023

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA PERSENTASE SARANA PRODUKSI YANG MEMENUHI KETENTUAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2020, TAHUN 2021, DAN TAHUN 2022

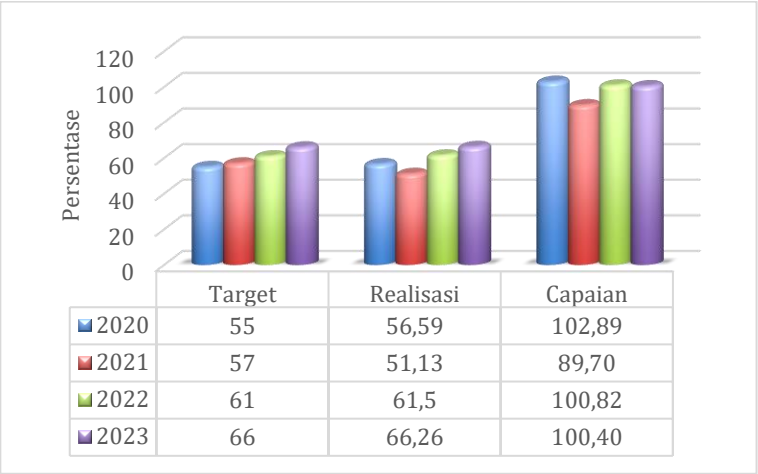

Gambar 3.61 Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase Sarana Produksi yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022

Jika dibandingkan persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan tahun 2023 terhadap tahun 2022, terdapat kenaikan persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan yaitu sebesar 4,76%. Namun, jika kita bandingkan persentase capaian terhadap target yang ditetapkan, terjadi sedikit penurunan, yaitu sebesar 0,42%.

C. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2020-2024

TABEL 3.73

PERBANDINGAN REALISASI

"PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN

YANG MEMENUHI KETENTUAN"

TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	**70,00%**	**66,26%**	**94,66%**	**AKAN TERCAPAI**	

Jika dibandingkan realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 terhadap target akhir tahun Renstra tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 94.66 % dengan kriteria **Akan Tercapai.** Untuk dapat mencapai target akhir tahun renstra Tahun 2020-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN DALAM SATU KLASTER DAN TARGET NASIONAL

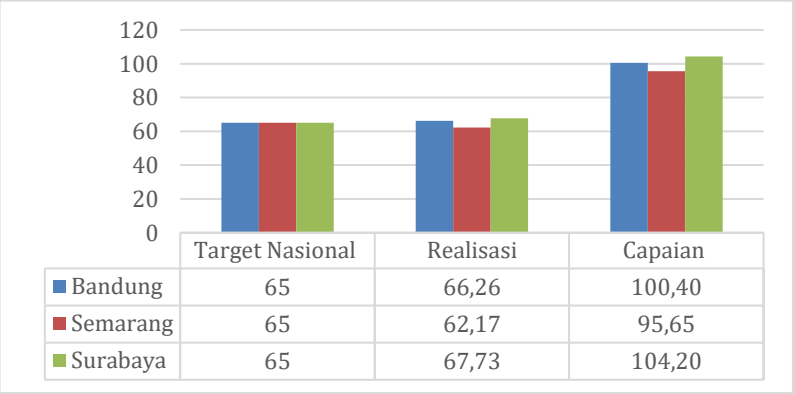

Gambar 3.62

Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan Balai Lain dalam satu klister terhadap Target Nasional

Jika Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dibandingkan dengan Balai lain yang setara, maka secara berturut-turut persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Surabaya (67,73%), diikuti oleh Balai Besar POM di Bandung (66,26%) dan Balai Besar POM di Semarang (62,17%).

Namun apabila dibandingkan dengan target masing-masing Balai, capaian tertinggi adalah Balai Besar POM di Semarang (113,04%), Balai Besar POM di Surabaya (104,02%), Balai Besar POM di Bandung (100,40%)

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2023 disebabkan antara lain:

- Sosialisasi dan bimbingan teknis terkait GMP kepada pelaku usaha telah dilakukan secara terus menerus, melalui berbagai media, baik secara luring ataupun daring. Hal tersebut menyebabkan pemahanan pelaku usaha terkait GMP meningkat dan berkorelasi dengan peningkatan pemenuhan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.

- Pemberian bimbingan teknis melalui pelayanan help desk untuk pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana produksi cukup memadai. Selain itu dilakukan desk CAPA terhadap temuan hasil pemeriksaan sehingga memudahkan pelaku usaha untuk menindaklanjuti temuan tersebut

- Sosialisasi terkait Keamanan dan Mutu Produk Obat dan Makanan kepada pelaku usaha telah dilakukan secara terus menerus. Keamanan dan Mutu Produk Obat dan Makanan ditentukan oleh peran produsen dalam proses produksinya.

- Peningkatan kompetensi dari petugas Balai Besar POM di Bandung sebagai inspektur dalam pelaksanaan inspeksi sarana produksi. Peningkatan kompetensi tersebut diperoleh melalui berbagai cara, antara lain mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis, baik secara daring ataupun luring.

Rekomendasi yang akan digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

- Peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan, workshop atau bimtek mengenai CPOB, CPPOB, CPOTB dan CPKB dilakukan secara berkelanjutan.
- Sosialisasi, bimbingan teknis dan help desk kepada pelaku usaha terkait pengetahuan dan implementasi GMP terus dilaksanakan menggunakan metode yang lebih efektif dan efisien yang berkelanjutan.
- Pembinaan secara terus menerus terkait penyelesaian CAPA untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sarana.
- Sosialisasi peraturan yang terbaru terkait Obat dan Makanan.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA.

TABEL 3.74
TINGKAT EFISIENSI
"PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN"
TAHUN 2023

Indikator	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	100.40%	861.599.000	859.312.820	99.73%	1.01	0.01	Efisien

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 0.01 dengan kriteria **EFISIEN**. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan tingkat efisiensinya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

a. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara konsisten terhadap rencana pelaksanaan terhadap pemeriksaan sarana produksi dan hasil dari pemeriksaan tersebut.

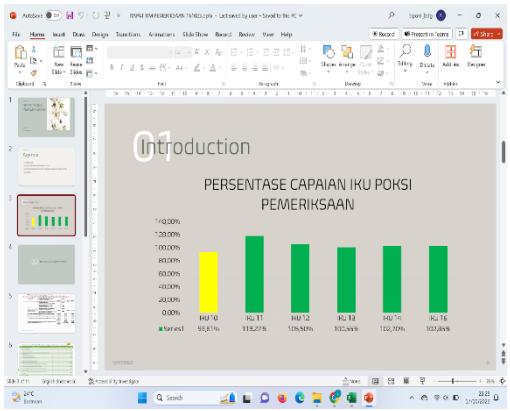

Gambar 3.63 Monitoring dan Evaluasi

b. Peningkatan Kompetensi Petugas melalui Bimtek Inspektur CPOB, CPPOB, CPOTB dan CPKB.

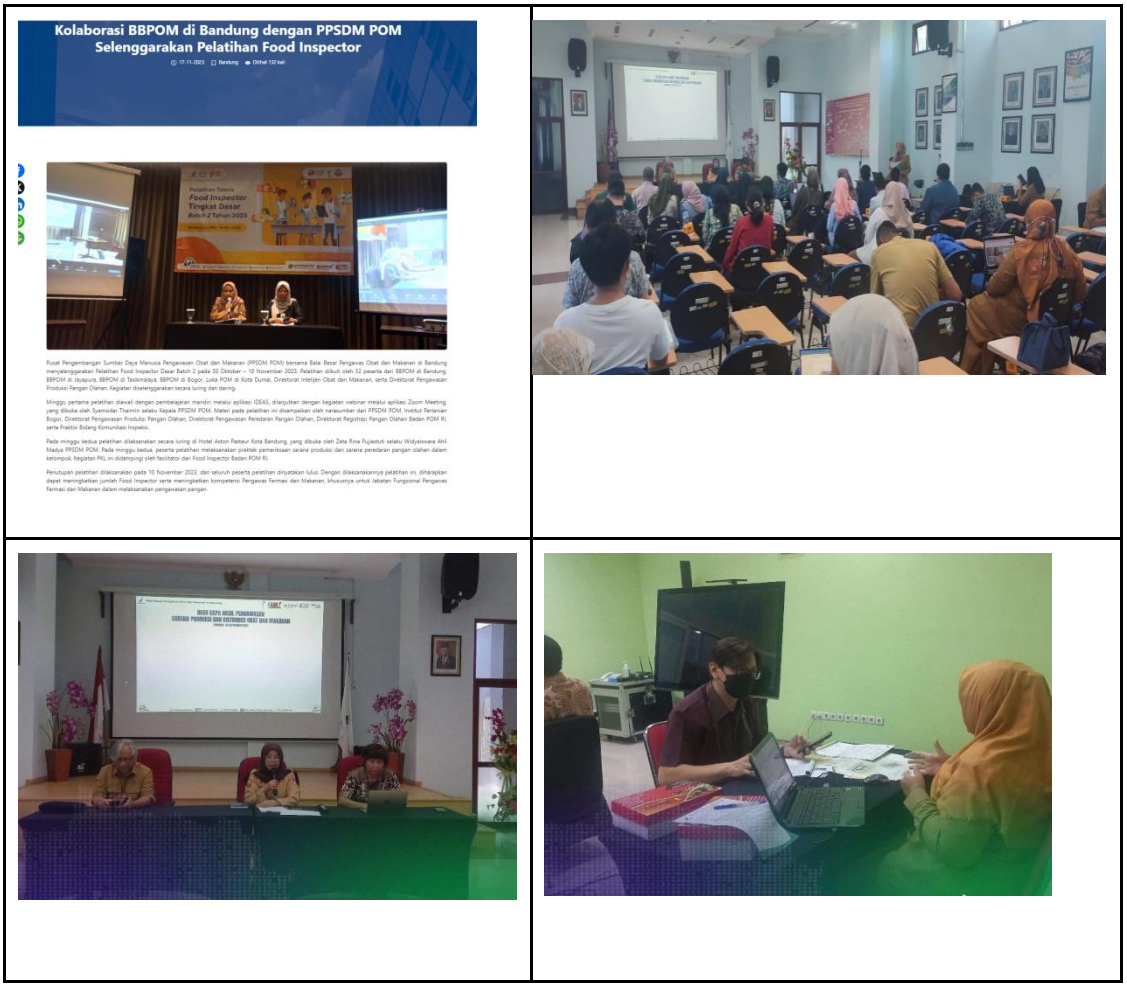

Gambar 3.64 Bimtek Inspektur CPOB, CPPOB, CPOTB, dan CPKB

c. Diadakannya kegiatan Desk CAPA Hasil Pengawasan Sarana Produksi sebagai bentuk layanan jemput bola BBPOM Bandung terhadap pemenuhan status CAPA-Closed.

Gambar 3.65 Desk CAPA Hasil Pengawasan Sarana Produksi

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.75
Matriks Tindaklanjut Rekomendasi
"Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan
Yang Memenuhi Ketentuan"
Tahun 2023

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
a	Meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan, workshop atau bimtek mengenai CPOB, CPPOB, CPOTB dan CPKB, serta sharing	Mengikuti pelatihan, workshop atau bimtek yang diadakan oleh pusat, UPT lain atau diseminasi internal untuk peningkatan kompetensi petugas antara lain Bimtek	-	-	Kompetensi SDM yang masih kurang mengakibatkan hasil pengawasan dan pembinaan menjadi kurang	Kompetensi SDM yang sesuai dengan standar dapat meningkatkan hasil pengawasan dan

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	knowledge.	Food Inspektur Dasar, Bimtek CPOTB Junior, Bimtek materi khusus (a.l validasi dan kualifikasi, CPOB Sel Punca) dan sharing knowledge antar inspektur			efektif	pembinaan
b	Help desk untuk pelaku usaha terkait sharing knowledge dan implementasi GMP dan Desk CAPA	Pemberian informasi kepada pelaku usaha melalui layanan publik dan Desk CAPA baik secara daring atau luring	-	-	Pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan masih kurang sehingga implementasi GMP menjadi tidak konsisten	Pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan lebih baik, sehingga implementasi GMP menjadi lebih konsisten
c	Melakukan pertemuan intensif dengan pemangku kepentingan melalui Kegiatan Penguatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Bersama Pimpinan Daerah dan Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Tindak	Pertemuan dengan lintas sektor terkait penyampaian dan evaluasi hasil pengawasan Obat dan Makanan lebih efektif	-	-	Tidak adanya peran serta dari lintas sektor terkait menyebabkan tidak optimalnya pengawasan yang dilaksanakan.	Dengan melibatkan lintas sektor terkait dalam pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan, hasilnya menjadi lebih efektif dan

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan.					efisien

5. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 dengan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa pada tahun 2023.

TABEL 3.76
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,00%	80,79%	**103,57%**	**SANGAT BAIK**	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Target persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 ditetapkan sebesar **78,00%** sedangkan realisasinya. adalah sebesar **80,79%**. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **103,57%** dengan kriteria **SANGAT BAIK**. Dengan rincian jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebanyak 1169 sarana dari 1.447 sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa.

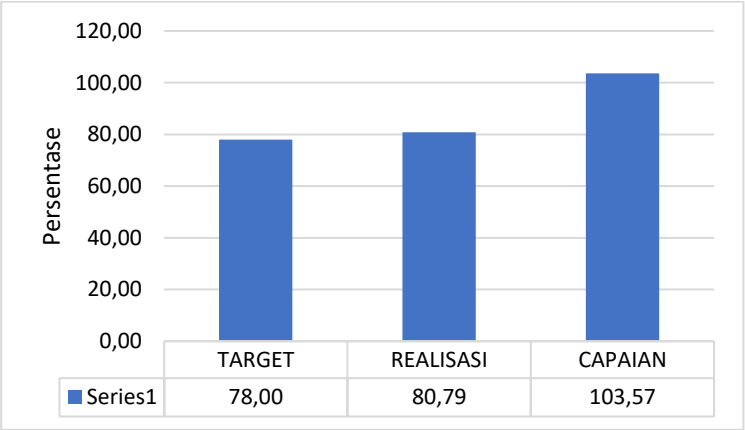

Gambar 3.66 Capaian Kinerja Indikator "Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan" Tahun 2023

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2020, TAHUN 2021, DAN TAHUN 2022

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi sarana distribusi yang memenuhi ketentuan, yaitu sebesar 0,2%. Namun terjadi penurunan persentase capaian sebesar 2,33%.

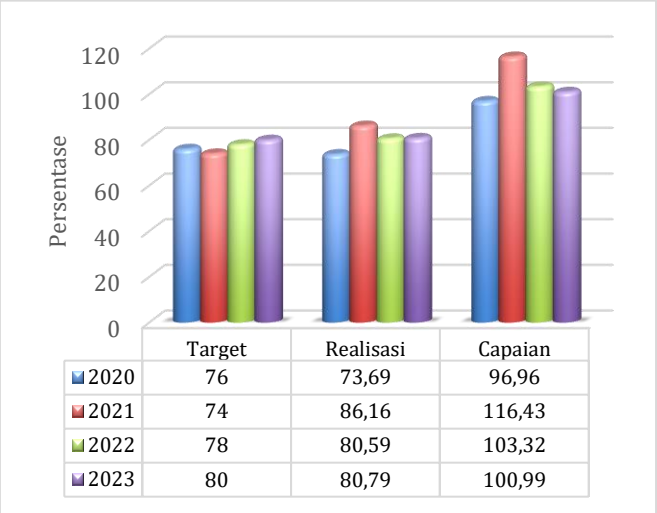

Gambar 3.67 Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase Sarana Distribusi yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022

C. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020 - 2024

TABEL 3.77
PERBANDINGAN REALISASI
"PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN"
TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80,00%	80,79%	100, 99%	**TERCAPAI**	▲

Jika dibandingkan realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 terhadap target akhir tahun Renstra tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 100.99% dengan kriteria **Sangat Baik**. Target Akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024 telah dapat terlampaui, namun perlu

dilakukan upaya-upaya dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk periode berikutnya agar tidak terjadi penurunan.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN DALAM SATU KLASTER

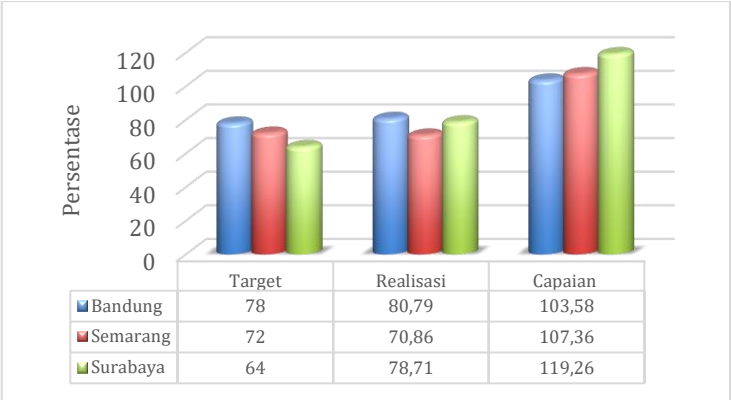

Gambar 3.68 Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan Balai Lain dalam satu klaster

Jika Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dibandingkan dengan Balai lain yang setara, maka persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Bandung (80,79%), diikuti oleh Balai Besar POM di Surabaya (78,71%) dan Balai Besar POM di Semarang (70,86%).

Namun apabila dibandingkan dengan target masing-masing Balai, capaian tertinggi adalah Balai Besar POM di Surabaya (119,26%), Balai Besar POM di Semarang (107,36%), Balai Besar POM di Bandung (103,58%)

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Keberhasilan atas peningkatan capaian kinerja disebabkan antara lain:

- Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap GDP sarana distribusi Obat dan Makanan meningkat.
- Peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Bandung dengan mengikuti pelatihan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).
- Pelaksanaan Bimbingan kepada pelaku usaha terus menerus dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain Desk Corrective Action Preventive Action (CAPA) baik secara daring ataupun luring. Kegiatan dilakukan juga dilakukan oleh petugas langsung kepada pelaku usaha melalui media layanan public Balai Besar POM di Bandung.
- Koordinasi lintas sektor baik dari institusi pemerintahan, organisasi profesi ataupun organisasi lainnya yang lebih intens dilakukan dalam rangka mengawal pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya antara lain:

- Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan form Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat dan Organisasi Profesi untuk meningkatkan kesadaran penanggung jawab pengelola obat di sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan pedoman teknis pengelolaan obat yang baik.
- Meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan, workshop, bimtek, diseminasi atau *sharing session* mengenai CDOB, pengelolaan obat di sarana pelayanan kefarmasian SMKPO dan BUPN/Importir kosmetik dan pedoman tindak lanjutnya.

- Sosialisasi, bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait GDP.
- Membangun database Hasil Pemeriksaan Sarana untuk memudahkan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan sarana.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA.

TABEL 3.78
TINGKAT EFISIENSI
"PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN"
TAHUN 2023

Indikator	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	103.57%	1.102.585.000	1.094.736.072	99.29%	1.04	0.04	Efisien

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 0,04 dengan kriteria **EFISIEN**. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan tingkat efisiensinya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 yaitu :

- Pembuatan perencanaan pemeriksaan sarana distribusi berdasarkan skala prioritas hasil dari analisis resiko dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana

pelaksanaan terhadap pemeriksaan sarana. Setiap minggu dilakukan monitoring terhadap capaian pemeriksaan sarana yang diinput melalui google drive koordinasi jadwal dinas.

- Peningkatan kompetensi personel melalui pelatihan dan Bimtek CDOB

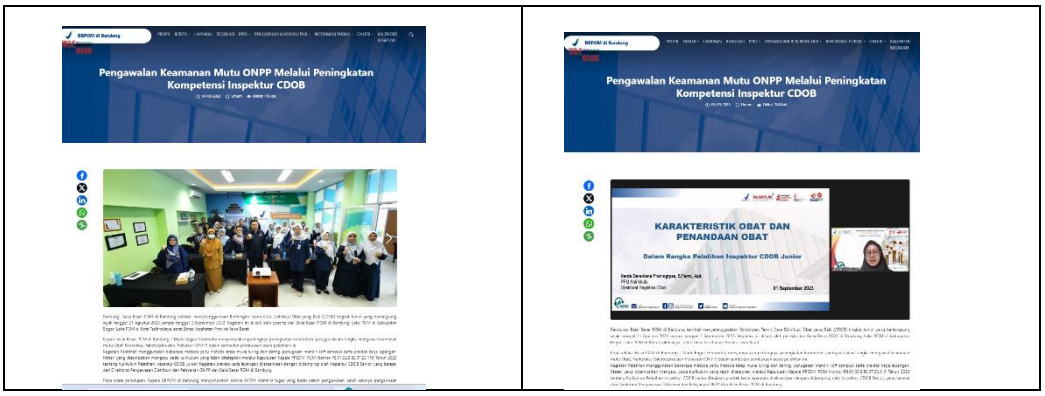

Gambar 3.69 Bimtek CDOB

- Melaksanakan pelatihan *Good Distribution Practice* (GDP) bekerjasama dengan organisasi profesi atau lintas sektor seperti pelatihan CDOB, SMKPO dan lain-lain dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam bidang Obat dan Makanan.

Gambar 3.70 pelatihan *Good Distribution Practice* (GDP)

- Diadakannya kegiatan Desk CAPA Hasil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan sebagai bentuk layanan jemput bola BBPOM Bandung terhadap pemenuhan status CAPA-Closed.

Gambar 3.71 Dek CAPA

- Pelatihan Farmakovigilans untuk petugas rumah sakit, klinik dan puskesmas.

Gambar 3.72 Pelatihan Farmakovigilans

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.79
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
"PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN"

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
a	Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada	Pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha sarana distribusi baik secara daring ataupun luring	-	-	Pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan masih kurang sehingga	Pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan lebih baik, sehingga

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	pelaku usaha dengan menyampaikan form Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.	terkait kewajiban untuk *compliance* terhadap peraturan dan bagaimana menindaklanjuti temuan hasil pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan			implementasi GDP menjadi tidak konsisten	implementasi GDP menjadi lebih konsisten
b	Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.	Mengirimkan surat pemberitahuan kepada sarana untuk menyampaikan CAPA Monitoring CAPA secara berkala	-	-	Perbaikan CAPA pelaku usaha belum dimonitoring dengan baik	Perbaikan CAPA sudah termonitoring dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha
c	Melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat dan Organisasi Profesi untuk meningkatkan kesadaran penanggung jawab pengelola obat di	Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan dan tindak lanjutnya Kolaborasi pentahelix	-	-	Koordinasi dan Kerjasama belum terlaksana dengan baik, sehingga peran serta lintas sektor dalam pengawasan masih rendah	Koordinasi dan Kerjasama sudah terjalin dengan baik, sehingga peran lintas sektor dalam pengawasan menjadi lebih baik

Rekomendasi	Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan pedoman teknis pengelolaan obat yang baik.	antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas dan media untuk membangun perubahan sosial di masyarakat dan SDGs				
Peningkatan Kompetensi Petugas	Mengikuti Pelatihan, Sosialisasi dan bimtek yang diadakan oleh internal maupun eksternal yaitu : - Penyamaan persepsi pedoman tindak lanjut Pengawasan Obat - Pelatihan CDOB Dasar - FGD Regulasi Pengawasan ONPP - Sosialisasi aplikasi SATU POM JABAR	-	-	Kompetensi SDM yang masih kurang mengakibatkan hasil pengawasan dan pembinaan menjadi kurang efektif	Kompetensi SDM yang sesuai dengan standar dapat meningkatkan hasil pengawasan dan pembinaan

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Sosialisasi, Bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait GDP	Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis kepada pelaku usaha distribusi - Sosialisasi kepada PBF tentang peraturan CDOB aspek pengelolaan Psikotropika dan Obat-obat tertentu - Refreshment CDOB - Pedoman Pengelolaan Obat di Sarana Pelayanan Kefarmasian yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Cirebon	-	-	Pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan masih kurang sehingga implementasi GDP menjadi tidak konsisten	Pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan lebih baik, sehingga implementasi GDP menjadi lebih konsisten
	Menyempurnakan aplikasi Digital Monitoring Hasil Pemeriksaan (DMP) untuk monitoring dan evaluasi hasil	Integrasi pengawasan sarana dengan aplikasi manajemen kinerja Membangun database melalui pengisian google form data kunjungan dan pengisian bersama	-	-	Monev hasil pemeriksaan belum efektif sehingga perbaikan pelaku usaha dalam	Monev hasil pemeriksaan sudah efektif sehingga perbaikan pelaku usaha dalam

Rekomendasi	Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
pemeriksaan	pada gdrive rekap data kunjungan. Selain itu sedang dikembangkan aplikasi SATU POM JABAR. Sampai dengan akhir tahun 2023, aplikasi ini dalam proses pengembangan. Diharapkan dengan aplikasi ini, semua hasil inspeksi akan terlihat progres tindak lanjut dari pelaku usaha atau lintas sektor, sehingga proses pembinaan dan progresnya lebih mudah dimonitor dan dievaluasi.			implementasi GDP tidak efektif	implementasi GDP lebih efektif

I. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal. Dengan informasi kinerja tersebut, fungsi Pemeriksaan telah membuat aplikasi dan kegiatan, sebagai berikut :

- Membuat dan menyempurnakan aplikasi Digital Monitoring Hasil Pemeriksaan (DMP) untuk melakukan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan. Aplikasi DMP ini di tahun 2023 dikembangkan menjadi aplikasi yang terintegrasi dengan SATU POM JABAR. Sampai dengan akhir tahun 2023, aplikasi ini dalam proses pengembangan. Diharapkan dengan aplikasi ini, semua hasil inspeksi akan terlihat progres tindak lanjut dari pelaku usaha atau lintas sektor, sehingga proses pembinaan dan progresnya lebih mudah dimonitor dan dievaluasi.
- Kegiatan SANGKURIANG (Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) berupa kegiatan pertemuan dan koordinasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha membahas terkait tindak lanjut hasil pengawasan. Dari kegiatan ini akan meningkatkan pemahaman dan komitmen lintas sektor dan pelaku usaha dalam mengimplementasikan Cara Distribusi yang Baik.

6. INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: (1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); (2) Profesionalitas SDM (18%); (3) Sarana Prasarana (15%); (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); (5) Konsultasi dan Pengaduan (15%); (6) Inovasi (7%). Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama). Dengan Kategori nilai sebagai berikut:

TABEL 3.80

KATEGORI PENILAIAN INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal

1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C -	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B -	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A -	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

TABEL 3.81
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
""INDEKS PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDUNG"
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	4.40	4.14	94,09%	Cukup	

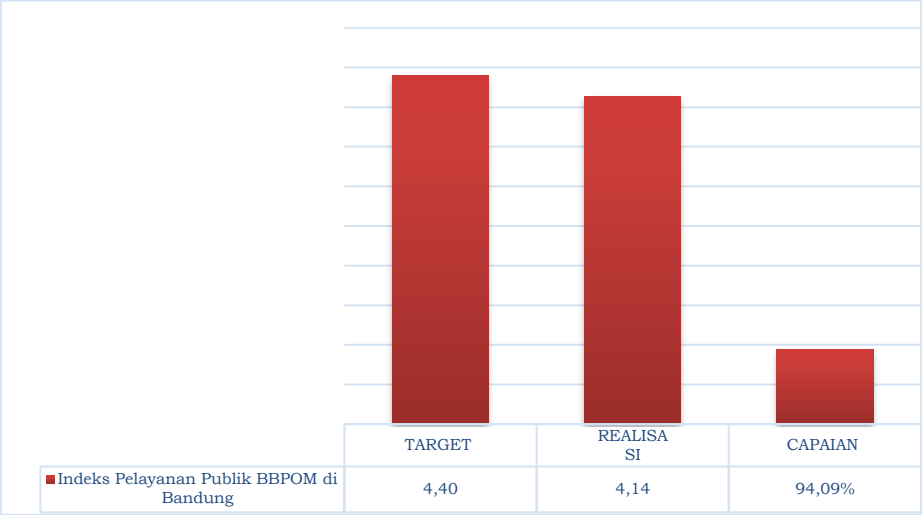

Gambar 3.73 Perbandingan target dengan realisasi kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung Tahun 2023

Target tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 4.40. Realisasi Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung pada tahun 2023 sebesar 4.14. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **94,09%** dengan kriteria **Cukup**

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020, 2021 DAN 2022

Pada tahun 2023, terjadi penurunan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, dan 2022 hal ini disebabkan oleh pemenuhan data dukung yang disampaikan.

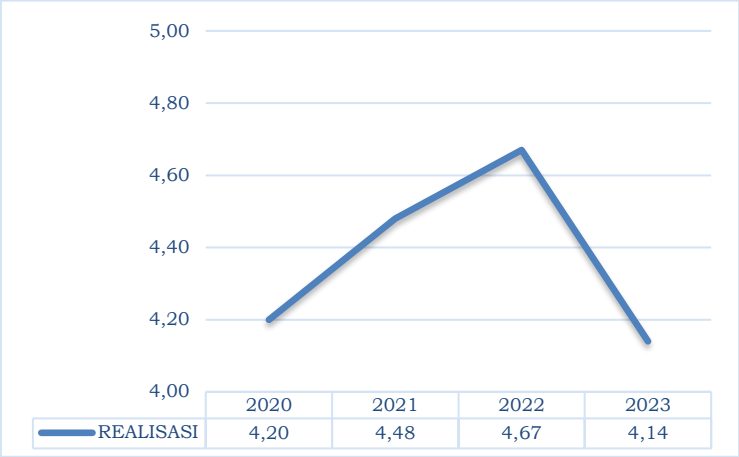

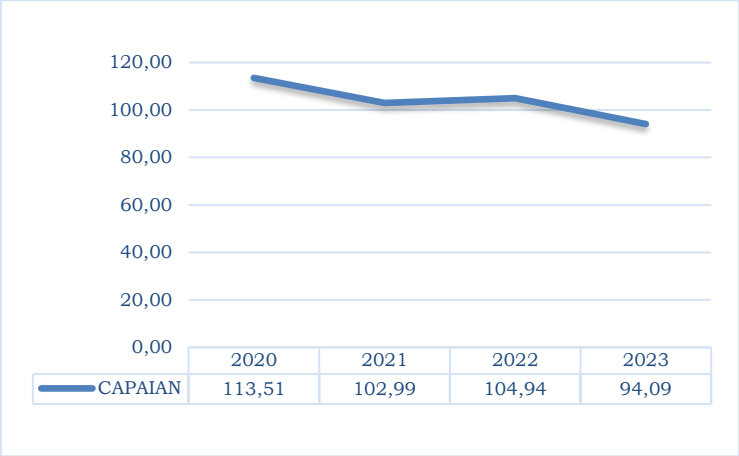

Gambar 3.74 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung

Tahun 2020 sd 2022

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

TABEL 3.82
PERBANDINGAN REALISASI
"INDEKS PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDUNG"
TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	4.55	4.14	90,99%	AKAN TERCAPAI	▲

Jika dibandingkan realisasi indeks pelayanan publik Balai Besar POM di Bandung pada tahun 2023 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 90,99% dengan kriteria **akan tercapai**. Target akhir tahun Renstra Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja untuk periode berikutnya agar tidak terjadi penurunan. Selain itu, perlu dilakukan reviu terhadap target Renstra Tahun 2020-2024.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

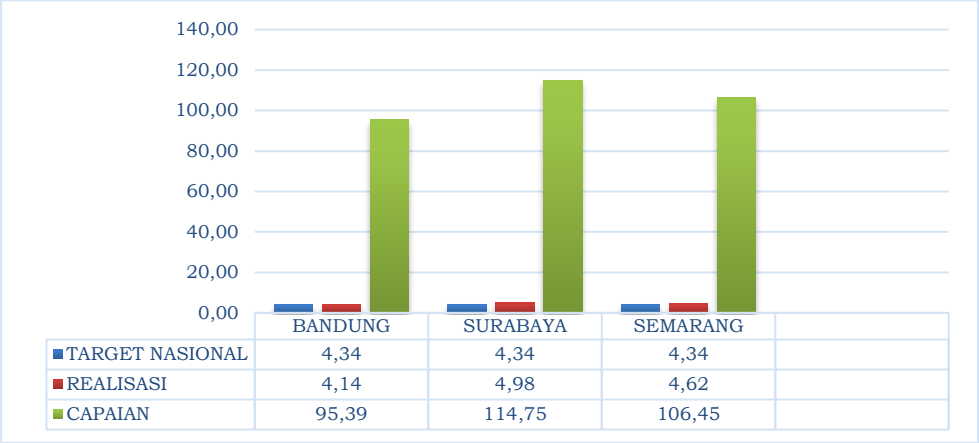

	BANDUNG	SURABAYA	SEMARANG
TARGET NASIONAL	4,34	4,34	4,34
REALISASI	4,14	4,98	4,62
CAPAIAN	95,39	114,75	106,45

Gambar 3.75 Perbandingan Indeks Pelayanan Publik BBPOM Tahun 2023 dengan Balai Lain dan Target Nasional

Jika dibandingkan realisasi Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2023 dengan target nasional (4.34), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Surabaya (114,75%), Balai Besar POM di Semarang (106,45%) dan Balai Besar POM di Bandung (95,39%),

E. ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN ATAS PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Kegagalan atas penurunan capaian kinerja disebabkan antara lain:

- Peningkatan sarana dan prasarana ruang pelayanan publik. Ruang pelayanan publik telah terintegrasi satu pintu untuk seluruh layanan yang terdiri dari; (1) Layanan Informasi; (2) Layanan Pengujian; (3) Layanan Pengaduan; dan (4) Layanan Sertifikasi. Selain itu, ruang tunggu dilengkapi dengan free coffee, akses wifi gratis, kantin kejujuran, kotak saran, media cetak/media siar (TV), area bermain anak, ruang ibu menyusui dan berbagai akomodasi untuk penyandang disabilitas.
- Kurang optimalnya pemeliharaan dan pengembangan inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh BBPOM di Bandung antara lain : (1) layanan permohonan pemeriksaan sarana oleh Balai (PSB) melalui : bit.ly/psbbandung; (2) layanan pengaduan dan informasi melalui program "KABAYAN" (Kepala Balai Melayani); (3) Aplikasi 'LACAK" untuk layanan pengujian pihak ketiga; (4) formulir pengaduan melalui aplikasi SIPETA; (5) Program "KELOM GEULIS" (Kenalan Dengan BBPOM di Bandung Berbagi Edukasi Dan Layanan Informasi, Sae Pisan) melalui IG Live dan IG Radio. Seluruh inovasi pelayanan publik BBPOM di Bandung telah disosialisasikan melalui media sosial dan WAG Mal Pelayanan Publik Kota Bandung.
- Perlu peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dan memperhatikan pemenuhan sarana prasara untuk kelompok rentan.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2023 antara lain:

- Rekomendasi Aspek Profesionalisme SDM
    - Melaksanakan pelayanan publik mengacu pada SP yang telah ditetapkan, dapat menambahkan berbagai mekanisme seperti piket dan pergantian petugas penjaga loket dengan sistem shift.

- Meningkatkan dan mempertahankan berbagai mekanisme yang ada pada UPP untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai.
- Menetapkan SK Kepala UPP mengenai kriteria pemberian penghargaan yang memuat unsur Kinerja, Kehadiran, Kerja Sama, Inovatif/Kreatif, Penampilan, dan Tidak Pernah Menerima Komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal serta mengimplementasikannya dengan bukti kertas kerja yang sesuai kriteria dan dokumentasi pemberian penghargaan.

- Rekomendasi Aspek Sarana dan Prasarana
  - Memelihara berbagai sarana prasarana parkir dan mempertahankan mekanisme yang sudah dibangun seperti pemeriksaan karcis serta tempat penitipan helm dan jaket agar berfungsi sebagaimana mestinya.
  - Senantiasa menjaga dan memelihara sarana prasarana yang ada di ruang tunggu pelayanan.
  - Meningkatkan dan mempertahankan berbagai fasilitas tambahan yang disediakan pada toilet pengguna layanan, memastikan monev instensitas petugas membersihkan toilet dilakukan setiap hari.
  - Meningkatkan dan memelihara sarana prasarana bagi kelompok rentan dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas sarpras mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan.

- REKOMENDASI ASPEK SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
  - Mengisi formulir F01 untuk SIPP non elektronik (tidak hanya subsite dan SIPPN) karena SIPP non elektronik (berupa media cetak: brosur, leaflet, buku saku dll) tetap dibutuhkan bagi pengguna layanan yang menyukai informasi secara langsung.
  - Memanfaatkan subsite pom.go.id yang sudah disediakan oleh Pusdatin dan SIPPN dari Kementerian PANRB untuk dikelola, dimanfaatkan dan dilakukan pemutakhiran secara rutin.

- Menghubungkan subsite dengan informasi publik berupa: SP, pelayanan, SKM, penilaian kinerja pemberi FAQ pelayanan publik.

- REKOMENDASI ASPEK KONSULTASI DAN PENGADUAN
  - Meningkatkan dan memelihara sarpras pendukung konsultasi dan pengaduan serta melakukan tindak lanjut pengaduan yang masuk pada berbagai media yang telah disediakan oleh UPP.
  - Memaksimalkan fungsi SP4N Lapor! Sebagai sarana konsultasi dan pengaduan dengan memberikan sosialisasi kepada Masyarakat untuk kanal pengaduan SP4N Lapor!
- REKOMENDASI ASPEK INOVASI PELAYANAN PUBLIK
  - Terus mempertahankan dan mengembangkan inovasi pelayanan publik yang dimiliki serta mengikutsertakan pada kompetisi inovasi pelayanan publik.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

TABEL 3.83
TINGKAT EFISIENSI
"INDEKS PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDUNG"
TAHUN 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di BAndung	4.40	4.14	94.09	155,256,000	155,182,985	99.95	0.94	-0.06	Tidak Efisien

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja sebesar -0.06 dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih besar dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung akan terus melakukan upaya perbaikan

berdasarkan rekomendasi yang telah disusun sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan capaian kinejanya

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Membuat standar pelayanan publik yang lebih berdampak pada masyarakat maupun pelaku usaha, mensosialisasikannya dan melaksanakannya secara konsisten.

Gambar 3.76 Forum Konsultasi Publik BBPOM Bandung secara hybrid tanggal 31 Juli 2023

Gambar 3.77 Publikasi Standar Pelayanan Publik BBPOM Bandung melalui Instagram

Gambar 3.78 Publikasi Maklumat Pelayanan BBPOM Bandung melalui media cetak

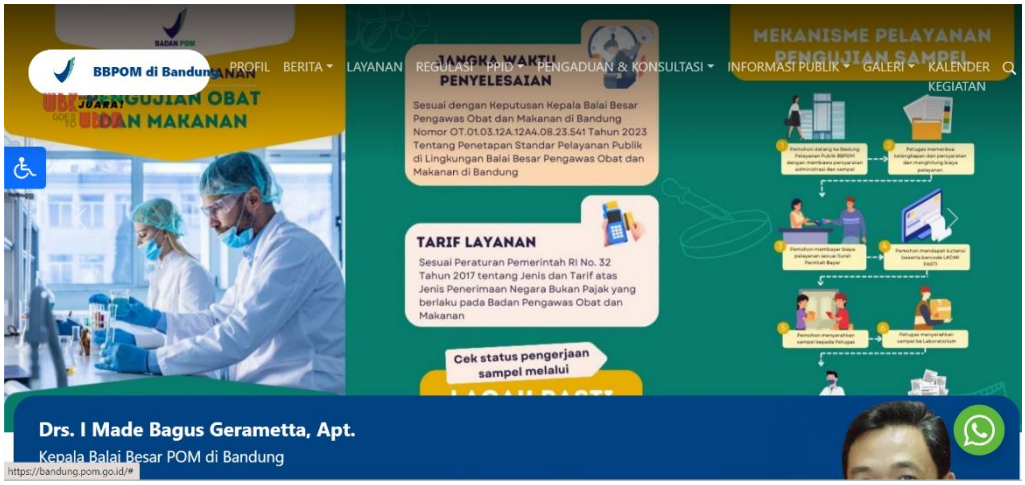

Gambar 3.79 Standar Pelayanan BBPOM Bandung melalui Subsite BBPOM Bandung

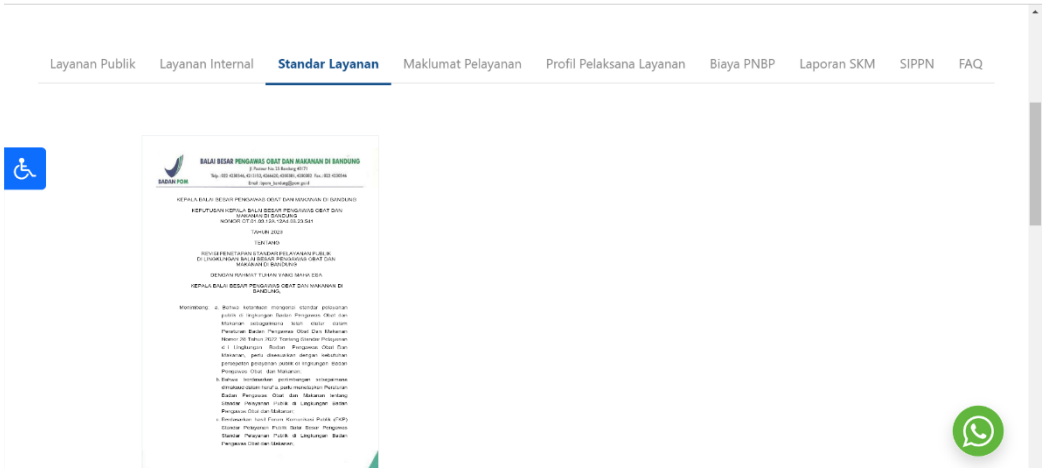

Gambar 3.80 Standar Pelayanan BBPOM Bandung melalui Subsite BBPOM Bandung

Gambar 3.81 Flayer Alur Pelayanan Informasi Obat dan Makanan

Gambar 3.82 Flayer Alur Pengaduan Masyarakat

- Petugas pelayanan publik diberikan pelatihan terkait peningkatan teknis maupun sosio kultural sehingga semakin meningkat kompetensi dan pemahaman tentang pembangunan budaya kerja yang baik dan berdaya saing.
- Sarana prasarana yang lebih ditingkatkan lagi yaitu terkait akses pemberian informasi yang lebih mudah, cepat dan terjangkau.

- Sistem informasi yang diberikan pada masyarakat lebih beragam baik melalui media cetak maupun elektronik. Penyebaran bahan-bahan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) baik melalui media cetak maupun elektronik lebih intensif.

Gambar 3.83 Flyer Informasi Alur dan Persyaratan Pemohon Notifikasi Kosmetik

Gambar 3.84 Penyebaran bahan-bahan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) melalui media sosial.

Gambar 3.85 Penyebaran bahan-bahan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) melalui media cetak.

- Pemberdayaan sistem informasi yang sudah ada seperti subsite Balai dibuat lebih informatif dan komunikatif. Sarana konsultasi dan pengaduan disamping diselenggarakan secara langsung juga dilakukan secara online/ daring dan diinformasikan kepada masyarakat secara lebih intensif.

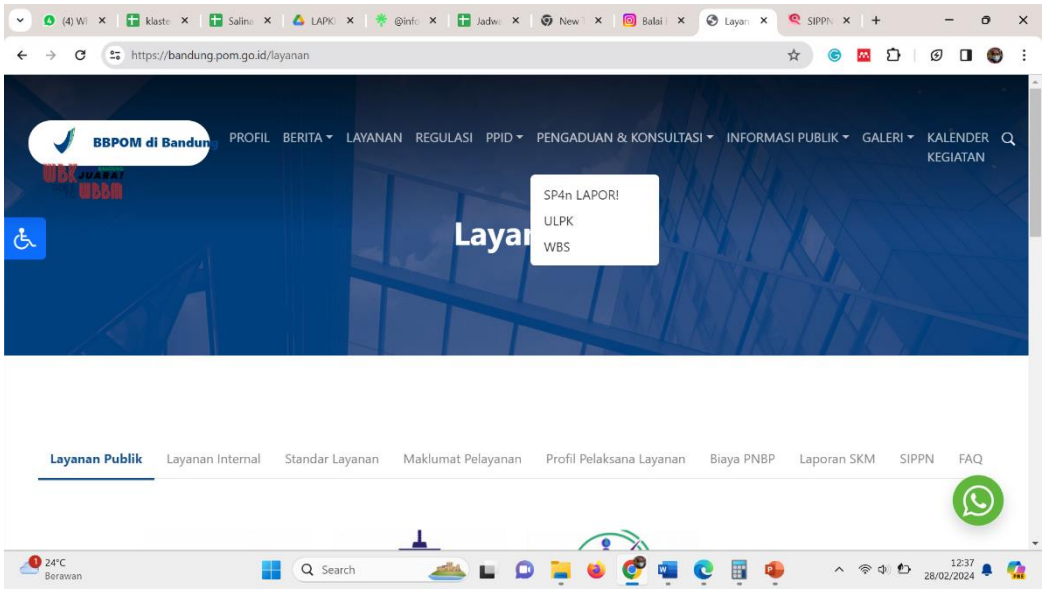

Gambar 3.86 Sarana Pengaduan di Subsite BBPOM Bandung

- Kotak saran selain langsung juga bisa disampaikan secara digital. Inovasi-inovasi terkait pelayanan publik yaitu pelayanan pengujian (aplikasi LACAK), pemberian informasi dan pengaduan (KABAYAN) dan layanan sertifikasi.

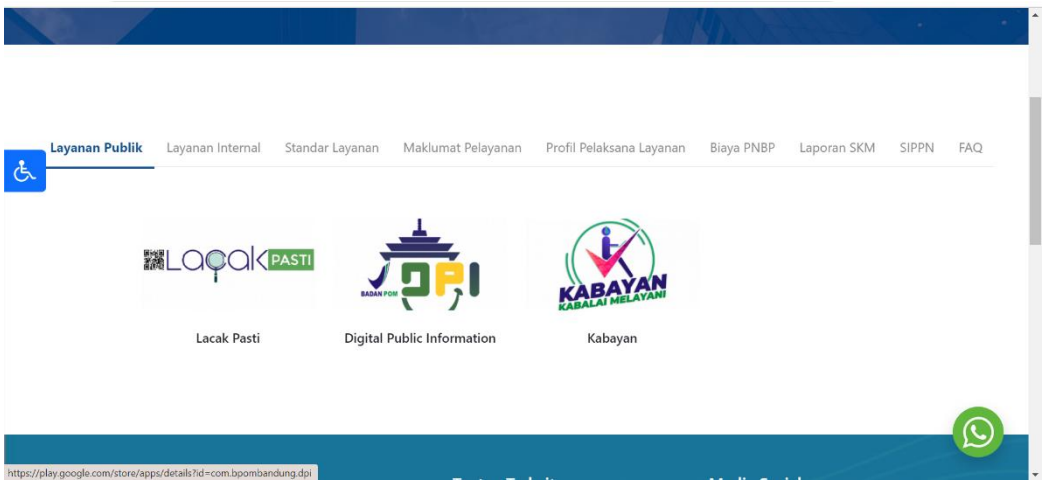

Gambar 3.87 Aplikasi BBPOM di Bandung

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.84

MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI

"INDEKS PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDUNG"

Rekomendasi		Tindaklanjut					
		Selesai	Belum		Kondisi sebelum	Kondisi Sesudah	
			Rencana Aksi	Timeline			
a	*Kebijakan Pelayanan* *a)* Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik agar mengacu pada PermenPANRB No.16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan FKP *b)* Pelaksanaan FKP agar mengikutsertakan masyarakat yang mewakili berbagai unsur dan profesi: (a) tokoh masyarakat; (b) akademisi; (c) dunia usaha; (d) LSM serta melibatkan media massa yang diharapkan juga menjadi corong dalam penyampaian	Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi			Kebijakan pelayanan belum sesuai rekomendasi	Kebijakan pelayanan telah sesuai rekomendasi	

Rekomendasi	Tindaklanjut					
	Selesai	Belum		Kondisi sebelum	Kondisi Sesudah	
		Rencana Aksi	Timeline			
informasi kepada masyarakat. *c)* Berita Acara FKP agar ditandatangi oleh perwakilan setiap unsur masyarakat yang hadir *d)* Mema nfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat *e)* Pada publikasi Standar Pelayanan memuat minimal 6 komponen service delivery pada seluruh media publikasi baik non elektronik dan elektronik. *f)* Penet apan maklumat pelayanan diperbaharui dengan menyesuaikan narasi berupa janji instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.						

Rekomendasi		Tindaklanjut					
		Selesai	Belum		Kondisi sebelum	Kondisi Sesudah	
			Rencana Aksi	Timeline			
	g) Pengaturan mengenai sistem istirahat bergilir bagi petugas layanan tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat istirahat dan penambahan ekstra pelayanan. *h)* Agar menindaklanjuti saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKM seluruhnya sebelum terbit laporan SKM.						
	Profesonalisme SDM *a)* Peningkatan kompetensi menyesuaikan kebutuhan petugas pelayanan yang disertai data dukung berupa informasi mengenai kompetensi SDM, posisi penugasan, masa kerja, pendidikan, pelatihan, dan sertifikat.	Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi			Profesionalisme SDM belum sesuai rekomendasi	Profesionalisme SDM telah sesuai rekomendasi	

Rekomendasi		Tindaklanjut					
		Selesai	Belum		Kondisi sebelum	Kondisi Sesudah	
			Rencana Aksi	Timeline			
	b) Waktu pelayanan publik pada standar pelayanan agar tercantum secara jelas, minimal sama dengan jam kerja dan termasuk mengatur terkait jadwal pelayanan ekstra. *c)* Perlu menetapkan kompetensi SDM melalui Keputusan Kepala Unit Kerja tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik. Bagi UPP yang memiliki gap kompetensi, agar menyediakan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai khususnya bagi petugas layanan publik.						

	Rekomendasi	Tindaklanjut					
		Selesai	Belum		Kondisi sebelum	Kondisi Sesudah	
			Rencana Aksi	Timeline			
	Sarana Prasarana *a)* Pada umumnya UPP di lingkungan BPOM telah memiliki CCTV namun agar disertai dengan pemeriksaan karcis untuk memberi rasa aman pada pengguna layanan. *b)* Jika memiliki lokasi yang cukup dapat dilakukan penambahan toilet duduk/jongkok untuk pengguna layanan. *c)* Apabila memungkinkan, sarana font office untuk layanan konsultasi dan pengaduan berada pada ruangan khusus yang mudah diakses pengguna layanan. *d)* Tersedia sarana prasarana berkebutuhan khusus yang mendukung dalam pemberian	Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi			Sarpras belum sesuai rekomendasi	sarpras telah sesuai rekomendasi	

Rekomendasi		Tindaklanjut					
		Selesai	Belum		Kondisi sebelum	Kondisi Sesudah	
			Rencana Aksi	Timeline			
	layanan bagi kelompok rentan seperti petugas khusus, kursi roda, toilet khusus disabilitas, SP huruf braille dan lain sebagainya.						
	Sistem Informasi Pelayanan Publik *a)* Agar melengkapi unsur unsur sistem informasi (unsur profil penyelenggara, pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja lembaga) pada subsite UPP BPOM. *b)* Untuk keamanan data elektronik, seluruh UPP agar menggunakan subsite yang telah disediakan Pusdatin dengan	Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi			Sistem Informasi Pelayanan Publik belum sesuai rekomendasi	Sistem Informasi Pelayanan Publik telah sesuai rekomendasi	

Rekomendasi		Tindaklanjut					
		Selesai	Belum		Kondisi sebelum	Kondisi Sesudah	
			Rencana Aksi	Timeline			
	domain pom.go.id. *c)* Penyebarluasan informasi secara elektronik sangat baik namun agar tidak melupakan penyebarluasan informasi non elektronik agar memberi akses bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan IT. *d)* Mendorong UPP pro aktif mewujudkan dan berpartisipasi dalam Mall Pelayanan Publik di daerah. *e)* Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses						

Rekomendasi		Tindaklanjut					
		Selesai	Belum		Kondisi sebelum	Kondisi Sesudah	
			Rencana Aksi	Timeline			
	IT atau tidak melek IT.						
	Konsultasi dan Pengaduan *a)* UPP diharapkan mendokumentasikan hasil konsultasi dan pengaduan baik secara fisik maupun elektronik, dan secara berkala agar mempublikasikan hasil layanan konsultasi dan pengaduan baik secara elektronik maupun fisik dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan informasi melalui media sosial dan FAQ pada subsite UPP, *b)* Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/ba	Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi			Konsultasi dan Pengaduan belum sesuai rekomendasi	Konsultasi dan Pengaduan telah sesuai rekomendasi	

Rekomendasi		Tindaklanjut					
		Selesai	Belum		Kondisi sebelum	Kondisi Sesudah	
			Rencana Aksi	Timeline			
	han cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT atau tidak melek IT. *c)* Untuk konsultasi dan pengaduan yang sering ditanyakan dibentuk FAQ pada menu di subsite unit kerja.						
	Inovasi *a)* Setiap inovasi pelayanan publik dilengkapi dengan laporan pelaksanaan inovasi. *b)* Dalam pelaksanaan replikasi, UPP mendokumentasikan setiap inovasi yang yang telah direplikasi oleh organisasi pelayanan publik lain. c) Inovasi	Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi			Inovasi belum sesuai rekomendasi	Inovasi telah sesuai rekomendasi	

Rekomendasi		Tindaklanjut					
		Selesai	Belum		Kondisi sebelum	Kondisi Sesudah	
			Rencana Aksi	Timeline			
	pelayanan publik agar diikutsertakan dalam KIPP.						

A. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

- Informasi terkait indek pelayanan publik tahun 2023 dapat dimanfaatkan untuk meningkatan IPP tahun 2024
- Inovasi satu nomor pelayanan whatsapp KABAYAN (KAmi BAngga melaYaNi)
- Inovasi SATU POM JABAR merupakan inovasi pelayanan publik sertifikasi BBPOM Bandung.

7. PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik diukur dengan membandingkan jumlah UMKM yang memenuhi standar dengan jumlah UMKM yang sedang didampingi pada tahun berjalan. UMKM yang didampingi mencakup UMKM pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional. Adapun ruang lingkup UMKM-nya adalah sebagai berikut : (1) UMKM pangan mencakup skala usaha mikro dan kecil yang belum memiliki izin edar atau PIRT yang akan naik kelas ke MD; (2) UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi:

a) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional, b) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap, c) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up), d) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap, e) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor; dan (3) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) dan yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Sedangkan kriteria UMKM yang memenuhi standar adalah: 1) UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai ; 2) UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; 3) UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: a) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B) b) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); c) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik); d) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

TABEL 3.85
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI
YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU"
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA

	TA 2023	TA 2023	TA 2023		
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79.0%	83.33%	105,49%	SANGAT BAIK	

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

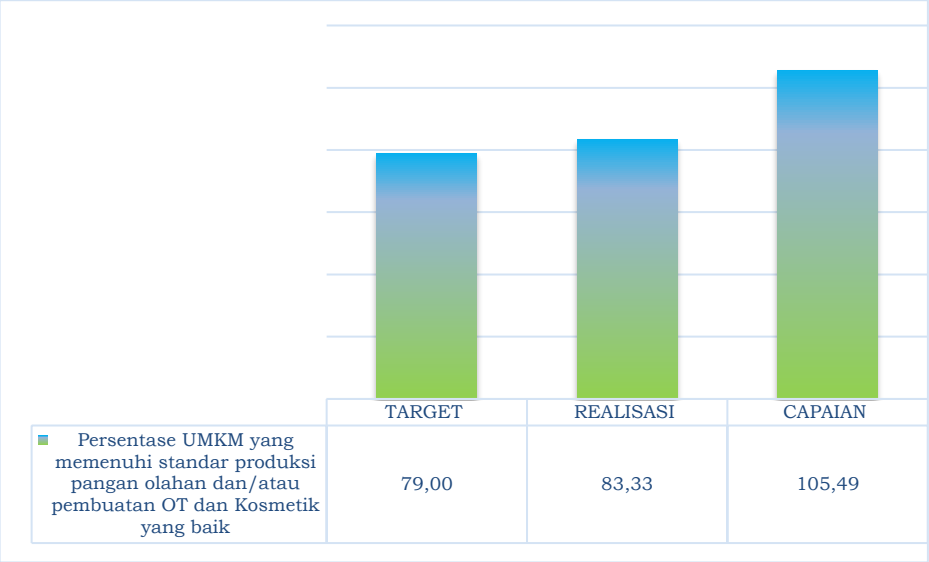

Gambar 3.88 Perbandingan target dengan realisasi kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2023

Pada tahun 2023, target persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik adalah sebesar 79.00%, sedangkan realisasi sebesar 83.33%. Dengan rincian tahapan yang telah dilaksanakan adalah tahapan penetapan UMKM pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional yang akan didampingi, pelaksanaan Bimbingan Teknis UMKM, tahapan fasilitasi/pendampingan dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPPOB,

SPA CPKB/rekomendasi BUPN dan CPOTB, tahapan sertifikasi atau monitoring evaluasi dan pelaporan ke Badan POM. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 105.49% dengan kriteria **Sangat Baik**.

TABEL 3.86

TAHAPAN PENDAMPINGAN UMKM PANGAN, KOSMETIK DAN OT

		TAHAPAN	Bobot	Bobot Kumulatif	Target Pelaksanaan	
	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Januari-Februari	Target Jumlah 4
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20%	30%	Maret-April	
Obat Tradisional	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40%	70%	Maret-Oktober	
	4	Sertifikasi	20%	90%	September-November	
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan	
Total Progres						
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	10%	Januari-Maret	Target Jumlah 7

	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	50%	Februari-Maret	
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-November	
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November	
Total Progres						
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	Target Jumlah 21
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei	
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September	
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-November	
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember	

Untuk tahapan kegiatan yang dilakukan, pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM pada tahun 2023 targetnya adalah 100% dan pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKMnya terealisasi 100%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **100 %**.

Di samping hal itu, untuk target persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di tahun 2023 adalah sebesar 79.00%, sedangkan realisasi sebesar 83.33%. Dengan rincian tahapan yang telah dilaksanakan adalah tahapan penetapan UMKM pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional yang akan didampingi, pelaksanaan Bimbingan Teknis UMKM, tahapan fasilitasi/pendampingan dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPPOB, SPA CPKB/rekomendasi BUPN dan CPOTB, tahapan sertifikasi

atau monitoring evaluasi dan pelaporan ke Badan POM. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **105.49%** dengan kriteria **Sangat Baik.**

TABEL 3.87

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN UMKM PANGAN. OT DAN KOSMETIK TAHUN 2023

No.	Komoditi	Jumlah UMKM Yang Didampingi	Penetapan UMKM	Bimtek UMKM	Pelaksanaan Fasilitasi	Sertifikasi	Pelaporan	% tahapan kegiatan pendampingan
1	Pangan	21	10%	20%	40%	20%	10%	100%
2	OT	4	10%	20%	40%	20%	10%	100%
3	Kosmetik	7	10%	20%	40%	20%	10%	100%
TOTAL						100%		

C. PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020, 2021 DAN 2022

Pengukuran terhadap persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik baru dilakukan pada tahun 2022. Pada tahun 2023, target tahapan pelaksanaan pendapingan/fasilitasi adalah sebesar 100% untuk tahapan kegiatan yang dilakukan. Pelaksanaan tahapan kegiatan pendampingan UMKM pada tahun 2023 adalah 100%. Dengan rincian tahapan yang telah dilaksanakan adalah tahapan penetapan UMKM pangan, kosmetik dan obat tradisional yang akan didampingi, pelaksanaan Bimtek UMKM dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendampingan UMKM.

Untuk target persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di tahun 2023 adalah sebesar 79.00%, sedangkan realisasi sebesar 83.33%. Dengan rincian tahapan yang telah dilaksanakan adalah tahapan penetapan UMKM pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional yang akan didampingi,

pelaksanaan Bimbingan Teknis UMKM, tahapan fasilitasi/pendampingan dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPPOB, SPA CPKB/rekomendasi BUPN dan CPOTB, tahapan sertifikasi atau monitoring evaluasi dan pelaporan ke Badan POM. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **105.49%** dengan kriteria **Sangat Baik**.

Pada tahun 2023, terjadi penurunan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik adalah 90,48%, sedangkan pada tahun 2023 persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik adalah 83,33%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan cara perhitungan realisasi penerbitan sertifkat/rekomendasi, Dimana sebelumnya dihitung persentase dari jumlah seluruh sertifikat/rekomendasi yang diterbitkan dibandingkan dengan jumlah target sarana UMKM, sedangkan di tahun 2023 persentase ditung dari persentase rata-rata dari masing-masing komoditi (pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional). Hal ini menyebabkan adanya penurunan hasil realisasi. Namun demikian, persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik masih melebihi target yang ditetapkan

Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.49.

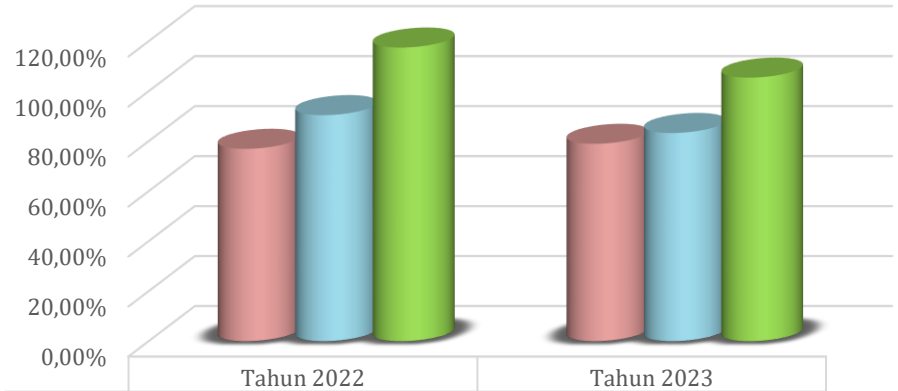

	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	77,00%	79,00%
Realisasi	90,48%	83,33%
Capaian	117,51%	105,48%

Gambar 3.89 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2022-2023

Untuk target persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di tahun 2023 adalah sebesar 79.00%, sedangkan realisasi sebesar 83.33%. Dengan rincian tahapan yang telah dilaksanakan adalah tahapan penetapan UMKM pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional yang akan didampingi, pelaksanaan Bimbingan Teknis UMKM, tahapan fasilitasi/pendampingan dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPPOB, SPA CPKB/rekomendasi BUPN dan CPOTB, tahapan sertifikasi atau monitoring evaluasi dan pelaporan ke Badan POM. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **105.49%** dengan kriteria **Sangat Baik**.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

TABEL 3.88
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI
YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU"
TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	TARGET RENSRA TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN	KATEGORI/ KRITRIA	
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81.0%	83.33%	105,49%	TERCAPAI	▲

Jika dibandingkan realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi p angan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada tahun 2023 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 102.88% dengan kategori **Tercapai**. Target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024 telah tercapai, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan capaian kinerja dengan melaksanakan rekomendasi yang telah disusun.

E. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

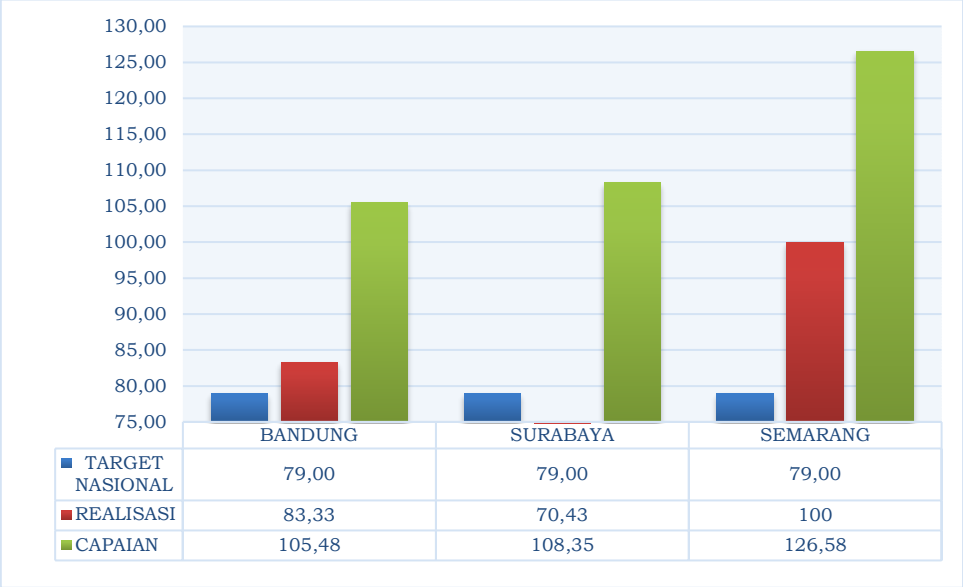

	BANDUNG	SURABAYA	SEMARANG
TARGET NASIONAL	79,00	79,00	79,00
REALISASI	83,33	70,43	100
CAPAIAN	105,48	108,35	126,58

Gambar 3.90 Perbandingan Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik Dengan Balai Lain Yang Sejenis/Setara Dan Target Nasional

Jika dibandingkan realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada tahun 2023 dengan target nasional (79.00%), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Semarang (100,00%), Balai Besar POM di Bandung (81,33%), Balai Besar POM di Surabaya (70,43%).

F. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar pada Tahun 2023 adalah memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan adanya hal berikut :

- Pendampingan UMKM Kosmetik dan Obat Tradisional merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan di tahun 2022, dan pada Tahun 2023 ini kegiatan tersebut sudah berjalan sesuai agenda yang ditetapkan.
- Sosialisasi kegiatan pendampingan UMKM yang secara masif dilakukan oleh BBPOM Bandung, meningkatkan animo/minat para pelaku usaha UMKM dalam terlibat aktif dalam program pendampingan ini.
- Komitmen yang kuat dari para pelaku usaha untuk segera berproses dalam kegiatan pendampingan mengakibatkan pelaksanaan kegiatan lebih cepat dibandingkan dengan perencanaan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis untuk mendukung kegiatan pendampingan UMKM sebagai fasilitator.
- Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/ Penggalangan Komitmen.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM.
- Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal pendampingan dan pembinaan UMKM.
- Meningkatkan sarana dan prasarana kerja pendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM.

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

TABEL 3.89

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK

TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	CAPAIAN TE
		Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
1	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	105,49 %	130.548.000	128.931.900	98,76	1,07	0,07	EFISIEN

H. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah beberapa regulasi yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian tahun 2023, antara lain:

- Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 mengatur tentang tahapan proses perizinan berusaha, termasuk proses perizinan yang berlaku di Badan POM. Hal ini menyebabkan adanya perubahan dalam hal tata cara dan prosedur perizinan yang bertujuan untuk memberikan adanya kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha.
- Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengatur tentang kemudahan untuk UMKM.

- Terbitnya PerBPOM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, yang merupakan perubahan atas penerbitan rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi pangan menjadi ijin penerapan CPPOB yang memudahkan pelaku UMKM pangan dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin penerapan CPPOB untuk sarana produksinya sehingga UMKM Pangan tersebut dapat melanjutkan proses registrasi pangan.

- Adanya Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.01.1.2.03.21.125 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerbitan Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika, mempercepat waktu pemenuhan (time line) dikeluarkannya rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika.

- Adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Cara Kosmetika Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 tahun 2019 tentang Pedoman Cara Kosmetika Yang Baik.

- Adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

- Adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik Secara Bertahap.

- Adanya Keputusan Kepala Badan POM Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik Bagi Usaha Mikro dan Kecil Pangan Olahan

- Berbagai Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen di Bidang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha yang diselenggarakan oleh

Balai Besar POM di Bandung secara rutin berdampak pada peningkatan pemahaman dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai peraturan yang berlaku.

Selain itu, adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian, meliputi:

- Bimtek dan Desk CAPA Bagi UMKM Pada tanggal 17 Maret 2023 yang merupakan kegiatan sosialisasi untuk memperkenalkan salah satu kegiatan pendampingan bagi UMKM yang dilakukan oleh BBPOM. Pada kegiatan ini para pelaku usaha diberikan materi terkait Penerapan Prinsip CPPOB pada Industri/UMKM Pangan Olahan, Pendaftaran Akun dan Dokumen Panduan Mutu, Pemaparan Materi Panduan Mutu Butir 1 -10, Alur Proses Produksi dan Pengendalian Proses, kemudian dilanjutkan dengan Desk Akun E-Sertifikasi dan Desk Penyusunan SOP antara pelaku usaha dengan Evaluator. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu para pelaku usaha untuk menyiapkan dokumen panduan mutu yang dipersyaratkan pada saat mengajukan permohonan ijin penerapan CPPOB sehingga meraka dapat mengupload dokumen tersebut dan mulai berproses di sistem/aplikasi e-sertifikasi. Bimtek ini merupakan salah satu kegiatan inovasi BBPOM Bandung, yaitu dalam rangka Booster UMKM Juara, namun tidak termasuk dalam tahapan kegiatan fasilitasi yang telah ditetapkan karena pada TW 1 tahapan yang dilaksanakan adalah penetapan target sarana UMKM yang akan difasilitasi/didampingi pada tahun 2023. Sementara untuk tahapan Bimtek untuk UMKM yang akan didampingi tersebut telah dijadwalkan untuk dapat dilaksanakan di awal pendampingan l TW 2

Gambar 3.91 Bimtek dan Evaluasi Desk CAPA Bagi Pelaku UMKM

- Pembinaan kepada para pelaku usaha obat tradisional dan kosmetik dalam acara Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM Obat Tradisional dan kosmetik yang diselenggarakan secara luring untuk 5 UMKM obat tradisional dan 8 UMKM kosmetik pada tanggal 13-14 April 2023. Pada hari pertama para pelaku usaha diberikan pemaparan materi terkait CPOTB/CPKB dan persyaratan pendaftaran OT/Kos, dilanjutkan desk dokumen panduan mutu pada hari kedua.

Gambar 3.92 Bimtek Pendampingan UMKM Kosmetik

Gambar 3.93 Bimtek Pendampingan UMKM Obat Tradisional

- Pembinaan kepada para pelaku usaha pangan olahan dalam acara Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM pangan Olahan yang diselenggarakan secara luring untuk 26 UMKM pangan olahan Pada tanggal 19-20 Mei 2023. Pada hari pertama para pelaku usaha diberikan pemaparan materi terkait CPPOB dan persyaratan pendaftaran pangan olahan, dilanjutkan desk dokumen panduan mutu pada hari kedua.

Gambar 3.94 Pembinaan kepada para pelaku usaha pangan olahan dalam acara Bimtek Pendampingan UMKM Pangan Olahan

Gambar 3.95 Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM Pangan Olahan

- Bimtek Peningkatan Wawasan SDM Bagi UMKM Pangan, peserta merupakan para pelaku usaha UMKM Pangan Olahan dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Dalam acara bimtek ini peserta mendapatkan materi terkait keamanan pangan, prosedur perizinan di bidang pangan, cara produksi pangan olahan yang baik dan materi terkait pengembanan usaha.

Gambar 3.96 Bimbingan Teknis Peningkatan Wawasan UMKM Pangan

Gambar 3.97 Bimbingan Teknis Peningkatan Wawasan UMKM Pangan

- Sosialisasi dan Desk Registrasi Booster UMKM Juara yang diikuti oleh 50 pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Penerapan CPPOB oleh Balai Besar POM Di Bandung Bekerja sama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan Bagan POM RI, pada tanggal 26-27 Juni 2023. Pelaku usaha yang menjadi peserta pada kegiatan ini merupakan UMKM yang mendapatkan fasilitasi dan pendampingan dari BBPOM di Bandung untuk tahun 2022 dan 2023. Para pelaku usaha didampingi dan dibantu

untuk melakukan pendaftaran akun dan pendaftaran produk pangan olahan oleh petugas dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Balai Besar POM Di Bandung untuk percepatan mendapatkan nomor izin edar. Output dari kegiatan Desk Registrasi ini adalah telah berhasil menerbitkan 24 nomor izin edar (NIE) dan 11 akun perusahaan

Gambar 3.98 Kegiatan Desk Registrasi Pangan dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan

Gambar 3.99 Para pelaku usaha mendapatkan NIE pada kegiatan Desk Registrasi Pangan dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan

- Bimtek Pelaku Usaha dan Desk Evaluasi Dokumen Booster UMKM Juara yang diikuti oleh 40 pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan Izin Penerapan CPPOB Bekerja sama dengan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Badan POM RI, pada tanggal 28-29 Agustus 2023. Sebagian besar pelaku usaha yang menjadi peserta pada kegiatan ini merupakan UMKM yang mendapatkan fasilitasi dan pendampingan dari BBPOM di Bandung untuk tahun 2022 dan 2023. Para pelaku usaha didampingi dan dibantu untuk melakukan pendaftaran akun dan pendaftaran Izin Penerapan CPPOB oleh petugas dari Balai Besar POM Di Bandung untuk percepatan mendapatkan Sertifikat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. Output dari kegiatan Desk Registrasi ini adalah telah berhasil menerbitkan 21 Sertifikat Izin Penerapan CPPOB untuk UMK.

Gambar 3.100 Kegiatan Desk Registrasi Pangan dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan

Gambar 3.101 Para pelaku usaha mendapatkan NIE pada kegiatan Desk Registrasi Pangan dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan

- Desk CAPA Bagi UMKM yang merupakan salah satu kegiatan pendampingan bagi UMKM yang dilakukan oleh BBPOM pada tanggal 2 Oktober 2023 dan 27 Oktober 2023. Pada kegiatan ini para pelaku usaha diberikan pendampingan dalam hal menyelesaikan progress perbaikan langsung oleh masing-masing evaluator. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu para pelaku usaha untuk menyiapkan dokumen panduan mutu yang dipersyaratkan pada saat mengajukan permohonan ijin penerapan CPPOB sehingga

meraka dapat mengupload dokumen perbaikan (CAPA) tersebut dan menyelesaikan proses di sistem/aplikasi e-sertifikasi sehingga dapat diterbitkan sertifikat.

Gambar 3.102 Kegiatan Desk Evaluasi Dokumen Booster UMKM Juara tanggal 2 Oktober 2023

Gambar 3.103 Kegiatan Desk Evaluasi Dokumen Booster UMKM Juara Tanggal 27 Oktober 2023

Gambar 3.104 Kegiatan Desk Evaluasi Dokumen Booster UMKM Juara

- Sosialisasi dan Desk Registrasi Booster UMKM Juara yang diikuti oleh 50 pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Penerapan CPPOB oleh Balai Besar POM Di Bandung Bekerja sama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan Bagan POM RI, pada tanggal 16-17 November 2023. Pelaku usaha yang menjadi peserta pada kegiatan ini merupakan UMKM yang mendapatkan fasilitasi dan pendampingan dari BBPOM di Bandung untuk tahun 2022 dan 2023. Para pelaku usaha didampingi dan dibantu untuk melakukan pendaftaran akun dan pendaftaran produk pangan olahan oleh petugas dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Balai Besar POM Di Bandung untuk percepatan mendapatkan nomor izin edar. Output dari kegiatan Desk Registrasi ini adalah telah berhasil menerbitkan 35 nomor izin edar (NIE) dan 15 akun Perusahaan.

Gambar 3.105 Para pelaku usaha mendapatkan NIE pada kegiatan Desk Registrasi Pangan dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan

Gambar 3.106 Para pelaku usaha mendapatkan Bimbingan Teknis dan Desk Registrasi Pangan dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan

I. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

TABEL 3.90

MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI

"INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN"

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
a	Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis untuk mendukung kegiatan pendapingan UMKM sebagai fasilitator	Mengikutsertakan petugas fasilitator UMKM dalam pelatihan terkait pembinaan UMKM	-	-	Fasilitator belum maksimal memberikan informasi yang diperlukan oleh pelaku usaha sehingga sarana yang memenuhi ketentuan masih sedikit	Fasilitator UMKM percaya diri dalam mendampingi proses perizinan pelaku usaha sehingga sarana yang memenuhi ketentuan memenuhi target yang ditetapkan
b	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada para pelaku UMKM obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen para	-	-		

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
		pelaku usaha tersebut				
c	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal pendampingan dan pembinaan UMKM	Menjalin kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal pendampingan dan pembinaan UMKM	-	-		

J. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

- Fungsi sertifikasi membuat program Bimtek Pelaku Usaha dan desk Evaluasi Dokumen yang dilaksanakan setiap semester. Kegiatan ini merupakan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha baru yang sedang melakukan proses registrasi pendafataran produk Obat dan Makanan. Dengan program ini proses perbaikan dan pemenuhan persyaratan oleh Pelaku Usaha menjadi lebih cepat dan baik, sehingga waktu yang diperlukan pelaku usaha dalam proses registrasi menjadi lebih cepat dan mudah. Dengan program ini pelaku usaha akan lebih mudah dan cepat untuk dapat memenuhi standar cara produksi yang baik.

- Perluasan cakupan pelaku usaha UMKM yang didampingi melalui kegiatan Booster UMKM dengan melibatkan lintas sektor yang lainnya sehingga mampu meningkatkan jumlah pelaku usaha UMKM yang memiliki perizinan di bidang Obat dan Makanan sesuai ketentuan.

SASARAN KEGIATAN KE-5

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh capaian sebesar **100,01%** dengan kriteria **Sangat Baik**. Hasil Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.91.

TABEL 3.91
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-5
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TA 2023	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KRITERIA	
1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,70	95,75	100,05	SANGAT BAIK	
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	112,00	112,00	100,00	BAIK	
3. Jumlah desa pangan aman	37,00	37,00	100,00	BAIK	
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	18,00	18,00	100,00	BAIK	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**100,01%**	**SANGAT BAIK**	

1. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Beberapa jenis Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (a) KIE melalui media cetak dan elektronik; (b) KIE langsung ke masyarakat; dan (c) KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: (a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; (c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; (d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Pengolahan data kuesioner KIE dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan Badan POM yang dilakukan setiap semester.

Penetapan hasil pengukuran indikator berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor : B-OT.03.02.22.22.01.24.16 Tanggal 12 Januari 2024 tentang Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan IV tahun 2023.

Pengukuran indikator tersebut menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4(empat) aspek KIE yang terdiri dari: (1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima; (3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan (4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan. Kategori penilaian yang digunakan pada tahun sebagai berikut:

TABEL 3.92
KATEGORI PENILAIAN
"TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN"
TAHUN 2023

SKOR INDEKS 100	INTERPRESTASI EFEKTIFITAS

<65.00	Kurang Efektif
65.01 - 75.00	Cukup Efektif
75.01 - 85.00	Efektif
85.01 - 95.00	Sangat Efektif
95.01 – 100	Sangat Efektif Sekali

TABEL 3.93
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN"
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KRITERIA	
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,7	95,75	100,05	SANGAT BAIK	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 95,70% dengan realisasi tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan sebesar 95,75% (Sangat Efektif Sekali) sesuai Kategori Penilaian tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan. Nilai tersebut di atas Indeks Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada tingkat nasional UPT Balai Besar/Balai POM sebesar 94,42. Persentase capaian target dengan realisasi kinerja indikator sasaran tersebut adalah sebesar 100,05% dengan kriteria **Sangat Baik**.

Adapun rincian indeks per indikator adalah "ragam kegiatan" sebesar 95,51%, "pemahaman sebesar" 96,78%, "manfaat" sebesar 97,12% dan "minat" sebesar 90,63%. Indikator yang memberikan kontribusi terbesar berasal dari indicator "manfaat" yang menunjukkan bahwa masyarakat menilai bahwa kegiatan KIE ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

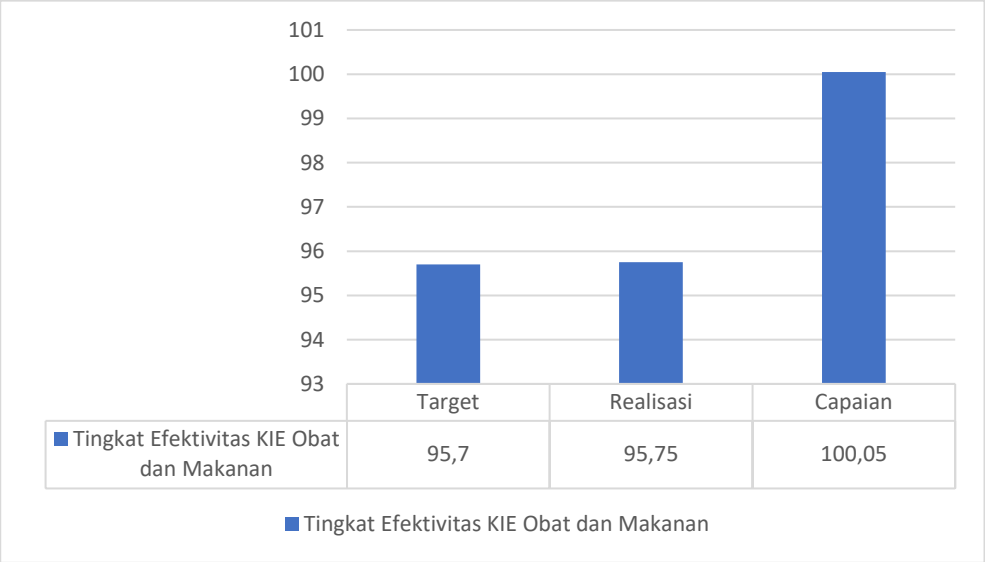

Gambar 3.107 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020, 2021, DAN 2022

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020, 2021 dan 2022, hal ini disebabkan oleh meningkatnya minat dan penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE dan penyebaran informasi mengenai obat dan makanan, disamping banyaknya ragam sumber informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sehingga menambah pemahaman masyarakat terhadap konten informasi obat dan makanan yang telah diberikan oleh Balai Besar POM di Bandung.

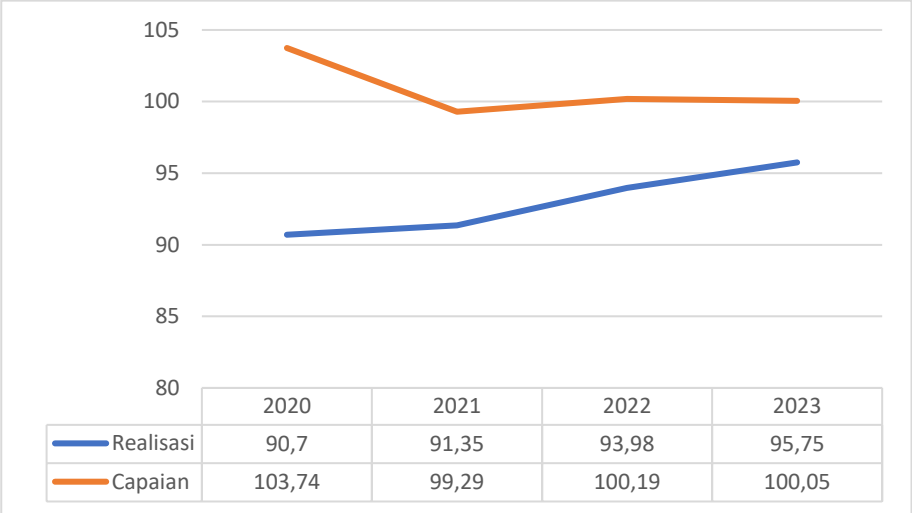

Gambar 3.108 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan tahun 2020, 2021, dan 2022

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

TABEL 3.94
PERBANDINGAN REALISASI
"TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN"
TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN	KRITERIA	
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	97,6	95,75	98,10%	AKAN TERCAPAI	

Jika dibandingkan realisasi tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pada tahun 2023 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 98,10% dengan kriteria **Akan Tercapai.** Untuk dapat mencapai target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI KINERA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

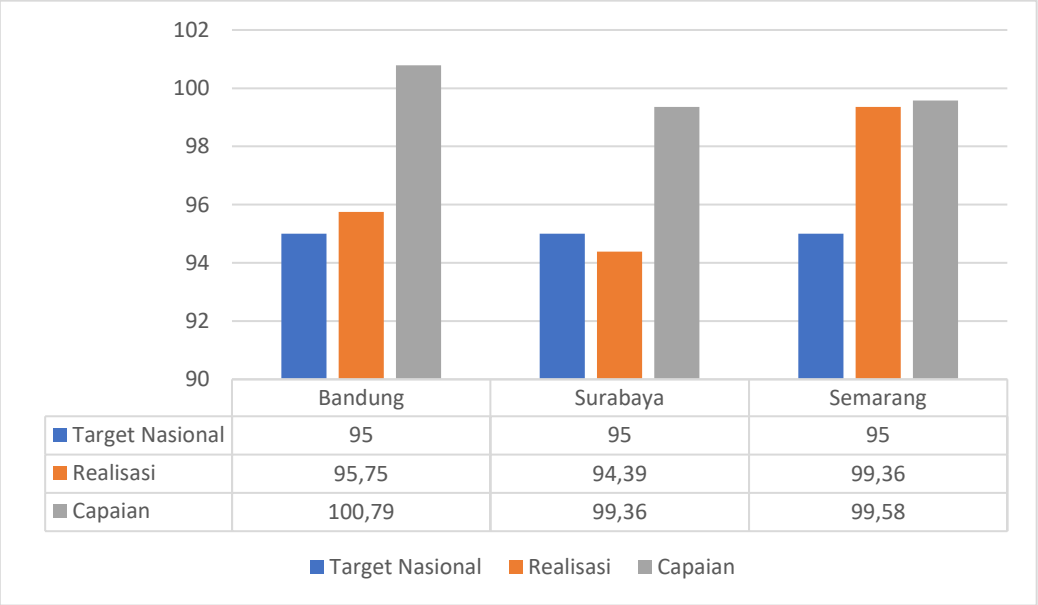

	Bandung	Surabaya	Semarang
Target Nasional	95	95	95
Realisasi	95,75	94,39	99,36
Capaian	100,79	99,36	99,58

Gambar 3.109 Perbandingan Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Balai Lain dan Target Nasional

Jika dibandingkan realisasi tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pada tahun 2023 dengan target nasional (95,00), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi yaitu Balai Besar POM di Bandung (100,79%), Balai Besar POM di Semarang (99,58%) dan Balai Besar POM di Surabaya (99,36%).

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Keberhasilan atas peningkatan pencapaian kinerja disebabkan antara lain:

- Penayangan informasi KIE melalui media sosial dilakukan secara konsisten, baik merupakan penayangan kembali informasi yang disampaikan oleh Badan POM maupun produk informasi yang dihasilkan oleh tim media sosial Balai Besar POM di Bandung.

- Kegiatan KIE Obat dan Makanan dilakukan secara langsung kepada masyarakat baik berupa kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandung secara mandiri maupun kegiatan kolaborasi bersama lintas sector, antara lain:
  1. Kegiatan kolaborasi bersama Tokoh Masyarakat,
  2. Kegiatan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Sarling Jabar),
  3. Kegiatan kolaborasi bersama lintas sector baik instansi pemerintah, perguruan tinggi maupun lembaga swasta, berupa kegiatan Bimtek, Workshop maupun Sosialisasi,
  4. Kegiatan kolaborasi bersama Organisasi Masyarakat (Pramuka),
  5. Kegiatan kolaborasi dengan stakeholder menggunakan media elektronik (radio), berupa *Talkshow* ataupun *Podcast*, Iklan Layanan Masyarakat.
  6. Kegiatan KIE melalui *Massage Blast*, Media Outdoor dan Informasi pada moda kendaraan
- Tim Media Sosial Balai Besar POM di Bandung mempunyai program penyebaran informasi melalui acara KELOM GEULIS, merupakan acara Podcast dengan tema mengenai obat dan makanan yang sedang popular di masyarakat.

Rekomendasi baik internal/eksternal untuk meningkatkan pencapaian kinerja antara lain :

- Berdasarkan hasil survei efektivitas KIE Balai Besar POM di Bandung tahun 2023, indicator yang paling kurang nilainya adalah aspek “minat” masyarakat terhadap kegiatan KIE, sehingga diperlukan upaya peningkatan minat masyarakat terhadap KIE yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung melalui pengembangan inovasi KIE sesuai dengan kebutuhan informasi per segmen target audiens dengan sentuhan kearifan local.
- Penjadwalan yang tidak konsisten menyebabkan program penyebaran informasi di Media Sosial tidak rutin ditayangkan, sehingga masyarakat kurang mendapatkan informasi mengenai produk obat dan makanan

- Melakukan penayangan informasi melalui layanan dengan berbagai platform aplikasi yang diminati masyarakat dan secara konsisten,
- Mengembangkan materi KIE sesuai sasaran dan menarik bagi audiens,
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap umpan balik dari Masyarakat melalui survei dan menindak lanjutinya secara cepat dan tepat,
- Memperluas cakupan KIE dengan cara mengembangkan kerjasama dengan tokoh Masyarakat dan lintas sektor terkait.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

TABEL 3.95
TINGKAT EFISIENSI
"TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN"
TAHUN 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,7	95,75	100,05	23.461.687.000	23.338.062.637	99,47	1,01	0,01	100%

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja. Persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 0,01 (100%) dengan kriteria **Efisien**. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung melakukan Upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menyebabkan keberhasilan pencapaian persyaratan kinerja:

- Selain program-program yang telah disampaikan di atas, program Iklan Layanan Masyarakat juga menunjang keberhasilan karena dengan program ini masyarakat lebih mengenal peran BPOM dalam mengawal produk obat dan makanan dan layanan-layanan yang diberikan Balai Besar POM di Bandung.

Gambar 3.110 Kegiatan Talkshow "Hati-Hati Penyalahgunaan Obat" bekerjasama dengan Radio Hardrock FM pada tanggal 4 Desember 2023 bertempat di d'Braga Hotel mengundang peserta mahasiswa dan masyarakat

Gambar 3.111. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan bersama Tokoh Masyarakat di Kabupaten Karawang

Gambar 3.112 Kegiatan Siaran Keliling (Sarling) bersama Lintas Sektor di Kabupaten Sumedang

Gambar 3.113 Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dengan tema "Peningkatan Pemahaman tentang Obat-Obat Tertentu" bekerjasama dengan BEM Universitas Pasundan pada bulan Agustus 2023

Gambar 3.114 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) SAKA POM bersama Kwarcab Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan kabupaten Garut secara Hybrid pada bulan November 2023

Pada implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan, Tim manajemen Risiko BBPOM Bandung, sudah melakukan identifikasi Risiko dan menetapkan Daftar Risiko dalam pencapaian IKU ini. Selanjutnya, dilakukan penilaian Risiko dan melakukan pengendalian terhadap Risiko tersebut, dengan hasil evaluasi Tahun 2023 sebagai berikut :

TABEL 3.96
IDENTIFIKASI RISIKO
TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN

No.	Kegiatan/ Proses Bisnis	Sumber Risiko	Issue ISO 9001:2015		Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Aktivitas Pengendalian saat ini		Level Risiko Residu
			Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko		Aktivitas Pengendalian	Simpulan Efektifitas Pengendalian	
1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Eksternal	Pengisian data kuisioner diluar kendali Internal	Pengolahan data kuesioner KIE dilakukan oleh Biro	IKU tidak tercapai	Koordinasi dengan Biro Humas	Efektif	3

			Balai	Hubungan Masyarakat				

Dari hasil evaluasi Risiko Tahun 2023 tersebut, dapat diketahui bahwa Risiko yang diidentifikasi, setelah dilakukan pengendalian, memiliki level Risiko residual yang rendah. Untuk itu perlu dilakukan penilaian ulang terhadap efektifitas pengendalian yang dilakukan, dan menambah bentuk pengendalian yang lain guna memastikan Risiko telah dikendalikan, melakukan mitigasi Risiko, dan melakukan pemutakhir daftar Risiko secara berkala, dengan melakukan identifikasi Risiko lain.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tebel berikut :

TABEL 3.97

MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI

"TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN"

Rekomendasi		**Tindaklanjut**			**Kondisi sebelum**	**Kondisi sesudah**
		Selesai	**Belum**			
			Rencana Aksi	**Timeline**		
a.	Melakukan survei sesuai periode triwulan tahun berjalan dan melakukan monitoring terhadap pemenuhan jumlah responden, termasuk proses	• Meningkatkan cakupan KIE yang dilakukan dengan bekerjasama dengan lintas sektor/Lembaga lain	-	-	Belum melakukan survei sesuai periode triwulan tahun berjalan dan melakukan monitoring terhadap pemenuhan jumlah responden,	Sudah melakukan survei sesuai periode triwulan tahun berjalan dan melakukan monitoring terhadap pemenuhan jumlah responden,

	cleaning jika terdapat data responden ganda	• Melaksanakan KIE melalui Webinar Warta POPA tentang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha maupun masyarakat luas • Menjaga Konsistensi kegiatan melalui Media Social			termasuk proses cleaning jika terdapat data responden ganda	termasuk proses cleaning jika terdapat data responden ganda
b.	Melakukan evaluasi dan Analisa terhadap hasil pengukuran masing-masing, untuk dapat mengembangkan strategi KIE yang lebih efektif		-	-	Belum melakukan evaluasi dan Analisa terhadap hasil pengukuran masing-masing, untuk dapat mengembangkan strategi KIE yang lebih efektif	Sudah melakukan evaluasi dan Analisa terhadap hasil pengukuran masing-masing, untuk dapat mengembangkan strategi KIE yang lebih efektif
c.	Melakukan koordinasi dengan Kelompok Substansi Pengaduan Masyarakat, Biro Hukum dan Organisasi apabila ada kendala dalam penggunaan aplikasi Evaluasi		-	-	Belum melakukan koordinasi dengan Kelompok Substansi Pengaduan Masyarakat, Biro Hukum dan Organisasi apabila ada kendala dalam penggunaan	Surat melakukan koordinasi dengan Kelompok Substansi Pengaduan Masyarakat, Biro Hukum dan Organisasi apabila ada kendala dalam penggunaan aplikasi Evaluasi KIE

	KIE				aplikasi Evaluasi KIE	

I. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Dari informasi kinerja yang didapatkan, fungsi infokom membuat program/kegiatan yang mendukung, meningkatkan dan/atau mempertahankan pencapaian kinerja tersebut, meliputi :

- Pelaksanaan KIE dengan BEM Mahasiswa untuk pemberdayaan dan peningkatan peran mahasiswa dalam pemberantasan peredaran produk Obat dan Makanan yang ilegal.
- Melakukan intensifikasi pelaksanaan KIE, dan juga diversifikasi media informasi yang digunakan. Karena dengan semakin banyaknya media informasi yang diakses oleh msyarakat, akan menaikan nilai efektiftas KIE tersebut.
- Kegiatan talkshow d'braga berupa penyebaran informasi dengan menghadirkan semua komponen Pentahelix (lintas sektor/pemerintah, akademisi, asosiasi pelaku usaha dan professional, media, dan Masyarakat umum).
- Pelaksanaan KIE SAKA POM bekerjasama dengan Kwarcab Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut dengan tujuan mencetak kader keamanan pangan .

2. JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman diukur berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Petunjuk Teknis Program Nasional Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).

TABEL 3.98
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"JUMLAH SEKOLAH DENGAN
PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN"
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KRITERIA	
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	112	112	100,00%	BAIK	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

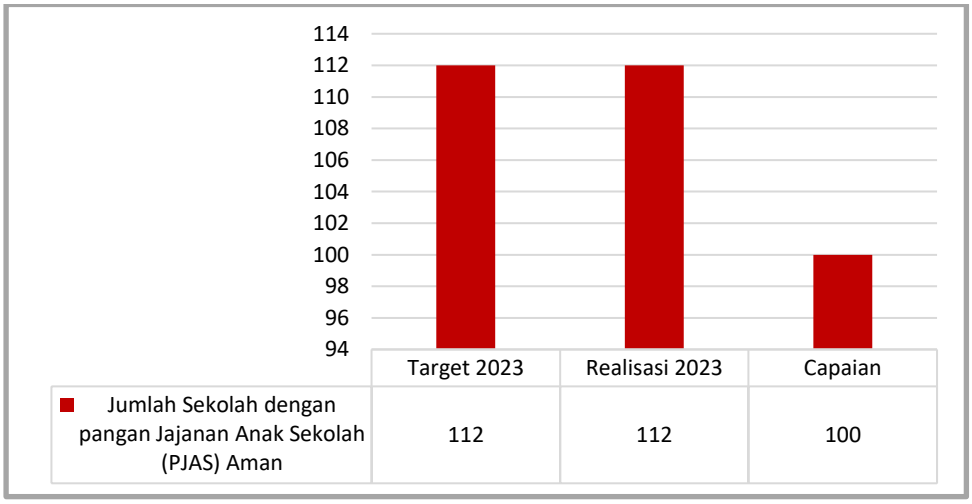

Gambar 3.115 Perbandingan Target dengan Realisasi kinerja Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023

Target yang ditetapkan pada indicator sasaran kegiatan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2023 adalah 112 sekolah (progress 100%). Realisasai jumlah sekolah dengan PJAS Aman sebanyak 112 sekolah. Dengan demikian persentase capaian target indicator sasaran tersebut adalah sebesar **100%** dengan kriteria **Baik.**

TABEL 3.99
JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN
TAHUN 2020-2023

Tahun Intervensi	Kab/Kota	Jumlah Sekolah
2020	Kabupaten Indramayu	5 sekolah
	Kabupaten Kuningan	11 sekolah
2021	Kota Cirebon	4 sekolah
	Kabupaten Cirebon	4 sekolah
	Kabupaten Majalengka	5 sekolah
	Kabupaten Sumedang	5 sekolah
	Kabupaten Karawang	4 sekolah
	Kabupaten Purwakarta	4 sekolah
2022	Kota Sukabumi	8 sekolah
	Kabupaten Ciamis	9 sekolah
	Kabupaten Banjar	9 sekolah
	Kabupaten Pangandaran	8 sekolah
2023	Kota Cimahi	8 sekolah
	Kabupaten Garut	9 sekolah
	Kabupaten Bekasi	9 sekolah
	Kabupaten Sukabumi	10 sekolah
Jumlah Target Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2023		112 sekolah

Pada tahun 2023, intervensi PJAS dilaksanakan di 36 sekolah dan dilakukan pengawalan di 76 sekolah yang sudah diintervensi pada tahun 2020-2022, sehingga jumlah target sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2023 adalah 112 sekolah, dengan rincian pada table 3.55

Intervensi sekolah dengan PJAS aman, dilakukan secara bertahap sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan Badan POM RI. Tahap kegiatan PJAS yang

dilaksanakan adalah Advokasi dengan lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan, Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan di Sekolah dan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman.

Secara rinci progress pelaksanaan kegiatan PJAS dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3.100
RENLAK DAN MONEV PELAKSANAAN KEGIATAN PJAS TAHUN 2023

KEGIATAN		PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRES (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Adokasi Lintas Sektor PJAS	20	15	5	0	0	20
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	10	0	10	0	0	10
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15	0	0	15	0	15
4	Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan	10	0	0	10	0	10
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (termasuk pengawalan tahun sebelumnya) • Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah • Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	15		0	15	0	15
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1	20	0	0	20	0	20

KEGIATAN		PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRES (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS
7	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1 (Tahun 2020 dan 2021)	10	0	0	0	0	0
TOTAL SKOR		**100**	**20**	**10**	**60**	**0**	**90**

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2022

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020, 2021 dan 2022, hal ini disebabkan bertambahnya jumlah sekolah yang diintervensi dan mendapat sertifikat Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak sekolah (PJAS) Aman.

Target setiap tahun adalah pengawalan terhadap Sekolah dengan PJAS Aman terdiri dari sekolah yang diintervensi tahun yang bersangkutan ditambah dengan jumlah sekolah yang telah dilakukan pengawalan terhadap sekolah yang diintervensi tahun sebelumnya.

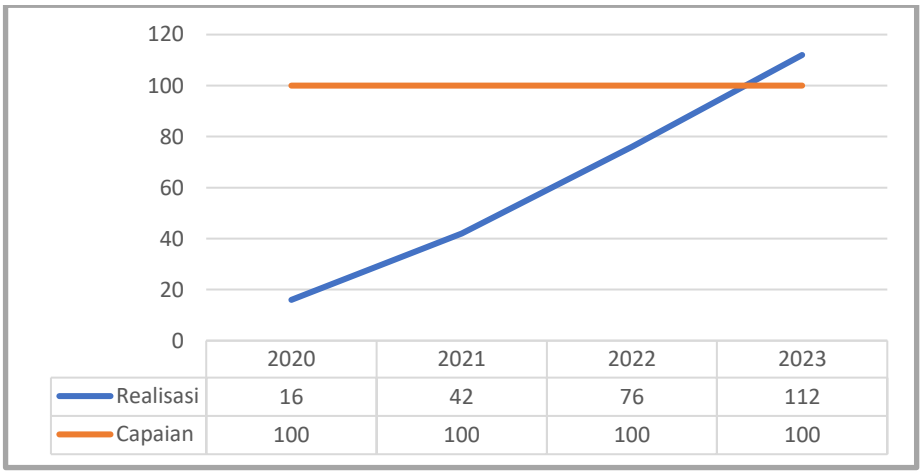

Gambar 3.116 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2020 s.d. 2023

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

TABEL. 3.101
PERBANDINGAN REALISASI
JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN
TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN	KRITERIA	
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	150	112	74,67%	▲	AKAN TERCAPAI

Jika dibandingkan realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada tahun 2023 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 74,67% dengan kriteria **Akan Tercapai**. Untuk dapat mencapai target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, perlu dlakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL

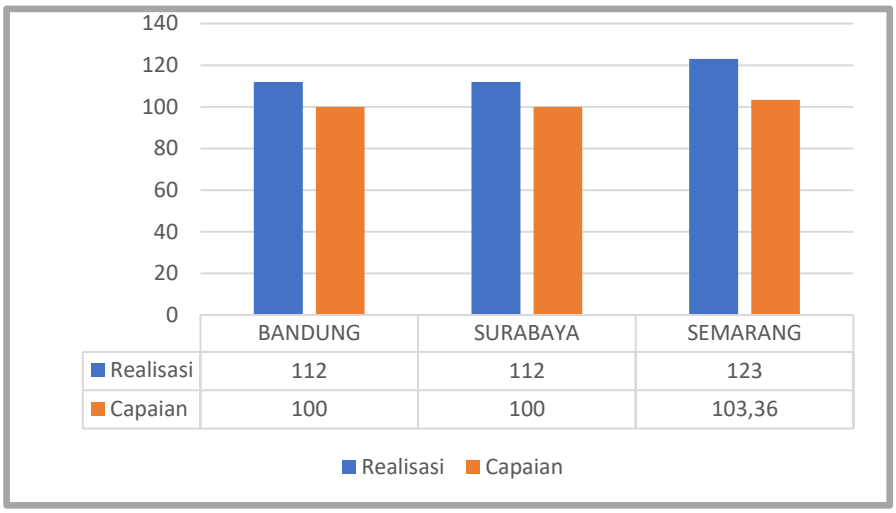

Gambar 3.117 Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023 dengan Balai Lain

Jika dibandingkan realisasi dan capaian jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada tahun 2023, maka pencapaian kinerja dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu : Balai Besar POM di Semarang (103,36%), Balai Besar POM di Bandung (100%) dan Balai Besar POM di Surabaya (100%). Sedangkan target nasional sebanyak 2767 sekolah di seluruh Indonesia, sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Peningkatan pencapaian kinerja sasaran disebabkan antara lain oleh **:**

- Dengan telah berakhirnya masa pandemic Covid 19, pelaksanaan tahapan program PJAS (Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan, Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah) dapat dilaksanakan secara luring. Pelaksanaan secara luring dapat mempermudah interaksi dan kolaborasi

yang dilakukan antara Balai Besar POM di Bandung dan Pemerintah Daerah yang diintervensi.

- Koordinasi dan Kerjasama dengan semua pihak terkait kegiatan intervensi sangat baik, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu. Kegiatan intervensi terhadap sekolah yang sudah dipilih melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementrian Agama, Adapun peserta dari sekolah adalah Guru Pengelola Kantin atau UKS/Kepala Sekolah, Perwakilan Komite Sekolah dan siswa.
- Pihak sekolah dan lintas sektor terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota) memandang pentingnya program Keamanan Pangan di Sekolah

Rekomendasi baik internal/eksternal untuk tahun 2024 diantaranya :

- Melaksanakan koordinasi dengan semua pihak terkait kegiatan intervensi Sekolah dengan PJAS Aman
- Melaksanakan kegiatan intervensi sesuai dengan pedoman dengan keselarasan dengan pemerintah daerah intervensi
- Melaksanakan tahapan kegiatan intervensi sesuai timeline yang ditentukan

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

TABEL 3.102
TINGKAT EFISIENSI
JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN TAHUN 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak	112	112	100	1.005.602.000	993.340.440	98,78%	1,01	0,01	100%

Sekolah (PJAS) Aman									

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman sebesar 0,01 (100,00) dengan kriteria **Efisien**. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut :

- Kegiatan intervensi dapat berhasil dalam pencapaian target kinerja, didukung oleh kegiatan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah setempat, sehingga program dapat dilaksanakan secara kommprehensif.
- Balai Besar POM di Bandung, mendapat tugas dalam pelaksanaan KIE dengan Tokoh masyarakat yang sangat banyak, namun dengan strategi dan bantuan personal dari fungsi yang lain, kegiatan KIE dan Program Prioritas Nasional dapat dilaksanakan sesuai target.

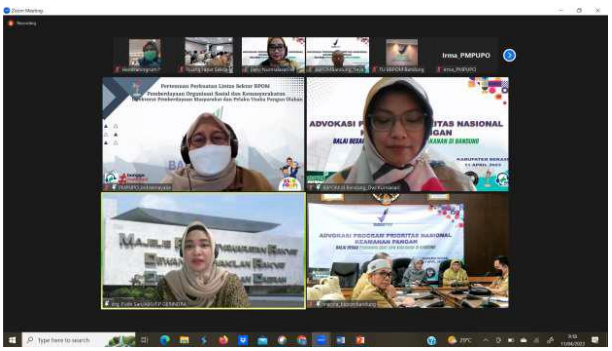

Gambar 3.118 Foto Kegiatan Advokasi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan

SOSIALISASI
KEAMANAN PANGAN

BADAN POM
SOSIALISASI
KEAMANAN PANGAN
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL KEAMANAN PANGAN
PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH

Gambar 3.119 Foto Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan

BADAN POM
IMBINGAN TEKNIS KEAMANAN PANGAN
NTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH

Gambar 3.120 Foto Kegiatan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah sekaligus penyerahan Paket Edukasi Keamanan Pangan untuk Sekolah

Gambar 3.121 Foto Kegiatan Pemberdayaan Kader : Sosialisasi oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah

Gambar 3.122 Foto Kegiatan Sampling dan Sertifikasi Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

TABEL 3.103
IDENTIFIKASI RISIKO
TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN

No.	Kegiatan/ Proses Bisnis	Sumber Risiko	Issue ISO 9001:2015		Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Aktivitas Pengendalian saat ini		Level Risiko Residu
			Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko		Aktivitas Pengendalian	Simpulan Efektifitas Pengendalian	
1	Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman	Eksternal	Pelaksanaan Program Prioritas Nasional tidak sesuai Juknis	Pemahaman Lintas Sektor dan komunitas sekolah yang masih kurang	IKU tidak tercapai	Melakukan monitoring setiap tahapan sesuai Juknis	Efektif	5

Dari hasil evaluasi Risiko Tahun 2023 tersebut, dapat diketahui bahwa Risiko yang diidentifikasi, setelah dilakukan pengendalian, memiliki level Risiko residual yang

rendah. Untuk itu perlu dilakukan penilaian ulang terhadap efektifitas pengendalian yang dilakukan, dan menambah bentuk pengendalian yang lain guna memastikan Risiko telah dikendalikan, melakukan mitigasi Risiko, dan melakukan pemutakhir daftar Risiko secara berkala, dengan melakukan identifikasi Risiko lain.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 3.104
TINDAK LANJUT REKOMENDASI SEBELUMNYA

Rekomendasi	Tindaklanjut			Kondisi sebelum	Kondisi sesudah
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melaksanakan koordinasi dengan semua pihak terkait kegiatan intervensi	Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah setempat, sehingga program dapat dilaksanakan secara komprehensif dan sesuai dengan pedoman	-	-	Belum melaksanakan koordinasi dengan semua pihak terkait kegiatan intervensi	Sudah melaksanakan koordinasi dengan semua pihak terkait kegiatan intervensi

I. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Dari informasi kinerja yang didapatkan, fungsi infokom membuat program/kegiatan yang mendukung, meningkatkan dan/atau mempertahankan pencapaian kinerja tersebut, dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi tahapan pelaksanaan, sehingga penjadwalan dan pelaksanaan intervensi dapat sesuai dengan ketentuan dan target tahapan yang sudah ditetapkan, dan semua tahapan dapat dipastikan terlaksana. Sehingga manfaat program kegiatan ini dapat dirasakan dan dapat direplikasi oleh pemda di sarana lokasi yang lain.

3. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Jumlah desa pangan aman diukur berdasarkan jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain. Tahapan pelaksanaan kegiatan Pembentukan Desa Pangan Aman: (1) Advokasi Kelembagaan Desa; (2) Bimtek Kader Pembentukan Desa Pangan Aman; (3) Bimtek Komunitas; (4) Fasilitasi Keamanan Pangan; (5) Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan; (6) Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Desa Pangan; (7) Lomba Desa; dan (8) Pengawalan. Hasil dari keseluruhan proses Audiensi dan Advokasi dengan pihak Pemda Kab/Kota yg diintervensi, Desa yang diintervensi meliputi 3 desa di Kabupaten Sukabumi yaitu Desa Kompa, Sukaraja dan Pasir Halang, 2 desa di Kabupaten Garut yaitu Desa Neglasari dan Giri Makmur; 2 desa di Kabupaten Bekasi yaitu Desa Kertarahayu dan Ciantra; 2 Kelurahan di Cimahi yaitu Kelurahan Citeureup dan Kelurahan Leuwi Gajah

TABEL 3.105
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"JUMLAH DESA PANGAN AMAN"
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	
Jumlah desa pangan aman	37	37	100%	BAIK	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini pada tahun 2023 adalah 37 Desa. Realisasi Indikator sasaran kegiatan tersebut sebesar 37 desa, maka capaiannya sebesar 100% dengan kriteria **Baik.**

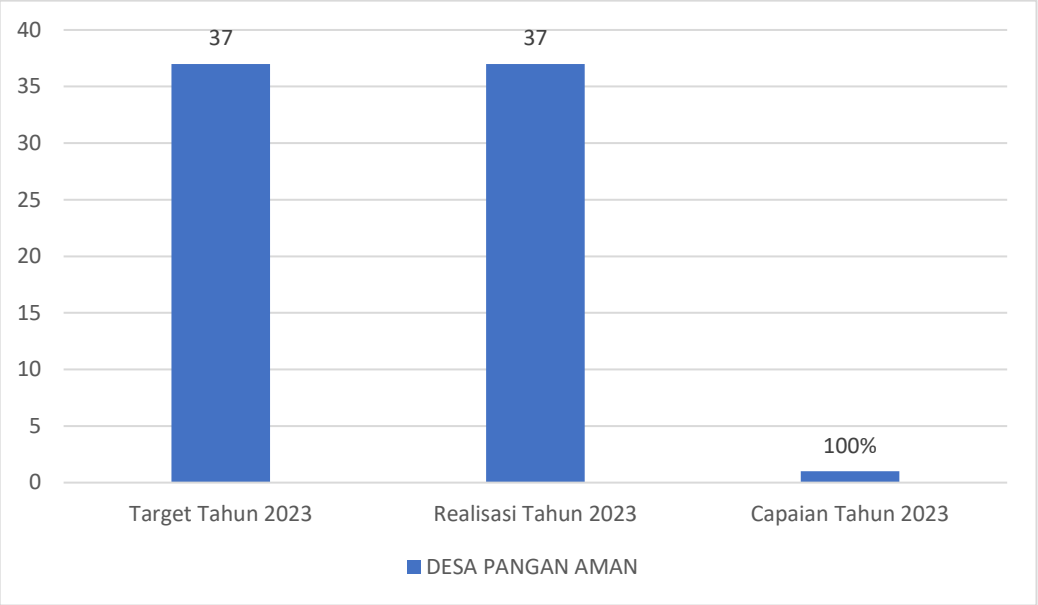

Gambar 3.123 Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja "Jumlah Desa Pangan Aman" Tahun 2023

TABEL 3.106
PROGRESS PELAKSANAAN DESA PANGAN AMAN
TAHUN 2023

KEGIATAN		PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRESS (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Adokasi Kelembagaan Desa	20	20	0	0	0	20
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit dll	5	0	5	0	0	5
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15	0	15	0	0	15
4	Bimtek Komunitas	15	0	0	15	0	15
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10	0	0	10	0	10
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10	0	0	0	10	10
7	Monitoring dan Evaluasi	15	0	0	0	15	15

8	Pengawalan tahun sebelumnya	10	0	0	0	10	10
TOTAL SKOR		**100**	**20**	**20**	**35**	**35**	**100**

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET TAHUN 2021, 2022 DAN 2023

Target tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 9 Desa (progress 100%).

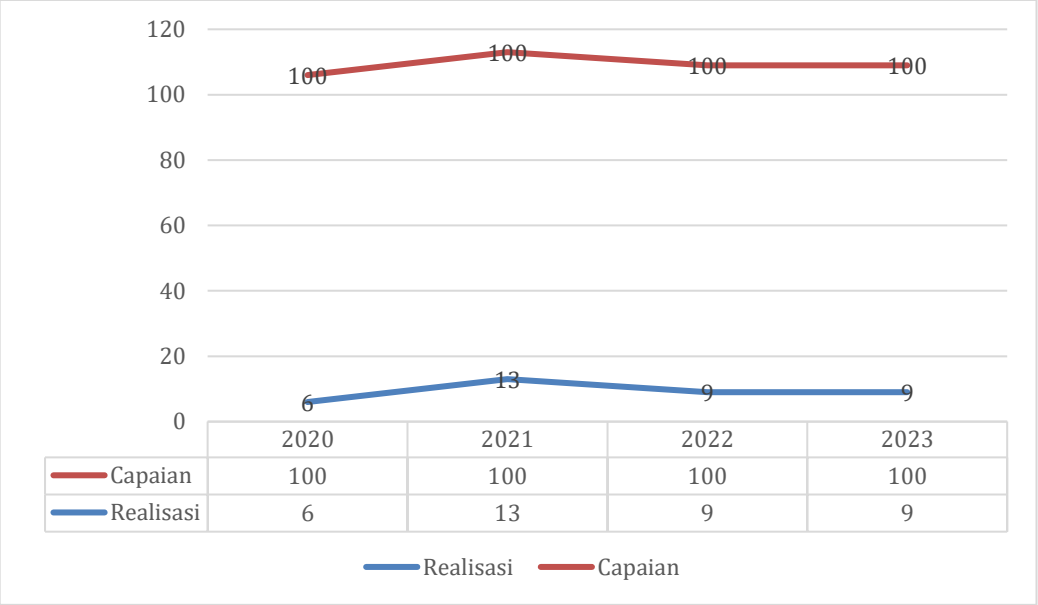

Gambar 3.124 Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja "Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2020-2023"

Pada Tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020, 2021 dan 2022, hal ini disebabkan oleh kegiatan Desa Pangan Aman terdiri dari desa yang diintervensi tahun ini sebanyak 9 desa dan desa yang diintervensi pada tahun 2020, 2021 dan 2022 (pengawalana) sebanyak 28 desa, sehingga capaian kinerja tahun 2023 mengalami kenaikan jumlah desa menjadi 37 desa.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

TABEL 3.108
PERBANDINGAN REALISASI "JUMLAH DESA PANGAN AMAN " TAHUN 2022
DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN	KRITERIA	
Jumlah Desa Pangan Aman	45	37	82,22%	AKAN TERCAPAI	

Jika dibandingkan realisasi jumlah desa pangan aman pada tahun 2023 terhadap target akhir renstra Tahun 2020-2024, maka pencapaian kinerjanya sebesar 82,22% dengan kriteria **AKAN TERCAPAI.** Untuk dapat mencapai target akhir tahun Resntra Tahun 2020-2024, perlu duilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

Jika dibandingkan realisasi jumlah desa pangan aman pada tahun 2023, maka pencapaian kinerja dari ketiga Balai Besar yaitu Balali Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Semarang dan Balai Besar POM di Bandung memiliki realisasi yang sama yaitu 37 Desa serta pencapaian Kinerja keseluruhan mencapai 100,00%.

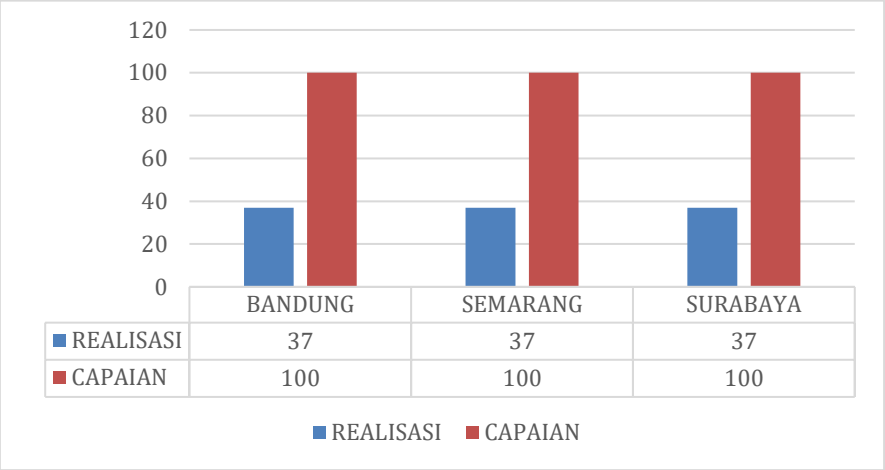

Gambar 3.125 Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja

"Jumlah Desa Pagan Aman " Tahun 2023

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja ini disebabkan karena :

- Telah dilakukan perencanaan program dan monitoring terhadap pelaksanaan program tersebut
- Anggaran yang tersedia sudah sesuai dengan perencanaan kegiatan
- Koordinasi lintas sektor
- Dukungan Pemerintah daerah atas keberhasilan program

Rekomendasi yang akan digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja pada period berikutnya antara lain:

- Pembuatan perencanaan program dan monitoring terhadap pelaksanaan program yang lebih baik
- Penggunaan anggaran yang tersedia lebih efektif sesuai dengan perencanaan kegiatan
- Peningkatan advokasi untuk mendapatkan dukungan Pemerintah daerah atas keberhasilan program

- Peningkatan komitmen pemerintah Desa /Kelurahan untuk dapat menlanjutkan program Desa Pangan Aman
- Peningkatan pemanfaatan test kit pengawasan pangan yang beredar di Desa/Kelurahan

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

TABEL 3.110
TINGKAT EFISIENSI
"JUMLAH DESA PANGAN AMAN"
TAHUN 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Jumlah Desa Pangan Aman	37	37	100	1.149.720.000	1.144.973.560	99,59	1,00	0,00	EFISIEN

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program Desa Pangan Aman yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Audiensi dan Advokasi kepada pemerintah daerah Kab Sukabumi, Kab Bekasi, Kab Garut dan Kota Cimahi. Audiensi kepada pemerintah daerah (Provinsi/kab/kota)/Dinas terkait, termasuk inventarisasi program lintas sektor yang dapat diintegrasikan. Pemilihan Desa yang akan dijadikan target intervensi berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah/Dinas terkait sesuai kriteria yang ditetapkan. Kemudian Dilakukan Advokasi yang menghasilkan rekomendasi mengenai sinergisme pelaksanaan desa pangan aman di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Bekasi dan Kota Cimahi. Kegiatan Advokasi di kabupaten Sukabumi dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023, di kabupaten Garut pada Tanggal 27 Maret 2023, di Kabupaten Bekasi pada Tanggal 11 April 2023 dan di Kota Cimahi dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2023. Secara umum

pelaksanaan kegiatan tersebut telah terselenggara sesuai dengan juknis yang ditetapkan oleh Badan POM.

Gambar 3.126 Advokasi dengan lintas sektor yang dihadiri oleh Anggota Komis IX DPR RI, drg. Putih Sari

- Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa

Pelatihan kader Keamanan pangan bertujuan untuk melakukan pendampingan implementasi keamanan pangan kepada komunitas desa dan melakukan pengawasan keamanan pangan di desa. Pelatihan Kader dilaksanakan selama 2 hari. Hari ke-1 dilakukan pengambilan data (kuisioner)sebelum pemberian materi, dilanjutkan dengan materi. Hari ke-2 dilakukan simulasi *rapid test kit*. Dimana Tiap desa diberikan 1 paket *rapid test kit* oleh BBPOM di Bandung. Kemudian dilakukan latihan mengajar /*Micro Teaching*.

Kader yang dilatih dari tiap desa yang direkomendasikan oleh kepala Desa/Lurah sebanyak 18 orang. Berikut table Jumlah dan pelaksanaan Bimbingan Teknis Kader Desa Pangan Aman.

TABEL 3.111
PELAKSANAAN BIMTEK KADER KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2023

NO.	KABUPATEN/KOTA	PELAKSANAAN	DESA	JUMLAH KADER
1.	Kota Cimahi	25-26 Mei 2023	Kelurahan Leuwigajah	18 Orang
			Kelurahan Citeureup	18 Orang
2.	Kabupaten Garut	5-6 Juni 2023	Desa Sukanegla	18 Orang

			Desa Girimakmur	18 Orang
3.	Kabupaten Bekasi	13-14 Juni 2023	Desa Ciantra	18 Orang
			Desa Kertarahayu	18 Orang
4.	Kabupaten Sukabumi	22-23 Juni 2023	Desa Kompa	18 Orang
			Desa Pasirhalang	18 Orang
			Desa Sukaraja	18 Orang

Gambar 3.127 Kader Keamanan pangan desa

- Bimbingan Teknis Komunitas Desa

Bimbingan Teknis komunitas Desa (Masyarakat dan pelaku usaha pangan desa) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman komunitas desa terhadap keamanan pangan. Jumlah masyarakat dan pelaku usaha pangan desa yang mendapatkan bimtek komunitas yaitu 54 orang per desa. Pelaku Usaha terdiri dari pelaku usaha pangan siap saji, pangan industry rumah tangga, dan pelaku usaha ritel. Kemudian komunitas desa terdiri dari PKK/Ibu rumah tangga, pemuda dan guru/siswa sekolah. Untuk Pelaku Usaha Pangan Siap Saji diharapkan mendapatkan sertifikat Laik Sehat Untuk Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan diharapkan mendapatkan SertifikatPIRT.

Bimtek Komunitas Masyarakat dilaksanakan pada :

TABEL 3.112

PELAKSANAAN BIMTEK KOMUNITAS DESA

No	Wilayah	Bimtek PUPD	Bimtek Komunitas Masyarakat Desa
1	Kota Cimahi	13-14 Juli 2023 Hotel Valore Cimahi	20 Juli 2023 : kel leuwigajah di kantor keluarahan Leuwigajah Kota Cimahi 21 Juli 2023 : kel. Citeureup di SMK 3 Citeureup kota Cimahi
2	Kabupaten Garut	26-27 Juli 2023 Hotel Harmoni Cipanas Garut	3 Agustus 2023 : SDN 1 Girimakmur Kab Garut 4 Agustus 2023 : SDN 3 Sukanegla Kab Garut
3	Kabupaten Bekasi	2-3 Agustus 2023 Hotel Grand Zuri Jababeka Cikarang Kab Bekasi	9 Agustus 2023 : SD 03 Kertarahayu Kab Bekasi 10 Agustus 2023 : Kantor Desa Ciantra Kab Bekasi
4	Kabupaten Sukabumi	14-15 Agustus 2023 Hotel Pangango Selabintana Kab Sukabumi	24 Agustus 2023 : Balai Desa Kompa Kab Sukabumi 25 Agustus 2023 : Balai Desa Sukaraja Kab Sukabumi 26 Agustus 2023 : Balai Desa Pasirhalang Kab Sukabumi

Gambar 3.128 Bimtek komunitas masyarakat

Bimtek Komunitas PUPD dan komunitas masyarakat berjalan sesuai juknis, keberhasilan dari bimtek komunitas adalah Anaya sinergitas dari dinas Kesehatan kabupaten/kota, sehingga outputnya berupa SPPIRT dan Laik sehat dapat tercapai.

- Fasilitasi Keamanan Pangan

Kegiatan fasilitasi keamanan pangan desa bertujuan untuk memberikan pendampingan praktek keamanan pangan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dan pelaku usaha pangan desa dalam menerapkan keamanan pangan. Pelaksanaan fasilitasi dilakukan oleh KKPD dan Petugas Dinkes dengan didampingi oleh Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) di setiap Desa/Kelurahan yang diintervensi. Fasilitasi dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan rentang waktu 3-4 minggu.

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi keamanan pangan pada table berikut.

TABEL 3.113

PELAKSAANAAN KEGIATAN FASILITASI KEAMANAN PANGAN

KABUPATEN/ KOTA	DESA/ KEL.	FASILITASI I	REALIASI	FASILITASI II	REALISASI
Kota Cimahi	Citeureup	Kader :1 Agustus 2023 PKP/DFI/ Sanitarian : 1-4 Agustus 2023	Sesuai	Kader :1 September 2023 PKP/DFI/ Sanitarian : 4-7 September 2023	Sesuai
	Leuwigajah	Kader :1 Agustus 2023 PKP/DFI/ Sanitarian : 7-11 Agustus 2023	Sesuai	Kader :1 September 2023 PKP/DFI/ Sanitarian : 11-14 Sept 2023	Sesuai
Kabupaten Garut	Girimakmur	Kader :7 Agustus 2023 PKP/DFI/ Sanitarian : 8-11 Agustus 2023	Sesuai	Kader :4 September 2023 PKP/DFI/ Sanitarian : 5-8 September 2023	Sesuai
	Sukanegla	Kader :7 Agus	Sesuai	Kader :4	Sesuai

		2023 PKP/DFI/ Sanitarian : 21-24 Agust 2023		September 2023 PKP/DFI/ Sanitarian : 11-14 Sept 2023	
Kabupaten Bekasi	Ciantra	Kader :14 Agustus 2023 PKP/DFI/ Sanitarian : 28-31 Agust 2023	Sesuai	Kader :11 September 2023 PKP/DFI/ Sanitarian : 18-21 Sept2023	Sesuai
	Kertarahayu	Kader :14 Agustus 2023 PKP/DFI/ Sanitarian : 21-24 Agust 2023	Sesuai	Kader :11 September 2023 PKP/DFI/ Sanitarian : 12-15 Sept 2023	Sesuai
Kabupaten Sukabumi	Pasirhalang	Kader :28 Agustus 2023 PKP/DFI/ Sanitarian : 4-7 September 2023	Sesuai	Kader :21 September 2023 PKP/DFI/ Sanitarian : 25-28 Sept 2023	Sesuai

	Sukaraja	Kader :28 Agustus 2023 PKP/DFI/ Sanitarian : 28-31 Agust 2023	Sesuai	Kader :21 September 2023 PKP/DFI/ Sanitarian : 18-21 Sept 2023	Sesuai
	Kompa	Kader :28 Agustus 2023 PKP/DFI/ Sanitarian : 22-25 Agust 2023	Sesuai	Kader :21 September 2023 PKP/DFI/ Sanitarian : 11-14 Sept 2023	Sesuai

Gambar 3.129 Fasilitasi Keamanan Pangan

- Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan

Sampling dan uji produk pangan menggunakan *Rapid Test Kit* dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pre intervensi (dilakukan bersamaan dengan kegiatan bimtek komunitas) dan post Intervensi (dilakukan setelah kegiatan fasilitasi keamanan pangan). Produk pangan yang diutamakan untuk disampling adalah produk PIRT yang berasal dari IRTP di desa target, pangan siap saji. Pangan olahan yang tidak memiliki ijin edar dapat dilakukan sampling dan diuji untuk ditindaklanjuti. Hasil pengujian sampel yang digunakan untuk memastikan praktek keamanan pangan sudah diterapkan di desa.

Intensifikasi pengawasan terhadap label produk IRTP pangan olahan

Produk yang diutamakan untuk disampling label adalah produk PIRT pangan olahan yang berasal dari IRTP di Desa target. Pengamatan dilakukan terhadap kesesuaian label pangan olahan sebagaimana tercantum dalam PP 69 tahun 1999 dan Perka BPOM Nomor 20 Tahun 2021, serta pengujian *rapid test kit.* Intensifikasi pengawasan label produk IRTP pangan olahan dilakukan melalui kegiatan mobling ole petugas Balai Besar POM di Bandung sebanyak 1 kali.

Pelaksanaan Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan sebagai berikut.

TABEL 3.114

PELAKSANAAN INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

KABUPATEN / KOTA	DESA/ KELURAHAN	PRE INTERVENSI	REALIASI	POST INTERVENSI	REALISASI
Kota Cimahi	Citeureup	21 Juli 2023	Sesuai	18 September 2023	Sesuai
	Leuwigajah	20 Juli 2023	Sesuai	19 September 2023	Sesuai
Kabupaten Garut	Girimakmur	3 Agustus 2023	Sesuai	9 Oktober 2023	Sesuai
	Sukanegla	4 Agustus 2023	Sesuai	10 Oktober 2023	Sesuai
Kabupaten Bekasi	Ciantra	10 Agustus 2023	Sesuai	25 September 2023	Sesuai
	Kertarahayu	9 Agustus 2023	Sesuai	25 September 2023	Sesuai
Kabupaten Sukabumi	Pasirhalang	25 Agustus 2023	Sesuai	11 Oktober 2023	Sesuai
	Sukaraja	24 Agustus 2023	Sesuai	11 Oktober 2023	Sesuai
	Kompa	23 Agustus 2023	Sesuai	13 Oktober 2023	Sesuai

- Lomba Desa Pangan Aman

Lomba Desa Pangan Aman bertujuan untuk menumbuhkan dan mendorong semangat, kreativitas dan partisipasi masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dalam upaya mewujudkan keamanan pangan di Desa. Lomba Desa dilaksanakan pada tingkat provinsi dan tingkat nasional. Pada tingkat provinsi terpilih Desa Ciantra Kabupaten Bekasi sebagai juara dan mewakili desa yang diintervensi tahun 2023 masuk pada tingkat nasional. BBPOM Bandung memberikan pendampingan dalam persiapan penyusunan profil Desa pangan aman. Kendala

- Pengawalan Desa Pangan Aman

Pengawalan bertujuan memastikan bahwa desa yang diintervensi melaksanakan program keamanan pangan secara berkelanjutan.Pengawalan dilakukan untuk desa yang diintervensi tahun sebelumnya. Pelaksanaan Pengawalan pada tanggal 5 Oktoer 2023 secara Darimg. Selain pemaparan materi, dilakukan diskusi mengenai rencana aksi yang sudah disusun oleh para kader dengan berkerjasama dengan perangkat desa. Dibahas mengenai program yang sudah disusun, realisasi pelaksanaan serta kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan rencana aksi. Kendala desa sulit untuk menganggarkan dalam APBDes program desa panga aman. Kemudian rencana Aksi yang sudah dibuat, bebrapa kegiatan tidak terlaksana dikarenakan padatnya kegiatan di desa.

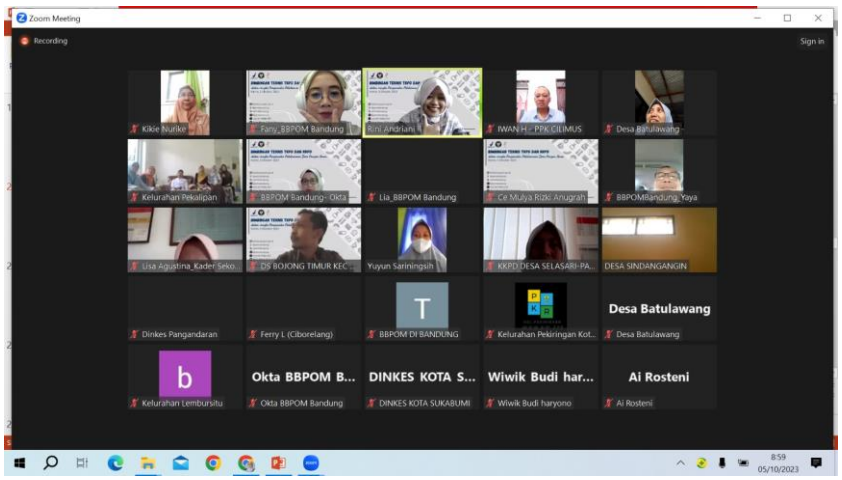

Gambar 3.130 Pengawalan Desa Pangan Aman

- Monitoring dan Evaluasi

  Pada TW IV dilaksanakan Workshop Monitoring dan Evaluasi yang mengundang lintas sektor Desa Pangan Aman yang diintervensi tahun 2023.Pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi semua desa yang diintervensi mengumpulkan rencana aksi program desa pangan aman tahun 2024. Kendala pada kegiatan ini adalah Pemerintah Daerah belum dapat menunjukkan rencana replikasi program Desa Pangan Aman selanjutnya.

Gambar 3.131 Pembukaan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional oleh Dr. H. Firman Adam, S.Pd., M.M.Pd.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi yang disampaikan untuk ditindaklanjuti terkait pelaksanaan Desa Pangan aman di tahun 2023 yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut.

TABEL 3.115
REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT TERHADAP PROGRAM
TAHUN 2023

Rekomendasi	Tindaklanjut			Kondisi sebelum	Kondisi sesudah
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Rencana aksi untuk desa yang diintervensi harap diinput dalam GKPD online, karena terlihat desa yang diintervensi tahun 2020 – 2021 belum memiliki rencana aksi.	Pendampingan pembuatan rencana aksi kepada desa yang sudah diintervensi.	-	-	Belum tersedia rencana aksi untuk desa yang diintervensi dan diinput dalam GKPD online	Sudah dilakukan pengawalan dan pendampingan dalam pembuatan rencana aksi dan sudah diinput ke dalam GKPD online
Pelaksanaan tahapan program desa pangan aman mengacu pada juknis agar target realisasi tercapai, begitu juga dengan pelaporan tiap tahapan segera di laporkan di GKPD online	Pelaksanaan yang melewati jadwal yang sudah ditetapkan, dilaporkan kepada PMPU PO disertai data dukung.	-	-	Pelaksanaan tahapan program desa pangan aman dan pelaporan belum mengacu pada juknis.	Sudah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai juknis dan melaksanakan pelaporan setiap tahapan ke GKPD Online secara tepat waktu

I. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Dari informasi kinerja yang didapatkan, fungsi infokom membuat program/kegiatan yang mendukung, meningkatkan dan/atau mempertahankan pencapaian kinerja tersebut, dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi tahapan pelaksanaan, sehingga penjadwalan dan pelaksanaan intervensi dapat sesuai dengan ketentuan dan target tahapan yang sudah ditetapkan, dan semua tahapan dapat dipastikan terlaksana. Sehingga manfaat program kegiatan ini dapat dirasakan dan dapat direplikasi oleh pemda di sarana lokasi yang lain.

TABEL 3.116
KOTA/KABUPATEN YANG MEREPLIKASI DESA PANGAN AMAN
TAHUN 2023

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA	TAHUN
1	Kabupaten Bandung	5 Desa	2023
2	Kota Depok		2023

4. JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya diukur berdasarkan jumlah pasar yang mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya, mengalami penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, serta mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Jumlah output target pasar merupakan jumlah komulatif dari pasar yang diitenrvensi sejak tahun 2020. Pasar yang sudah diintervensi dari tahun 2020- 2022 sebanyak 13 pasar, target tahun ini sebanyak 5 pasar. Pasar yang mendapat intervensi adalah Pasar Sukaraja dan Pasar Parung Kuda di Kabupaten Sukabumi, Pasar Baraya Desa di Kabupaten Garut, Pasar Tambun Kabupaten Bekasi, dan Pasar Atas di Kota Cimahi.

TABEL 3.117
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"JUMLAH PASAR AMAN DARI BERBASIS KOMUNITAS"
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KRITERIA

Jumlah pasar aman dari Berbasis Komunitas	18	18	100%	BAIK	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini pada tahun 2023 adalah 18 pasar. Realisasi indikator sasaran kegiatan tersebut sebesar 18 pasar, maka capaiannya sebesar100**%** dengan kriteria **Baik.** Secara rinci progress pelaksanaan kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dapat dilihat pada tabel berikut.

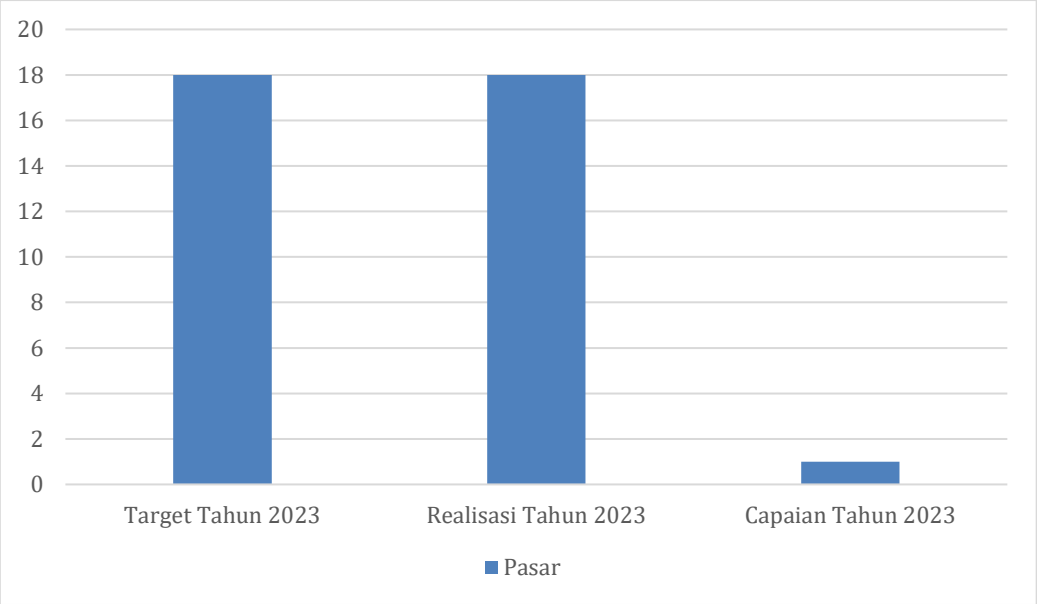

Gambar 3.132 Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja "Jumlah Pasar Aman Dari Berbasis Komunitas" Tahun 2023

TABEL 3.118
PROGRESS PELAKSANAAN KEGIATAN PASAR AMAN
DARI BAHAN BERBAHAYA
TAHUN 2023

KEGIATAN		PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRES (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Advokasi	20	20	0	0	0	20
2	Survey Pasar	5	0	5	0	0	5

KEGIATAN		PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRES (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15	0	15	0	0	15
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar (Tahun N dan Pengawalan Tahun Sebelumnya)	15	0	3	12	0	15
5	Penyuluhan	10	0	2	8	0	10
6	Kampanye	10	0	2	8	0	10
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	15	0	0	5	10	15
8	Pengawalan Pasar Aman	10	0	0	0	10	10
TOTAL SKOR		**100**	**20**	**27**	**28**	**25**	**100**

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET TAHUN 2022, 2021, DAN 2020

Target tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 18 Pasar (progress 100%).

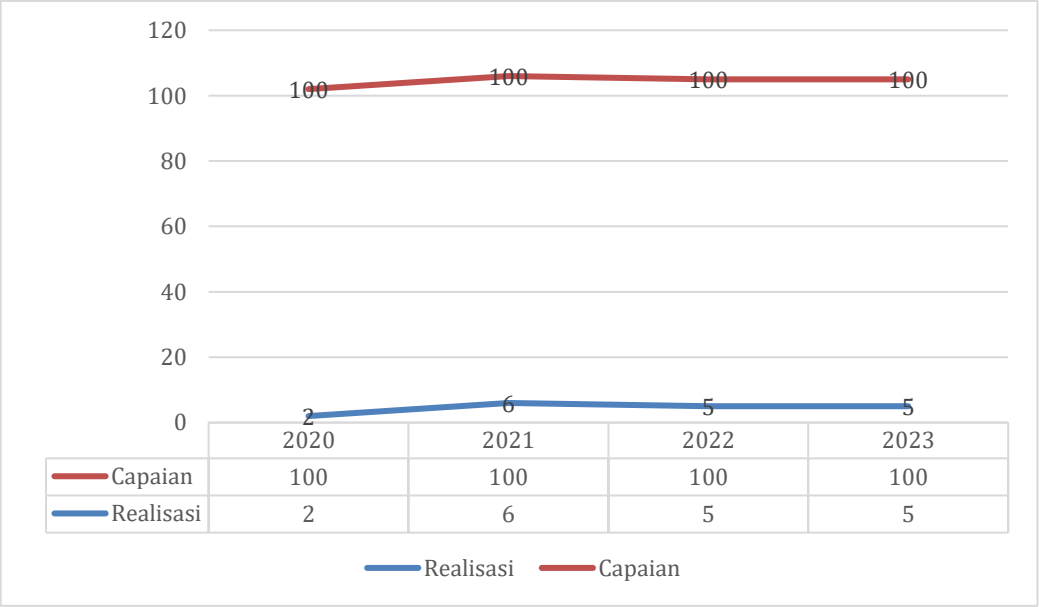

Gambar 3.133 Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja "Jumlah Pasar Aman Dari

Berbasis Komunitas" Tahun 2020-2023

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020, 2021 dan 2021 , hal ini disebabkan oleh kegiatan pasar aman berbasis komunitas terdiri dari pasar yang diintervensi tahun ini sebanyak 5 pasar dan pasar yang diintervensi pada tahun 2020, 2021, dan 2022 (pengawalan) sebanyak 13 pasar, sehingga capaian kinerja tahun 2023 mengalami kenaikan jumlah pasarnya menjadi 18 pasar.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

Target tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 18 Pasar (100%). Jika realisasi kinerja pada tahun 2023 dihitung terhadap target Renstra 2020-2024, maka capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar **85,71%** dengan kriteria **Akan Tercapai.**

TABEL 3.119
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"JUMLAH PASAR AMAN DARI BERBASIS KOMUNITAS"
TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN	KATEGORI	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	21	18	85,71	AKAN TERCAPAI	

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

Jika dibandingkan realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun 2023, maka pencapaian kinerja dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Surabaya (24 pasar), Balai Besar POM di Semarang (21 pasar), Balai Besar POM di Bandung (18 pasar) serta pencapaian kinerja keseluruhannya

mencapai 100.00%. Target nasional jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sebanyak 259 pasar di seluruh Indonesia. Kontribusi program PPABK BBPOM Bandung berkontribusi sebesar 6,95% terhadap target nasional.

Gambar 3.134 Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja "Jumlah Pasar Aman Dari Berbasis Komunitas" Tahun 2023

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja ini disebabkan karena :

- Telah dilakukan perencanaan program dan monitoring terhadap pelaksanaan program tersebut
- Anggaran yang tersedia sudah sesuai dengan perencanaan kegiatan
- Dukungan Pemerintah daerah atas keberhasilan program

Rekomendasi yang akan digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja pada period berikutnya antara lain:

- Pembuatan perencanaan program dan monitoring terhadap pelaksanaan program yang lebih baik
- Penggunaan anggaran yang tersedia lebih efektif sesuai dengan perencanaan kegiatan

- Peningkatan koordinasi dan advokasi untuk mendapatkan dukungan Pemerintah daerah atas keberhasilan program
- Peningkatan komitmen pengelola pasar dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan program

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

TABEL 3.120
TINGKAT EFISIENSI "JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASI KOMUNITAS" TAHUN 2023

Indikator	target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian anggaran	IE	TE	Capaian TE
Pasar Pangan Aaman Berbasis Komunitas	18	18	100	348.351.000	336.632.450	96,64	1,03	0,03	100%

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja sebesar 0.03 (100.00%) dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung akan terus melakukan upaya perbaikan berdasarkan rekomendasi yang telah disusun sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan capaian kinerjanya

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Audiensi dan Advokasi kepada pemerintah daerah Kab Sukabumi, Kab Bekasi, Kab Garut dan Kota Cimahi. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan survey pasar di 3 kab dan 1 kota. Kabupaten Sukabumi pada tanggal 16 Maret 2023, di Kabupaten Garut pada tanggal 27 Maret 2023, di Kota Cimahi pada tanggal 28 Maret 2023 dan di Kabupaten Bekasi pada tanggal 11 April 2023. Secara umum pelaksanaan kegiatan tersebut telah terselenggara sesuai dengan juknis yang ditetapkan oleh Badan POM.

Gambar 3.135 Advokasi dengan lintas sektor yang dihadiri oleh Anggota Komis IX DPR RI, drg. Putih Sari

- Tahap survei pasar untuk mengidentifikasi pasar tradisional yang memenuhi persyaratan pasar sehat atau pasar wisata dan sejenisnya yang ditunjuk Pemerintah Daerah sebagai prioritas sasaran pengendalian bahan berbahaya, Tujuan lain survei pasar adalah untuk mengidentifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya. Pelaksanaan survei pasar ecara umum dilaksanakan tepat waktu. Rincian pelaksanaan survei pasar tercantum pada TabeL 3.121.

TABEL 3.121
"PELAKSANAAN SURVEI PASAR"
TAHUN 2023

No	Pasar	Pelaksanaan	Hasil Survei
1.	Pasar Tambun, Kabupaten Bekasi	17 April 2023	Cukup

2.	Pasar Atas Kota Cimahi	4 April	Cukup
3.	Pasar Baraya Desa, Kabupaten Garut	30 Maret	Kurang
4.	Pasar Parungkuda, Kabupaten Sukabumi	30 Maret	Cukup
5.	Pasar Sukaraja, Kabupaten Sukabumi	31 Maret	Cukup

Gambar 3.136 Survei Pasar

- Tahap Bimtek petugas pengelola pasar bertujuan untuk melatih petugas pengelola pasar agar dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui pengambilan contoh dan pengujian cepat menggunakan test kit, meningkatkan partisipasi pengelola pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik di pasar rakyat. Rincian pelaksanaan Bimtek Petugas Pasar tercantum pada TabeL 3.122

TABEL 3.122
"PELAKSANAAN BIMTEK PETUGAS PASAR"
TAHUN 2023

No	Pasar	Pelaksanaan	Jumlah Peserta Bimtek
1.	Pasar Tambun, Kabupaten Bekasi	26 Mei 2023	10 orang
2.	Pasar Atas Kota Cimahi	13 April 2023	10 orang
3.	Pasar Baraya	7 Juni 2023	10 orang

	Desa, Kabupaten Garut		
4.	Pasar Parungkuda, Kabupaten Sukabumi	12 Mei 2023	10 orang
5.	Pasar Sukaraja, Kabupaten Sukabumi	13 Mei 2023	10 orang

Gambar 3.137 Bimtek Petugas Pengelola Pasar Atas Kota Cimahi

- Tahap selanjutnya adalah dilaksanakan kampanye kepada komunitas pasar. Kampanye bertujuan untuk melakukan sosialisasi aksi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas kepada komunitas pasar, khususnya masyarakat sebagai konsumen, meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan, dan kemandirian komunitas pasar tentang keamanan pangan dan ikut serta dalam mengawasi bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan, meningkatkan partisipasi pengelola pasar dan pedagang pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pagan Olahan yang Baik di pasar rakyat. Secara umum pelaksanaan

kampanye komunitas telah sesuai dengan Juknis Badan POM. Rincian pelaksanaan kampanye komunitas pasar tercantum pada TabeL 3.123.

TABEL 3.123
"PELAKSANAAN KAMPANYE KOMUNITAS PASAR"
TAHUN 2023

No	Pasar	Pelaksanaan	Jumlah komunitas yang mengikuti kampanye
1.	Pasar Tambun, Kabupaten Bekasi	14 Juni 2023	30 orang
2.	Pasar Atas Kota Cimahi	12 Juli 2023	22 orang
3.	Pasar Baraya Desa, Kabupaten Garut	25 Agustus 2023	27 orang
4.	Pasar Parungkuda, Kabupaten Sukabumi	5 September	25 orang
5.	Pasar Sukaraja, Kabupaten Sukabumi	6 September 2023	30 orang

Gambar 3.138 Kampanye Komunitas Pasar Sukaraja Kabupaten Sukabumi

- Sampling dan pengujian bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya bertujuan untuk memberdayakan petugas pengelola pasar untuk dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan, maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui pengambilan contoh dan pengujian cepat menggunakan test kit kimia, pengujian mikrobiologi, memperoleh data hasil pengawasan di setiap pasar percontohan sebagai bahan untuk evaluasi dan tindak lanjut implementasi program. Sampling dan pengujian tahap I Pasar Parungkudan dan Pasar Sukaraja di Kab Sukabumi, Pasar Tambun di Kab Bekasi, Pasar Baraya di Kab Garut dan Pasar Atas di Kota Cimahi pada bulan Juli-Agustus 2023.

  Sampling dan pengujian tahap II Pasar Parungkudan dan Pasar Sukaraja di Kab Sukabumi, Pasar Tambun di Kab Bekasi, Pasar Baraya di Kab Garut dan Pasar Atas di Kota Cimahi pada bulan September-Oktober 2023. Secara umum seluruh tahapan Monev tahap II berjalan lancar namun tidak sesuai dengan perencanaan pada Juknis Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK). Monev tahap II dilaksanakan pada Bulan September-Oktober 2023.
- Kegiatan penyuluhan kepada pedagang pasar. Target pedagang pasar yang mendapatkan penyuluhan adalah pedagang yang berdasarkan hasil sampling dan pengujian pada tahap I menjual bahan berbahaya atau pangan yang

mengandung bahan berbahaya. Kegiatan penyuluhan kepada pedagang pasar dan kampanye kepada komunitas pasar berjalan sesuai dengan perencanaan dan Juknis PPABK. Rincian pelaksanaan penyuluhan pedagang pasar tercantum pada TabeL 3.124

TABEL 3.124
"PELAKSANAAN PENYULUHAN PEDAGANG PASAR"
TAHUN 2023

No	Pasar	Pelaksanaan	Jumlah pedagang yang mendapatkan penyuluhan
1.	Pasar Tambun, Kabupaten Bekasi	14 Juni 2023	10 orang
2.	Pasar Atas Kota Cimahi	12 Juli 2023	10 orang
3.	Pasar Baraya Desa, Kabupaten Garut	25 Agustus 2023	10 orang
4.	Pasar Parungkuda, Kabupaten Sukabumi	5 September	10 orang
5.	Pasar Sukaraja, Kabupaten Sukabumi	6 September 2023	10 orang

Gambar 3.139 Penyuluhan Pedagang Pasar Sukaraja Kabupaten Sukabumi

- Pada pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun 2020-2022. Pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun 2020-2021 berupa Bimtek terhadap pengelola pasar yang dilaksanakan secara daring. Pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun 2022 berupa Bimtek terhadap pengelola pasar dan dilakukan sampling serta pengujian sampel. Pengawalan berjalan sesuai jadwal yang tercantum pada KAK PPABK tahun 2023.

Gambar 3.140 Sampling dan Pengujian Pengawalan di Pasar Pelita Kota Sukabumi

Gambar 3.141 Verifikasi Sampling dan Pengujian di Pasar Atas Kota Cimahi

- Workshop Monitoring dan Evaluasi yang mengundang lintas sektor dan pengelola pasar yang diintervensi tahun 2023.

Gambar 3.142 Monitoring dan Evaluasi oleh Dr. H. Firman Adam, S.Pd., M.M.Pd.

Gambar 3.143 Penyerahan Piagam Kepada Pasar yang diintervensi Tahun 2023

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

TABEL 3.125
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI "PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS" TAHUN 2023

Rekomendasi		Tindak lanjut			Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timelime		
1	Perencanaan dan Monev yang ketat terhadap pelaksanaan program secara konsisten dilakukan untuk memastikan kegiatan terlaksana sesuai dengan Juknis	Telah dibuat perencanaan dan dilakukan monitoring dan evalusi secara konsisten			Perencanaan dan monev yang belum konsisten	Perencanaan dan monev yang belum konsisten sehingga PPABK terlaksana sesuai KAK
2	Dukungan dari Pemda Kab/Kota yang diintervensi terhadap Program	Telah terwujud dukungan lintas sektor terhadap PPABK			Dukungan yang kurang terhadap program	Terlaksananya program PPABK

	PPABK				PPABK	
3	Koordinasi intensif dengan stakeholder untuk melakukan intervensi ke pedagang, pembeli di pasar, sehingga pasar yang diintervensi bisa menerapkan secara mandiri program pasar aman dari bahan berbahaya serta dapat direplikasi oleh pasar lainnya di Kabupaten setempat dan bisa masuk nominasi Lomba Pasar Aman	Telah dilakukan koordinasi intensif agar Pemda kabupaten/kota dapat melaksanakan keberlangsungan Program PPABK			Koordinasi dengan lintas sektor yang kurang internsif	Koordinasi dengan lintas sektor yang internsif sehingga Pemda dapat melanjutkan program PPABK

Hasil evaluasi risiko tahun 2023, dapat diketahui bahwa risiko yang diidentifikasi, setelah dilakukan pengendalian, memiliki level risiko residual yang rendah dan aktivitas pengendalian tidak efektif. Perlu dilakukan penilaian ulang terhadap efektifitas pengendalian yang dilakukan, dan menambah bentuk pengendalian yang lain untuk memastikan bahwa risiko telah dikendalikan, melakukan mitigasi Risiko, dan melakukan pemutakhir daftar risiko secara berkala, dengan melakukan identifikasi risiko lain.

TABEL 3.126
IDENTIFIKASI RISIKO
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Kegiatan/ Proses Bisnis	Sumber Risiko	Issue ISO 9001:2015		Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015)	Aktivitas Pengendalian saat ini		Level Risiko Residu
			Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko		Aktivitas Pengendalian	Simpulan Efektifitas Pengendalian	
1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Program Nasional GKPD, PJAS, Basar Aman)	Eksternal	Kegiatan PN Pemberdayaan Masyarakat tidak berlanjut di daerah yang telah diintervensi.	Rendahnya komitmen Pemerintah Daerah untuk melanjutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat (PJAS, GKPD, Pasar Aman)	Tujuan Pemberdayaan Masyarakat sulit untuk dicapai.	Pemantauan tindak lanjut kegiatan pemberdayaan masyarakat (PJAS, GKPD, Pasar Aman)	Tidak Efektif	5

I. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Dari informasi kinerja yang didapatkan, fungsi infokom membuat program/kegiatan yang mendukung, meningkatkan dan/atau mempertahankan pencapaian kinerja tersebut, dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi tahapan pelaksanaan, sehingga penjadwalan dan pelaksanaan intervensi dapat sesuai dengan ketentuan dan target tahapan yang sudah ditetapkan, dan semua tahapan dapat dipastikan terlaksana. Sehingga manfaat program kegiatan ini dapat dirasakan dan dapat direplikasi oleh pemda di sarana lokasi yang lain.

- Pembuatan DEUDEUIEUN (viDEo Untuk eDukasi jUga Informasi kEpada sEluruh Negeri) yang merupakan video singkat tentang cara penentuan parameter dan

hasil uji, untuk mengatasi kendala pengelola pasar yang mengalami menentukan parameter uji dan menentukan hasil pengujian.

- Pembuatan MONEP (Monitoring dan Evaluasi untuk PPABK), yang merupakan sistem monitoring dan evaluasi setiap tahapan pelaksanaan program PPABK

SASARAN KEGIATAN KE-6

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) dan diukur pada akhir tahun. Dari perhitungan kedua indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **99,37%** dengan kriteria **Cukup**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3.127
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-6
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TA 2023	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KRITERIA	
1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100,00%	99,07%	99,07%	CUKUP	
2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100,00%	99,66%	99,66%	CUKUP	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**99,37%**	**CUKUP**	

1. **PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR**

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan cara menjumlahkan persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dan persentase sampel Obat yang diuji sesuai standar kemudian dibagi 2 (dua). Persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar adalah jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi Jumlah target sampel Obat dikali 100%. Sedangkan persentase sampel

Obat yang diuji sesuai standar adalah jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100%.

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Definisi operasional sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

TABEL 3.128
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR"
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TA 2023	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KRITERIA	
Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100,00%	99,07%	99,07%	CUKUP	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Pada tahun 2023, jumlah sampel obat yang disampling 2550 sampel dan jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar sebanyak 3152 sampel. Dari data tersebut, diperoleh nilai persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 99,07%. %. Target pada triwulan IV yang telah ditetapkan sebesar 100,00%, dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar 99,07% dengan Kriteria **CUKUP**.

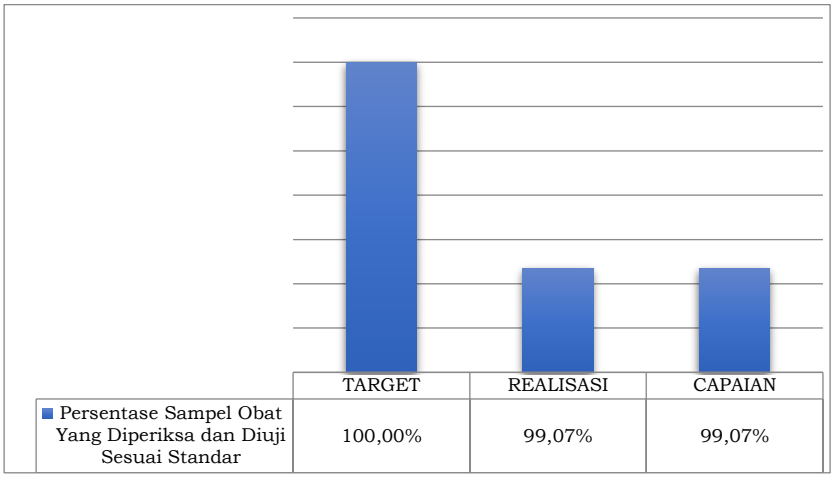

Gambar 3.144 Perbandingan target dengan realisasi kinerja Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2023

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I, II, DAN III TAHUN 2023

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan persentase pemenuhan standar peralatan laboratorium dari tahun 2021, 2022 dan 2023. Pemenuhan standar peralatan menurut standar GLP pada tahun 2021 sebesar 71.60%, tahun 2022 sebesar 75.80% dan tahun 2023 sebesar 78.86%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.64.

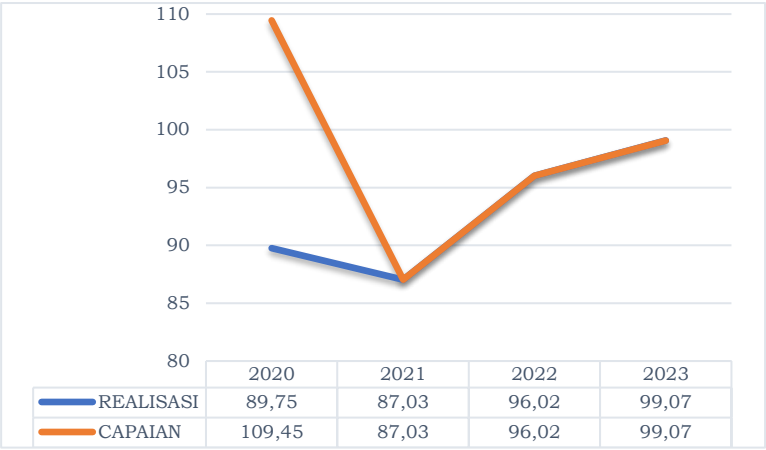

Gambar 3.145 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Obat yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar Tahun 2020 - 2023

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

Jika dibandingkan Realisasi Persentase Obat yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar pada tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 99,07% dengan kategori **Akan Tercapai**. Untuk dapat mencapai target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

TABEL 3.129
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR"
TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KATEGORI	
Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100.00%	99,07%	99,07%	AKAN TERCAPAI	

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

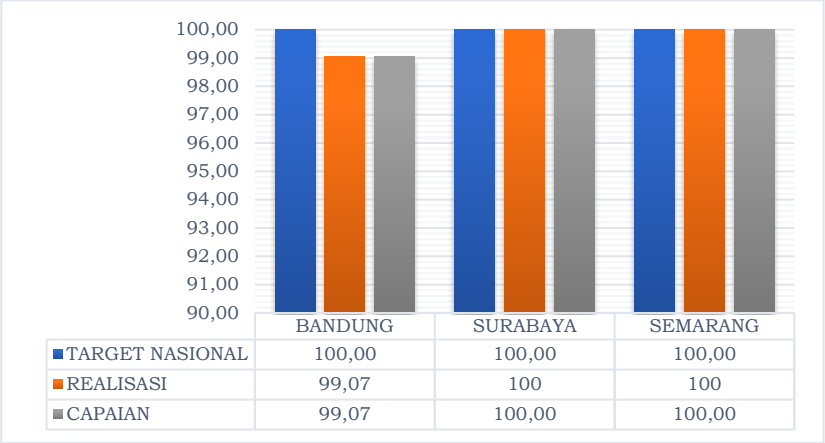

Gambar 3.146 Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar Tahun 2023 dengan Balai Lain dan Target Nasional

Jika dibandingkan Realisasi Persentase Obat yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar pada tahun 2023 dengan target nasional (100.00%), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu : Balai Besar POM di Surabaya (100.00%), Balai Besar POM di Semarang (100.00%) dan Balai Besar POM di Bandung (99,07%).

E. ANALISIS KEGAGALAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

- Target yang ditetapkan utk sampel yang diperiksa adalah 100,00% dan realisasinya sebesar 100,00% (2550 sampel dari 2550 sampel yang ditargetkan). Sedangkan untuk sampel yang diuji, target yang ditetapkan pada triwulan IV adalah 100,00% dan realisasinya mencapai 98,13% (3152 sampel dari 3212 sampel yang diuji). Sehingga realisasi triwulan IV untuk indikator kinerja ini sebesar 99,07%.
- Koordinasi sampling yang melibatkan fungsi pemeriksaan, Koordinator regionalisasi region 3 (BBPOM di DKI Jakarta atau BBPOM di Semarang) dan fungsi pengujian yang lebih baik, sehingga pemecahan permasalahan atau kendala yang terjadi pada saat proses sampling di lapangan sudah berjalan optimal.
- Terdapat 60 sampel yang diuji melewati timeline pengujian disebabkan karena Antrian peralatan utama seperti KCKT, GCMS, Microwave dan AAS (Pemenuhan peralatan sesuai standar GLP tahun 2023 baru sebesar 78,86%).
- Koordinasi sampling yang melibatkan fungsi pemeriksaan, Koordinator regionalisasi region 3 (BBPOM di DKI Jakarta atau BBPOM di Semarang) dan fungsi pengujian yang lebih baik, sehingga pemecahan permasalahan atau kendala yang terjadi pada saat proses sampling di lapangan dapat lebih ditingkatkan lagi.
- Pembuatan jadwal untuk proses pengujian dan penggunaan alat uji yang lebih tepat, terutama peralatan utama yang dipakai beberapa laboratorium sekaligus

seperti GCMS, Microwave, dan AAS yang dipakai oleh Laboratorium Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan sehingga proses pengujian lebih efisien dan efektif.

- Pemenuhan peralatan sesuai standar GLP secara bertahap terutama pembelian peralatan utama seperti GCMS, KCKT, microwave digester, serta alat-alat penunjang laboratorium lainnya.
- Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.
- Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Makanan meningkat.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

TABEL 3.130
ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	CAPAIAN TE
		Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
1	Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	99,07%	847.044.000	840.448.568	99,22	1,00	0,00	EFISIEN

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain :

- Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung adalah peningkatan kompetensi dan kapabilitas personel melalui pelatihan,

kalibrasi/verifikasi peralatan laboratorium, jaminan mutu hasil pengujian melalui uji validasi dan verifikasi metode analisa.

- Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah dilakukan peningkatan kompetensi teknis personil melalui pelatihan, yaitu 1). Pengembangan Kemampuan Laboratorium Kimia Pangan dan Air (Pengujian 3-MCPD Ester dan GE dalam Minyak secara GC-MS) Tanggal 5-9 Juni 2023; 2). Pengembangan Kemampuan Laboratorium Kimia Pangan dan Air (Penetapan Kadar Pb, Cd, Hg, Sn, As dalam Tepung Terigu secara ICP-MS) Tanggal 5-9 Juni 2023; 3). Pengembangan Kemampuan Laboratorium Kimia OT, SK dan Kuasi tanggal 5-9 Juni 2023.
- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang dilakukan secara rutin. Rapat Monev Kinerja Bulanan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung dan dihadiri oleh seluruh Koordinator dan Subkoordinator.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

TABEL 3.131
MATRIKS TINDAK LANJUT
"PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR"
TAHUN 2023

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
a	Dalam rangka mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung maka Laboratorium Balai Besar POM di Bandung harus handal dengan dilengkapi	Pemenuhan peralatan sesuai standar GLP tahun 2023 adalah 78,86%	-	-	Nilai pemenuhan peralatan tahun 2022 sebesar	Terdapat kenaikan pemenuhan peralatan sebesar

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	oleh alat laboratorium yang lengkap, sehingga seluruh parameter uji kritis yang ditetapkan dalam standar pedoman sampling dan timeline telah sesuai dengan pedoman/SOP yang telah ditetapkan.				75.80%	3.06%
b	Terjadi antrian alat karena pemenuhan peralatan yang masih kurang sehingga dilakukan penyesuaian dengan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji, sehingga pengujian dapat berjalan efisien dan efektif.	Telah dilakukan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji terutama peralatan utama yang dipakai beberapa laboratorium sekaligus seperti GCMS yang dipakai oleh Laboratorium Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan	-	-	Timeline pengujian tahun 2022 sebesar 93,77%	Terdapat kenaikan pemenuhan timeline pengujian sebesar 4,36% menjadi 98,13%
c	Meningkatkan kompetensi manajerial dan teknis personil pengujian melalui pelatihan dan webinar dan Bimbingan Teknis Internal. Dengan adanya pelatihan dan webinar ini meningkatkan pengetahuan dari personel penguji kimia pangan.	1. Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Obat (Identifikasi dan Penetapan Kadar EG dan DEG dalam Sediaan Sirup Obat secara GC-MS) tanggal 10-14 Juli 2023 2. Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (Penentuan Kadar Merkuri dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Sediaan Padat dan Cair secara	-	-	Nilai pemenuhan standar kompetensi tahun 2022 sebesar 86.10%	Terdapat kenaikan pemenuhan standar kompetensi sebesar 4.83% menjadi 90,93%

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
		Spektrofotometri Serapan Atom) tanggal 7-11 Agustus 2023 3. Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Kosmetik (Identifikasi Metanol Dalam Kosmetik Sediaan Masker Tisu Secara Kromatografi Gas-Spektrofotometri Massa Head Space Sampler) tanggal 7-11 Agustus 2023 4. Bimtek Internal Laboratorium Mikrobiologi (Efektivitas Pengawet dan Uji Cemaran Mikroba pada Suplemen Kesehatan Probiotik) pada tanggal 19-23 Juni 2023				
d	Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik pemeriksaan sampel makanan maupun pengujian makanan sehingga pemeriksaan dan pengujian makanan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.	Monev timeline pengujian obat triwulan I-IV tahun 2023	-	-	Timeline pengujian obat tahun 2022 sebesar 93,77%	Terdapat kenaikan pemenuhan timeline pengujian obat sebesar 4,36% menjadi 98,13%

I. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Untuk monitoring ketepatan jenis, jumlah dan waktu sampling dibuat sistem informasi kinerja yang mendukung pencapaian kinerja tersebut. seperti membuat inovasi kegiatan, baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

- Fungsi Inspeksi melakukan inovasi monitoring ketepatan jenis, jumlah dan waktu sampling.
- Fungsi Pengujian melakukan perkuatan sistem secara internal untuk menunjang proses bisnis yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Kegiatan yang telah dilakukan, yaitu :
- Di laboratorium Kimia membuat aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi untuk komodisti lainnya. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan
- Di laboratorium mikrobiologi membuat aplikasi IFTE (Integrated Form for Tools & Equipment) yang merupakan e-form terintegrasi untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrumen. Setiap peralatan di Laboratorium mikrobiologi diberikan nomor dan QR Code, sehingga untuk penggunaannya personel pengujian tinggal melakukan scan QR Code untuk check in, dan akan secara otomatis tersimpan data penggunaannya dalam sistem. Selain itu di laboratorium mikrobiologi ini juga membuat aplikasi Kartu Stock Online menggunakan google appsheet. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan, penggunaan dan mengontrol media/reagen, sehingga lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik dan aman, akibatnya penggunaan media/reagen akan lebih efektif dan efisien.

2. PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan cara menjumlahkan persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dan persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar kemudian dibagi 2 (dua). Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar adalah jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi Jumlah target sampel Makanan dikali 100%. Sedangkan persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar adalah jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100%.

Definisi operasional sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

TABEL 3.132
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA
DAN DIUJI SESUAI STANDAR"
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TA 2023	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KRITERIA	
Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar	100%	99,66%	99,66%	CUKUP	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 100%. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Tahun 2023 sebesar 99,66% dengan rincian jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebesar 99,66% (sebanyak 1087 sampel dibandingkan terhadap jumlah target sampel Makanan yang diperiksa sebanyak 1087 sampel) dan jumlah sampel

Makanan yang diuji sesuai standar sebesar 99,32% (sebanyak 1470 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel Makanan yang diuji sebanyak 1480 sampel). Dengan demikian realisasi TA 2023 sebesar 99,66% dan capaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar 99,66**%** dengan kriteria **Cukup.**

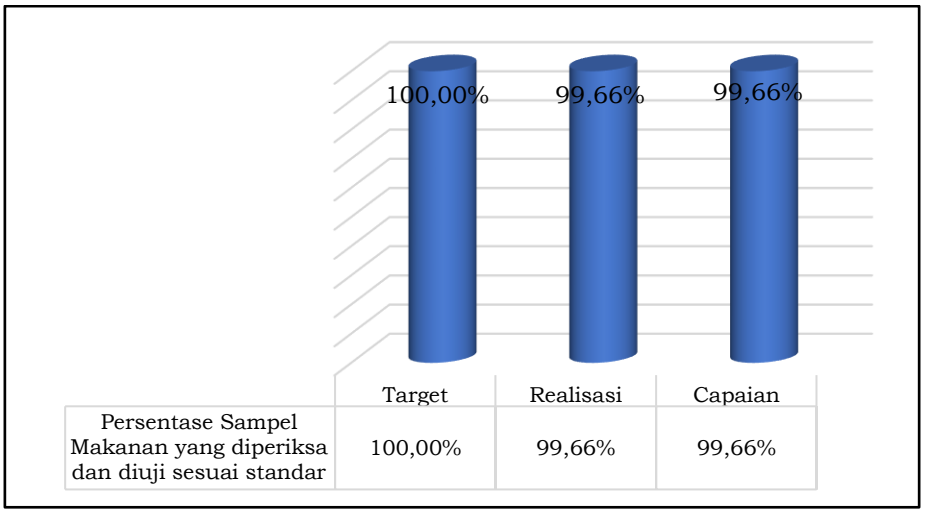

Gambar 3.147 Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2023

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020, 2021, DAN 2022

Gambar 3.148 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Tahun 2020 - 2023

Persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 99.66% dimana terjadi penurunan capaian jika dibandingkan tahun 2020, 2021 dan 2022. Penurunan capaian tersebut diakibatkan karena tidak terpenuhinya timeline pengujian sebagai dampak dari kerusakan alat di laboratorium pangan sehingga sampel tersebut diuji di laboratorium kimia dan terjadi antrian pada alat di lab. Kimia dan sampel tidak dapat diuji tepat waktu. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.66.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET TAHUN RENSTRA TAHUN 2020-2024

Pada tahun 2023, target indikator sasaran tersebut adalah 100%. Target tersebut sesuai dengan yang ditetapkan pada Rencana Strategis tahun 2020-2024 yaitu 100%. Jika realisasi dihitung terhadap target Renstra, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 99,66% dengan kriteria Akan Tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar .....

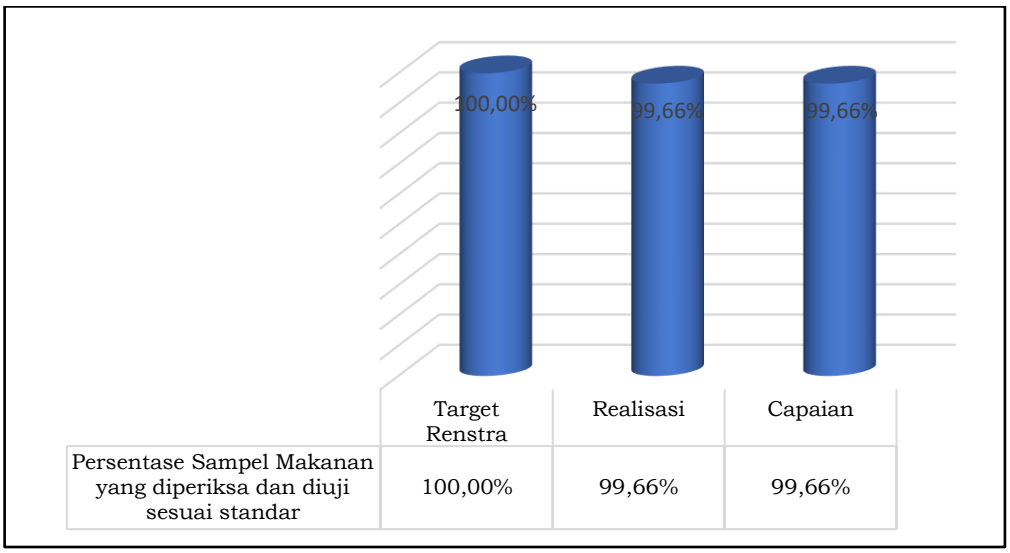

Gambar 3.149 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 Terhadap Target Renstra Tahun 2020-2024 "Persentase Makanan Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar"

TABEL 3.133
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA
DAN DIUJI SESUAI STANDAR"
TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KATEGORI	
Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100.00%	99,66%	99,66%	AKAN TERCAPAI	

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

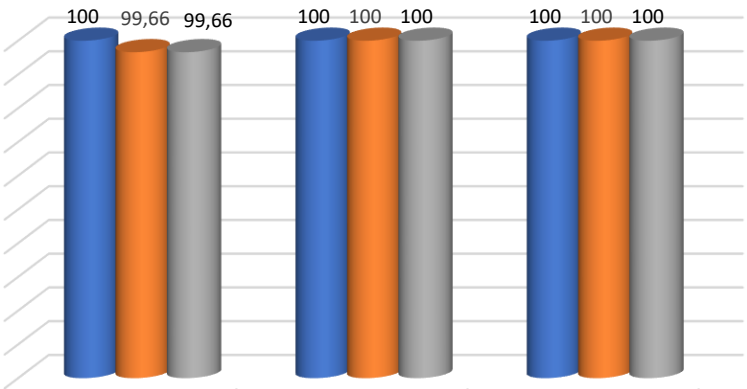

	Bandung	Surabaya	Semarang
Target Nasional	100	100	100
Realisasi	99,66	100	100
Capaian	99,66	100	100

Gambar 3.150 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Balai Besar POM Lain "Persentase Makanan Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar"

Realisasi kinerja persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari yang tertinggi yaitu: Balai Besar POM di Surabaya (100.00%), Balai Besar POM di Semarang (100%) dan Balai Besar POM di Bandung (99.66%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional, maka capaian kinerja

tertinggi adalah Balai Besar POM di Surabaya (100.00%), dan Balai Besar POM di Semarang (100%).

E. ANALISIS KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Kegagalan pencapaian pada tahun 2023 ini disebabkan oleh:

- Target yang ditetapkan untuk sampel yang diperiksa sesuai standar adalah 100% dan realisasinya 100% (1087 sampel dari 1087 sampel yang ditargetkan). Sedangkan untuk sampel yang diuji, target yang ditetapkan 100,00% dan realisasinya 99,32% (1470 sampel dari 1480 sampel yang diperiksa dan diuji).
- Pada tahun 2023, terjadi kerusakan alat AAS di laboratorium Kimia Pangan sehingga terdapat 10 sampel dengan parameter uji logam diuji di laboratorium Kimia Obat. Dampaknya adalah terjadi antrian alat dan *timeline* pengujian sampel makanan tidak tercapai.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2023, antara lain :

- Melakukan perawatan alat dan kalibrasi alat sesuai dengan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan.
- Melakukan penjadwalan untuk proses pengujian dan penggunaan alat uji yang lebih tepat, sehingga lebih efisien dan efektif.
- Meningkatkan pemenuhan peralatan laboratorium sesuai standar GLP secara bertahap.
- Meningkatkan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial. Pada tanggal 10-14 Juli telah dilakukan Bimtek Internal Laboratorium Kimia Pangan dengan judul “Penetapan Kadar Akrilamid dalam kopi secara LCMSMS.

- Meningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Makanan meningkat.
- Koordinasi sampling dan pengujian yang lebih baik dengan melibatkan fungsi pemeriksaan, koordinator regionalisasi region 3 (BBPOM di Semarang) dan fungsi pengujian, sehingga pemecahan permasalahan atau kendala yang terjadi pada saat proses sampling di lapangan dapat berjalan optimal.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

TABEL 3.134
ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	CAPAIAN TE
		Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
1	Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	99,66%	639.507.000	635.405.936	99,36%	1,00	0,00	EFISIEN

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

- Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung adalah peningkatan kompetensi dan kapabilitas personel melalui pelatihan, kalibrasi/verifikasi peralatan laboratorium, jaminan mutu hasil pengujian melalui uji validasi dan verifikasi metode analisa.
- Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.

- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang dilakukan secara rutin. Rapat Monev Kinerja Bulanan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung dan dihadiri oleh seluruh Koordinator yang diselenggarakan secara Luring dan Daring.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

TABEL 3.135
MATRIKS TINDAK LANJUT
"PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA
DAN DIUJI SESUAI STANDAR"
TAHUN 2023

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
a	Dalam rangka mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung maka Laboratorium Balai Besar POM di Bandung harus handal dengan dilengkapi oleh alat laboratorium yang lengkap, sehingga seluruh parameter uji kritis yang ditetapkan dalam standar pedoman sampling dan timeline telah sesuai dengan pedoman/SOP yang telah ditetapkan.	Pemenuhan peralatan sesuai standar GLP tahun 2023 adalah 78,86%	-	-	Nilai pemenuhan peralatan tahun 2022 sebesar 75.80%	Terdapat kenaikan pemenuhan peralatan sebesar 3.06%
b	Terjadi antrian alat karena pemenuhan peralatan yang masih kurang sehingga dilakukan penyesuaian dengan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji, sehingga	Telah dilakukan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji terutama peralatan utama yang dipakai beberapa laboratorium sekaligus seperti GCMS yang dipakai oleh	-	-	Timeline pengujian makanan tahun 2022	Terdapat kenaikan pemenuhan timeline pengujia

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	pengujian dapat berjalan efisien dan efektif.	Laboratorium Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan			sebesar 99,48%	n makanan sebesar 0,18% menjadi 99,66%
c	Meningkatkan kompetensi manajerial dan teknis personil pengujian melalui pelatihan dan webinar dan Bimbingan Teknis Internal. Dengan adanya pelatihan dan webinar ini meningkatkan pengetahuan dari personel penguji kimia pangan.	Telah dilakukan peningkatan kompetensi teknis pengujian sebagai berikut: 1. Bimtek Internal Laboratorium Kimia Pangan dengan judul "Penetapan Kadar Akrilamid dalam kopi secara LCMSMS" pada tanggal 10-14 Juli 2023 2. Bimtek Analisis Instrumen yang diselenggarakan Oleh PPPOMN pada tanggal 22-26 Mei 2023 dengan judul " Penetapan Kadar 3-MCPD Ester dan GE dalam Minyak Goreng secara GC-MS". 3. Program LRPPI (Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia) Pada Tanggal 22 – 26 Mei 2023 dengan judul " Penetapan kadar Pb, Cd, Hg, Sn, As pada tepung terigu secara ICP-MS".	-	-	Nilai pemenuhan standar kompetensi tahun 2022 sebesar 86.10%	Terdapat kenaikan pemenuhan standar kompetensi sebesar 4.83% menjadi 90,93%

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
d	Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik pemeriksaan sampel makanan maupun pengujian makanan sehingga pemeriksaan dan pengujian makanan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.	Monev timeline pengujian makanan triwulan I-IV tahun 2023	-	-	Timeline pengujian tahun 2022 sebesar 99,48%	Terdapat kenaikan pemenuhan timeline pengujian sebesar 0,18% menjadi 99,66%

I. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Untuk monitoring ketepatan jenis, jumlah dan waktu sampling dibuat sistem informasi kinerja yang mendukung pencapaian kinerja tersebut. seperti membuat inovasi kegiatan, baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

- Fungsi Inspeksi melakukan inovasi monitoring ketepatan jenis, jumlah dan waktu sampling.
- Fungsi Pengujian melakukan perkuatan sistem secara internal untuk menunjang proses bisnis yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Kegiatan yang telah dilakukan, yaitu :
  - Di laboratorium Kimia membuat aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi untuk komodisti lainnya. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan.

- Di laboratorium mikrobiologi membuat aplikasi IFTE (Integrated Form for Tools & Equipment) yang merupakan e-form terintegrasi untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrumen. Setiap peralatan di Laboratorium mikrobiologi diberikan nomor dan QR Code, sehingga untuk penggunaannya personel pengujian tinggal melakukan scan QR Code untuk check in, dan akan secara otomatis tersimpan data penggunaannya dalam sistem. Selain itu di laboratorium mikrobiologi ini juga membuat aplikasi Kartu Stock Online menggunakan google appsheet. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan, penggunaan dan mengontrol media/reagen, sehingga lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik dan aman, akibatnya penggunaan media/reagen akan lebih efektif dan efisien.

SASARAN KEGIATAN KE-7

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung. Dari perhitungan 1 (satu) indikator tersebut, diperoleh capaian sebesar **121,26%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.136.

TABEL 3.136
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-7
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN	CAPAIAN TAHUN 2023	KRITERIA	
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,00%	84,88%	121,26%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			121,26%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	

PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undang di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan

Penyidikan antara lain: (a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan); (b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), termasuk penyerahan perbaikan berkas atas petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Peneliti melalui P-19); (c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) dan (d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum). Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro legal berdasarkan hasil gelar kasus sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.

Cara untuk menghitung persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

a. SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
c. P21 sebesar 30%, dan – nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan =

{(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan pada sasaran kegiatan ini adalah sebesar 70,00%. Realisasi kinerja untuk sasaran kegiatan ke-7 sebesar 84,88% sehingga capaian sasaran kegiatan ke-7 sebesar **121,26%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan.** Adapun rincian realisasi kinerja penindakan tahun 2023 dapat dilihat pada table di bawah ini.

TABEL 3.137
CAPAIAN KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

Tahapan Penyidikan	**Jumlah Perkara Tahun 2023**	**Perkara Carry Over**	**Target Perkara Tahun 2023**	**Keterangan**
SPDP		1	10	
Tahap 1	2	2		
P 21	3	4		1 perkara Tahun 2023 belum P 21
Tahap 2	5	2		Tahap 2 atas 3 perkara tahun 2023 yang sudah P 21 akan dilaksanakan di awal tahun 2024
Jumlah	10	9		

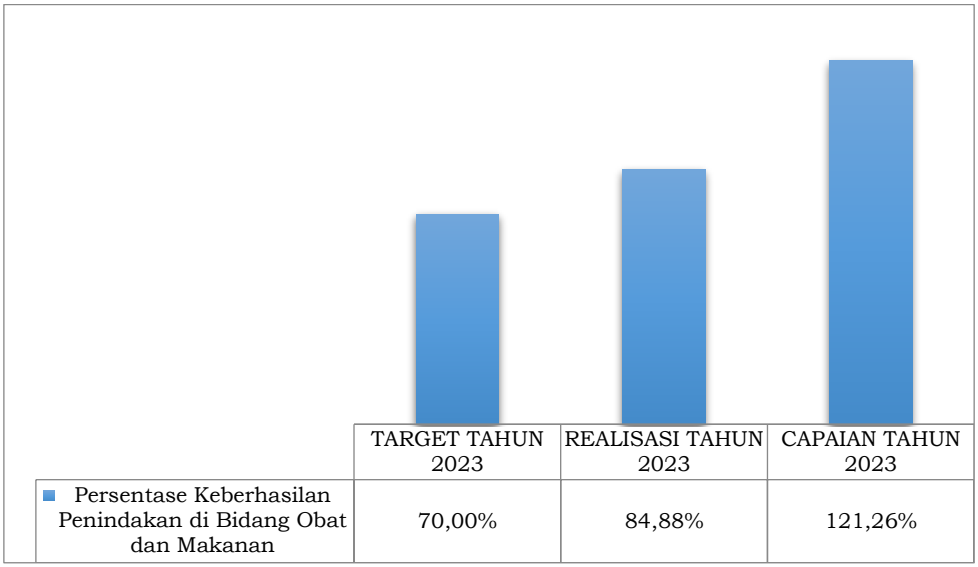

Gambar 3.151 Perbandingan target dengan realisasi kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020, 2021, DAN 2022

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Sementara apabila dibandingkan dengan tahun 2022, UPT dapat mempertahankan capaian kinerja yaitu

sebesar 120 %. Terhadap realisasi yaitu keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan terdapat sedikit penurunan yaitu sebesar 1,76 %. Hal ini disebabkan oleh adanya pemunduran jadwal pelaksanaan Tahap 2 dari 3 perkara yang sudah P 21 atas petunjuk dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dimana pelaksanaan Tahap 2 atas 3 perkara tersebut akan dilaksanakan pada awal tahun 2024.

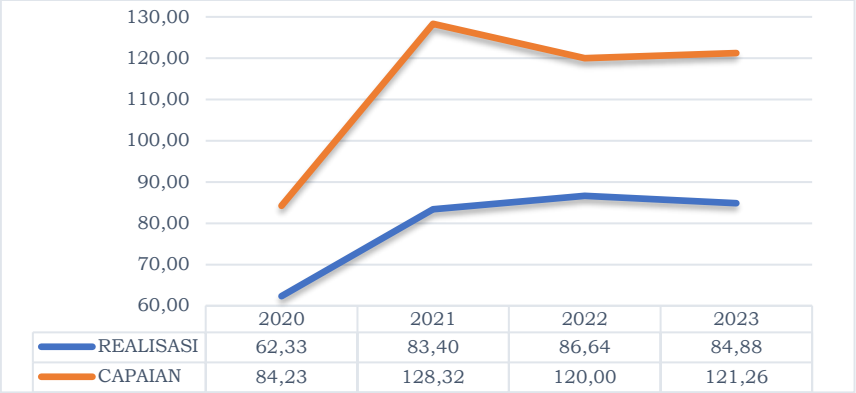

Gambar 3.152 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2020 sd 2023

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

TABEL 3.138
PERBANDINGAN REALISASI
"PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN" TAHUN 2022
DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	71,00%	84.88%	119.55%	▲	TERCAPAI

Jika dibandingkan realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2023 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 119.55% dengan kriteria **Tercapai**. Target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024 telah tercapai sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, namun tetap perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan capaian kinerja dengan melaksanakan rekomendasi yang telah disusun. Selain itu, perlu dilakukan reviu kembali terhadap target Tahun 2024 di Renstra BBPOM di Bandung.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

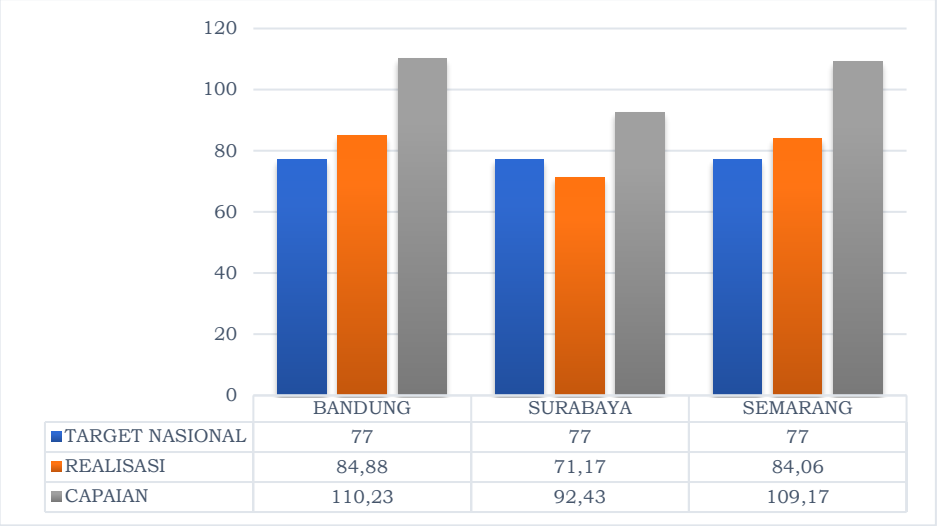

Gambar 3.153 Perbandingan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Balai Lain

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan tahun 2023 yang dicapai BBPOM di Bandung adalah sebesar 110,23 % bila dibandingkan terhadap target nasional, dimana persentase keberhasilan penindakan kejahatan nasional ditargetkan sebesar 77 % dan BBPOM di Bandung memperoleh realisasi sebesar 84,88%.

Jika dibandingkan realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2023 dengan UPT lain yang sejenis/setara maka BBPOM di Bandung memiliki realisasi dan capaian kinerja yang lebih tinggi dimana BBPOM di Bandung memiliki realisasi sebesar 84,88% dengan capaian kinerja sebesar 121, 26%, sedangkan BBPOM di Surabaya memiliki realisasi sebesar 71,17% dengan capaian kinerja sebesar 98,85% dan BBPOM di Surabaya memiliki realisasi sebesar 84,06% dengan capaian kinerja sebesar 107,77%.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Peningkatan/Penurunan capaian kinerja indikator sasaran ini pada tahun 2023 disebabkan antara lain:

- Pembentukan jejaring informasi yang berkelanjutan tentang kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang terjadi di wilayah Jawa Barat
- Pembatasan komunikasi dalam penentuan target investigasi dan operasi penindakan serta melakukan rotasi atau penggantian terhadap petugas yang bertugas dalam pembuatan surat perintah tugas investigasi dan surat perintah operasi penindakan
- Mengoptimalkan kegiatan investigasi atau penelusuran kasus yang didasarkan pelaporan dari masyarakat melalui Poksi Infokom dan diteruskan ke kelompok subatansi penindakan sehingga dapat dihasilkan output berupa perkara dari pelaporan tersebut.
- Terbentuknya kesepakatan dengan pejabat di Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar dan Metro Jaya dalam proses pelaksanaan bantuan teknis dan taktis sehingga dapat menunjang kegiatan operasi penindakan dan proses pemberkasan
- Terbitnya SK PPNS BBPOM di Bandung yang telah disesuaikan menyertakan Undang - Undang RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sehingga kategori kasus yang dapat ditangani semakin luas dan variatif.

- Peningkatan koordinasi stakeholder dalam lingkup ICJS khususnya dengan Sie Korwas Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sehingga mendukung percepatan penyelesaian perkara.
- Peningkatan kompetensi dan kemampuan PPNS dalam penanganan perkara sehingga perkara dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

TABEL 3.139
ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	CAPAIAN TE
		Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
1	Persentase Keberhasilan Penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	84,88%	1.252.398.000	1.242.412.698	99,20%	1,22	0,22	EFISIEN

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Dalam mendukung tercapainya indikator sasaran ini, dilaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu: (1) Penyidikan obat dan makanan; dan (2) Dukungan Teknis Investigasi Awal di Bidang Obat dan Makanan. Kedua kegiatan tersebut merupakan salah satu fungsi Balai Besar POM di Bandung sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, yaitu: Pelaksanaan intelijen dan penyidikan

terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

- Penyidikan Obat dan Makanan

  Pada tahun 2023, jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan yang ditangani sebanyak 10 perkara yang dilakukan proses projusticia, melalui 10 (sepuluh) kali pelaksanaan kegiatan operasi penindakan sebagai berikut: 9 (sembilan) kali kegiatan operasi berhasil dilaksanakan yaitu ditemukan adanya dugaan tindak pidana dan 1 (satu) kali operasi menemui kegagalan yaitu tidak ditemukan ada dugaan tindak pidana pada sarana yang sudah ditargetkan. Dari 9 (sembilan) kali kegiatan yang berhasil diperoleh 10 perkara projusticia dimana terdapat 1 (satu) kali operasi yang ditangani dalam 2 (dua) berkas perkara terpisah. Sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan Tinggi melalui Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Perkara yang telah diselesaikan hingga Tahap 2 pada akhir tahun 2023 adalah sebanyak 5 perkara, P21 sebanyak 8 perkara, dan Tahap 1 sebanyak 2 perkara. Sebaran wilayah perkara yang telah dan/atau sedang ditangani berada di Kabupaten Bekasi (6 perkara), Kota Bandung (2 perkara), Kabupaten Garut (1 perkara) dan Kota Cimahi (1 perkara). Adapun rincian perkara yang ditangani pada tahun 2023 berdasarkan jenis komoditi adalah 4 perkara produksi dan atau peredaran sediaan Kosmetika tanpa izin edar/ tidak memenuhi standar keamanan, mutu dan kemanfaatan, 2 perkara peredaran sediaan Obat Tradisional tanpa izin edar/ tidak memenuhi standar keamanan, mutu dan kemanfaatan, 1 perkara peredaran sediaan Obat yang tidak memiliki perijinan berusaha dan/atau tanpa kewenangan dan keahlian, serta 3 perkara sediaan pangan yang menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan, yang secara terperinci dapat diamati pada table-tabel di bawah ini :

TABEL 3.140
PERKARA KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023
BERDASARKAN WILAYAH

Kota/ Kab.	**Jumlah Perkara**	**Keterangan**
Kab. Bekasi	6	3 perkara Tahap 2, 1 perkara P21
Kota Bandung	2	Tahap 1
Kota Cimahi	1	P 21
Kab. Garut	1	P 21
Jumlah	**10**	

TABEL 3.141
PERKARA KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023
BERDASARKAN KOMODITI

Komoditi	**Jumlah Perkara**	**Keterangan**
Obat	1	selesai
Kosmetika	4	2 perkara Tahap 1, 2 perkara selesai
Obat Tradisional	2	1 perkara P 21, 1 perkara selesai
Pangan	3	2 perkara P 21, 1 perkara selesai
Jumlah	**10**	

Pada fungsi penindakan pada tahun 2023 telah dilakukan manajemn risiko dalam rangka mecapai target keberhasilan penindakan. Pada tahap awal tahun 2023 dilakukan identifikasi risiko yang berasal dari masukan seluruh pegawai di fungsi penindakan yang tertera dalam daftar risiko. Daftr risiko memuat uraian peristiwa risiko dan penyebab risiko. Selanjutnya dilakukan pengendalian risiko yang meliputi tindakan mitigasi sehingga diperoleh tingkat risiko mitigasi yang rendah atau dapat

dikendalikan yang tidak menghambat dalam capaian persen keberhasilan di penindakan. Indikator keberhasilan manajemen risiko adalah dengan tercapai persen keberhasilan penindakan pada fungsi penindakan pada tahun 2023.

TABEL 3.142

IDENTIFIKASI RISIKO DAN PENGENDALIAN RISIKO

Satuan / Unit Kerja : BBPOM di Bandung

Tahun : 2023

No.	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko	Respon Risiko	Deskripsi Tindakan Mitigasi	Sumber Daya Yang Dibutuhkan	Tingkat Risiko Mitigasi	Uraian Target
1	2	3	4	5	6	7	8
1	perkembangan teknologi dan inovasi tindak pidana obat dan makanan	Kegiatan Penindakan belum optimal	Reduce	Peningkatan Kompetensi SDM	SDM dan Anggaran	7	Kegiatan Penindakan optimal sesuai target
2	Intimidasi, intervensi, kekerasan fisik dari Pihak yang berkepentingan	Efek Gentar PPNS dan Pengawalan Aparat Penegak Hukum belum optimal	Share	Pendampingan pihak Korwas Polda	SDM dan Anggaran	11	Tidak terdapat Intimidasi, intervensi, kekerasan fisik dari Pihak yang berkepentingan
3	Tuntutan Praperadilan dari tersangka	Persyaratan Administratif Penindakan belum sesuai ketentuan	Avoid	Pelaksanaan gelar perkara dengan Korwas Polda terhadap perkara yang beresiko praperadilan	SDM dan Anggaran	11	Tidak terdapat tuntutan Praperadilan dari tersangka

				dari Tersangka			
4	Kasus obat dan makanan tidak selalu dapat ditindak dengan cepat		Share	Pendampingan pihak Korwas Polda	SDM dan Anggaran	11	Pemberkasan dapat tercapai sesuai target

Gambar 3.154 Kegiatan penindakan peredaran sediaan Obat tanpa perijinan berusaha di Kab. Bekasi

Gambar 3.155 Kegiatan penindakan peredaran sediaan Obat Tradisional tanpa ijin edar/ TMS Mutu di Kota Cimahi

Gambar 3.156 Kegiatan penindakan produksi pangan yang menggunakan formalin di Kab. Garut

Gambar 3.157 Kegiatan penindakan peredaran sediaan Obat Tradisional tanpa ijin edar/ TMS Mutu di Kab. Bekasi

Gambar 3.158 Kegiatan penindakan produksi sediaan Kosmetika TIE di Kab. Bekasi

Gambar 3.159 Kegiatan penindakan produksi pangan yang menggunakan formalin di Kab. Bekasi

Gambar 3.160 Kegiatan penindakan produksi sediaan Kosmetika TIE di Kota Bandung

Gambar 3.161 Kegiatan penindakan produksi pangan yang menggunakan formalin di Kab. Bekasi

Selain penanganan perkara tahun 2023, juga dilakukan peninjauan terhadap perkara-perkara carry over dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 9 perkara dimana dilakukan penyelesaian terhadap 3 perkara melalui pelaksanaan Tahap 2 sebanyak 2 perkara dan penerbitan SP3 sebanyak 1 perkara. Terhadap 6 perkara lainnya dilakukan tindak lanjut berupa gelar perkara yang merekomendasikan pengumpulan alat bukti terkait perbuatan pidana yang disangkakan. Pelaksanaan pengumpulan alat bukti tersebut sudah dilakukan melalui kegiatan pemberkasan yang kemudian akan dilakukan pembahasan untuk menetapkan kelanjutan penanganannya.

- Investigasi Awal

  Kegiatan investigasi awal adalah kegiatan untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dari informasi dari masyarakat, temuan hasil dari Kelompok Substansi Pemeriksaan baik dalam rangka pemeriksaan rutin maupun dalam rangka sertifikasi, pengaduan masyarakat melalui Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi, berdasarkan surat dari Badan POM RI, pengembangan kasus yang ditangani, serta penelusuran melalui media online (patroli siber). Kegiatan investigasi awal yang dilakukan selama tahun 2023

terhadap 25 sarana, dengan 8 sarana yang berpotensi diduga kuat melakukan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Sarana tersebut akan ditindaklanjuti dengan kegiatan penindakan.

Kegiatan patrol siber dilakukan dengan cara pencarian dan penelusuran terhadap tautan marketplace yang menjadi sarana peredaran sediaan farmasi dan/atau pangan yang diduga tidak sesuai ketentuan dan diduga beroperasi berada di wilayah catchment area UPT. Selama tahun 2023, dilaporkan data sebanyak 698 tautan dengan sebagian besar diduga beroperasi di wilayah Bekasi (Kota dan Kabupaten). Terhadap data tautan yang dilaporkan seluruhnya diberikan rekomendasi takedown atau penutupan alamat tautan. Data tersebut juga ditindaklanjuti oleh UPT melalui kegiatan investigasi untuk dapat menemukan lokasi fisik kegiatan operasionalnya untuk kemudian dapat dilakukan penindakan.

Selama tahun 2023, telah dilakukan patrol siber terhadap 698 tautan yang memperjualbelikan produk sediaan farmasi dan pangan tanpa ijin edar dan/atau tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, dengan rincian kategori produk sebagai berikut : Obat 8 tautan, Obat Tradisional 386 tautan, Kosmetik 290 tautan, Suplemen Kesehatan 4 tautan, Pangan 10 tautan. Dari 698 tautan hasil patrol siber selama tahun 2023 tersebut, paling banyak berasal dari Kota Bandung sebanyak 178 tautan. Rincian per Kab/Kota dapat dilihat pada Tabel berikut.

TABEL 3.143
MONITORING KEGIATAN PATROLI SIBER TAHUN 2023
BALAI BESAR POM DI BANDUNG

NO.	WILAYAH	JUMLAH TAUTAN
1	Kota Bandung	178
2	Kab. Bandung	60
3	Kab. Bandung Barat	5

4	Kota Cimahi	25
5	Kota Banjar	1
6	Kota Bekasi	129
7	Kab. Bekasi	76
8	Kota Bogor	7
9	Kab. Bogor	66
10	Kab. Ciamis	1
11	Kota Cirebon	4
12	Kab. Cirebon	9
13	Kota Depok	58
14	Kab. Garut	23
15	Kab. Indramayu	14
16	Kab. Karawang	17
17	Kota Sukabumi	6
18	Kab. Sumedang	1
19	Kota Tasikmalaya	12
20	Kab. Tasikmalaya	2
21	Pengaduan Konsumen	4
	TOTAL	**698**

Berdasarkan hasil evaluasi dari Direktorat Siber Badan POM RI, tautan yang layak untuk proses takedown sebanyak 650 tautan (93,12%). Dari jumlah tersebut, sudah dilakukan proses takedown terhadap 641 tautan (98,62%).

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

TABEL 3.144
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
"PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2023"

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
a	Peningkatan kompetensi SDM baik dari segi kompetensi teknis ataupun manajerial yang telah dilaksanakan Balai Besar POM di Bandung	Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalime, dan Koordinasi PPNS Badan POM Tahun 2023	-	-	Kompetensi SDM belum memadai, sehingga tidak bisa mengelola informasi, mengumpulkan informasi, investigasi awal dan operasi penindakan tidak efektif	Kompetensi SDM sudah memadai, sehingga bisa mengelola informasi, mengumpulkan informasi, investigasi awal dan operasi penindakan menjadi efektif
b	Peningkatan koordinasi lintas sektor dengan Criminal Justice System (CJS) pada saat akan, selama dan setelah proses penindakan dilaksanakan secara intensif terutama dengan Korwas PPNS Polda Jabar dan Polda	Pertemuah Koordinasi Lintas Sektor dari CJS	-	-	Pemahaman dan dukungan CJS dalam penindakan perkara Obat dan Makanan,	Pemahaman dan dukungan CJS dalam penindakan perkara Obat dan Makanan,

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Metro Jaya, Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri				masih kurang, sehingga dukungan CJS kurang dan penyelesaian berkas perkara terkendala	sudah baik, sehingga dukungan CJS menguat dan berkas perkara selesai
c	Pengadaan perlengkapan intelijen dan perlengkapan penindakan sudah mulai berjalan dengan penyusunan spesifikasi dan rencana belanja.	Perlengkapan intelijen berupa unit sepeda motor sudah diterima dari Bagian Tata Usaha dan sudah digunakan dalam kegiatan intelijen	-	-	Perlengkapan yang tidak memadai akan menyebabkan kegiatan investigasi awal menjadi tidak efektif	Perlengkapan yang tidak memadai akan menyebabkan kegiatan investigasi awal menjadi efektif

I. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Dari informasi kinerja yang didapatkan, fungsi penindakan melakukan upaya peningkatan proses dan sarana maupun perlengkapan pelaksanaan kegiatan, meliputi:

- Proses pengumpulan bahan keterangan dan informasi yang lebih baik dan komprehensif, sehingga dapat menemukan adanya kejadian tindak pidana bidang Obat dan Makanan.

- Kelengkapan peralatan yang digunakan dalam kegiatan investigasi awal semakin ditingkatkan sehingga dapat membantu kesuksesan kegiatan. Akibatnya informasi, data, dan bukti terjadinya tindak pidana dapat diketahui dan dikumpulkan secara lebih komprehensif.
- Berdasarkan capaian atas keberhasilan penindakan kejahatanan di bidang obat dan makanan dimana sudah 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023 yang menunjukan hasil di atas 120 % dengan kategori 'Tidak Dapat Disimpulkan' maka dapat dilakukan penyesuaian target untuk tahun berikutnya dari semula 70% menjadi 75% - 80%.
- Mengingat bahwa kegiatan penindakan kejahatanan di bidang obat dan makanan juga menjadi dasar dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dimana setiap tahapan kegiatan penindakan mulai dari tahapan Investigasi hingga tahapan penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap 2 kegiatan menjadi indicator dalam pengukuran kinerja pegawai maka capaian keberhasilan penindakan tahun 2023 juga digunakan dalam pembuatan Dokumen Pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja Pegawai. Dengan capaian keberhasilan penindakan sebesar 121,26% maka seluruh pegawai di Kelompok Fungsi Penindakan memperoleh predikat Sesuai Ekspektasi dalam penilaian kinerja individu tahun 2023 yang tertuang dalam SKP Tahun 2023 masing-masing pegawai.

SASARAN KEGIATAN KE-8

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 2 (dua) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan kedua indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 100,72% dengan kriteria SANGAT BAIK. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.145.

TABEL 3.145
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-8
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TA 2023	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KRITERIA	
4. Indeks RB BBPOM di Bandung	84,8	91,47	107,87%	SANGAT BAIK	
5. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	88	82,34	93,57%	CUKUP	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**100,72%**	**SANGAT BAIK**	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kedelapan, sebagai berikut:

1. INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu

satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: (1) Manajemen Perubahan: bobot 5%; (2) Penataan Tatalaksana: bobot 5%; (3) Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 15%; (4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%; (5). Penguatan Pengawasan: bobot 15%; dan (6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%. Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: (1) Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%; (2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

TABEL 3.146
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG"
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TA 2023	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KRITERIA	
Indeks RB BBPOM di Bandung	84,8	91,47	107,87%	SANGAT BAIK	

S. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 84,8, Realisasi Indeks RB BBPOM di Bandung adalah 91,47. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **107,87%** dengan kriteria **SANGAT BAIK.**

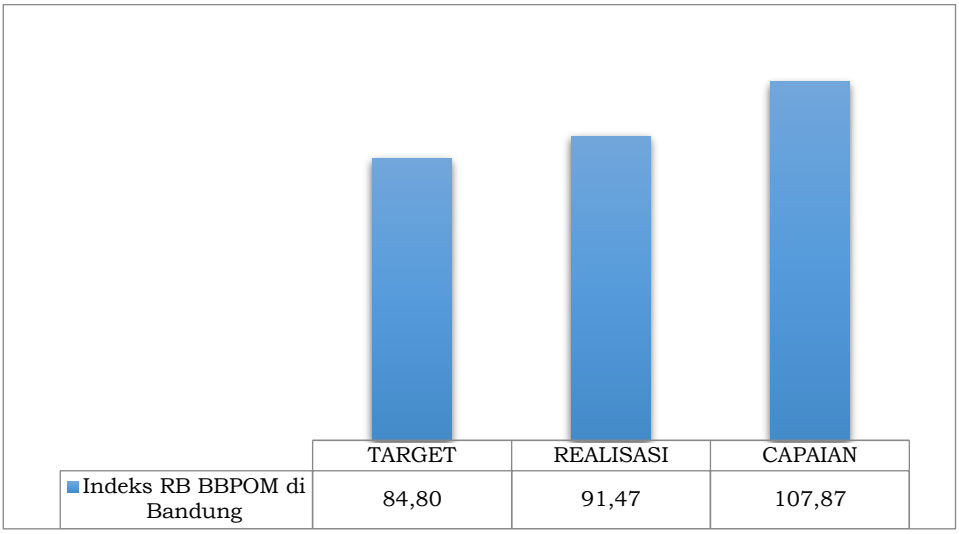

Gambar 3.162 Perbandingan target dengan realisasi kinerja Tahun 2023

TABEL 3.147
PENILAIAN INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG
TAHUN 2023

PENILAIAN			**Bobot**	**Aspek Pemenuhan**	**Aspek Reform**	**Total Nilai**	**Ket**
A.	**Komponen Pengungkit**		60,00				
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	3,63	4,00	7,63	**MS**
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	2,92	2,50	5,42	**MS**
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,81	5,00	9,81	**MS**
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,90	3,95	8,85	**MS**
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	6,44	7,50	13,90	**MS**
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,92	3,35	8,27	**MS**
TOTAL PENGUNGKIT						**53,88**	
B.	**Komponen Hasil**		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			**21,71**	
		1. Nilai Survei Persepsi Korupsi (SPAK)	17,50			16,71	**MS**

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Ket
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			5,00	**MS**
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			**15,88**	
		Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			15,88	**MS**
TOTAL HASIL						**37,59**	
NILAI PMPZI						**91,47**	

T. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020, 2021, DAN 2022

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020. 2021, dan 2022. Disebabkan oleh monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang dilaksanakan secara berkala, serta seluruh rekomendasi telah dilaksanakan. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.2.

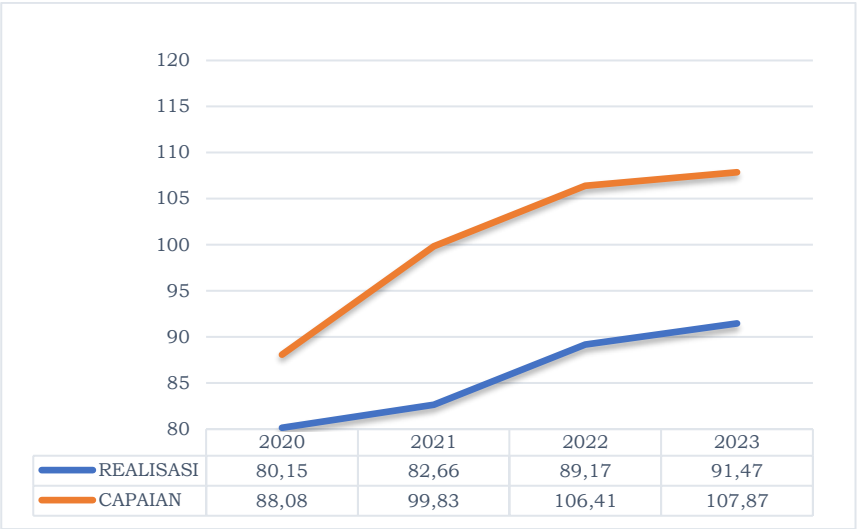

Gambar 3.163 Indeks RB BBPOM di Bandung Tahun 2020 - 2023

U. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

TABEL 3.148

PERBANDINGAN REALISASI

"INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG"

TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI TA 2023	CAPAIAN	KATEGORI	
Indeks RB BBPOM di Bandung	92,47	92,47	100%	TERCAPAI	▲

Jika dibandingkan Realisasi Indeks RB BBPOM di Bandung pada tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 100% dengan kategori Tercapai. Untuk dapat mencapai target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

V. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

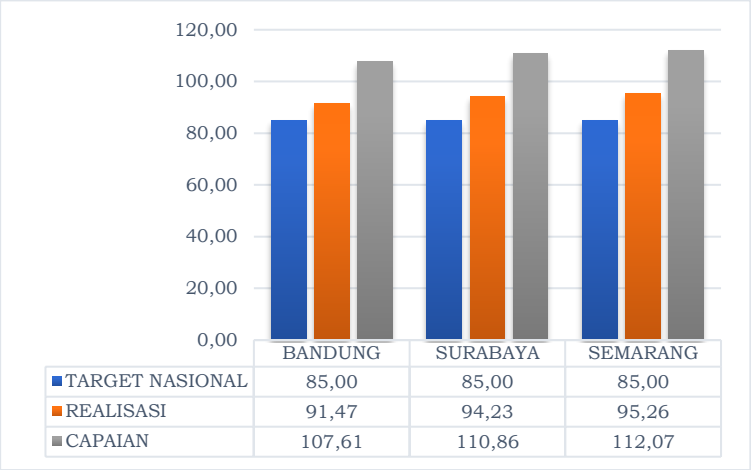

Gambar 3.164 Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Bandung Tahun 2023 dengan Balai Lain dan Target Nasional

Jika dibandingkan Realisasi Indeks RB BBPOM di Bandung pada tahun 2023 dengan target nasional (85), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Semarang (112,07%), Balai Besar POM di Surabaya (110,86%), dan Balai Besar POM di Bandung (107,61%).

W. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

- Balai Besar POM di Bandung telah melakukan pembangunan ZI secara konsisten dan berhasil mendapatkan predikat WBK dari Kementerian PANRB pada tahun 2021. Balai Besar POM di Bandung juga telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas implementasi ZI.
- Telah membuat dan mengimplementasikan berbagai Inovasi yang mendukung pelaksanaan Reformasi Briokrasi di BBPOM Bandung.
- Inovasi Pelayanan Publik antara lain LACAK PASTI, KELOM GEULIS, KABAYAN, SIPETA, SI ITEUNG, WARTA POPA, MELODI POPA, Kerjasama TV dan Radio Desa dalam Iklan Layanan Masyarakat, , Layanan Sertifikasi secara Daring, Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam rangka Jemput Bola. Beberapa inovasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat pada subsite BBPOM di Bandung yang berisi berbagai link aplikasi dan media pelayanan publik seperti LACAK PASTI, BIC, KABAYAN, SI ITEUNG, LAPOR, Sertifikasi UMKM JUARA Dan terintegrasi dengan BANDUNG SMART CITY smartcity.bandung.go.id.
- Inovasi Internal yang dapat diakses portal GEULIS seperti SIADO, SIMANGGA, SIDAKEP, BIC, SIPT, SIASN, SIPETA, KMS dll. Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja tersebut secara berkala (bulanan).
- Upaya mendorong perbaikan pelayanan publik diwujudkan dalam inovasi BOOSTER UMKM JUARA yang menyediakan layanan sertifikasi dan pendampingan UMKM pada tahap pemeriksaan sarana oleh Balai atau registrasi

dan meningkatkan kompetensi pelaku usaha melalui bimbingan teknis dan desk CAPA dan desk registrasi.

Rekomendasi untuk peningkatan capaian kinerja pada periode berikutnya berdasarkan Surat Inspektur Utama Nomor: B-PI.06.06.7.72.08.23.482 tanggal 10 Agustus 2023 Perihal: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan BPOM Tahun 2023, antara lain:

- Menyusun dan menetapkan ukuran keberhasilan dan rencana aksi tindak lanjut atas rencana aksi hasil pemantauan dan evaluasi inovasi AoC BOOSTER
- Menyusun dan menetapkan road map atas rencana pengembangan aplikasi GEULIS serta hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan aplikasinya.
- Menyusun dan menetapkan rencana pengembangan inovasi sistem data pegawai terkait ukuran kinerja pegawai, dan assessment pegawai serta merumuskan inovasi yang dapat mengimplementasikan secara nyata penegakan disiplin pegawai.
- Menindaklanjuti hasil pemantauan capaian kinerja dan melakukan pemantauan implementasi reward dan punishment.
- Menetapkan pengelola inovasi kegiatan internalisasi WBS dan menindaklanjuti pengaduan sampai dengan tuntas.
- Menyusun dan menetapkan latar belakang pengembangan inovasi pelayanan publik berdasarkan risiko yang ada atau kebutuhan Unit Kerja.
- Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan internal sesuai ketentuan.
- Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas tata kelola, pengendalian intern, dan manajemen risiko sehingga mampu menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

X. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

TABEL 3.149
TINGKAT EFISIENSI
"INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG"

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	CAPAIAN TE
		Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
1	Indeks RB BBPOM di Bandung	107,87 %	4.511.010.000	4.489.630.377	99,53%	1,08	0,08	EFISIEN

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja Indeks RB BBPOM di Bandung sebesar 0.08 dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung akan melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

Y. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- Sosialisasi dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM kepada seluruh pegawai BBPOM di Bandung tahun 2023.
- Forum Konsultasi Publik dan penandatanganan komitmen bersama lintas sector.
- Inovasi AoC BOOSTER capacity building untuk penguatan kompetensi dan meningkatkan peran AoC Balai Besar POM di Bandung dalam menginternalisasi setiap inovasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Balai Besar POM di Bandung merupakan upaya komitmen dalam pembangunan Zona Integritas.

- Inovasi aplikasi GEULIS yang mengintegrasikan seluruh inovasi elektronik yang dikembangkan Balai Besar POM di Bandung sebagai bentuk upaya penataan tata laksana yang baik. Sistem pengendalian dokumen mutu yang diinovasikan melalui SIADO merupakan sistem administrasi dokumen yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengendalian dokumen mutu yang dapat diakses pegawai dan masyarakat.
- Inovasi SIDAKEP (Sistem Data Kepegawaian) merupakan perangkat lunak yang digunakan sebagai pusat informasi sumber daya manusia atau kepegawaian di Balai Besar POM di Bandung.
- inovasi MANEKIN merupakan website yang mengintegrasikan seluruh proses manajemen Balai Besar POM di Bandung secara terstruktur dan terorganisir untuk mencapai tujuan dan sasaran Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun bersama pimpinan dan memudahkan dalam pemantauan penyusunan Laporan Kinerja.
- Inovasi link Lapor yang dibentuk menjadi media pelaporan bagi pegawai dan masyarakat atas pelanggaran berupa gratifikasi, WBS, dan benturan kepentingan serta telah disosialisasikan melalui berbagai media.
- inovasi BOOSTER UMKM JUARA yang menyediakan layanan sertifikasi dan pendampingan UMKM pada tahap pemeriksaan sarana oleh Balai atau registrasi dan meningkatkan kompetensi pelaku usaha melalui bimbingan teknis dan desk CAPA dan desk registrasi.
- Pemanfaatan berbagai media sosial yang dimiliki BBPOM di Bandung sebagai media komunikasi publik untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang program dan kegiatan, kinerja dan KIE Obat dan Makanan yang terkini dll.

Z. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

TABEL 3.150
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
"INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG"
TAHUN 2023

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
a	Mengembangkan inovasi yang telah dibangun secara berkelanjutan dalam hal penguatan integritas dan sistem pelayanan untuk mewujudkan WBBM	Monitoring dan Evaluasi efektifitas inovasi yang telah dibangun secara berkala dan melakukan pengembangan inovasi-inovasi lainnya khususnya dalam hal penguatan integritas dan sistem pelayanan	-	-	Inovasi yang diterapkan tidak sesuai dengan perkembangan kondisi lingkungan strategis	Inovasi berkembang menyesuaikan dengan lingkungan strategis dan harapan masyarakat
b	Membangun unit kerja dengan orientasi pelayanan prima sehingga dapat menjadi unit kerja percontohan, baik di lingkup BPOM maupun di lingkup antar instansi pemerintah	Tindaklanjut rekomendasi hasil penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik tahun 2023 dengan kategori Pelayanan Prima	-	-	Pelayanan publik masih belum memenuhi harapan msuarakat	Pelayanan Publik sudah memenuhi harapan masyarakat pengguna layanan
c	Memprioritaskan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal	Melengkapi data dukung tindaklanjut rekomendasi dan mengupload data dukung tersebut pada aplikasi SAPA APIP, serta	-	-	Pelaksanaan program kegiatan	Pelaksanaan program kegiatan

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
		berkoordinasi dengan PIC Auditor Inspektorat Utama BPOM.			masih belum sesuai pedoman atau peraturan yang berlaku	sudah sesuai dengan pedoman atau peraturan yang berlaku
d	Terus melakukan pengembangan inovasi baik yang sudah ada maupun inovasi baru, sesuai dengan karakteristik unit kerja dan kebutuhan stakeholder serta melaksanakan analisis dampak kemanfaatan inovasi yang telah dikembangkan terhadap perbaikan unit kerja	Pengembangan inovasi-inovasi sesuai karakteristik unit kerja dan kebutuhan stakeholder serta melakukan analisis dampak kemanfaatan inovasi yang telah dikembangkan	-	-	Inovasi yang diterapkan tidak sesuai dengan perkembangan kondisi lingkungan strategis	Inovasi berkembang menyesuaikan dengan lingkungan strategis dan harapan masyarakat

AA. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

- Membuat berbagai Inovasi dan juga pengembangan Inovasi Internal yang menunjang dan memperbaiki dalam pelaksanaan program kegiatan, AoC

BOOSTER capacity building; SIDAKEP (Sistem Data Kepegawaian); MANEKIN (Manajemen Kinerja)

- Mengembangkan Inovasi untuk eskternal yaitu : BOOSTER UMKM JUARA yang merupakan inovasi layanan sertifikasi dan pendampingan UMKM dalam proses perizinan baik dalam proses sertifikasi sarana maupun dalam proses registrasi izin edar produk.
- Penyesuaian Target Kinerja IKU untuk tahun 2024.

2. NILAI AKIP BBPOM DI BANDUNG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Keberhasilan implementasi SAKIP UPT BBPOM diukur dengan menggunakan Indikator Nilai AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Badan POM RI. Capaian kinerja Indikator Nilai AKIP BBPOM Bandung Tahun 2023 adalah sebesar **93,57%**, sebagaimana tercantum dalam tabel 3.151.

TABEL 3.151
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"NILAI AKIP BBPOM DI BANDUNG"
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TA 2023	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KRITERIA	
Nilai AKIP BBPOM di Bandung	88	82,34	93,57%	CUKUP	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 88, Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Bandung adalah 82,34. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **93,57%** dengan kriteria **CUKUP.**

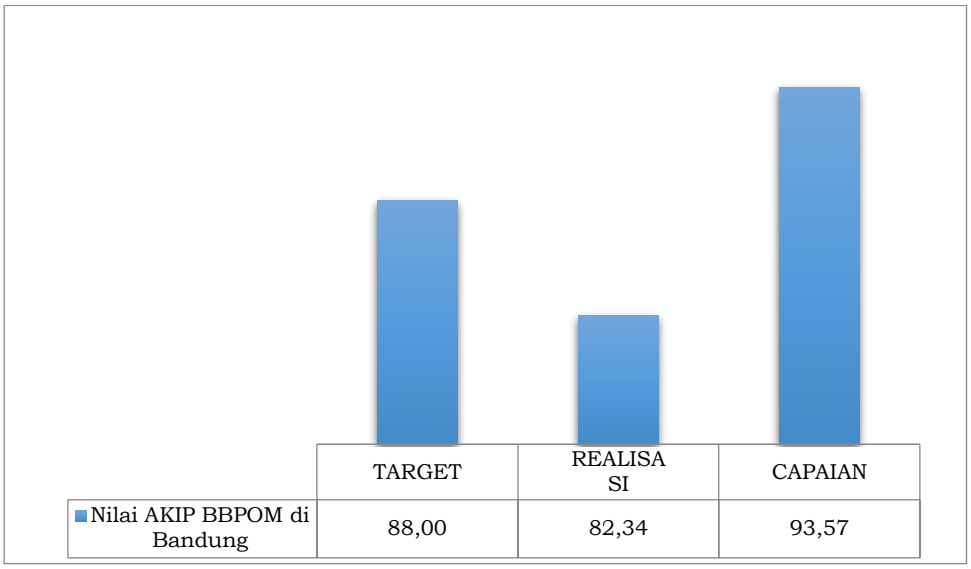

Gambar 3.165 Perbandingan target dengan realisasi kinerja Tahun 2023

Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP, maka implementasi atas SAKIP Balai Besar POM di Bandung Tahun 2023 dapat dikategorikan **A (Memuaskan)**. Akuntabilitas kinerja sudah baik, menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah berorientasi hasil pada Balai Besar POM di Bandung, namun masih perlu adanya perbaikan. Rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP disajikan pada tabel berikut:

TABEL 3.152
PENILAIAN
"NILAI AKIP BBPOM DI BANDUNG"
TAHUN 2023

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	24	19,68
2	Pengukuran Kinerja	24	19.68
3	Pelaporan Kinerja	12	9.84
4	Evaluasi Internal	20	16.20
5	Capaian Kinerja	20	16.94
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**82.34**
Tingkat Akuntabilitas			**A**

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020, 2021, DAN 2022

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020. 2021, dan 2022. hal ini disebabkan seluruh rekomendasi peningkatan capaian kinerja telah dilaksanakan antara lain : Reviu Renstra BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024, adanya aplikasi SIMAKIN dalam penyusunan perencanaan kinerja hingga monitoring dan evaluasinya, pengukuran dan pelaporan dilaksanakan sesuai pedoman dan tepat waktu, monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara berkala. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.2.

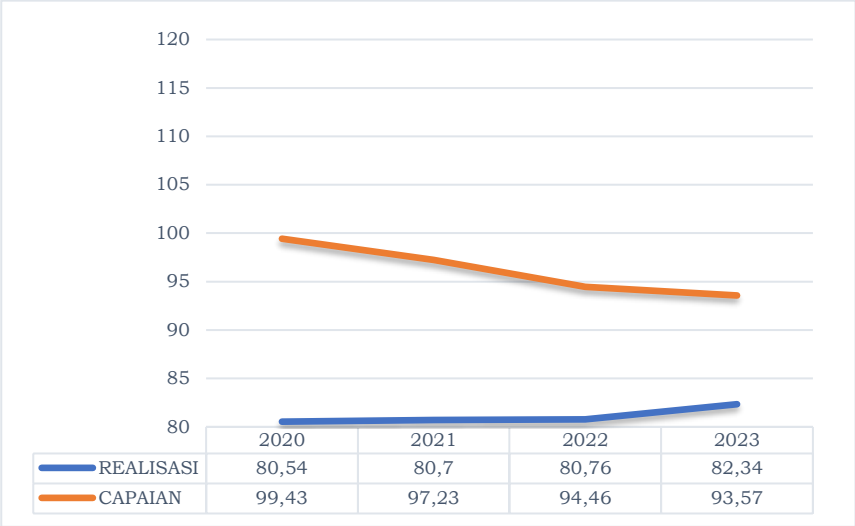

Gambar 3.166 Nilai AKIP BBPOM di Bandung Tahun 2020 - 2023

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

TABEL 3.153
PERBANDINGAN REALISASI
"NILAI AKIP BBPOM DI BANDUNG"
TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI TA 2023	CAPAIAN	KATEGORI	
Nilai AKIP BBPOM di Bandung	84	82.34	98,02	AKAN TERCAPAI	▲

Jika dibandingkan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Bandung pada tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 98,02% dengan kategori Akan Tercapai. Untuk dapat mencapai target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

Gambar 3.167 Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Bandung Tahun 2023 dengan Balai Lain dan Target Nasional

Jika dibandingkan Realisasi Indeks RB BBPOM di Bandung pada tahun 2023 dengan target nasional (84), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Surabaya (101,43%), Balai Besar POM di Bandung (98,02%), dan Balai Besar POM di Semarang (95,90%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Analisis penyebab peningkatan dalam pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- Perencanaan

  Balai Besar POM di Bandung telah menyusun dokumen perencanaan kinerja antara lain Renstra, Reviu Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT) TA 2023, Perjanjian Kerja (PK) TA 2023 dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) TA 2023 dengan penyelarasan (*cascading*) indikator kinerja hingga setiap level. Balai Besar POM di Bandung mendapatkan

Penghargaan Atas Kinerja Anggaran TA 2022 yaitu Nilai Kinerja Anggaran Satker (NKA) dengan nilai 91.56

- Pengukuran

  Balai Besar POM di Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), serta melakukan pengukuran target kinerja setiap bulannya.

- Pelaporan

  Laporan Kinerja telah disusun sesuai dengan pedoman, yaitu dengan menyajikan pembandingan data kinerja antara realisasi tahun berjalan, dengan target jangka menengah, standar nasional dan capaian BBPOM yang setara, serta menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja maupun hambatannya. Telah memanfaatkan *subsite* sebagai media publikasi dokumen pelaporan kinerja sehingga mudah diakses oleh public.

- Evaluasi Internal

  BBPOM di Bandung telah melaksanakan evaluasi internal atas kinerja setiap triwulanan sesuaid engan pedoman, yaitu dengan menyajikan data realisasi dan capaian kinerja serta kendala hambatan yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja

- Capaian Kinerja
  - Output

    Capaian kinerja output tahun 2022, sebanyak 18 (100%) indikator kinerja tercapai, sehingga lebih baik dibanding capaian kinerja tahun 2021.

  - Outcome

    Capaian kinerja outcome tahun 2022 sebanyak 8 (27,59%) indikator kinerja tidak mencapai target dan sebanyak 6 (21,43%) indikator kinerja tidak lebih baik dibanding capaian kinerja tahun 2021.

Rekomendasi untuk peningkatan capaian kinerja pada periode berikutnya antara lain:

- Perencanaan Kinerja
  - Melakukan reviu secara memadai agar indikator dan target pada Renstra,RKT, PK dan RAPK selaras. Menyusun kertas kerja perubahan/penetapan target untuk setiap indicator sasaran kinerja dengan berdasarkan basis data, justifikasi yang memadai dan komprehensif serta mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya
  - Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan dan memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja
  - Memanfaatkan *subsite* sebagai media publikasi dokumen perencanaan kinerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat
- Pengukuran Kinerja
  - Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid, waktu *delivery*, dan mekanisme yang jelas jika terjadi perubahan/kesalahan data
  - Menyusun notulen rapat monitoring dan evaluasi yang menunjukkan dengan jelas keterlibatan dan peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan atas kendala pengukuran dan/atau capaian kinerja serta timeline rencana aksi
  - Mendokumentasikan dan memastikan sumber data capaian kinerja dapat tertelusur dengan baik sehingga realisasi kinerja selaras antara dokumen RHPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja dan Laporan Kinerja Tahunan
- Pelaporan Kinerja
  - Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan
  - Seluruh Laporan Evaluasi agar disahkan oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung
  - Menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis dan kegiatan serta

upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya

- Menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator, definisi operasional, target, dan perubahan kegiatan
- Melakukan pelaporan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan mengisi lengkap hambatan dan rencana tindak lanjut

- Evaluasi Kinerja Internal

  Laporan evaluasi internal dan laporan interim agar mencantumkan kendala/hambatan dalam pelaksanaan kinerja, data monitoring Tindak Lanjut remomendasi /rencana aksi periode sebelumnya dan notulen hasil rapat evaluasi internal.

- Capaian Kinerja

  Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehinggan dapat mengantisipasi potensi target kinerja yang tidak tercapai dan tidak dapat disimpulkan dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

TABEL 3.154
TINGKAT EFISIENSI
"NILAI AKIP BBPOM DI BANDUNG"

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	CAPAIAN TE
		Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
1	Nilai AKIP BBPOM di Bandung	93,57%	473.786.000	473.780.000	100%	0,94	-0,06	TIDAK EFISIEN

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja Nilai AKIP BBPOM di Bandung sebesar -0.06 dengan kriteria Tidak Efisien. Hal ini

disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih besar dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Dengan demikian, Balai Besar POM di Bandung akan melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Pembentukan Tim Manajemen Kinerja BBPOM di Bandung tahun 2023, yang terdiri dari perwakilan masing-masing fungsi, sehingga memudahkan melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian output dan capaian kinerja.
2. Peningkatan Kompetensi Tim Manajemen Kinerja melalui Bimbingan Teknis penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Badan POM.
3. Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dilakukan setiap bulan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung yang dihadiri oleh Tim Manajemen Kinerja.
4. Menindaklanjuti semua rekomendasi hasi evaluasi dalam rangka melakukan perbaikan atas pencapaian kinerja

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

TABEL 3.155
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
"NILAI AKIP BBPOM DI BANDUNG"
TAHUN 2023

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum	Kondisi Setelah
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	**PERENCANAAN**					
a	Melakukan reviu Dokumen Renstra secara berkala menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM	Telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No HK.02.02.12A.12A5. 12.21.110 Tahun 2021 Tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024	-	-	Target Kinerja belum sesuai dengan perubahan lingkungan strategisnya	Target Kinerja sudah disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategisnya
b	Menetapkan target kinerja jangka menengah,	Telah disusun Kertas Kerja Penetapan Target Indikator Kinerja Utama	-	-	Penetapan target kinerja belum sesuai dengan	Penetapan target kinerja sudah sesuai dengan capaian kinerja UPT dan

	jangka pendek dan triwulan dengan memenuhi kriteria penetapan target yang baik berdasarkan basis data yang mememadai, dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi	Tahun 2020-2024			capaian kinerja UPT dan baseline data, sehingga akan tidak akan tercapai	baseline data, sehingga akan dapat tercapai
2	**PENGUKURAN**					
a	Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta menyampaikan masukan dan perbaikan atas pemanfaatan dan penggunaan aplikasi e-performance Badan POM.	Telah disampaikan Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor BOT.01.02.12A.12A5 .06.22.1622 perihal Penyampaian Masukan untuk Perpanjangan Batas Waktu Pelaporan tanggal 17 Juni 2022	-	-	Capaian kinerja tidak dapat diterima oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, sehingga disimpulkan belum berkinerja	Capaian kinerja dapat diterima dengan baik oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, sehingga disimpulkan berkinerja

		kepada Biro Perencanaan dan Keuangan. Ditanggapi dengan Surat Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor : B-PR.08.01.21.213.07. 22.232 perihal Tanggapan atas Masukan Perpanjangan Batas Waktu Pelaporan tanggal 29 Juli 2022.				
b	Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkanny a dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian	Surat Edaran Nomor : KP.09.01.2.24.01.22. 01 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNS dalam Penilaian Kinerja Individu melalui Aplikasi SIMAKIN BPOM Sebagai Dasar Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan POM. Berdasarkan SE tersebut, pada tahun 2022 telah	-	-	Tidak selaras antara target SKP pegawai dengan taget kinerja organisasi, sehingga setiap pegawai tidak mengetahui kontribusi SKP nya terhadap capaian organisasi, akibatnya target kinerja organisasi tidak tercapai	Target sudah selaras antara SKP dan kinerja organisasi, sehingga setiap pegawai memahami kontribusinya terhadap capaian kinerja organisasi, dan diberikan reword, akibatnya ada motivasi peningkatan kinerja

	capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment.	disusun SKP setiap individu berdasarkan indikator kinerja tingkat unit. Pengukuran dan penilaian kinerja individu dilaksanakan setiap triwulan melalui aplikasi SIMAKIN tersebut yang menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja pegawai.				
3	**PELAPORAN**					
	Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk	Dokomen Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Kinerja Interim merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam melakukan Reviu Renstra BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024 (penetapan target). Selain itu, dalam analisa keberhasilan dan kegagalan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan	-	-	Informasi kinerja tidak dimanfaatkan secara optimal sehingga perbaikan kinerja tidak terjadi, dan capaian kinerja organisasi tidak tercapai	Informasi kinerja dimanfaatkan secara optimal sehingga perbaikan kinerja dilakukan secara berkesinambungan, dan capaian kinerja organisasi akan tercapai

	perbaikan/peningkatan kinerja.	rencana tindaklanjut dalam upaya meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya				
4	**EVALUASI INTERNAL**					
a	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi sebelum dan setelah rencana aksi.	Melengkapi monitoring dan evaluasi capaian kinerja dengan rencana aksi dan simpulan kondisi sebelum dan setelah rencana aksi	-	-	Monitoring dan evaluasi belum berjaaln secara efektif, sehingga proses pencapaian pelaksanaan kinerja tidak dapat dikendalikan, dan permasalahan/kendala yang dihadapi tidak dapat diidentifikasi, akibatnya capaian tidak maksimal	Monitoring dan evaluasi berjaaln secara efektif, sehingga proses pencapaian pelaksanaan kinerja dapat dikendalikan, dan permasalahan/kendala yang dihadapi dapat diidentifikasi secara cepat dan ditangani, akibatnya capaian jadi maksimal
b	Melengkapi rencana aksi	Melengkapi Laporan Evaluasi Internal,	-	-	Laporan evaluasi	Laporan evaluasi internal, laporan

	tindak lanjut yang dituangkan pada laporan evaluasi berkala dan/atau laporan kinerja interim dengan Person in Charge (PIC) maupun timeline penyelesaian tindak lanjut.	Laporan Kinerja Interim, Laporan Kinerja Tahunan dengan rekomendasi, PIC dan timeline penyelesaian tindaklanjut			internal, laporan kinerja interim, laporan kinerja tahuanan tidak lengkap dan tidak sesuai timeline	kinerja interim, laporan kinerja tahuanan sudah lengkap dan sesuai timeline
5	**CAPAIAN KINERJA**					
	Meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal secara optimal.	Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran secara berkala setiap bulan untuk merumuskan rencana tindaklanjut pada bulan berikutnya	-	-	Rapat monev tidak secara berkala, sehingga hasil evaluasi internal tidak dapat dimanfaatkan secara optimum	Rapat monev secara berkala, sehingga hasil evaluasi internal dapat dimanfaatkan secara optimum dalam meningkatkan capaian kinerja

I. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

- Aplikasi MANEKIN merupakan aplikasi manajemen kinerja BBPOM Bandung

- Membuat kegiatan baru berupa Pembuatan Kertas Kerja penetapan target kinerja, sehingga penetapan target kinerja dapat sesuai dengan kondisi riil dilapangan, karena berdasarkan capaian kinerja
- Penyesuaian Target Kinerja IKU untuk tahun 2024.

SASARAN KEGIATAN KE-9

TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG BERKINERJA OPTIMAL

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) dan diukur pada akhir tahun anggaran.

TABEL 3.156
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-9
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TA 2023	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KRITERIA	
6. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	81	89,91	111,00%	SANGAT BAIK	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**111,00%**	**SANGAT BAIK**	

INDEKS PROFESIONAL ASN BBPOM DI BANDUNG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Menimbang hal tersebut, maka diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN untuk melihat kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara tersebut maka ditetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Peraturan BKN

nomor 8 Tahun 2019 tersebut disebutkan bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Terdapat empat dimensi dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, yaitu:

a. Dimensi kualifikasi

b. Dimensi kompetensi

c. Dimensi kinerja

d. Dimensi disiplin

Berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023 hal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 disampaikan bahwa terdapat penyesuaian instrumen pada dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagai berikut:

a. Dimensi Kualifikasi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan bobot kualifikasi pendidikan disesuaikan dengan jenis jabatan yang diduduki, dengan bobot sebesar 25%;

b. Dimensi Kinerja, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kinerja berdasarkan predikat kinerja dengan bobot sebesar 30%;

c. Dimensi Kompetensi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kompetensi dinilai secara proporsional yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan bobot sebesar 40%; dan

d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS paling kurang 1 (satu) tahun terakhir, dengan bobot sebesar 5%.

Untuk mencapai nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara sesuai dengan target Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Balai Besar POM di Bandung sejumlah

81,00, maka Balai Besar POM di Bandung melakukan upaya untuk meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN pada Tahun 2023 dengan cara sebagai berikut:

- **Kualifikasi Pendidikan:**

  Mengajukan usulan calon peserta tugas belajar atau ijin belajar pada tahun 2023 ke PPSDM; mengajukan pencantuman gelar ke BKN melalui Biro SDM bagi pegawai yang sudah selesai melaksanakan Tugas/ ijin Belajar; dan melakukan Monitoring dan Evaluasi Peserta Tugas Belajar secara berkala.

- **Kinerja:**

  Melakukan monitoring dan evaluasi penilaian SKP secara berkala dengan didampingi oleh Biro SDM. Hasil dari Monitoring dan Evaluasi tersebut, ditindaklanjuti secara berkala dengan salah satunya melakukan pembinaan kinerja bagi pegawai yang nilai realisasi belum sesuai dengan target per triwulan atau target tahunan.

- **Kompetensi:**

  Melakukan Monitoring dan Evaluasi rencana Pengembangan Kompetensi Tahun 2023 (seminar/kursus/magang/sejenisnya) serta capaian Jam Pelajaran (JP) seluruh Pegawai; Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu, seperti Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli dan Pranata Keuangan APBN, Perencana, dan Pranata Komputer; dan Pemetaan Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu.

- **Disiplin:**

  Memberikan Sosialiasi Peraturan Disiplin, Kode Etik, dan kode perilaku secara berkala kepada seluruh pegawai sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai dan berkontribusi terhadap berkurangnya pelanggaran disiplin, kode etik, dan kode perilaku.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 di lingkungan BPOM dilakukan dengan menggunakan aplikasi siasn.pom.go.id/ipasn yang terintegrasi dengan data-data kepegawaian yang terdapat dalam aplikasi siasn.pom.go.id. Setiap ASN di Balai Besar POM

di Bandung dapat melihat nilai IP-ASN masing-masing dengan menggunakan aplikasi IP-ASN. Berdasarkan data di aplikasi tersebut, diketahui bahwa nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Balai Besar POM di Bandung sejumlah 89,91 melebihi target 81,00 (111,00%) dengan rincian nilai masing-masing dimensi sebagai berikut:

a. Dimensi kualifikasi sejumlah 21,63% dari 25%;

b. Dimensi kompetensi sejumlah 38,45% dari 40%;

c. Dimensi kinerja sejumlah 24,83% dari 30%; dan

d. Dimensi disiplin sejumlah 5% dari 5%.

TABEL 3.157
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"INDEKS PROFESIONALITAS ASN BBPOM DI BANDUNG"
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TA 2023	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KRITERIA	
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	81	89,91	111,00%	SANGAT BAIK	

BB. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 81, Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung adalah 89,91. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **111,00%** dengan kriteria **SANGAT BAIK.**

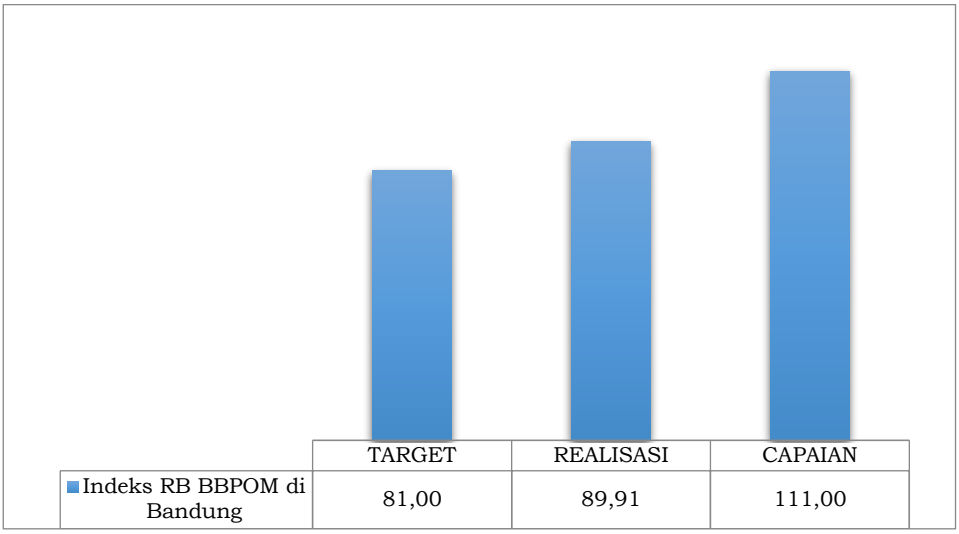

Gambar 3.168 Perbandingan target dengan realisasi kinerja Tahun 2023

CC. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020, 2021, DAN 2022

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020. 2021, dan 2022. hal ini disebabkan karena terdapat penyesuaian instrument pada dimensi Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023 hal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Dimensi Kualifikasi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan bobot kualifikasi pendidikan disesuaikan dengan jenis jabatan yang diduduki, dengan bobot sebesar 25%;
b. Dimensi Kinerja, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kinerja berdasarkan predikat kinerja dengan bobot sebesar 30%;
c. Dimensi Kompetensi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kompetensi dinilai secara proporsional yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan bobot sebesar 40%; dan
d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS paling kurang 1 (satu) tahun

terakhir, dengan bobot sebesar 5%.Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.169.

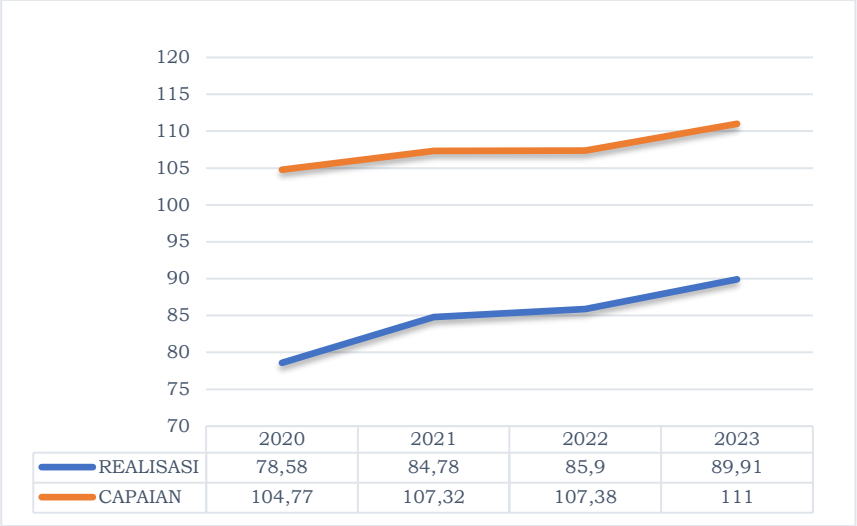

Gambar 3.169 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung Tahun 2020 - 2023

DD. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

TABEL 3.158
PERBANDINGAN REALISASI
"INDEKS PROFESIONALITAS ASN BBPOM DI BANDUNG"
TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI TA 2023	CAPAIAN	KATEGORI	
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	82,00	89,91	109,65%	TERCAPAI	▲

Jika dibandingkan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung pada tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 109,65% dengan kategori Tercapai. Untuk dapat mencapai target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

EE. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

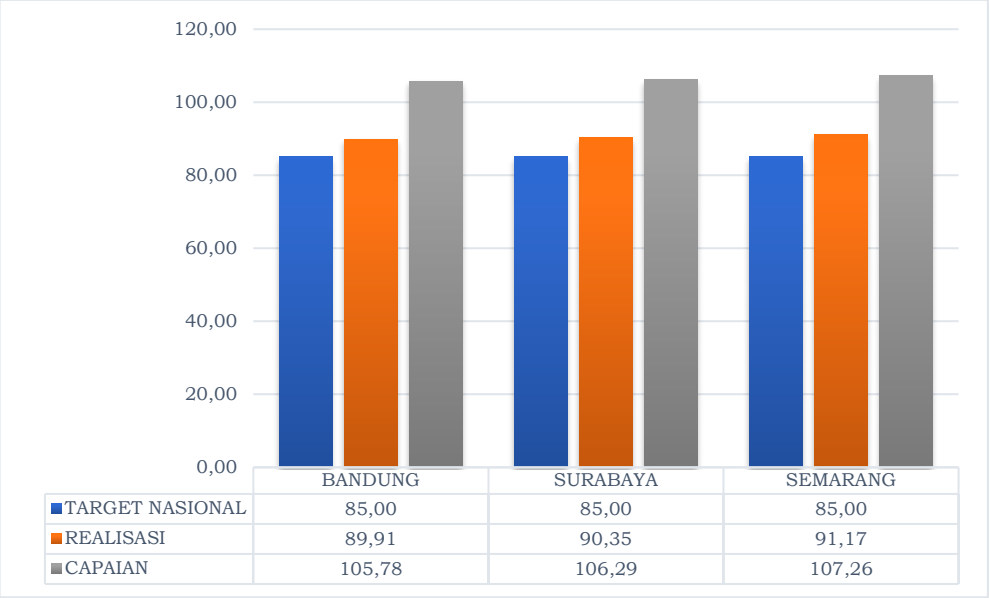

Gambar 3.170 Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung Tahun 2023 dengan Balai Lain dan Target Nasional

Jika dibandingkan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung pada tahun 2023 dengan target nasional (85), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Semarang (107,26%), Balai Besar POM di Surabaya (106,29%), dan Balai Besar POM di Bandung (105,78%).

FF. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 di lingkungan BPOM dilakukan dengan menggunakan aplikasi siasn.pom.go.id/ipasn yang terintegrasi dengan data-data kepegawaian yang terdapat dalam aplikasi siasn.pom.go.id. Setiap ASN di Balai Besar POM di Bandung dapat melihat nilai IP-ASN masing-masing dengan menggunakan aplikasi IP-ASN. Berdasarkan data di aplikasi tersebut, diketahui bahwa nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Balai Besar POM di Bandung

sejumlah 89,91 melebihi target 81,00 (111,00%) dengan rincian nilai masing-masing dimensi sebagai berikut:

a. Dimensi kualifikasi sejumlah 21,63% dari 25%;

b. Dimensi kompetensi sejumlah 38,45% dari 40%;

c. Dimensi kinerja sejumlah 24,83% dari 30%; dan

d. Dimensi disiplin sejumlah 5% dari 5%.

Keberhasilan atas peningkatan kinerja disebabkan oleh :

- **Dimensi Kualifikasi Pendidikan:**

  Dimensi Kualifikasi Pendidikan mempunyai bobot 25%, dimana semakin tinggi jenjang pendidikan Pegawai, maka semakin tinggi IP-ASN dimensi Kualifikasi Pendidikan, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut, BBPOM di Bandung mencapai rata-rata 21,63% (dua puluh satu koma enam puluh tiga). Upaya yang dilakukan BBPOM di Bandung yaitu mengajukan usulan calon peserta tugas belajar pada tahun 2023 ke PPSDM; mengajukan pencantuman gelar ke BKN melalui Biro SDM bagi pegawai yang sudah selesai melaksanakan Tugas/ ijin Belajar; dan melakukan Monitoring dan Evaluasi Peserta Tugas Belajar secara berkala.

- **Dimensi Kompetensi:**

Dimensi Kompetensi mempunyai bobot 40%, yang terdiri atas Kompetensi Diklat Kepemimpinan/ Fungsional, Diklat teknis 20 JP, Seminar/Workshop/ Magang/ dan sejenisnya bagi Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana). BBPOM di Bandung mencapai rata-rata 38,45% (tiga puluh delapan koma empat puluh lima).

Upaya yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung adalah melakukan Monitoring dan Evaluasi rencana Pengembangan Kompetensi Tahun 2023 (seminar/kursus/magang/sejenisnya) serta capaian Jam Pelajaran (JP) seluruh Pegawai; Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu, seperti Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Analis Pengelola

Keuangan APBN Ahli dan Pranata Keuangan APBN, Perencana, dan Pranata Komputer; dan Pemetaan Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu.

- **Dimensi Kinerja:**

  Dimensi Kinerja mempunyai bobot 30% (tiga puluh), yang terdiri atas Indikator Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai. BBPOM di Bandung mencapai rata-rata 24,83% (dua puluh empat koma delapan puluh tiga) karena di tahun 2023 terdapat 3 (tiga) pegawai yang memiliki predikat kinerja "kurang" dan 1 (satu) orang pegawai memiliki predikat kinerja "perlu perbaikan".

  Capaian Kinerja seluruh Pegawai yang dilaksanakan secara tertib dan akuntabel oleh seluruh pegawai melalui aplikasi SIMAKIN di siasn.pom.go.id.

- **Dimensi Disiplin:**

  Dimensi Disiplin mempunyai bobot 5%, yang terdiri atas Data Informasi Pegawai yang pernah mendapat hukuman disiplin. BBPOM di Bandung mencapai rata-rata 5% (lima). Pencegahan Pelanggaran Disiplin, melalui sosialisasi Peraturan Disiplin berperan dalam pemahaman dan pelaksanaan Disiplin Pegawai BBPOM di Bandung.

Berdasarkan surat sekretaris utama nomor B-KP.17.2.24.01.24.32 tanggal 12 Januari 2024 hal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Badan POM Tahun 2023 disampaikan bahwa:

1. Dari hasil pengukuran IP ASN Badan POM Tahun 2023, semua unit kerja telah memenuhi target IP ASN Tahun 2023
2. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil pengukuran IP ASN dengan nilai di bawah rata-rata, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
   a. Masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan

b. Masih terdapat pejabat fungsional yang belum mengikuti diklat fungsional

c. Masih terdapat pegawai yang belum mengikuti diklat teknis minimal 20 JP

3. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai IP ASN Badan POM pada tahun 2024 antara lain meningkatkan nilai dimensi kompetensi yang dapat dilakukan dengan memberikan penugasan kepada jabatan struktural/fungsional/pelaksana untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional, diklat teknis 20JP dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya.

GG. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

TABEL 3.159
TINGKAT EFISIENSI
"INDEKS PROFESIONALITAS ASN BBPOM DI BANDUNG"

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	CAPAIAN TE
		Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
1	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	111,00 %	4.984.796.000	4.963.410.377	99,57%	1,11	0,11	EFISIEN

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung sebesar 0.11 dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung akan melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

HH. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Keberhasilan atas pencapaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN ini disebabkan oleh :

- Adanya peningkatan dalam dimensi kualifikasi dari tahun 2022 sebesar 16,5% menjadi 21,63% di Tahun 2023, dikarenakan adanya peningkatan kualifikasi pegawai melalui program pendidikan baik itu tugas belajar maupun ijin belajar.
- Adanya peningkatan dalam dimensi kompetensi dari tahun 2022 sebesar 37,96% menjadi 38,45% di tahun 2023. Hal ini dikarenakan banyaknya program peningkatan komepetensi yang dilaksanakan baik secara terjadwal maupun tidak.
- Fasilitasi pendaftaran,serta monitoring evaluasi berkala tugas belajar pegawai melalui SIASN;
- Pemanfaatan aplikasi IDEAS untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi secara daring dan tidak terjadwal;
- Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi berkala pengembangan kompetensi seluruh pegawai
- Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi berkala pengisian Sasaran Kinerja Pegawai;
- Sosialisasi dan Pelaporan Disiplin secara berkala tepat waktu setiap bulan.
- Pemanfaatan fitur aplikasi IP-ASN di SIASN untuk memudahkan pemantauan dan tindak lanjut hasil pengukuran IP-ASN

Rekomendasi untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor: B-KP.17.2.24.01.23.01.23.94 tanggal 27 Januari 2023, perihal : Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Badan POM Tahun 2022, yaitu:

- Melakukan evaluasi secara berkala terkait setiap dimensi yang akan diukur dalam IP ASN.

- Melakukan monitoring dalam penilaian kinerja SKP pegawai melalui aplikasi SIMAKIN, agar meningkatkan kesesuaian dan ketepatan waktu penilaian sesuai pedoman.
- Melakukan sosialisasi dan internalisasi ketentuan kepegawaian untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin pegawai.

II. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

TABEL 3.160
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
"INDEKS PROFESIONALITAS ASN BBPOM DI BANDUNG"
TAHUN 2023

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
a	Melakukan evaluasi secara berkala terkait setiap dimensi yang akan diukur dalam IP ASN	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulanan, pada rapat monev kinerja bulanan	-	-	Kendala yg dihadapi tidak teridentifikasi sehingga target tidak tercapai	Kendala dapat diidentifikasi dan dilakukan perbaikan sehingga target tercapai
b	Setiap pegawai mengikuti pengembangan kompetensi berupa diklat	Telah dilakukan monitoring pengembangan kompetensi yang dilakukan setiap	-	-	Pegawai tidak dapat	Pegawai dapat melaksa

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	kepemimpinan/diklat fungsional, diklat teknis 20 JP dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya	pegawai. dan mengingatkan pegawai yang belum terpenuhi target JP nya			melaksanakan pengembangan kompetensi minimal 20JP	nakan peningkatan komepetnsi minimal 20JP
c	Pelaporan Pegawai yang telah selesai tugas belajar tahun 2023, Monev pegawai sedang tubel	Pada Tahun 2023 terdapat pegawai BBPOM di Bandung yang mengajukan Tugas belajar dan selesai Tubel mengajukan Pencantuman Gelar ke BKN melalui Biro SDM				
d	Monev Pengembangan Kompetensi 2023 dan capaian target 20 JP	Pada akhir tahun 2023 seluruh pegawai mencapai target pengembangan kompetensi yang ditentukan, terutama dengan tersedianya aplikasi IDEAS				
e	Monev pengisian SKP melalui aplikasi SIMAKIN 2023	Capaian SKP tahun 2023 dengan hasil 3 (tiga) orang pegawai memiliki predikat kinerja kurang dan 1 (satu) orang perlu perbaikan dan				

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
		pelaporan dilaksanakan tepat waktu				
f	Monev akumulasi disiplin kehadiran 2023 dan sosialisasi peraturan disiplin kepada seluruh pegawai	Pada tahun 2023 tidak ada SK pelanggaran disiplin yang diterbitkan dan pelaporan dilaksanakan tepat waktu				

JJ. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

- Membuat kegiatan baru melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai minimal 20JP
- Pencapaian kinerja ini dapat memberikan dampak peningkatan kompetensi pegawai sehingga dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja yang lainnya.
- Penyesuaian Target Kinerja IKU untuk tahun 2024.

SASARAN KEGIATAN KE-10

MENGUATNYA LABORATORIUM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator, yaitu 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dan 2) Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal. Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran tersebut sebesar **102,86%** dengan kriteria **Sangat Baik** Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.161.

TABEL 3.161
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-10
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TA 2023	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KRITERIA	
• Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89,00%	87,00%	97,75%	CUKUP	
• Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2,80	2,88	102,86%	SANGAT BAIK	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**102,86%**	**SANGAT BAIK**	

1. PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP

Pada tahun 2020 telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK. 02.01.1.2.11.20.1114 tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Badan

POM yang berlaku untuk tahun 2020-2024. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) ini merupakan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL di Badan POM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM.

Penilaian kemampuan laboratorium dilakukan terhadap 3 (tiga) parameter yaitu pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Kompetensi dan Standar Peralatan. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) dengan menggunakan tools penilaian sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1115 tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Laboratorium Badan POM.

Metode penilaian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penilaian Standar Ruang Lingkup (SRL)

   Pemenuhan terhadap SRL pengujian menggunakan bukti Catatan Pengujian/Lembar Catatan Pengujian (CP/LCP). Hasil Uji Profisiensi yang inlier. Hasil Uji Kolaborasi yang dIIIkuti untuk pengujian terkait. Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh parameter yang mempunyai angka 1 dan dibagi dengan target kemudian dikalikan dengan 100%.

2. Penilaian Standar Kompetensi

   Komponen penilaian kompetensi terdiri dari Pengetahuan dan Keterampilan. Bukti fisik untuk aspek pengetahuan adalah sertifikat pelatihan/bukti pelatihan/bukti diseminasi/surat keterangan supervisi tentang pelatihan terkait. Bukti fisik untuk keterampilan berupa CP/LCP pengujian minimal melakukan satu kali pengujian terkait parameter yang dimaksud/Laporan Pengujian hasil supervisi.

   - Hitung nilai kompetensi masing-masing personel yang terdapat pada Formulir Informasi Kompetensi. Hasil sudah dinyatakan dalam persen (%).
   - Hasil perhitungan kompetensi personel dari masing-masing laboratorium direkap pada Rekapitulasi Persentase Pemenuhan Kompetensi Personel.
   - Hasil Rekapitulasi masing-masing Laboratorium kemudian digabungkan pada Profil Kompetensi Personel Penguji.

3. Penilaian Standar Peralatan

- Untuk perhitungan persentase masing-masing alat adalah jumlah alat yang dimiliki dibagi dengan standar dikalikan 100%.
- Untuk jumlah alat yang angka persentasenya lebih dari 100% maka angka yang digunakan adalah 100%.
- Pemenuhan standar peralatan dihitung dengan menjumlah persentase seluruh peralatan dibagi dengan jumlah jenis peralatan yang tercantum pada standar.

TABEL 3.162
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP"
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89,00%	87,00%	97,75%	CUKUP	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

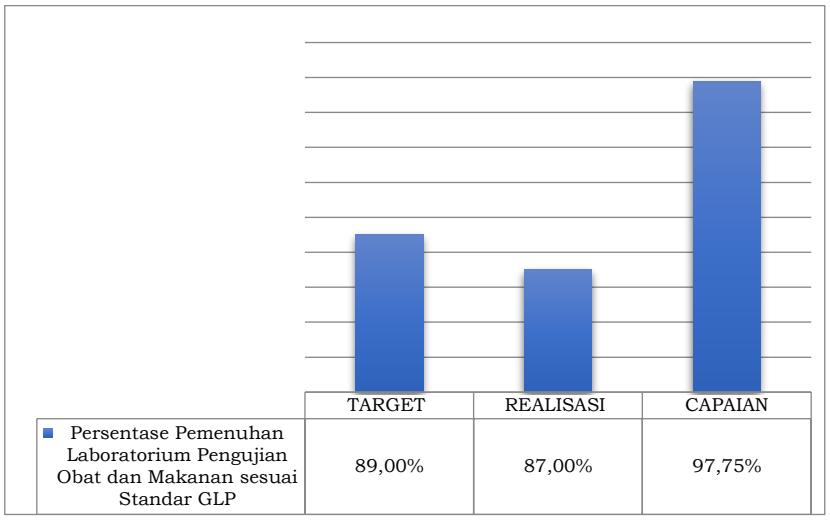

Gambar 3.171 Perbandingan target dengan realisasi kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLPTahun 2023

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 89,00%. Persentase pemenuhan laboratorium pada tahun 2023 sebesar 87,00%, Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar **97,75%** dengan kategori **Cukup.**

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020, 2021 dan 2022

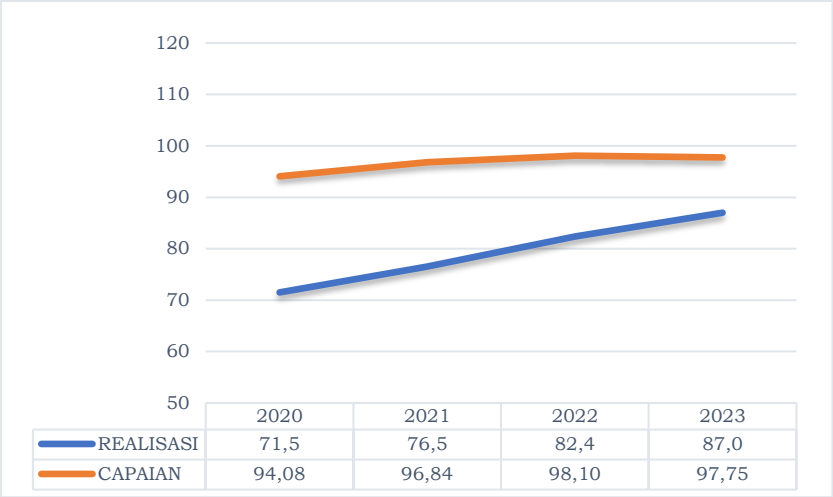

Gambar 3.172 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2020 - 2023

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020, 2021 dan tahun 2022, hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan pemenuhan standar ruang lingkup, standar kompetensi dan standar peralatan. Persentase pemenuhan standar ruang lingkup tahun 2020 sebesar 66.60%, tahun 2021 sebesar 73.50%, tahun 2022 sebesar 85.40% dan tahun 2023 sebesar 91.31%. Persentase pemenuhan standar kompetensi tahun 2020 sebesar 81.50%, tahun 2021 sebesar 84.40%, tahun 2022 sebesar 86.10% dan tahun 2023 sebesar 90.93%. Persentase pemenuhan standar peralatan tahun 2020 sebesar 66.40, tahun 2021 sebesar 71.60%, tahun 2022 sebesar 75.80% dan tahun 2023 sebesar 78.86%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

TABEL 3.163

PERBANDINGAN REALISASI

"PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP"

TAHUN 2023

DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2023	CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP	94	87.00	92.55	AKAN TERCAPAI	▲

Jika dibandingkan Realisasi Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP pada tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 92.55% dengan kategori **Akan Tercapai.** Untuk dapat mencapai target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

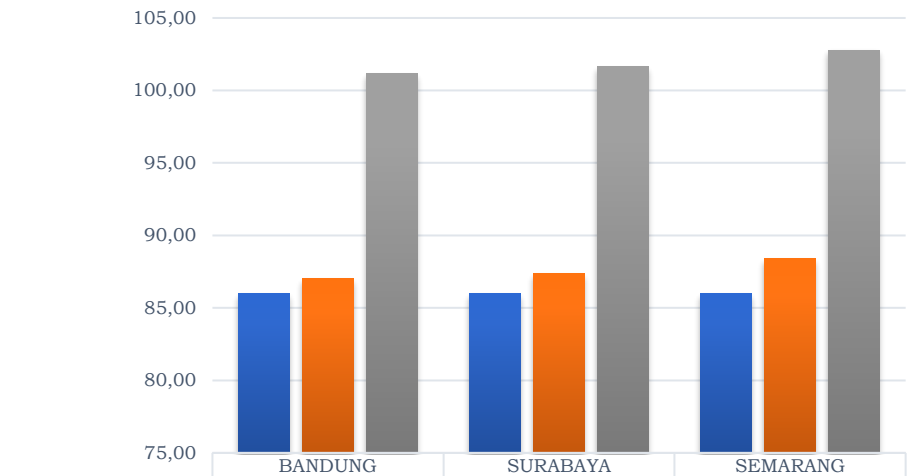

	BANDUNG	SURABAYA	SEMARANG
TARGET NASIONAL	86,00	86,00	86,00
REALISASI	87,00	87,40	88,39
CAPAIAN	101,16	101,63	102,78

Gambar 3.173 Perbandingan Realisasi Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2023 dengan Balai Lain dan Target Nasional

Jika dibandingkan Realisasi Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP pada tahun 2023 dengan target nasional (86.00%), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Semarang (102.78%), Balai Besar POM di Surabaya (101.63%), dan Balai Besar POM di Bandung (101.16%).

E. ANALISIS KEGAGALAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Kendala permasalahan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja, antara lain:

- Untuk pemenuhan Standar Ruang Lingkup :

  Kimia :

  Pemenuhan SRL Kimia Obat NAPPZA terjadi peningkatan sebesar 3,6 % dari Tahun 2022 adalah 62,0 % dan pada Tahun 2023 adalah 65,6 %. SRL Kimia Obat Nappza ini sulit dipenuhi disebabkan sampel yang masuk Ruang Lingkup banyak tidak tersampling karena sulit diperoleh dipasaran dan yang bisa tersampling pun

terkendala dengan kemampuan uji belum tersedianya Bahan Baku Pembanding (Akarbose, Alfacalcidol, Simetikon, Bismuth Subsalicylate, Mesalazine, misoprostol, retinol, Kalium sukrosa oktasulfat, Ursodeoxycholic acid, colestyramine, imidapril, isosorbide monihidrat, milirinone, Nicardipine, Nitroglycerine).

Pemenuhan SRL Kimia Kosmetik terjadi peningkatan sebesar 1,2 % dari Tahun 2022 adalah 97,0 % dan Tahun 2023 adalah 98,2 %. Untuk SRL Kimia Kosmetik terdapat dua parameter uji yang menggunakan GCMS HSS belum bisa dilaksanakan karena alat GCMS mengalami kerusakan.

Pemenuhan SRL Kimia OT SK terjadi peningkatan sebesar 7,9 % dari Tahun 2022 adalah 85,1 % dan Tahun 2023 adalah 93,0%. Untuk SRL Kimia OTSK parameter uji Identifikasi Citrinin belum dapat dikerjakan karena belum tersedianya Bahan Baku Pembanding.

Pemenuhan SRL Mikrobiologi dan Biologi Molekuler terjadi peningkatan sebesar 8,8% dari Tahun 2022 adalah 89,3 % dan Tahun 2023 adalah 98,1 %. Pemenuhan SRL Kimia Obat NAPPZA, Kimia Kosmetik, Kimia OT SK dan Mikrobiologi dan Biologi Molekuler tetap terjadi peningkatan, hal ini menunjukkan Tool Monitoring SKL New regionalisasi tidak menjadi hambatan pada pemenuhan standar ruang lingkup pada komoditi tersebut. Berbeda dengan Pemenuhan SRL Kimia Pangan terjadi penurunan pada saat menggunakan tool Monitoring SKL New regionalisasi sebesar 0,7 %. Hal ini disebabkan penambahan jumlah Parameter Uji pangan untuk pengujian dasar dari 91 Parameter Uji menjadi 92 Parameter Uji pada tools New Regionalisasi.

Mikrobiologi :

Capaian RL pada TW IV sebesar 98.1% (102 dari 104 parameter uji), hal tersebut terjadi karena:

a) Pengujian ALT Non Laktat (kontamintan) pada produk pangan olahan

- Parameter uji bukan termasuk parameter kritis sehingga tidak dilakukan pengujian.
- Media yang digunakan berbeda dengan pengujian ALT pada pangan secara

umum sehingga diperlukan anggaran yang cukup untuk pengadaan media.

- Belum memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian tersebut karena belum dilakukan pelatihan.
- Belum dilakukan verifikasi Metode Analisa

b) Deteksi DNA spesies spesifik Tikus/Sapi/Ayam/ Anjing/Kuda

- Sesuai dengan pedoman sampling, sampel yang diuji untuk parameter deteksi DNA spesies spesifik pada produk pangan adalah 3 sampel. 1 sampel untuk high DNA (spesifik porcine), 2 sampel untuk produk low DNA. BBPOM di Bandung hanya melakukan pengujian untuk high DNA spesifik porcine sebanyak 1 sampel dalam 1 tahun.
- Belum dilakukan pelatihan dan verifikasi metode Analisa untuk Deteksi DNA spesies spesifik pada Tikus/Sapi/Ayam/ Anjing/Kuda

- Untuk pemenuhan standar kompetensi :

Kimia : untuk penilaian kompetensi kimia pangan yang tidak dilakukan seperti uji indeks bias, kadar air (metode karl fisher), kadar air (metode toluene) masih belum terpenuhi karena bukan parameter uji wajib atau ruang lingkup akreditasi. Untuk uji indeks bias juga di komoditi OTSK sudah bukan parameter uji wajib; Untuk penilaian kompetensi kimia obat, pengujian menggunakan spektrofluorometri dan uji spesifik menggunakan Ion kromatografi dinilai padahal belum tersedia alatnya; Untuk penilaian kompetensi spesifik, validasi/verifikasi metode sesuai level kompetensi sulit terpenuhi, karena uji spesifik terbatas.

Mikrobiologi : Belum semua personel mengikuti pelatihan/sosialisasi terkait verifikasi metode analisa kualitatif dan kuantitatif mikrobiologi. Lab. Mikrobiologi BBPOM di Bandung bukan merupakan Laboratorium provider uji banding/kolaborasi sehingga belum melakukan pelatihan terkait hal tersebut (belum menjadi prioritas)

Parameter uji Deteksi enterococcus pada pangan tidak terdapat dalam PerBPOM 13 tahun 2019, sehingga tidak dilakukan pengujian tersebut (untuk dilakukan review terhadap standar kompetensi)

- Untuk pemenuhan standar peralatan :

  Pemenuhan standar peralatan pada Tahun 2022 adalah 74,3 % untuk Kimia dan 77,2 % untuk Mikrobiologi dan Biologi molekuler. Sedangkan pada Tahun 2023 adalah 78,8 % untuk Kimia dan 78,9 % untuk Mikrobiologi dan Biologi Molekuler. Tetap terjadi peningkatan dengan adanya tool ataupun konsep new regionalisasi.

  Kimia : Pemenuhan peralatan masih kurang karena keterbatasan anggaran; ada beberapa alat yang rusak sehingga menurunkan nilai pemenuhan standar peralatan.

  Mikrobiologi : Lab. Mikrobiologi dan Biologi Molekular di Bandung tidak mendapat anggaran untuk penambahan alat, sehingga tidak terjadi peningkatan dalam capaian SKL Alat.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut ke depan antara lain:

- Pemenuhan Standar Ruang Lingkup : Membuat roadmap pemenuhan SRL Obat, OTSK, Kosmetik , Pangan dan Mikrobiologi disesuaikan dengan kendala permasalahan yang ada.
- Pemenuhan Standar Kompetensi : Membuat roadmap pelatihan peningkatan standar kompetensi terutama personil yang nilainya masih rendah dan dirotasi dari fungsi lain masuk ke pengujian, melalui peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.
- Pemenuhan Standar Peralatan : Membuat roadmap penambahan alat dan perbaikan alat yang rusak di tahun anggaran 2024.

- Masih tingginya gap pemenuhan peralatan, mengakibatkan antrian peralatan yang sangat tinggi sehingga pemenuhan timeline pengujian juga tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu dilakukan pembuatan jadwal untuk proses pengujian dan penggunaan alat uji yang lebih tepat, sehingga lebih efisien dan efektif.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

TABEL 3.164
ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	KET
		Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
1	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	97,75%	7.083.938.000	7.082.103.976	99,97%	0,98	-0,02	TIDAK EFISIEN

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja :

- Untuk pemenuhan standar ruang lingkup tahun 2022 telah dilakukan verifikasi metode analisa sebanyak 48 metode analisa pada laboratorium pengujian kimia dan 12 metode analisa pada laboratorium pengujian mikrobiologi.
- Untuk pemenuhan Standar Kompetensi tahun 2023, telah dilakukan kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan terkait teknis laboratorium untuk meningkatkan pengetahuan personil pengujian, antara lain yaitu 1). Bimbingan Teknis ICP-MS dalam rangka Pengujian Laboratorium Air : Penetapan Kadar 12 logam (Ag, B, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Pb dan Se) secara simultan menggunakan alat ICP-MS) pada tanggal 2-5 Mei 2023; 2). Bimtek LRPPI (PK Pb, Cd, Hg, Sn dan As dalam

tepung terigu secara ICP-MS) pada tanggal 4-9 Juni 2023; 3). Bimtek LRPPI (PK 3-MCPD dalam minyak secara GC-MS) pada tanggal 4-9 Juni 2023; 4). Identifikasi Asam p-aminobenzoat pada Sediaan Kosmetik secara KCKT-PDA dan Identifikasi Steroid pada Sediaan Kosmetik dengan metode UHPLC pada tanggal 4-9 Juni 2023; 5). Penetapan Kadar Fenilalanin, Isoleusin, Lysin HCl dan Triptofan dalam Suplemen Kesehatan Sediaan Padat secara KCKT-PDA pada tanggal 4-9 Juni 2023; 6). Bimtek Internal Laboratorium Mikrobiologi (Efektivitas Pengawet dan Uji Cemaran Mikroba pada Suplemen Kesehatan Probiotik) pada tanggal 19-23 Juni 2023; 7). Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (Penentuan Kadar Merkuri dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Sediaan Padat dan Cair secara Spektrofotometri Serapan Atom) tanggal 7-11 Agustus 2023; 8). Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Kosmetik (Identifikasi Metanol Dalam Kosmetik Sediaan Masker Tisu Secara Kromatografi Gas-Spektrofotometri Massa Head Space Sampler) tanggal 7-11 Agustus 2023; 9). Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Pangan (Pengujian Akrilamida dalam Kopi secara LC MS/MS) tanggal 10-14 Juli 2023; 10). Bimtek Internal Laboratorium Obat (Uji Penetapan Kadar Etilen Glikol dan Dietilen Glikol dalam Sediaan Sirup Obat secara GCMS serta Aplikasi dan Troubleshooting GCMS) pada tanggal 10-14 Juli 2023; 11). Identifikasi Alprazolam, Bromazepam, Diazepam, Flurazepam, Klonazepam, Klordiazepoksida dan Nitrazepam dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan secara GCMS dan Identifikasi Amfetamin Sulfat, Bisakodil, Dietilpropion HCl, Fenfluramin HCl, Fenolftalein, Kofein dan Sibutramin HCl dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan secara GCMS pada tanggal 18-22 September 2023; 12). Pelatihan Teknis Jejaring Laboratorium Pangujian Pangan Indonesia (JLPPI) : Validasi Metode Analisa Deteksi DNA Spesifik Porcine pada tanggal 1-6 Oktober 2023; dan 13). Workshop Manajemen Risiko sesuai ISO/IEC 17025:2017 pada tanggal 2 Nopember 2023.

- Untuk pemenuhan Standar peralatan Laboratorium telah dilakukan pengadaan peralatan laboratorium pada laboratorium Pengujian terdapat penambahan

sebanyak 1 alat, yaitu LCMS MS. Akan tetapi dengan konsep new regionalisasi, alat tersebut di transfer ke Balai Besar POM di Surabaya pada Bulan September 2023.

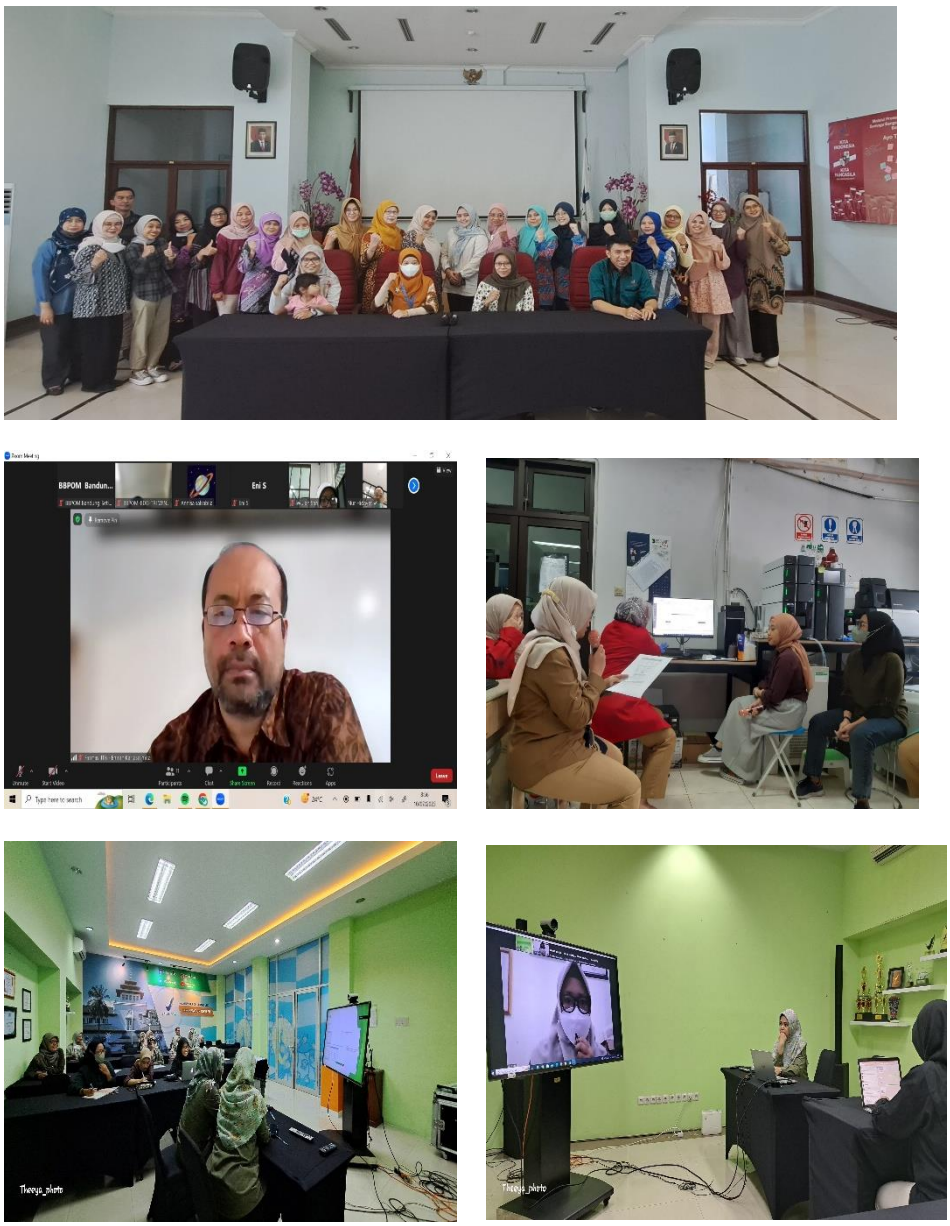

Gambar 3.174 Kegiatan Bimbingan Teknis Internal Tahun 2023

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut yang telah dilakukan berdasarkan rekomendasi tersebut :

TABEL 3.165
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
"PERSENTASE PEMENUHAN STANDAR LABORATORIUM SESUAI STANDAR GLP"

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
a	Membuat roadmap pemenuhan SRL Obat, OTSK, Kosmetik , Pangan dan Mikrobiologi disesuaikan dengan kendala permasalahan yang ada	Pemenuhan SRL standar GLP tahun 2023 adalah 91,31%	-	-	Nilai pemenuhan SRL tahun 2022 sebesar 85.40%	Terdapat kenaikan SRL sebesar 5.91%
b	Pemenuhan Standar Peralatan : Membuat roadmap penambahan alat dan perbaikan alat yang rusak di tahun anggaran 2024.	Pemenuhan peralatan sesuai standar GLP tahun 2023 adalah 78,86%	-	-	Nilai pemenuhan peralatan tahun 2022 sebesar 75.80%	Terdapat kenaikan pemenuhan peralatan sebesar 3.06%
c	Membuat roadmap pelatihan peningkatan standar kompetensi terutama personil yang nilainya masih rendah dan dirotasi dari fungsi lain masuk ke pengujian	Telah dilakukan peningkatan kompetensi teknis pengujian	-	-	Nilai pemenuhan standar kompetensi tahun 2022 sebesar 86.10%	Terdapat kenaikan pemenuhan standar kompetensi sebesar 4.83% menjadi 90,93%

I. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Untuk monitoring ketepatan jenis, jumlah dan waktu sampling dibuat sistem informasi kinerja yang mendukung pencapaian kinerja tersebut. seperti membuat inovasi kegiatan, baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

- Fungsi Inspeksi melakukan inovasi monitoring ketepatan jenis, jumlah dan waktu sampling.
- Fungsi Pengujian melakukan perkuatan sistem secara internal untuk menunjang proses bisnis yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Kegiatan yang telah dilakukan, yaitu :
  - Di laboratorium Kimia membuat aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi untuk komodisti lainnya. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan
  - Di laboratorium mikrobiologi membuat aplikasi IFTE (Integrated Form for Tools & Equipment) yang merupakan e-form terintegrasi untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrumen. Setiap peralatan di Laboratorium mikrobiologi diberikan nomor dan QR Code, sehingga untuk penggunaannya personel pengujian tinggal melakukan scan QR Code untuk check in, dan akan secara otomatis tersimpan data penggunaannya dalam sistem. Selain itu di laboratorium mikrobiologi ini juga membuat aplikasi Kartu Stock Online menggunakan google appsheet. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan, penggunaan dan mengontrol media/reagen, sehingga lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik dan aman, akibatnya penggunaan media/reagen akan lebih efektif dan efisien.

2. INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen: (1). Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di Badan POM Operational Centre (BOC). Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut: SIPT, SPIMKer Data Keracunan. (2). Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/dIIImplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

TABEL 3.166
PENILAIAN INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BBPOM DI BANDUNG
TAHUN 2023

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Email	
	TA 2023
total_akun_individu	148
total_akun_unit	1
total_individu_login	125
total_individu_aktif	125
total_unitbalai_aktif	1
Aspek Login (%)	25,34
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	40
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	25,34
Perhitungan (%)	90,68
Perhitungan per TW	94,38
Nilai Indeks	3

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC	
Aktifitas	TA 2023
Login BOC	40
Akses BCC	60
Total	100
Perhitungan per TW	79,58
Nilai Indeks Per TW	2

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Sharing Folder	
Aktifitas	TA 2023
Jumlah Akses	563
Perhitungan	518,58
Nilai Indeks	3

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Berita Aktual	
	TA 2023
Jumlah Upload	13
Jumlah Viewer	1550
Perhitungan Rata2 Berita	14,08
Perhitungan Rata2 Pengunjung	113,21
Indeks Per TW	3

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SPIMKER	
Aktifitas	TA 2023
Jumlah Entry	23
Jumlah Verifikasi	14
Perhitungan	60,87
Perhitungan per TW	87,24
Nilai Indeks per TW	3
Komposit SPIMKER (20%)	0,6

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SIPT	
Penilaian	TA 2023
% Sarana	117,96
% Sampling	100,25
% Pengujian	99,97
Rata-Rata	106,06
Indeks per Bulan	3
Komposit SIPT	2,4

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	
Indeks	TA 2023
Indeks Pemanfaatan	2,75
Indeks Pemutakhiran	3
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	2,88

TABEL 3.167
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL"
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2,80	2,88	102,86%	SANGAT BAIK	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 2,80 sedangkan realisasinya sebesar 2,88. Dengan rincian, pada komponen Nilai Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi sebesar 2,75 dan komponen Indeks Data

dan Informasi yang dimutakhirkan sebesar 3. Sehingga capaian kinerja indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **102,86%** dengan kriteria Sangat Baik**.**

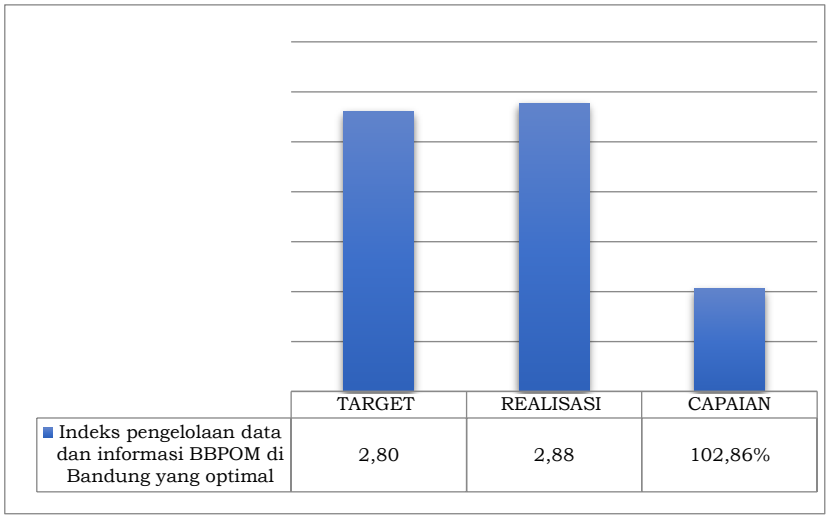

Gambar 3.175 Perbandingan target dengan realisasi kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal Tahun 2023

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020, 2021, DAN 2022

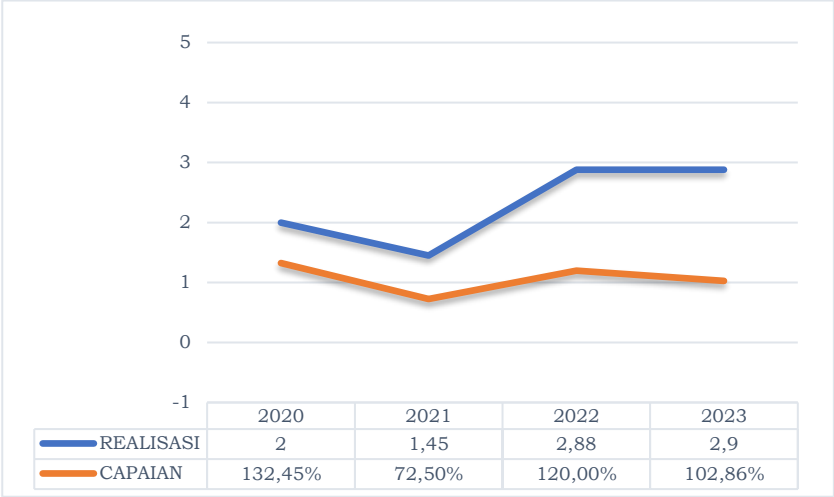

Gambar 3.176 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal Tahun 2020 - 2023

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2020-2024

Target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 2,80 (dua koma delapan). Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan III dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan III sebesar **102,86**%.

TABEL 3.168
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL"
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI TA 2023	CAPAIAN	KATEGORI	
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	3	2,88	96%	AKAN TERCAPAI	

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

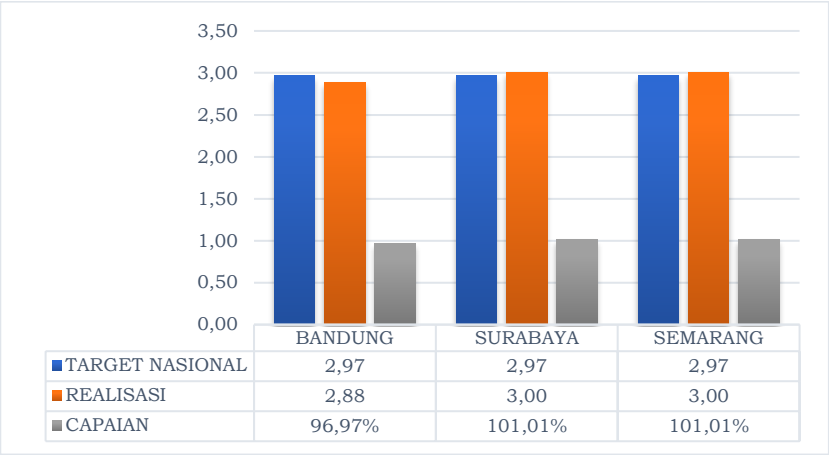

Gambar 3.177 Perbandingan Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimalTahun 2023 dengan Balai Lain dan Target Nasional

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Penyebab kecenderungan kenaikan kinerja pada triwulan III tahun 2023, sebagai berikut:

- Penggunaan absensi apel dan kegiatan melalui email corporate
- Akses BOC dan Login BOC: akses dan login BOC dilaksanakan secara rutin dan berkala sehingga indeks pemanfaatan meningkat
- Berita Aktual: ada kecenderungan peningkatan jumlah viewer berita aktual, dengan jumlah berita yang diunggah cukup banyak yaitu 13 berita. Peran penting tim media sosial untuk pemanfaatan subsite bandung.pom.go.id serta sosialiasi serta informasi di media sosial masih perlu terus ditingkatkan untuk lebih optimalnya akses subsite tersebut.
- SPIMKER dan SIPT: Secara umum untuk SPIMKER dan SIPT telah dilaksanakan dengan baik; Untuk SPIMKER pemanfaatan cukup tinggi.

Tindak lanjut yang telah dilakukan:

- Pemanfaatan email: Sosialisasi berkala pemanfaatan email kepada seluruh pegawai melalui Nota Dinas; Integrasi Lembar Potongan Gaji yang dikirimkan melalui email; Koneksi aplikasi internal dengan akun email corporate seluruh pegawai; serta akses wajib aplikasi mySAPK menggunakan email corporate
- Akses BOC dan Login BOC: Tertib administrasi akses dan login BOC, serta update data secara berkala sesuai oleh PIC tim TIK
- Sosialisasi Shared Folder, akses Berita Aktual oleh seluruh pegawai ditingkatkan.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

TABEL 3.169
ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA
INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	KET
		Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
1	Indeks Pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang Optimal	102,86%	311.617.000	294.714.691	94,58%	1,09	0,09	EFISIEN

G. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA SEBELUMNYA

- Peningkatan koordinasi dengan PUSDATIN untuk optimalisasi SIPT serta peningkatan komunikasi kepada seluruh pegawai BBPOM di Bandung untuk optimalisasi email corporate semakin ditingkatkan dengan monitoring perbulan.
- Peningkatan monitoring terhadap akses dan pemanfaatan koneksi BOC dan shared folder oleh penanggungjawab TIK dilaksanakan perbulan.

H. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Dari informasi kinerja yang didapatkan ini, dibentuk Tim ITIK yang akan memonitor dan meningkatkan pemanfaatan data dan informasi di BBPOM di Bandung. Beberapa program yang dilakukan dalam meningkatkan dan/atau mempertahankan pencapaian kinerja tersebut, meliputi :

- Membuat aplikasi event yang terintegrasi dengan email corporate pegawai, sehingga setiap yang akan mengikuti kegiatan daam event tersebut akan membuka email corporate dan pemanfaatan email tersebut menjadi lebih baik.
- Meningkatkan dan Mengoptimalkan pemanfaatan berita aktual, media social dan aplikasi lain untuk mendukung terlaksananya kegiatan di Balai Besar POM di Bandung.

SASARAN KEGIATAN KE-11

TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG SECARA AKUNTABEL

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan kedua indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran tersebut sebesar **92,34%** dengan kriteria **Cukup**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.170.

TABEL 3.170
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-11
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET TA 2023	REALISASI TA 2023	CAPAIAN TA 2023	KRITERIA	
1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95,6	88,28	92,34%	CUKUP	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**92,34%**	**CUKUP**	

NILAI KINERJA ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:(1) Revisi DIPA; (2) Deviasi Halaman IIII DIPA; (3) Pengelolaan UP; (4) Rekon LPJ Bendahara; (5) Data Kontrak; (6) Penyelesaian Tagihan; (7) Penyerapan Anggaran; (8) Retur SP2D; (9) Perencanaan Kas

(Renkas); (10) Pengembalian/Kesalahan SPM; (11) Dispensasi Penyampaian SPM; (12) Pagu Minus; dan (13) Konfirmasi Capaian Output.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan sebesar 95,6. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung Tahun 2023 sebesar 88,28, dengan rincian, nilai EKA sebesar 86,84 dan nilai IKPA sebesar 90,44. Dengan demikian capaian kinerja indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **92,34%** dengan kriteria **Cukup.**

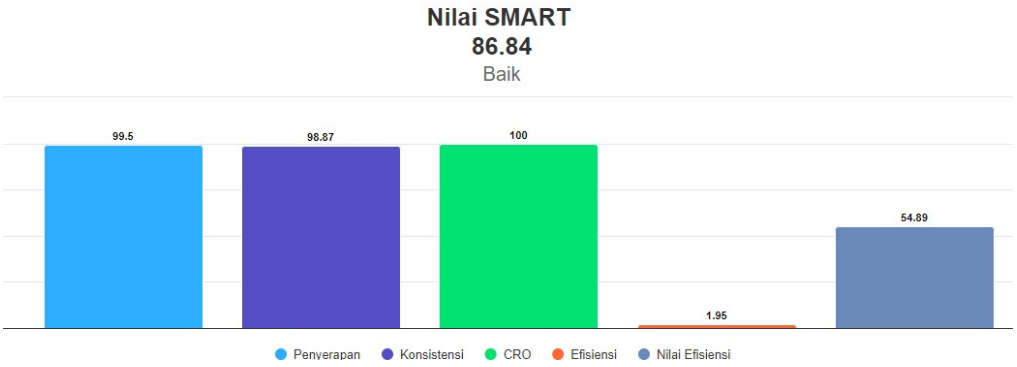

Gambar 3.178 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

TABEL 3.171
"NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)
BBPOM DI BANDUNG"
TAHUN 2023

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	095	063	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	Nilai	100.00	38.37	98.95	91.00	94.12	90.90	85.00	100.00	90.48	100%	90.48
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	3.84	19.79	9.10	9.41	9.09	4.25	25.00			
					Nilai Aspek	69.19		91.99					100.00			

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020, 2021, DAN 2022

Pada Tahun 2023, terjadi penurunan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, dan 2022. Hal ini disebabkan oleh kurangnya monitoring

Rencana Penarikan Dana (RPD) selama Tahun 2023. Sehingga nilai IKPA menjadi lebih rendah. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.22222.

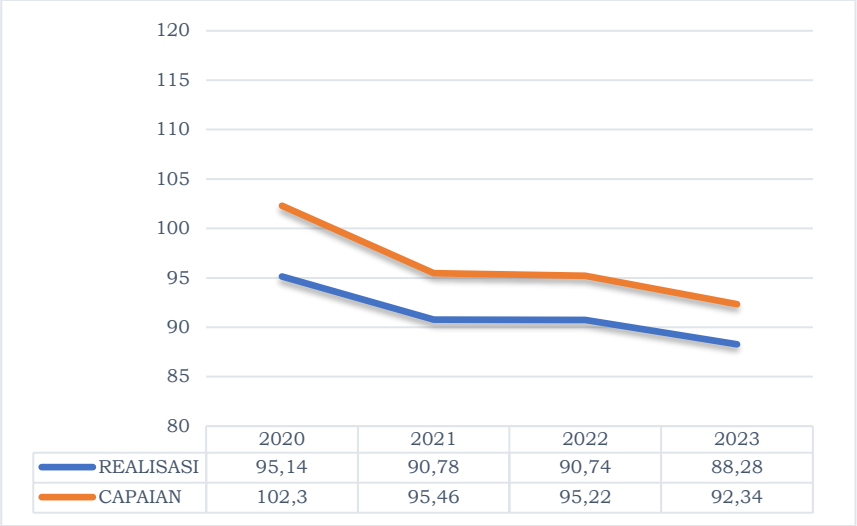

Gambar 3.179 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung Tahun 2020 - 2023

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

Pada Tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 95,90. Jika nilai pencapaian sasaran pada Tahun 2023 terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran sebesar 92,05% dengan kategori Akan Tercapai.

TABEL 3.172
CAPAIAN KINERJA NILAI KINERJA ANGGARAN
TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI TA 2023	CAPAIAN	KATEGORI	
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95.90%	88,28	92,05%	AKAN TERCAPAI	

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

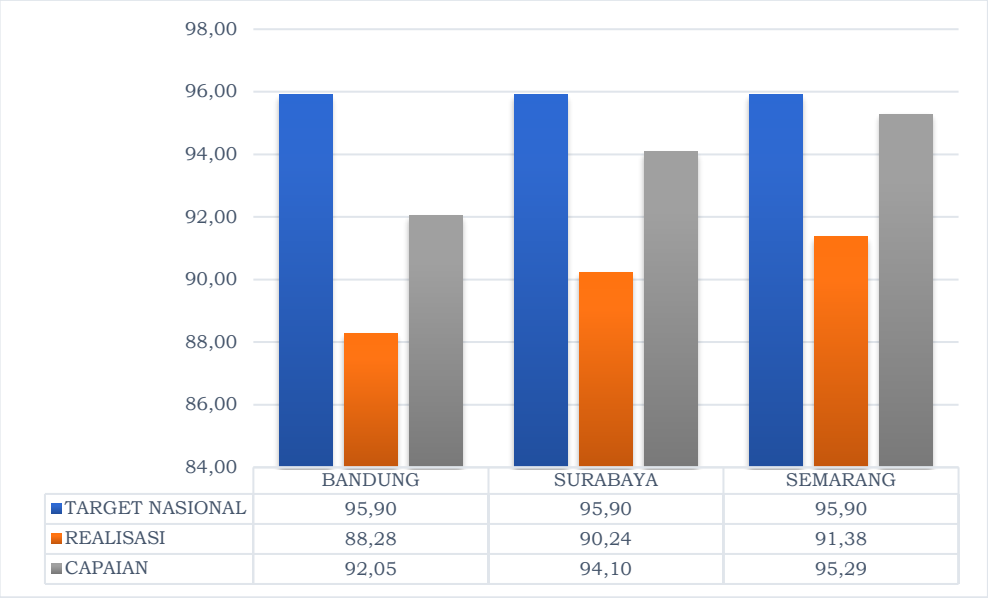

Gambar 3.180 Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung Tahun 2023 dengan Balai Lain dan Target Nasional

Jika dibandingkan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran di Bandung pada tahun 2023 dengan target nasional (85), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Semarang (95,29%), Balai Besar POM di Surabaya (94,10%), dan Balai Besar POM di Bandung (92,05%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN ATAU PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 masih dibawah target yang sudah ditetapkan, hal ini dikarenakan oleh:

- Hasil penilaian IKPA pada aspek Deviasi halaman III DIPA masih rendah. hal ini dipengaruhi oleh tingginya tingkat deviasi antara realisasi anggaran dan rencana penarikan dana yang sudah ditetapkan. Makin besar deviasi yang terjadi, semakin kecil perolehan nilai aspeknya.

- Hasil penilaian IKPA pada aspek pengelolaan UP/TUP masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh ketepatan waktu pertanggungjawaban UP atau TUP, semakin tinggi ketepatan waktu pertanggungjawabnnya, akan semakin tinggi nilai asepk yang didapatkan.
- Hasil penilaian EKA pada aspek efisiensi belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh capaian output dan realisasi anggaran. Semakin tinggi capaian output akan meningkatkan penilaian aspek ini, tapi semakin tinggi realisasi anggarannya akan menurunkan penilaiannya.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

- Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran setiap rincian output dan sasaran kegiatan setiap bulan.
- Memperbaiki kualitas perencanaan kegiatan melalui pembuatan PoA yang selalu diperbaharui setiap triwulan dan penyesuaian antara PoA fisik dan anggarannya..
- Peningkatan kinerja pengelolaan APBN dan komitmen Ketua Tim Fungsi terkait, antara lain: penyampaian laporan capaian output tepat waktu, pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu, penyampaian data kontrak dan LPJ Bendahara tepat waktu, penyelesaian tagihan tepat waktu.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

TABEL 3.173
ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA
"NILAI KINERJA ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG"

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	CAPAIAN TE
		Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
1	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95,6%	1.690.210.000	1.651.423.672	97,71%	0,95	-0,05	TIDAK EFISIEN

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung sebesar -0.05 dengan kriteria Tidak Efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih besar dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Dengan demikian, Balai Besar POM di Bandung akan melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja sebagai berikut:

- Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dilakukan setiap bulan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung yang dihadiri oleh Tim Manajemen Kinerja dan Ketua Tim masing-masing Fungsi, yang diselenggarakan secara luring dan daring. Kegiatan bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran serta merumuskan rencana tindaklanjut untuk kegiatan triwulan berikutnya.

Gambar 3.181 Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran

- Peningkatan kompetensi melalui pelatihan / sosialisasi untuk Bendahara, PPK, PPSPM, Pejabat Pengadaan dan pengelola keuangan lainnya

H. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

TABEL 3.174
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
"NILAI KINERJA ANGGARAN"
TAHUN 2023

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
a	Melaporkan kinerja melalui aplikasi SMART DJA secara tepat waktu dengan data yang akurat	Telah dilakukan pelaporan capaian kinerja output melalui aplikasi SAKTI, yang sudah terkoneksi dengan SMART DJA	-	-	Penilaian IKPA menjadi tidak akurat dan nilainya kecil	Penilain IKPA menjadi akurat dan nilainya tinggi sesuai kinerja
b	Memastikan penyerapan anggaran triwulan sesuai dengan target (15%-40%-60%-99%) dengan cara menyegerakan pencairan dan pelaksanaan kegiatan terutama belanja modal	Telah dilakukan rencana penarikan dana, dan rencana pengadaan belanja modal. Sesuai dengan target pencaoran anggaran	-	-	Realisasi anggaran tidak sesuai dengan target per TW	Realisasi anggaran sesuai dengan target per triwlanny a
c	Memperhatikan ketentuan waktu pertanggungjawaban keuangan	Telah dibuatkan SOP untuk pertanggungjawaban keuangan	-	-	Pertanggungjawaban tidak tertib dan telat bayar, serta tinggi	Pertanggungjawaban lebih tertib, pembayaran sesuai waktunya dan

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
					potensi tidak dapat terbayarkan	mengurangi risiko tidak terbayarkan
d	Monev realisasi anggaran secara berkala dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA yang ditetapkan	Telah dilakukan monev realisasi anggaran per bulan	-	-	Tidak ada kendali dan monitoring realisasi anggaran dan kesesuaiannya dengan RPD	Ada kendali dan monitoring realisasi anggaran sehingga dapat sesuai dengan PoA dan RPD
e	Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan bahwa data dalam dokumen pembayaran telah benar	Telah dilakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan SOP	-	-	Dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap sehingga pembayaran tidak tepat waktu dan tidak sesuai RPD	Dokumen pertanggungjawaban lengkap, sehingga pembayaran tepat waktu dan sesuai RPD

I. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Dari informasi kinerja yang didapatkan, fungsi Tata Usaha membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

- Melakukan perbaikan SOP alur pertangungjawaban keuangan, untuk meningkatkan pengendalian berkas pertanggungjawaban, monev, mempercepat waktu proses pencairan, dan mengurangi kesalahan dokumen pertanggungjawaban.
- Informasi kinerja ini digunakan sebagai salah satu dasar penetapan target indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM Bandung di periode tahun selanjutnya.

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022. Sesuai hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 terdapat 7 rekomendasi perbaikan, yang termuat dalam 5 aspek, yaitu Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Berikut tindak lanjut yang telah dilaksanakan, sebagaimana termuat dalam Tabel ..... :

Tabel 3.....
MATRIKS TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
PERENCANAAN						
a	Melakukan reviu Renstra terkait pemetaan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja	Telah dilakukan reviu Renstra BBPOM di Bandung TA 2020-2024	-	-	Tujuan, sasaran dan indikator kinerja beserta targetnya tidak sesuai dengan kondisi limgkumgan strategisnya	Tujuan, sasaran dan indikator kinerja beserta targetnya telah sesuai dengan kondisi limgkumgan strategisnya
b	Melakukan reviu secara memadai agar indikator dan target Renstra, RKT, PK dan RAPK selaras	Telah dilakukan reviu dokumen Renstra, RKT, PK dan RAPK Tahun 2023	-	-	Indikator dan target Renstra, RKT, PK dan RAPK belum selaras	Indikator dan target Renstra, RKT, PK dan RAPK sudah selaras
PENGUKURAN						
c	Melakukan perbaikan terhadap SOP manajemen kinerja terkait mekanisme	-	Melakukan reviu dan perbaikan SOP manajemen	2024	-	-

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	penginputan data kinerja pada aplikasi internal dan apabila terjadi kesalahan data kinerja		kinerja terkait mekanisme penginputan data kinerja, dan apabila terjadi kesalahan			
PELAPORAN						
d	Mencantumkan penjelasan terkait upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi dan/atau penjelasan atas penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya	Telah dilakukan monitoring dan pengukuran Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya	-	-	Penyebab inefisiensi tidak dapat teridentifikasi, sehingga upaya perbaikan tidak efektif, karena tidak mencapai sumber permasalahan nya	Penyebab inefisiensi dapat teridentifikasi, sehingga upaya perbaikan akan tebih efektif
EVALUASI INTERNAL						
e	Laporan evaluasi internal dan laporan interim agar mencantumkan rencana tindak lanjut yang berkesinambungan dalam rangka pencapaian target kinerja	-	Mencantumkan rencana Tindak Lanjut yang berkesinambungan, pada Laporan Evaluasi Internal	2024	-	-
CAPAIAN KINERJA						

Rekomendasi		Tindaklanjut			Kondisi Sebelum rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
f	Meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal dan meningkatkan keandalan data capaian kinerja yang dilengkapi dengan dasar perhitungan yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya dan mampu telusur	Telah memanfaatkan hasil evaluasi internal dan meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya dan mampu telusur	-	-	Dasar perhitungan belum valid, sumber data belum tertelusur sehingga capaian kienrja belum dapat dipercaya	Dasar perhitungan sudah valid, sumber data mampu tertelusur sehingga capaian kienrja dapat dipercaya
g	Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat mengantisipasi potensi target kinerja yang tidak tercapai dan tidak dapat disimpulkan dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja	Telah melaksanakan evaluasi internal triwulanan sesuai dengan pedoman, yaitu dengan menyajikan data realisasi, dan capaian kinerja serta kendala hambatan yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja	-	-	Evaluasi internal belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga Upaya perbaikan kinerja tidak optimal	Evaluasi internal sudah dimanfaatkan secara maksimal sehingga Upaya perbaikan kinerja sudah optimal

3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Pada tahun 2023, Informasi Kinerja yang didapat, baik itu kinerja bulanan, triwulan dan tahunan, telah dimanfaatkan oleh setiap kelompok fungsi dan tim kerja BBPOM di Bandung.

Pemanfaatan informasi kinerja dilakukan dalam aspek sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian kegiatan melalui perbaikan proses kerja dan juga inovasi untuk meningkatkan capaian kinerja. Penyesuian kinerja ini telah dilakukan oleh masing-masing kelompok fungsi, sebagai berikut :
   a. aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian juga digunakan untuk komodisti lainnya. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan. Penggunaan aplikasi ini sangat menunjang capaian indikator-indikator kinerja di poksi pengujian.
   b. aplikasi IFTE (Integrated Form for Tools & Equipment) yang merupakan e-form terintegrasi untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrument. Penggunaan aplikasi ini sangat menunjang capaian indikator-indikator kinerja di poksi pengujian.
   c. aplikasi SISTER UMKM (Sistem Informasi Terpadu UMKM), sebagai informasi dalam menentukan kebutuhan pelaku usaha dalam proses perizinan Obat dan Makanan. Penggunaan aplikasi ini sangat menunjang capaian indikator-indikator kinerja di poksi sertifikasi.
   d. program Bimtek Pelaku Usaha dan desk Evaluasi Dokumen yang dilaksanakan setiap semester. Kegiatan ini merupakan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha baru yang sedang melakukan proses registrasi pendafataran produk Obat dan Makanan. program ini meningkat kepuasan Pelaku Usaha terhadap

program BBPOM di Bandung. Pelaksanaan kegiatan ini sangat menunjang capaian indikator-indikator kinerja di poksi sertifikasi.

e. Program kegiatan KAHARTOS (Kamus Hasil Informasi Terkait Medsos) merupakan pemberian informasi terkait pengawasan BBPOM Bandung melalui media sosial. Pelaksanaan program kegiatan ini sangat menunjang capaian indikator-indikator kinerja di poksi informasi dan komunikasi.

f. "KABAYAN" yaitu penggunaan satu nomor whatsapp dalam pelayanan publik secara daring dan "Si ITEUNG", yaitu pelayanan publik berupa konsultasi secara daring menggunakan platform google.meet. Pelaksanaan kegiatan ini sangat menunjang capaian indikator-indikator kinerja di poksi informasi dan komunikasi.

g. aplikasi Digital Monitoring Hasil Pemeriksaan (DMP) untuk melakukan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan. Penggunaan aplikasi ini sangat menunjang capaian indikator-indikator kinerja di poksi pemeriksaan.

h. Kegiatan SANGKURIANG (Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) berupa kegiatan pertemuan dan koordinasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha membahas terkait tindak lanjut hasil pengawasan. Dari kegiatan ini akan meningkatkan komitmen lintas sektor dan pelaku usaha dalam menindaklajuti hasil pengawasan. Pelaksanaan kegiatan ini sangat menunjang capaian indikator-indikator kinerja di poksi pemeriksaan.

i. aplikasi monitoring timeline (MOTORIK – Monitoring Timeline Optimalkan Indikator Kinerja) pengajuan permohonan sertifikasi dan evaluasi CAPA sehingga petugas dapat melakukan monitoring timeline secara update untuk menentukan prioritas pekerjaan sehingga pemenuhan kinerja penerbitan sertifikat yang dilakukan tepat waktu dapat tercapai. Penggunaan aplikasi ini sangat menunjang capaian indikator-indikator kinerja di poksi sertifikasi.

j. aplikasi event yang terintegrasi dengan email corporate pegawai, sehingga setiap yang akan mengikuti kegiatan dalam event tersebut akan membuka email corporate dan pemanfaatan email tersebut menjadi lebih baik. Penggunaan

aplikasi ini sangat menunjang capaian indikator-indikator kinerja di poksi tata usaha.

k. perbaikan SOP alur pertangungjawaban keuangan, untuk meningkatkan pengendalian berkas pertanggungjawaban, monev, mempercepat waktu proses pencairan, dan mengurangi kesalahan dokumen pertanggungjawaban. Pelaksanaan kegiatan ini sangat menunjang capaian indikator-indikator kinerja di poksi tata usaha.

2. Informasi kinerja Tahun 2023 menjadi salah satu data yang dianalisa dalam reviu penetapan target kinerja di tahun 2024. Sehingga ketercapaian kinerja di tahun 2023, akan menentukan usulan kenaikan atau penurunan target kinerja di tahun 2024.
3. Informasi kinerja ini juga dimanfaatkan dalam penetapan predikat kinerja Pegawai ASN. Sesuai Surat Edaran MenPAN RB nomor 2 tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Predikat Kinerja ASN menytakan bahwa sebelum menentukan predikat kinerja pegawai, harus ditetapkan dulu pola distribusi predikat kinerja pegawai, yang menggambarkan persentase jumlah pegawai yang dapat diberikan kriteria sangat baik, baik, cukup ataupun kurang. Pola distribusi ini ditetapkan berdasarkan capaian organisasi berupa nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) satker, yang dihitung dari nilai capaian masing-masing IKU.

3.4 REALISASI ANGGARAN DAN ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Pada tahun 2023, anggaran Balai Besar POM di Bandung sebesar Rp. 73.084.519.000,-. dengan rincian: (1) Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 43.257.256.824,-; dan (2) Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 29.459.855.159,-. Pada tahun 2023, realisasi anggaran sebesar Rp. 72.717.111.983,- (99,50%).

TABEL 3.175
REALISASI ANGGARAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2023

PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Program Pengawasan Obat dan Makanan	43.562.354.000	43.257.256.824	99.30
Program Dukungan Manajemen	29.522.165.000	29.459.855.159	99.79
TOTAL	73.084.519.000	72.717.111.983	99.50

Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan sasaran kegiatan dan alokasi anggaran dan realisasinya berdasarkan indikator sasaran kegiatan:

TABEL 3.176
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
TAHUN 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1.066.105.000	1.054.685.519	98,93%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	614.646.000	609.002.116	99,08%
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1.611.152.500	1.573.513.526	97,66%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	3.301.402.500	3.285.865.263	99,53%
5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	25.350.941.000	25.171.693.410	99,29%
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1.486.551.000	1.475.854.504	99,28%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1.252.398.000	1.242.412.698	99,20%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	4.984.796.000	4.963.410.377	99,57%
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	24.330.762.000	24.312.432.231	99,92%

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	7.395.555.000	7.376.818.667	99,75%
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	1.690.210.000	1.651.423.672	97.71%
TOTAL		**73.084.519.000**	**72.717.111.983**	**99,50%**

Penyerapan anggaran per sasaran kegiatan pada tahun 2023 dari yang terbesar secara berurutan adalah sebagai berikut :

1) Sasaran Kegiatan Kesembilan yaitu: Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal dengan pagu sebesar Rp. 24.330.762.000,- dan realisasi sebesar Rp. 24.312.432.231,-, dengan capaian 99,92%.
2) Sasaran Kegiatan Kesepuluh yaitu: Menguatnya laboratorium. Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan dengan pagu sebesar Rp. 7.395.555.000,- dan realisasi sebesar Rp. 7.376.818.667,- dengan capaian 99,75%.
3) Sasaran Kegiatan Kedelapan yaitu: Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal dengan pagu sebesar Rp. 4.984.796.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.963.410.377,- dengan capaian 99,57%.
4) Sasaran Kegiatan Keempat yaitu: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 3.301.402.500,- dan realisasi sebesar Rp. 3.285.865.263,- dengan capaian 99,53%.
5) Sasaran Kegiatan Kelima yaitu: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 25.350.941.000,- dan realisasi sebesar Rp. 25.171.693.410,- dengan capaian 99,29%.
6) Sasaran Kegiatan Keenam yaitu: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu

sebesar Rp. 1.486.551.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.475.854.504,- dengan capaian 99,28%.

7) Sasaran Kegiatan Ketujuh yaitu: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 1.252.398.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.242.412.698,- dengan capaian 99,20%.

8) Sasaran Kegiatan Kedua yaitu: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 614.646.000,- dan realisasi sebesar Rp. 609.002.116,- dengan capaian 99,08%.

9) Sasaran Kegiatan Kesatu yaitu: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 1.066.105.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.054.685.519,-, dengan capaian 98,93%.

10) Sasaran Kegiatan Kesebelas yaitu: Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel dengan pagu sebesar Rp. 1.690.210.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.651.423.672,- dengan capaian 97.71%.

11) Sasaran Kegiatan Ketiga yaitu: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 1.611.152.500,- dan realisasi sebesar Rp. 1.573.513.526,-, dengan capaian 97.66%.

Sedangkan jika dilihat penyerapan anggaran berdasarkan *perspective balance score card* maka secara berturut-turut dari yang tertinggi adalah sebagai berikut:

1) *Learning and Growth Perspective* dengan pagu anggaran sebesar Rp. *38.401.323.000*,- dan realisasi sebesar Rp. *38.340.741.930*,- dengan capaian *99,84*%.

2) *Internal Process Perspective* dengan pagu anggaran sebesar Rp. *31.391.292.500*,- dan realisasi sebesar Rp. *31.224.357.977*,- dengan capaian *99,47*%.

3) *Stakeholders Perspective* dengan pagu anggaran sebesar Rp. *3.291.903.500*,- dan realisasi sebesar Rp. *3.263.930.461*,- dengan capaian *99,15*%.

TABEL 3.177

REALISASI ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN BERDASARKAN

PERSPECTIVE BALANCE SCORE CARD

BALAI BESAR POM DI BANDUNG

TAHUN 2023

Perspective	Sasaran Kegiatan		Sasaran Kegiatan			Perpective		
			Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1.066.105.000	1.054.685.519	98,93%	3.291.903.500	3.237.201.161	98,34%
	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	602.235.000	370.848.819	61,58%			
	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	614.646.000	609.002.116	99,08%			

Perspective	Sasaran Kegiatan		Sasaran Kegiatan			Perpective		
			Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1.611.152.500	1.573.513.526	97,66%	31.391.292.500	31.175.825.875	99,31%
	5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	3.301.402.500	3.285.865.263	99,53%			
	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	25.350.941.000	25.171.693.410	99,29%			
	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1.486.551.000	1.475.854.504	99,28%			

Perspective	Sasaran Kegiatan		Sasaran Kegiatan			Perpective		
			Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	1.252.398.000	1.242.412.698	99,20%	38.401.323.000	38.304.084.947	99,75%
	9	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	4.984.796.000	4.963.410.377	99,57%			
	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	24.330.762.000	24.312.432.231	99,92%			
	11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	7.395.555.000	7.376.818.667	99,75%			
NILAI PENCAPAIAN ANGGARAN			**73.084.519.000**	**72.717.111.983**	**99,50%**	**73.084.519.000**	**72.717.111.983**	**99,50%**

Pada Tahun 2023, RPD yang tercantum dalam Halaman III DIPA BBPOM di Bandung sebesar Rp. 72.498.159.000,-, maka deviasi sebesar -0,58 dengan kategori Baik (Hijau). Secara rinci dijelaskan tabel berikut :

TABEL 3.178
HASIL PERHITUNGAN DEVIASI RPD
TAHUN 2023

BULAN	% RPD Halaman III DIPA	% Realisasi	Deviasi	Kategori
OKTOBER	55,90	76,31	-20,42	TIDAK BAIK
NOVEMBER	58,69	84,32	-25,63	TIDAK BAIK
DESEMBER	96,33	96,62	-0,29	BAIK

Berdasarkan Surat Edaran Nomor : HK.02.02.2.21.04.21.11 tentang Target Rencana Penarikan Dana (RPD) Per Triwulan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2021 bahwa target RPD per triwulan, mengacu pada target penyerapan anggaran per triwulan:

a. Triwulan I, sebesar minimal 15 persen;

b. Triwulan III, sebesar minimal 40 persen;

c. Triwulan IIII, sebesar minimal 60 persen; dan

d. Triwulan IV, sebesar minimal 99 persen.

TABEL 3.179
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2023

Target Realisasi TA 2023	Realisasi Anggaran TA 2023	Capaian
99%	99,50%	100,51%

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks

efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input. Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian.

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Apabila IE ≥ SE: kegiatan efisien

Apabila IE < SE: kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input (berupa dana).

Hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.180
PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI
BERDASARKAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
a		b	c	d=b/c	e=d-1	f
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	99,35%	98,78%	1,01	0,01	EFISIEN
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	104,96%	99,38%	1,06	0,06	EFISIEN
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,67%	98,78%	1,01	0,01	EFISIEN
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	106,17%	99,38%	1,07	0,07	EFISIEN
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	125,13%	99,47%	1,26	0,26	EFISIEN
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	111,13%	99,08%	1,12	0,12	EFISIEN
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	104,18%	99,98%	1,04	0,04	EFISIEN
8	Indeks kepuasan masyarakat	101,33%	94,57%	1,07	0,07	EFISIEN

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
a		b	c	d=b/c	e=d-1	f
	atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan					
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	101,38%	99,54%	1,02	0,02	EFISIEN
10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dIIIlaksanakan	102,04%	99,87%	1,02	0,02	EFISIEN
11	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	115,33%	99,71%	1,16	0,16	EFISIEN
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	105,80%	99,54%	1,06	0,06	EFISIEN
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	100,39%	99,73%	1,01	0,01	EFISIEN
14	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	103,58%	99,29%	1,04	0,04	EFISIEN
15	Indeks Pelayanan Publik	94,09%	99,95%	0,94	-0,06	TIDAK EFISIEN

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
a		b	c	d=b/c	e=d-1	f
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	105,48%	98,76%	1,07	0,07	EFISIEN
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	100,05%	99,34%	1,01	0,01	EFISIEN
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100,00%	98,78%	1,01	0,01	EFISIEN
19	Jumlah desa pangan aman	100,00%	99,59%	1,00	0,00	EFISIEN
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	100,00%	96,64%	1,03	0,03	EFISIEN
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99,07%	99,22%	1,00	0,00	EFISIEN
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99,66%	99,36%	1,00	0,00	EFISIEN
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	121,26%	99,20%	1,22	0,22	EFISIEN
24	Indeks RB UPT	107,87%	99,53%	1,08	0,08	EFISIEN
25	Nilai AKIP UPT	93,57%	100,00%	0,94	-0,06	TIDAK EFISIEN

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
a		b	c	d=b/c	e=d-1	f
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	111,00%	99,92%	1,11	0,11	EFISIEN
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	97,75%	99,97%	0,98	-0,02	TIDAK EFISIEN
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	102,86%	94,58%	1,09	0,09	EFISIEN
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92,34%	97,71%	0,95	-0,05	TIDAK EFISIEN
TOTAL		**103,54%**	**99,50%**	**1,04**	**0,04**	**EFISIEN**

Pada Tahun 2023, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) indikator secara kumulatif masuk kedalam kategori **Efisien (0,04).**

Sedangkat hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Kegiatan pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.181
PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI
BERDASARKAN KEGIATAN/OUTPUT
TAHUN 2023

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2023	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	f	g	h=(g/fx100)
1	3165.AEA.001 – Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Laporan	14	14	100,00%	420.383.000	415.804.564	98,91%
2	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Keputusan	1958	2554	130,44%	1.319.067.000	1.313.946.602	99,61%
3	3165.QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	UMKM	32	32	100,00%	130.548.000	128.931.900	98,76%
4	3165.BKB.001 Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	Laporan	1	1	100,00%	1.204.413.000	1.174.793.276	97,54%
5	3165.BMB.001 Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Layanan	45	45	100,00%	170.167.000	170.105.684	99,96%

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2023	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	f	g	h=(g/fx100)
6	3165.CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Paket	1	1	100,00%	223.000.000	211.010.000	94,62%
7	3165.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	Unit	9	9	100,00%	75.400.000	60.400.000	80,11%
8	3165.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	1	1	100,00%	300.000.000	298.097.181	99,37%
9	3165.PDD.001 Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Laboratorium	1	1	100,00%	2.810.300.000	2.797.688.127	99,55%
10	3165.QCD.U02 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	Perkara	10	10	100,00%	1.009.980.000	1.004.347.248	99,44%
11	3165.QDB.001 Sekolah dengan	Lembaga	112	112	100,00%	1.005.602.000	993.340.440	98,78%

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2023	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	f	g	h=(g/fx100)
	Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman							
12	3165.QDB.002 Desa Pangan Aman	Lembaga	37	37	100,00%	1.149.720.000	1.144.973.560	99,59%
13	3165.QDB.003 Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Lembaga	18	18	100,00%	348.351.000	336.632.450	96,64%
14	3165.QDC.001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Orang	81.107	83272	102,67%	23.291.520.000	23.135.943.973	99,33%
15	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Sampel	957	962	100,52%	834.563.000	829.042.665	99,34%
16	3165.QIA.005 Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	Sampel	2548	2550	100,08%	1.656.261.000	1.640.088.939	99,02%
17	3165.QIA.008 Sampel pangan	Sampel	125	125	100,00%	61.832.000	61.408.419	99,31%

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2023	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	f	g	h=(g/fx100)
	fortifikasi yang diperiksa oleh UPT							
18	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Sarana	384	412	107,29%	876.819.000	872.527.012	99,51%
19	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Sarana	1431	1447	101,12%	1.674.428.000	1.668.174.784	99,63%
20	3165.RAB.001 Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Laboratorium	1	1	100,00%	5.000.000.000	5.000.000.000	100,00%
21	6384.EBA.994	Layanan	1	1	100,00%	29.522.165.000	29.459.855.159	99,79%

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2023	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	f	g	h=(g/fx100)
	Layanan Perkantoran							
					TOTAL	73.084.519.000	72.717.111.983	99,50%

Pada Tahun 2023, BBPOM di Bandung melaksanakan 22 (dua puluh dua) Rincian Output (RO) dengan nilai TE masuk kategori Efisien. Dari data perhitungan tingkat efisiensi, nilai TE tertinggi adalah Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT (TE=1,30). Berdasarkan perhitungan Nilai TE, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan BBPOM di Bandung pada TA 2023 terlaksana secara efisien (TE=0,04).

Namun, tingkat efisiensi adalah bersifat relative, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

4.2 SARAN

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2023 mengukur pencapaian kinerja Tahun 2023 berdasarkan target pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang ditetapkan tanggal 28 Desember 2022 berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024. Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024. Berikut hasil pencapaian sasaran kegiatan pada Tahun 2023, yaitu:

1. Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2023 sebanyak 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Dari sasaran kegiatan tersebut diukur berdasarkan 29 (dua puluh sembilan) indikator sasaran kegiatan, dengan hasil sebagai berikut: enam belas (16) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Sangat Baik, tiga (3) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Baik, delapan (8) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Cukup, Serta dua (2) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Secara rinci setiap sasaran kegiatan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.
2. Hasil capaian kinerja sasaran kegiatan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

   STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

   - Capaian kinerja sasaran kegiatan pertama sebesar 106,03% dengan kriteria Sangat Baik, ini menunjukan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.
   - Capaian kinerja sasaran kegiatan kedua sebesar 111,13% dengan kriteria Sangat Baik, ini menunjukan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan
   - Capaian kinerja sasaran kegiatan ketiga sebesar 102,30% dengan kriteria Sangat Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam

meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

- Capaian kinerja sasaran kegiatan keempat sebesar 103,82% dengan kriteria Sangat Baik, ini menunjukan keberhasilan Balai Besar POM di dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik.
- Capaian kinerja sasaran kegiatan kelima sebesar 100,01% dengan kriteria Sangat Baik, ini menunjukan berhasilnya upaya Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan.
- Capaian kinerja sasaran strategis keenam sebesar 99,37% dengan kriteria Cukup, ini menunjukan belum berhasilnya Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan.
- Capaian kinerja sasaran kegiatan ketujuh sebesar 121,26% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, ini menunjukan keberhasilan upaya Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan.

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

- Capaian kinerja sasaran kegiatan kedelapan sebesar 100,72% dengan kriteria Sangat Baik, ini menunjukan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan UPT yang optimal.
- Capaian kinerja sasaran kegiatan kesembilan sebesar 111,00% dengan kriteria Sangat Baik, ini menunjukan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam mewujudkan SDM UPT yang berkinerja optimal.
- Capaian kinerja sasaran kegiatan kesepuluh sebesar 102,86% dengan kriteria Sangat Baik, ini menunjukan berhasilnya Balai Besar POM di Bandung dalam

memperkuat laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.

- Capaian kinerja sasaran kegiatan kesebelas sebesar 92,34% dengan kriteria Cukup, ini menunjukan belum berhasilnya Balai Besar POM di Bandung mengelola keuangan secara akuntabel.

3. Pada Tahun 2023, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) didapatkan hasil sebesar Efisiensi (TE = 0,04).

4.2 SARAN

Untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan dalam kondisi sumber daya yang terbatas maka perlu langkah-langkah strategi yang tepat serta inovasi. Capaian sasaran kegiatan pada Tahun 2023 merupakan dasar untuk menetapkan strategi dan inovasi pada periode selanjutnya. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandung, antara lain :

1. Koordinasi dengan lintas sektor sehingga inpres No. 3 tahun 2018 tentang peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan dengan baik melalui pemantapan jaringan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Provinsi Jawa Barat.
2. Menjalin kerjasama dengan *stake holder* terkait, sehingga instansi yang berkomitmen dalam pengawasan Obat dan Makanan lebih banyak lagi. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dengan melakukan berbagai inovasi yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pelayanan prima.

4. Melakukan penyesuaian dalam metode pengawasan pre market, post market dan penyidikan yaitu dengan menggunakan teknologi dan melakukan inovasi berbasis teknologi.
5. Melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan terus menerus serta berkesinambungan.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

LAMPIRAN

1. REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020-2024
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2023
3. PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2023
4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2023

BADAN POM

REVIU RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

TAHUN 2020-2024

DAFTAR ISI

		Halaman
	DAFTAR ISI	i
	DAFTAR GAMBAR	ii
	DAFTAR GRAFIK	iii
	DAFTAR TABEL	iv
	DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB 1	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. TUJUAN	2
	C. RUANG LINGKUP	2
BAB 2	HASIL REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2020-2024	3
	A. REVIU TERHADAP BAB I PENDAHULUAN	3
	B. REVIU TERHADAP BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN	14
	C. REVIU TERHADAP BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	23
	D. REVIU TERHADAP BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	28
	E. REVIU TERHADAP LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN	35
	F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	52
BAB 3	PENUTUP	53

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
GAMBAR 1	Struktur Organisasi BBPOM di Bandung (Semula) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM	3
GAMBAR 2	Struktur Organisasi BBPOM di Bandung (Menjadi) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM	4
GAMBAR 3	Peta Strategi BSC Level II BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024	22
GAMBAR 4	Peta Strategi BSC Loka POM di Bogor dan Loka POM di Tasikalaya Tahun 2020-2024	23

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
GRAFIK 1	Pemetaan Kebutuhan Pegawai 2020-2024 BBPOM di Bandung	5
GRAFIK 2	Profil Gender Pegawai BBPOM di Bandung	6
GRAFIK 3	Profil Jabatan Pegawai BBPOM di Bandung	6
GRAFIK 4	Profil Pendidikan Pegawai BBPOM di Bandung	7

DAFTAR TABEL

		Halaman
TABEL 1	Pemetaan Kebutuhan Pegawai 2020-2024 BBPOM di Bandung	5
TABEL 2	Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Bandung Tahun 2020	8
TABEL 3	Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024	14
TABEL 4	Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan, Kebijakan dan Strategi BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024	17
TABEL 5	Perubahan Arah Kebijakan BPOM 2020-2024	24
TABEL 6	Perubahan Strategi BPOM Tahun 2020-2024	26
TABEL 7	Perubahan Target Indikator Kinerja BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024	31
TABEL 8	Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	34
TABEL 9	Matriks Perubahan Kegiatan, sasaran, Indikator dan Target Kinerja BBPOM di Bandung Pada Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024	36
TABEL 10	Matriks Perubahan Kegiatan, sasaran, Indikator dan Target Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Pada Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024	44
TABEL 11	Matriks Perubahan Kegiatan, sasaran, Indikator dan Target Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya Pada Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kota TasikmalayaTahun 2020-2024	48

BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171
Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546
Email : bpom_bandung@pom.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
NOMOR HK.02.02.12A.12A5.12.21.110 TAHUN 2021

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, perlu dilakukan reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organsasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2020-2024.

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171
Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546
Email : bpom_bandung@pom.go.id

Kesatu	:	Menetapkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
Kedua	:	Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024 sebagaimana diaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam menyusun Dokumen Perencanaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Oktober 2021.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 13 Desember 2021
Kepala Balai Besar POM di Bandung

Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si.
NIP. 19650713 199103 2 001

Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI di Jakarta
2. Sekretaris Utama Badan POM RI di Jakarta
3. Inspektur Utama Badan POM RI di Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
NOMOR HK.02.02.12A.12A5.12.21.110
TAHUN 2021
TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TAHUN 2020-2024

REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, BPOM telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, yang dijadikan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM dalam menyusun dokumen perencanaan, diantaranya adalah Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.03.103.05.20.1124A Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Serta adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka BPOM telah melakukan reviu terhadap Rencana Stategis BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi dan telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Stategis BPOM Tahun 2020-2024. Dengan demikian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung juga perlu melakukan reviu Rencana Stategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024 berdasarkan Reviu Rencana Stategis BPOM Tahun 2020-2024, sehingga berbagai kebijakan dan strategi yang ditetapkan BPOM dapat teroperasionalisasikan dan diimplementasikan dengan baik.

B. TUJUAN

Tujuan Reviu Rencana Strategis Balai Besar di Bandung Tahun 2020-2024 adalah sebagai acuan:

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung.
2. Dalam penyusunan dokumen evaluasi paruh waktu dan akhir periode pelaksanaan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Reviu Rencana Strategis Balai Besar di Bandung Tahun 2020-2024 adalah:

1. Reviu terhadap perubahan lingkungan stategis, visi, misi,tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan dan strategi; dan
2. Reviu indikator kinerja dan target pada level sasaran kegiatan.

BAB II
HASIL REVIU RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TAHUN 2020-2024

A. REVIU TERHADAP BAB I PENDAHULUAN

1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi UPT di Lingkungan BPOM termasuk BBPOM di Bandung. Adapun perubahan Organisasi dan Tata Kerja dimaksud, sebagai berikut:

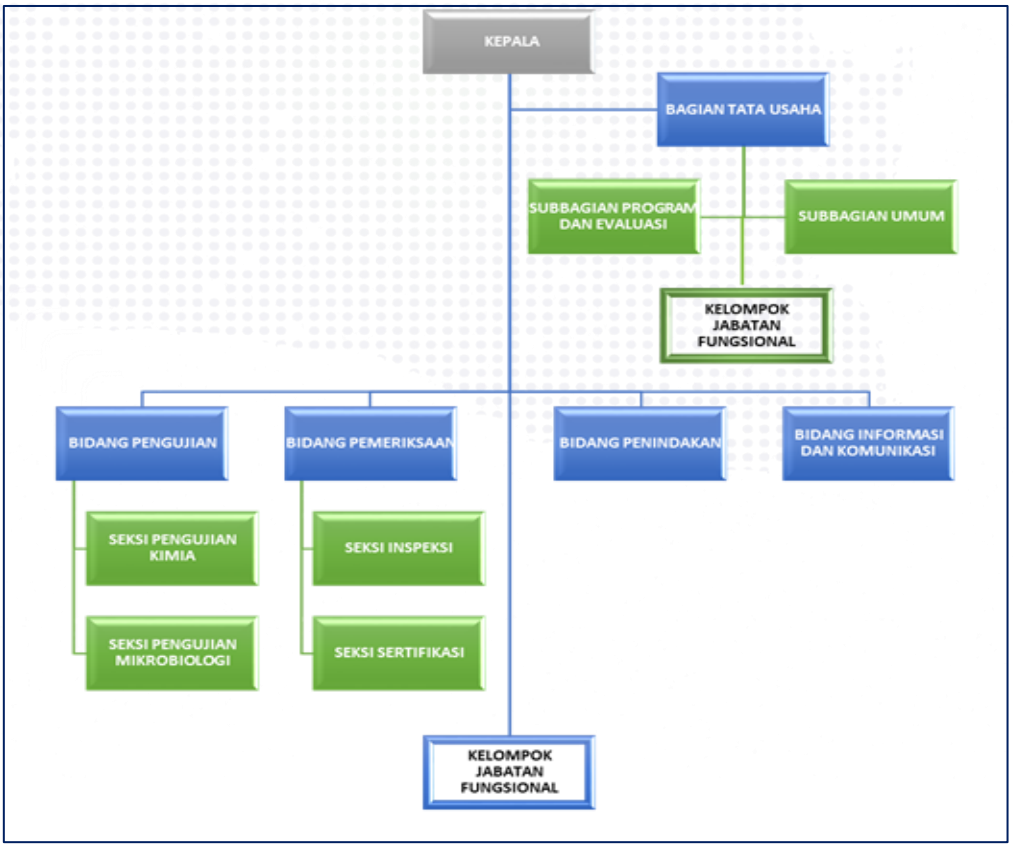

Gambar 1
Struktur Organisasi BBPOM di Bandung (Semula) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM

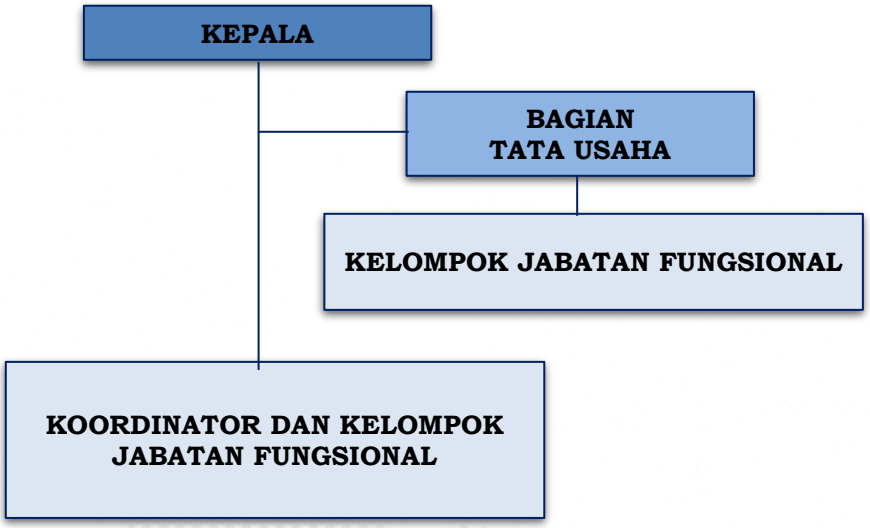

Gambar 2
Struktur Organisasi BBPOM di Bandung (Menjadi) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM

Berdasarkan gambar 1 dan 2 di atas terlihat perubahan organisasi dan tata kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang semula terdiri atas: a. Kepala; b. Bidang Pengujian; c. Bidang Pemeriksaan; d. Bidang Penindakan; e. Bidang Informasi dan Komunikasi; f. Bagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional berubah menjadi organisasi Balai Besar POM di Bandung yang terdiri atas: a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Reviu Kebutuhan Sumber Daya Manusia berdasarkan Analisis Beban Kerja

   Pada Renstra BBPOM di Bandung tahun 2020-2024, telah disusun kebutuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Bandung. Pada tahun 2020, jumlah Pegawai eksisting sejumlah 129 sedangkan kebutuhan sejumlah 311, sehingga ada gap sejumlah 182 pegawai. Pemetaan kebutuhan pegawai tersebut, selanjutnya dilakukan dalam rentang waktu hingga tahun 2024 dengan memperhitungkan SDM Pensiun dan

Mutasi masuk dan keluar, secara keseluruhan dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut.

Tabel 1
Pemetaan Kebutuhan Pegawai 2020-2024 BBPOM di Bandung

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Kebutuhan SDM ABK 2020	311	311	311	311	311
SDM Pensiun	1	3	4	1	5
SDM Pindah ke BBPOM di Bandung	1	6	1	1	1
SDM Pindah Keluar BBPOM di Bandung	1	1	0	0	0
SDM yang mengikuti Tugas Belajar	6	8	7	6	6
SDM Tersedia	129	147	144	147	142
Kekurangan SDM	**182**	**164**	**167**	**164**	**169**

Grafik 1
Pemetaan Kebutuhan Pegawai 2020-2024 BBPOM di Bandung

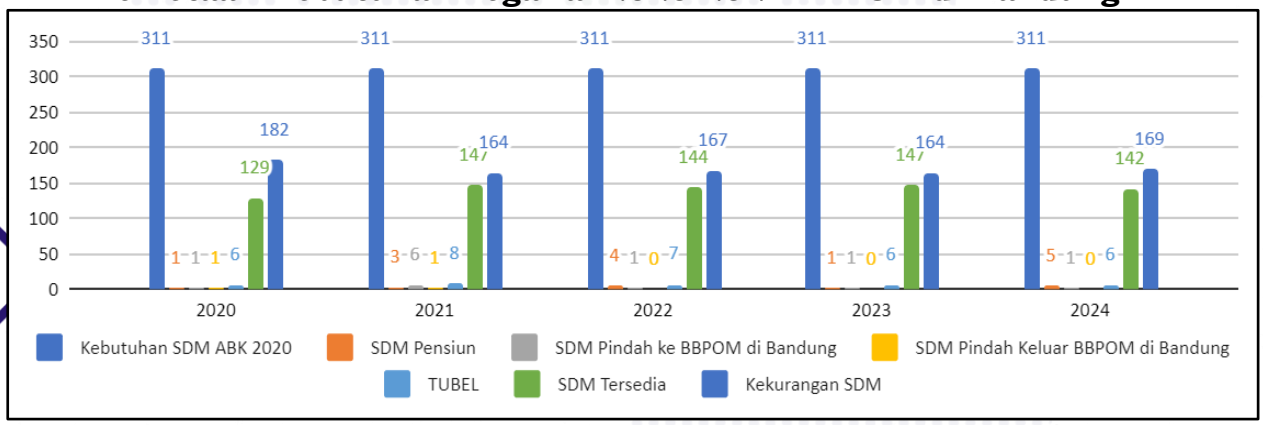

Dalam perkembangannya, terdapat perubahan data jumlah SDM secara dinamis, karena adanya perubahan Organisasi dan Tata Laksana dan Mutasi pegawai, sehingga GAP Pegawai akan selalu disesuaikan. Berdasarkan data SIASN per 21 Februari 2022, jumlah pegawai eksisting adalah 144 pegawai, sehingga GAP kebutuhan pegawai semakin berkurang. Selain itu, berdasarkan data SIASN profil seluruh pegawai eksisting tersebut juga dapat dipetakan dalam gender, tingkat pendidikan dan jabatan sebagai berikut.

1. Profil gender

   Proporsi Jumlah pegawai Perempuan (111) lebih banyak dibandingkan pegawai Laki-Laki (33).

Grafik 2
Profil Gender Pegawai BBPOM di Bandung

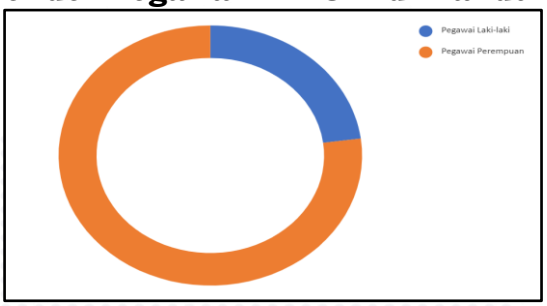

2. Profil Jabatan

   Secara umum, profil Jabatan terbanyak adalah Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (110) selanjutnya adalah Pejabat Fungsional Tertentu (15) dan Pejabat Fungsional Umum (17). Untuk Jabatan Struktural, UPT BBPOM di Bandung terdiri atas Kepala Balai dan Kepala Bagian Tata Usaha.

Grafik 3
Profil Jabatan Pegawai BBPOM di Bandung

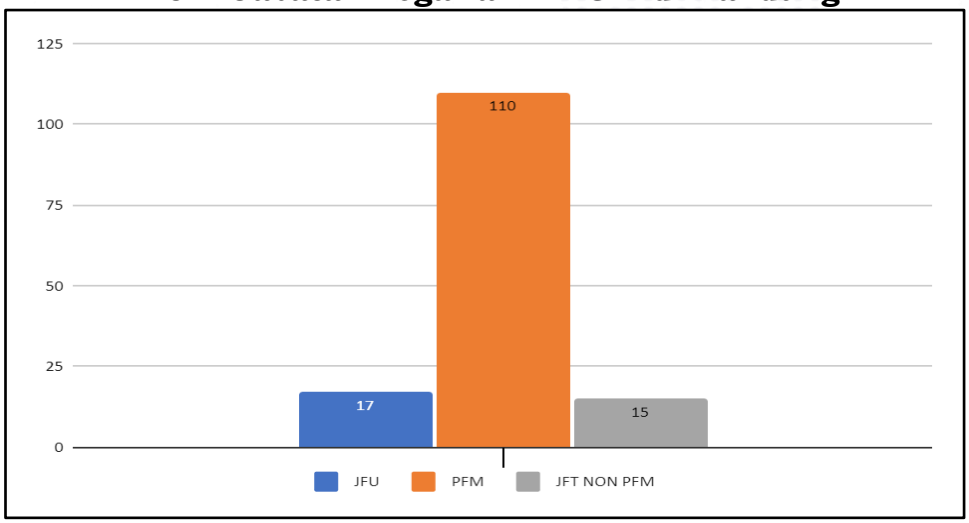

3. Profil Pendidikan

Secara umum, Pendidikan tertinggi Pegawai adalah Strata 2 (S-2) dan Profesi Apoteker dan terendah adalah setingkat Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Sekolah Menengah Farmasi. Untuk jumlah pegawai terbanyak adalah Pegawai dengan Pendidikan Profesi Apoteker sejumlah 53 pegawai, seperti dapat dilihat dalam grafik berikut.

Grafik 4
Profil Pendidikan Pegawai BBPOM di Bandung

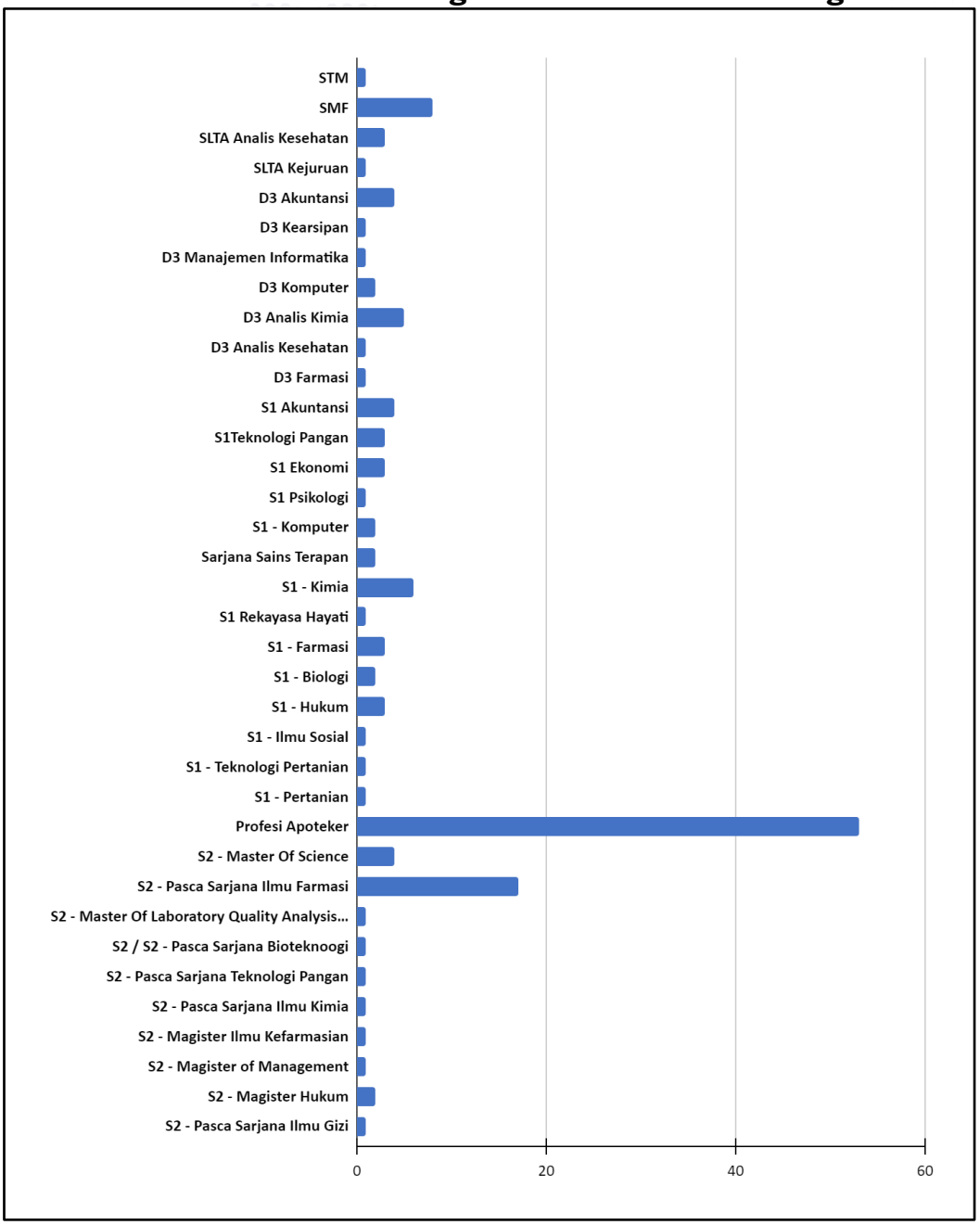

3. Capaian Kinerja BBPOM di Bandung Tahun 2020

Hasil pelaksanaan tahun pertama Renstra BPOM 2020-2024 tersaji dalam Tabel Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Bandung Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 2
Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN (%) PENYESUAIAN	KRITERIA CAPAIAN
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	*1.* Persentase obat yang memenuhi syarat	80,80%	97,62%	120,82%	120,00%	Tidak dapat disimpulkan
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00%	76,80%	98,46%	98,46%	Baik
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00%	94,49%	104,99%	104,99%	Baik
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72,00%	67,25%	93,40%	93,40%	Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**104,42%**	**104,21%**	**BAIK**
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung	*5.* Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72,00%	67,35%	93,54%	93,54%	Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**93,54%**	**93,54%**	**BAIK**
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	*6.* Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,00	90,82	109,42%	109,42%	Baik
		7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71,00	75,43	106,24%	106,24%	Baik
		8. Indeks kepuasan	88,5	85,91	97,07%	97,07%	Baik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN (%) PENYESUAIAN	KRITERIA CAPAIAN
		masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung					
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**104,24%**	**104,24%**	**BAIK**
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	*9.* Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	87,00%	96,85%	111,32%	111,32%	Sangat Baik
		10. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,90%	51,89%	91,20%	91,20%	Baik
		11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00%	86,51%	101,78%	101,78%	Baik
		12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00%	56,59%	113,18%	113,18%	Sangat Baik
		13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00%	73,69%	96,96%	96,96%	Baik
		14. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	3,7	4,2	113,51%	113,51%	Sangat Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**104,66%**	**104,66%**	**BAIK**
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	*15.* Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,43	90,70	104	104	Baik
		16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16	16	100	100	Baik
		17. Jumlah desa pangan aman	6	6	100	100	Baik
		18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2	100	100	Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**101**	**101**	**BAIK**
6.	Meningkatnya efektivitas	*19.* Persentase sampel Obat yang	82	89,75	109	109	Baik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN (%) PENYESUAIAN	KRITERIA CAPAIAN
	pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	diperiksa dan diuji sesuai standar					
		20. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	88,60	108	108	Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**109**	**109**	**BAIK**
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	*21.* Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74	62,33	84	84	Cukup
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**84**	**84**	**CUKUP**
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	*22.* Indeks RB BBPOM di Bandung	91	80,15	88	88	Cukup
		23. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81	80,54	99	99	Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**94**	**94**	**BAIK**
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	*24.* Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	78,58	105	105	Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**105**	**105**	**BAIK**
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	*25.* Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	71,50	94	94	Baik
		26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51	2	132	120	Tidak dapat disimpulkan
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**113**	**107**	**SANGAT BAIK**
11.	Terkelolanya keuangan BBPOM di Bandung secara akuntabel	*27.* Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93,00	95,14	102,30%	102,30%	Baik
		28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (100%)	108,70%	108,70%	Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			**105,05%**	**105,05%**	**BAIK**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja Balai Besar POM di Bandung melebihi 100 persen, artinya target yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Merujuk

pada tabel 2, masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai dikarenakan beberapa hal antara lain, adanya perubahan kebijakan dari eksternal yang berpengaruh dengan kinerja BBPOM di Bandung selain adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja di atas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BBPOM di Bandung dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024. Hal tersebut dilakukan guna mendorong peningkatan kinerja dan upaya inovasi dalam rangka perlindungan masyarakat dan mendukung daya saing produk Obat dan Makanan.

Selain kinerja yang disajikan dalam matriks di atas, Balai Besar POM di Bandung juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, antara lain:

- Mengawal vaksin COVID-19 terkait keamanan dan mutu vaksin COVID-19 selama peredaran, antara lain inspeksi sarana/ pengawasan sarana distribusi.
- Pembangunan Laboratorium *Biohazard Standard Laboratorium (BSL) 2* yang dilengkapi dilengkapi dengan fasilitas untuk melaksanakan pengujian COVID-19.
- Uji cepat menggunakan *rapid test* untuk obat yang digunakan dalam penanganan COVID-19 oleh P3OMN di pusat sebagai koordinator dan 33 laboratorium BB/BPOM yang telah terakreditasi.

4. Potensi dan Permasalahan Baru yang Muncul

Dalam Renstra Balai Besar POM di Bandung 2020-2024, Balai Besar POM di Bandung telah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BBPOM di Bandung dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra

BBPOM di Bandung tersebut yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pandemi Covid-19

Potensi:

1) Peran BBPOM di Bandung sangat dibutuhkan dalam rangka mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin/obat terutama dalam pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat.

2) Peran BBPOM di Bandung dibutuhkan dalam mengawal penggunaan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan COVID-19.

Permasalahan:

1) Kapasitas Sumber Daya Manusia dan teknologi BBPOM di Bandung masih sangat terbatas dibanding tuntutan dalam pemenuhan percepatan *pengujian Covid dan Obat Covid.*

2) Meningkatnya produksi dan peredaraan obat-obatan seperti suplemen, vitamin dan obat-obat untuk penyembuhan Covid-19 sehingga perlu peran BBPOM di Bandung dalam intensifikasi pengawasan baik *postmarket* obat-obatan tersebut.

b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Potensi:

BBPOM di Bandung sebagai salah satu unit pelaksanan teknis diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BBPOM di Bandung mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

1) **Area ke-4 "Pengendalian Penyakit dan Imunisasi"** Kontribusi BPOM pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, intensifikasi pengawasan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut *Monitoring* Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).

2) **Area ke-5 "Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan"** Balai Besar POM di Bandung sebagai salah satu unit pelaksana teknis BPOM ikut berperan aktif dalam Penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (*Post Authorization Safety Study*/PASS).

3) **Area ke-6 "Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)"** khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Balai Besar POM di Bandung sebagai salah satu UPT BPOM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BBPOM di Bandung; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.

4) **Area ke-8 "Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat"** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini Balai Besar POM di Bandung sebagai salah satu UPT BPOM dapat berkontribusi melalui mendukung penuh penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam

rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.

Permasalahan:

1) Kesadaran *stakeholder* dan masyarakat dalam melaporkan kasus efek samping obat dan makanan yang dibutuhkan dalam penguatan farmokovigilans masih relatif rendah.
2) Kemampuan laboratorium pengujian obat dan makanan masih belum memadai dari sisi jumlah dan kompetensinya.
3) Masih terbatasnya kapasitas BBPOM di Bandung dari sisi pemenuhan sumberdaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sistem informasi yang andal.

B. REVIU TERHADAP BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

1. **Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024**, karena tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan BPOM. Visi, Misi dan Tujuan BPOM masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 3
Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Visi	Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong

Misi	1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan
Tujuan	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. 2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. 4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu. 5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat

	dan Makanan. 6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2. Terdapat perubahan terhadap Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan, Indikator, Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024, karena ada perubahan Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan, Indikator, Kebijakan dan Strategi BPOM Tahun 2020-2024. Perubahannya adalah penambahan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan serta untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja BPOM sebagai berikut:

Tabel 4

Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan, Kebijakan dan Strategi BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu.	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		

MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			6. Indeks Pelayanan Publik 7. Persentase UMKM yang memenuhi standar		
		3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan.	1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis system merit. 2. Penguatan pengujian analisi/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 2. Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM yang optimal		
		3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang		

MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			diperiksa dan diuji sesuai standar		
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik.	Persentase UMKM yang memenuhi standar.		
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat. 2. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 3. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 5. Persentase pangan fortifikasi yang	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan.	Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh UPT

MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			memenuhi syarat		
	2. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/ infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung		
		3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	1. Indeks RB BBPOM di Bandung 2. Nilai AKIP BBPOM di Bandung		

MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		4. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung		

3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama BBPOM di Bandung

Tidak ada perubahan sasaran kegiatan pada peta strategi BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024, namun demikian dilakukan penambahan, pengurangan serta perubahan Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024 dan penyesuaian terhadap target kinerja IKU BBPOM di Bandung yang akan dijelaskan lebih rinci dalam poin D mengenai Reviu terhadap Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Adapun sasaran kegiatan dan IKU BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024 sebagaiman tertuang dalam peta strategi BBPOM di Bandung sebagai berikut:

Gambar 3
Peta Strategi BSC Level II BBPOM di Bandung
Tahun 2020-2024

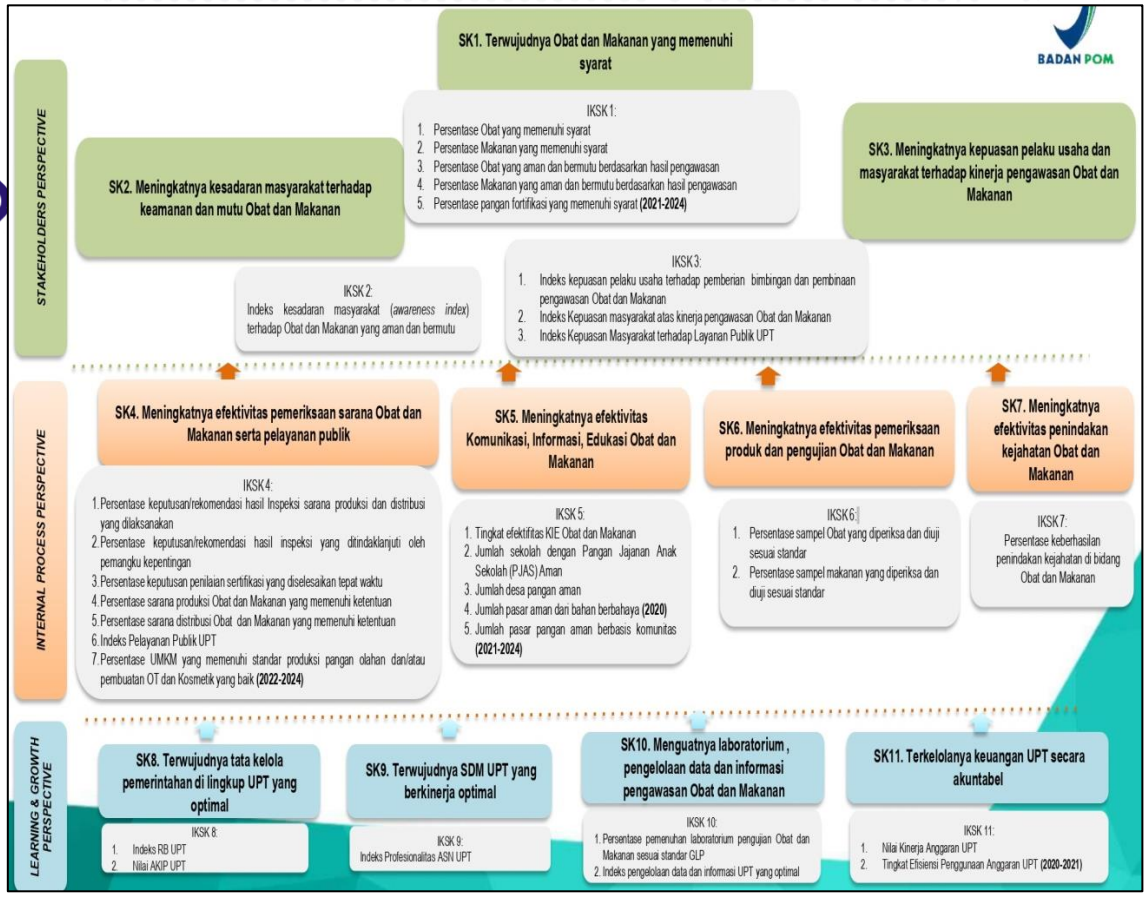

4. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Loka POM

Peta Strategis Loka POM di Bogor dan Loka POM di Tasikmalaya pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024 hanya berlaku pada tahun 2020-2021. Pada tahun 2022, Loka POM di Bogor dan Loka POM di Tasikmalaya telah menjadi Satker Mandiri sehingga bukan lagi bagian dari Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024.

Gambar 4
Peta Strategi BSC Loka POM di Bogor dan Loka POM di Tasikalaya Tahun 2020-2024

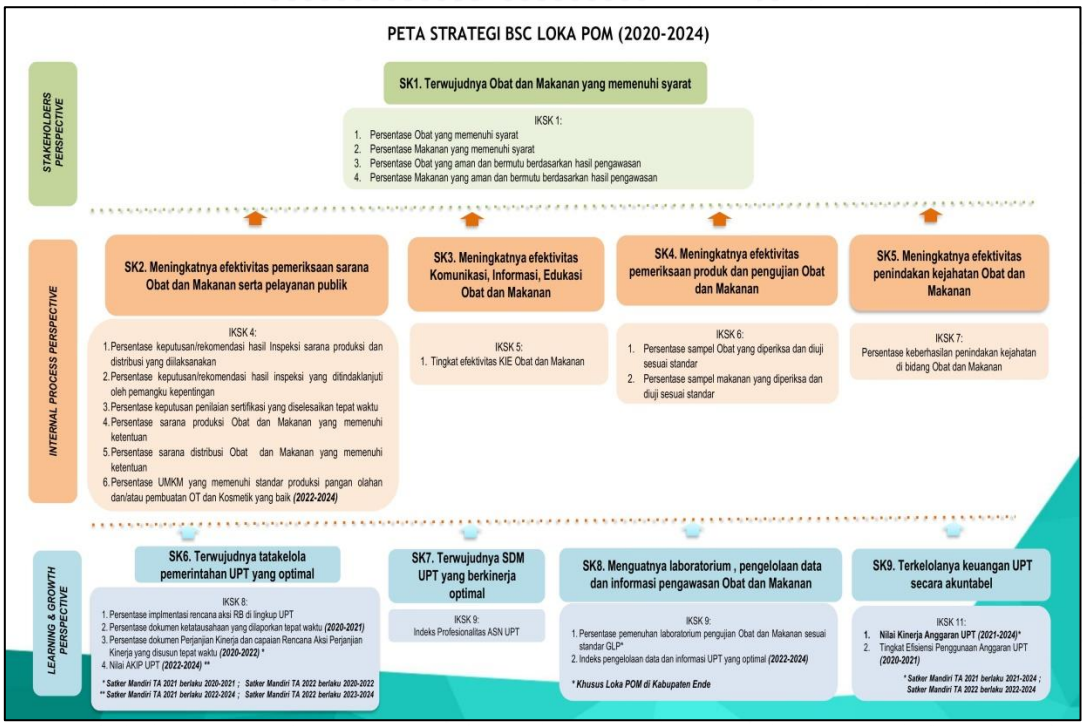

C. REVIU TERHADAP BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan BBPOM di Bandung

Adanya perubahan arah kebijakan BPOM karena perubahan lingkungan strategis terkini, maka Arah Kebijakan BBPOM di Bandung berubah mengacu pada perubahan Arah Kebijakan

BPOM. Beberapa perubahan Arah Kebijakan BPOM sebagai berikut:

a. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan tidak hanya dilakukan terhadap pelaku usaha namun juga terhadap **lembaga riset**.

b. Mengakomodir adanya kebijakan pemerintah tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), BBPOM di Bandung harus lebih selektif dalam memilah pelaku usaha yang perlu dibina atau pelaku usaha yang merupakan sindikat kejahatan yang memiliki niat jahat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, perlu perubahan paradigmabidang penindakan dimana proses penyidikan menjadi upaya hukum terakhir (ultimum remedium) dan tepat menyasar pada pelaku yang memiliki niat jahat. Hal ini dituangkan dalam arah kebijakan menjadi "Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan **dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan".**

c. Perubahan tata urut Arah Kebijakan BPOM sesuai arahan Kepala BPOM dalam RDP RKA-K/L Pagu Indikatif BPOM Tahun Anggaran 2022.

Secara rinci, perubahan Arah Kebijakan BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5

Perubahan Arah Kebijakan BPOM 2020-2024

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
	kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat danMakanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan **lembaga riset** dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.	4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan **dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.**
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Strategi BBPOM di Bandung

Terdapat beberapa penyesuaian terhadap Strategi BBPOM di Bandung sesuai Strategi BPOM, antara lain:

a. Penambahan strategi patrol siber sebagai tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.

b. Melakukan re-grouping strategi sesuai dengan fungsinya. Selain itu, juga dilakukan perubahan tata urut strategi BPOM sesuai dengan perubahan tata urut Arah Kebijakan BPOM.

Secara rinci, perubahan Strategi BBPOM di Bandung mengacu pada perubahan strategi BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 6

Perubahan Strategi BPOM Tahun 2020-2024

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/ infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.	2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan	3. Intensifikasi pembinaan dan

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.	fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.	4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.	5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.	6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.	7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan public berbasis elektronik.	8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan public berbasis elektronik.
	9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3. Terkait Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan BBPOM di Bandung, tidak terdapat perubahan dari yang tercantum dalam Renstra BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024. Kedua kerangka tersebut masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan akan kelembagaan dan regulasi BBPOM di Bandung dalam

menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

D. REVIU TERHADAP BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

   Kinerja BBPOM di Bandung yang digambarkan dalam Peta Strategi BSC Level II BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024, tidak terdapat perubahan pada sasaran kegiatan, namun terdapat perubahan pada indikator kinerja yaitu : penambahan 2 (dua) indikator kinerja baru : (1) Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat; dan (2) Persentase UMKM yang memenuhi standar, dan pengurangan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung. Selain itu, dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja dengan menggunakan baseline baru berdasarkan realisasi terhadap target kinerja Tahun 2020. Sehingga jumlah indikator kinerja BBPOM di Bandung sebelumnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) bertambah menjadi 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja. Secara umum target tetap dan meningkat. Namun terdapat target indikator yang turun antara lain:

   a. **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**, penurunan target disebabkan realisasinya dibawah target tahun 2020. Penyebab rendahnya realisasi indikstor tersebut adalah: sampel makanan yang disampling secara purposive/targeted, yang tidak memenuhi syarat masih tinggi, sebagian besar berasal dari sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan sampel fortifikasi garam beryodium.

   b. **Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu,** penurunan target disebabkan realisasinya dibawah target tahun 2020. Penyebab

rendahnya realisasi indikator tersebut adalah: (1) rendahnya indeks pengetahuan dan indeks perilaku masyarakat terhadap Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat; (2) Persepsi masyarakat terhadap obat dan makanan masih dianggap seperti komoditi biasa pada umumnya yang tidak memerlukan perhatian lebih; (3) masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang Obat dan Makanan.

c. **Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan,** penurunan target disebabkan realisasinya dibawah target tahun 2020. Penyebab rendahnya realisasi indikator tersebut adalah: (1) selama wabah/pandemi penyakit, pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan tidak bisa optimal dibandingkan tahun sebelumnya; dan (2) Siklus pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian ke setiap sarana relative lama sehingga kesadaran akan pemenuhan ketentuan relative rendah.

d. **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan** penurunan target disebabkan realisasinya dibawah target tahun 2020. Penyebab rendahnya realisasi indikator tersebut adalah: belum terselesaikannya perkara *carry over* tahun sebelumnya hingga ke penyerahan tahap II karena adanya pandemik Covid-19.

e. **Indeks RB BBPOM di Bandung**, penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%). Selain itu, telah dilakukan penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun baik pada Indeks RB.

Secara rinci, perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 7
Perubahan Target Indikator Kinerja BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Realisasi 2020	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3	97,62	97	97.5	98	98.5
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86	76,80	80	82	84	86
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91	92	93	94	94,49	95	95.5	96	96,5
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78	67,25	70	72	74	76
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat							70	72	74	76
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	75	78	81	83	90,82	71	74	77	80
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	85	86	87,5	89	75,43	91.1	92.3	93.4	94.6
	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83	85,91	77.83	80.22	82.62	85.01
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	88,5	90,5	91	91,5	92		89,50	90,50	91,00	92,00
Meningkatnya efektivitas	Persentase keputusan/	87	89	91	93	95	96,85	96	97	98	99

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Realisasi 2020	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan										
	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	56,9	63,9	70,9	78	85	51,89	64	71	78	85
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97	86,51	88	91	94	97
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70	56,59	57	61	66	70
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	78	80	81	82	73,69	74	76	78	80
	Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,7	3,75	3,81	4,16	4,51	4,2	4,35	4,45	4,51	4,55
	Persentase UMKM yang memenuhi standar							-	77	79	81
Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83	90,70	92	93.8	95.7	97.6
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	42	62	82	104	16	42	76	112	150
	Jumlah desa pangan aman	9	19	28	37	47	6	19	28	37	47
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	8	13	18	23	2	8	13	18	23
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai	82	85	88	91	94	89,75	100	100	100	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Realisasi 2020	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	standar										
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	84	86	88	90	88,60	100	100	100	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74	78	82	86	90	62,33	65	67	69	71
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Indeks RB BBPOM di Bandung	91	92	93	94	95	80,15	82.8	83.8	84.8	85.8
	Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81	85	90	91	92	80,54	83	85.5	88	90.5
Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	77	80	82	85	78,58	79	80	81	82
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	79	81	85	90	71,50	79	84	89	94
	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3	2	2	2.25	2.5	3
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93	94	95	96	97	95,14	95.1	95.3	95.6	95.9
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (100%)	Efisien (95%)	-	-	-

2. Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung

Pada Tahun Anggaran (TA) 2021 karena adanya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Pengangaran (RSPP) yang diterbitkan oleh suprasistem (Kementerian Keuangan dan Bappenas) maka dilakukan perubahan stuktur Rencana Kerja (Renja) BPOM, salah satunya pada Satker UPT yaitu dari semula hanya terdapat 1 (satu) Program dan Kegiatan yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" menjadi 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan yaitu "Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" dan "Program Dukungan Manajemen" melalui "Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM".

Tabel 8

Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung

No.	Program/Kegiatan (Semula)	Program/Kegiatan (Menjadi)
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Tetap
2	Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Tetap
3		Program Dukungan Manajemen
4		Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan BBPOM di Bandung secara umum masih sesuai dengan kebutuhan organisasi Badan POM dikaitkan dengan tren besaran anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas setiap tahunnya, sehingga

deviasi antara kerangka pendanaan dan realisasi alokasi anggaran tidak jauh berbeda. Anggaran tersebut dirasa masih cukup untuk pemenuhan target kinerja Balai Besar POM di Bandung 2020-2024.

E. REVIU TERHADAP LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Reviu dan penyesuaian terhadap Lampiran I, yang memuat sasaran kegiatan dan IKU BBPOM di Bandung serta program dan kegiatan yang dilakukan beserta sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun 2020 serta adanya perubahan organisasi dan tata kerja BBPOM di Bandung. Hal tersebut berdampak terhadap munculnya kegiatan, sasaran dan indikator baru serta penghapusan, penyesuaian dan pergeseran sasaran dan indikator di beberapa kegiatan. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPOM Tahun 2020-2024 mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT BPOM sebagai berikut:

Tabel 9

Matriks Perubahan Kegiatan, sasaran, Indikator dan Target Kinerja BBPOM di Bandung Pada Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024

SEMULA								MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelakasana
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022	2023	2024			
Program Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung								Program Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung										BBPOM di Bandung
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung								Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
	1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3		1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,62	97	97.5	98	98.5	Pro PN	Merupakan indikator RPJMN. Target 2021 lebih rendah dari realisasi 2020 karena disesuaikan dengan target pada RKP 2021.	BBPOM di Bandung
	2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86		2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	76,80	80	82	84	86	Pro PN		BBPOM di Bandung
	3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91	92	93	94		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,49	95	95.5	96	96,5	-		BBPOM di Bandung
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67,25	70	72	74	76	-		BBPOM di Bandung
									5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		70	72	74	76	Pro PN	Semula merupakan indikator pada Ditwas Pangan Risiko Rendah dan Sedang (Unit Kerja OTK Lama),	BBPOM di Bandung

SEMULA								MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelakasana
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Realisasi 2020	Target							
		2020	2021	2022	2023	2024				2021	2022	2023	2024			
															dipindahkan ke UPT disesuaikan denganUnit Organisasi yang melaksanakan sampling dan pengujian pangan fortifikasi	
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung							Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
	1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	75	78	81	83		1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	67,35	71	74	77	80	-	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 dan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung							Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat	83	85	86	87,5	89		1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan	90,82	91.1	92.3	93.4	94.6	-	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 dan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung

SEMULA								MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelakasana
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022	2023	2024			
		dan Makanan								pengawasan Obat dan Makanan								
	2.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83		2.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75,43	77.83	80.22	82.62	85.01	-		BBPOM di Bandung
	3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	88,5	90,5	91	91,5	92		3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	85,91	89,50	90,50	91,00	92,00	-		BBPOM di Bandung
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
	1.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95		1.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96,85	96	97	98	99	-	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 dan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung
	2.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang	56,9	63,9	70,9	78	85		2.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang	51,89	64	71	78	85	-		BBPOM di Bandung

SEMULA								MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelakasana
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022	2023	2024			
		dilaksanakan								dilaksanakan								
	3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97		3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	86,51	88	91	94	97	-	Tidak dilakukan penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung
	4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70		4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56,59	57	61	66	70	Pro PN	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 dan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung
	5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	78	80	81	82		5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,69	74	76	78	80	Pro PN		BBPOM di Bandung
	6.	Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,7	3,75	3,81	4,16	4,51		6.	Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	4,2	4.35	4.45	4.51	4.55	-	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.12.21.683 dan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung
									7.	Persentase UMKM yang memenuhi standar		-	77	79	81	Pro PN	Merupakan indikatorbaru pada UPTuntuk peningkatan peran pembinaan UMKM yang selama ini secara umum telah dilakukan oleh UPT namun belum dihitung sebagai kinerja dalam	BBPOM di Bandung

SEMULA								MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelakasana
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022	2023	2024			
																	indikator tersendiri	
	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung								Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung							Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 dan realisasi tahun 2020	
	1.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83		1.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,70	92	93.8	95.7	97.6	-		BBPOM di Bandung
	2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	42	62	82	104		2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	42	76	112	150	Pro PN		BBPOM di Bandung
	3.	Jumlah desa pangan aman	9	19	28	37	47		3.	Jumlah desa pangan aman	6	19	28	37	47	Pro PN		BBPOM di Bandung
	4.	Jumlah pasar aman dari Bahan Berbahaya	4	8	13	18	23		4.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	8	13	18	23	Pro PN		BBPOM di Bandung
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
	1.	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94		1.	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89,75	100	100	100	100	Pro PN	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570	BBPOM di Bandung
	2.	Persentase sampel makanan yang diperiksa	82	84	86	88	90		2.	Persentase sampel makanan yang	88,60	100	100	100	100	Pro PN		BBPOM di Bandung

SEMULA								MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelakasana
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target						Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Realisasi 2020	Target							
		2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022	2023	2024				
	dan diuji sesuai standar								diperiksa dan diuji sesuai standar									
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung								Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74	78	82	86	90			1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	62,33	65	67	69	71	-	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 dan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung								Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
	1. Indeks RB BBPOM di Bandung	91	92	93	94	95			1. Indeks RB BBPOM di Bandung	80,15	82.8	83.8	84.8	85.8	-	Penurunan target Disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%). Selain itu dilakukan	BBPOM di Bandung

SEMULA								MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelakasana
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022	2023	2024			
																	penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun	
	2.	Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81	85	90	91	92		2.	Nilai AKIP BBPOM di Bandung	80,54	83	85.5	88	90.5	-	Dilakukan penyesuaian kembali Target terhadap trend kenaikan per tahun	BBPOM di Bandung
	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal								Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal									
	1.	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	77	80	82	85		1.	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	78,58	79	80	81	82	-	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 dan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan								Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan									
	1.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	79	81	85	90		1.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	71,50	79	84	89	94	-	Dilakukan penyesuaian target berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 dan realisasi tahun 2020	BBPOM di Bandung
	2.	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3		2.	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2	2	2.25	2.5	3	-		BBPOM di Bandung

SEMULA								MENJADI								Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelakasana
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022	2023	2024			
	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel								Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel									
	1.	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93	94	95	96	97		1.	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95,14	95.1	95.3	95.6	95.9	-	Dilakukan penyesuaian kembali targetterhadap trend kenaikan per tahun	BBPOM di Bandung
	2.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)		2.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (100%)	Efisien (95%)	-	-	-	-	Mulai tahun 2022-2024 target indikator ini dihapus karena sudah terdapat indikator Nilai Kinerja Anggaran	BBPOM di Bandung

Tabel 10

Matriks Perubahan Kegiatan, sasaran, Indikator dan Target Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Pada Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024

SEMULA								MENJADI									Pro PN
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024					2021*	2022*	2023*	2024*		
Program Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Bogor								Program Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Bogor									
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor								Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor								
	1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3		1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,72	97	97,5	98	98,5		
	2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86		2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	94,59	85	87	89	91		
	3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91	92	93	94		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,44	94	95	95,5	96		
	4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,00	80	82	83	85		
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor								
	1.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95		1.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95,83	96	97	99	10		
	2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	60	65	70	75		2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,67	60	65	70	75		
	3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang	85	88	91	94	97		3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang	46,49	88	90	92	94		

SEMULA								MENJADI									Pro PN
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024					2021*	2022*	2023*	2024*		
		diselesaikan tepat waktu								diselesaikan tepat waktu							
	4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70		4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67,44	67	71	75	79		
	5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	78	80	81	82		5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,90	75	77	79	80		
									6.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	77	79	81		
	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor								Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor								
	1.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	71	74	77	81	84		1.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,11	90.0	90.9	91.8	92.7		
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor								
	1.	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50	50		1.	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50	50	50	50		
	2.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50	50		2.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50	50	50	50		
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor								Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor								
	1.	Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65	70	75	78	82		1.	Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	43,00	70	74	78	82		

SEMULA								MENJADI									Pro PN
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024					2021*	2022*	2023*	2024*		
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal								Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal								
	1.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan UPT	80	85	90	95	100		1.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan UPT	136,36	100	100	100	100		
	2.	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	100	100		2.	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00	100	-	-	-		
	3.	Persentase dokumen perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100		3.	Persentase dokumen perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00	100	-	-	-		
									4.	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Bogor	-	78.9	80.6	82.2	83.9		
									Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Bogor								
									1.	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Bogor	-	-	2,25	2,5	3		
	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bogor yang berkinerja optimal								Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bogor yang berkinerja optimal								
	1.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Bogor	75	77	80	82	85		1.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Bogor	85,00	85,2	85,4	85,6	85,8		
	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Bogor secara Akuntabel								Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Bogor secara Akuntabel								
	1.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)		1.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor	100,00	Efisien (92%)	-	-	-		

Keterangan:

* Mulai Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Bogor telah menjadi Loka POM Satker Mandiri dan membuat Renstra Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021-2024, sehingga kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021-2024 tidak lagi menjadi bagian dari Renstra Balai Besar POM di Bandung.

Tabel 11

Matriks Perubahan Kegiatan, sasaran, Indikator dan Target Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya

Pada Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kota TasikmalayaTahun 2020-2024

SEMULA								MENJADI									Pro PN
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024					2021*	2022*	2023*	2024*		
Program Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Tasikmalaya								Program Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Tasikmalaya									
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya								Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya								
	1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3		1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,36	97	97,5	98	98,5		
	2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86		2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85,71	85,5	87	88,5	90		
	3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91	92	93	94		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,30	96	96,5	97	97,5		
	4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62,50	62,5	65	68	70		
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya								
	1.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95		1.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98,64	90	92	93	95		
	2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	60	65	70	75		2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	33,75	50	55	60	65		
	3.	Persentase keputusan	85	88	91	94	97		3.	Persentase keputusan	60,00	88	90	93	95		

SEMULA								MENJADI									Pro PN
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024					2021*	2022*	2023*	2024*		
		penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu								penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu							
	4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70		4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61,29	61	66	70	75		
	5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	63	66	68	71		5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	84,41	84	86	88	90		
									6.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	77	79	81		
	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya								Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya								
	1.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	74	77	81	84		1.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,88	89.5	91.3	93.1	95.0		
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya								
	1.	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50	50		1.	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50	50	50	50		
	2.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50	50		2.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50	50	50	50		
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya								Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya								
	1.	Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di	65	70	75	78	82		1.	Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di	100,00	70	74	78	82		

SEMULA								MENJADI									Pro PN
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024					2021*	2022*	2023*	2024*		
		bidang Obat dan Makanan								bidang Obat dan Makanan							
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal								Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal								
	1.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan UPT	80	85	90	95	100		1.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan UPT	100,00	100	100	100	100		
	2.	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	100	100		2.	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	97,73	100	-	-	-		
	3.	Persentase dokumen perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100		3.	Persentase dokumen perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00	100	-	-	-		
									4.	Nilai AKIP Loka POM di Kota Tasikmalaya	-	78.9	80.6	82.2	83.9		
									Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Tasikmalaya								
									1.	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Tasikmalaya	-	-	2,25	2,5	3		
	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang berkinerja optimal								Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang berkinerja optimal								
	1.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tasikmalaya	75	77	80	82	85		1.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tasikmalaya	75,94	77	78	79	80		
	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel								Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel								
	1.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota	Efisien (88%)	Efisien (89%)	Efisiien (90%)	Efisien (91%)	Efisien (92%)		1.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota	100,00	Efisien (92%)	-	-	-		

SEMULA								MENJADI								Pro PN
Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Saasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024					2021*	2022*	2023*	2024*	
		Tasikmalaya								Tasikmalaya						

Keterangan:

*Mulai Tahun 2021 Loka POM di Kota Tasikmalaya telah menjadi Loka POM Satker Mandiri dan membuat Renstra Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2024, sehingga kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2024 tidak lagi menjadi bagian dari Renstra Balai Besar POM di Bandung

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

a. Reviu Renstra BBPOM di Bandung dilaksanakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis serta organisasi dan tata kerja BBPOM di Bandung yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta proses perencanaan dan penganggaran BBPOM di Bandung.

b. Berdasarkan hasil reviu terhadap Renstra BBPOM di Bandung yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Renstra BBPOM di Bandung masih berjalan baik dan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan untuk mencapai target pada akhir tahun 2024.

2. Rekomendasi

a. Hasil reviu Renstra BBPOM di Bandung 2020-2024 yang telah dilakukan secara menyeluruh agar dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja BBPOM di Bandung serta evaluasi paruh waktu dan akhir tahun pelaksanaan Renstra BBPOM di Bandung.

b. BBPOM di Bandung selaku unit pelaksana tenis BPOM melakukan reviu Renstra Unit Organisasi Satuan Kerja mengacu pada hasil reviu Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB III
PENUTUP

Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024 selain perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaiannya secara berkala, perlu juga dilakukan reviu secara menyeluruh terhadap Renstra BBPOM di Bandung tersebut. Reviu Renstra BBPOM di Bandung dilakukan untuk menyeleraskan berbagai perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang berdampak terhadap kinerja BBPOM di Bandung sehingga memerlukan adanya berbagai penyesuaian baik pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, arah kebijakan, strategi maupun target kinerja.

Untuk memastikan hasil reviu Renstra BBPOM di Bandung dapat teroperasionalisasikan dan diimpelementasikan dengan baik, maka penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan BBPOM di Bandung agar memperhatikan hasil reviu Renstra BBPOM di Bandung. BBPOM di Bandung sebagai salah satu Unit Organisasi dan Satuan Kerja di Lingkungan BPOM telah melakukan penyesuaian terhadap dokumen Renstra BBPOM di Bandung dengan memperhatikan hasil reviu Renstra BPOM. Melalui reviu Renstra BBPOM di Bandung ini, diharapkan BBPOM di Bandung terus dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil dan berdampak terhadap peningkatan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Balai Besar POM di Bandung

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
BADAN POM

Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si.
NIP. 19650713 199103 2 001

BADAN POM

Jalan Pasteur Nomor 25, Bandung

bandung.pom.go.id

BPOMBandung

@bpombandung

@BPOMBandung

BalaiBesarPOMdiBandung

KABAYAN
Ka Balai Melayani
08112440533

Si Iteung
0821 2893 6046

1500533
HALOBPOM

AYO PAKAI MASKER! AYO VAKSIN!

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG WBK MENUJU WBBM!

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT & MAKANAN DI BANDUNG JUARA!

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546

Email : bpom_bandung@pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

NOMOR HK.02.02.12A.12A5.07.22.106 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.02.12A.12A5.12.21.110 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2023.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 12 Juli 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Sukriadi Darma

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

NOMOR HK.02.02.12A.12A5.07.22.106 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2023

RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	74
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	77
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	82,62
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	91
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	4,51
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,7
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	112

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	kerja BBPOM di Bandung	Aman	
		Jumlah desa pangan aman	37
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	18
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	Indeks RB BBPOM di Bandung	84,8
		Nilai AKIP BBPOM di Bandung	88
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	81
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95,6

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Sukriadi Darma

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Bandung
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukriadi Darma, S.Si., Apt., SH.
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Bandung
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung,28 Desember 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. Penny K. Lukito, MCP	Sukriadi Darma, S.Si., Apt., SH.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Bandung

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	78
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93.40
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	82.62
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.40
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.70
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	112
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	37
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	18
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	84.80
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	88
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	81
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.8
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	95.60

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
75,260,350,000.00

Bandung,28 Desember 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. Penny K. Lukito, MCP	Sukriadi Darma, S.Si., Apt., SH.

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Bandung
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	532.995.540, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Produk	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A	PENYUSUNAN PERENCANAAN SAMPLING	2.769.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	1.827.540, 00	1.827.540, 00	66, 00 (%)
2.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Produk	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	B	PENGADAAN SAMPEL OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN SUPLEMEN KESEHATAN	745.160.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	491.805.600, 00	491.805.600, 00	66, 00 (%)
3.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Produk	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	C	PENGIRIMAN PAKET SAMPLING	59.640.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	39.362.400, 00	39.362.400, 00	66, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	532.995.540, 00	532.995.540, 00				

2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	144.966.250, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Produk	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Pengadaan sampel makanan	A	PENYUSUNAN PERENCANAAN SAMPLING	9.400.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	6.110.000, 00	6.110.000, 00	65, 00 (%)
2.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Produk	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Pengadaan sampel makanan	B	PENGADAAN SAMPEL	213.625.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	138.856.250, 00	138.856.250, 00	65, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	144.966.250, 00	144.966.250, 00				

3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	274.573.460, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Produk	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A	PENYUSUNAN PERENCANAAN SAMPLING	2.769.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	941.460, 00	941.460, 00	34, 00 (%)
2.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Produk	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	B	PENGADAAN SAMPEL OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN SUPLEMEN KESEHATAN	745.160.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	253.354.400, 00	253.354.400, 00	34, 00 (%)
3.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Produk	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	C	PENGIRIMAN PAKET SAMPLING	59.640.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	20.277.600, 00	20.277.600, 00	34, 00 (%)
Total						0, 00	0, 00	0, 00	274.573.460, 00	274.573.460, 00			

4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78.058.750, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Produk	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Pengadaan sampel makanan	A	PENYUSUNAN PERENCANAAN SAMPLING	9.400.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	3.290.000, 00	3.290.000, 00	35, 00 (%)
2.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Produk	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Pengadaan sampel makanan	B	PENGADAAN SAMPEL	213.625.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	74.768.750, 00	74.768.750, 00	35, 00 (%)
Total						0, 00	0, 00	0, 00	78.058.750, 00	78.058.750, 00			

5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	28.810.000, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Produk	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	Pengadaan sampel makanan	A	PENGADAAN SAMPEL PANGAN FORTIFIKASI	28.810.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	28.810.000, 00	28.810.000, 00	100, 00 (%)

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
Total					0, 00	0, 00	0, 00	28.810.000, 00	28.810.000, 00				

6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu — 78 — 358.797.000, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan koordinasi	F	RAPAT KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER BALAI BESAR POM DI BANDUNG	42.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	42.000.000, 00	42.000.000, 00	100, 00 (%)
2.	BBPOM di Bandung	Komunikasi Publik	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A	KIE MELALUI MEDIA CETAK/ELECTRONIK DAN MEDIA SOSIAL	170.167.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	170.167.000, 00	170.167.000, 00	100, 00 (%)
3.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan	A	KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN	79.230.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	79.230.000, 00	79.230.000, 00	100, 00 (%)
4.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan	B	PERJALANAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR	44.920.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	44.920.000, 00	44.920.000, 00	100, 00 (%)
5.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan	C	WORKSHOP INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI BALI	12.100.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	12.100.000, 00	12.100.000, 00	100, 00 (%)
6.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan	E	WORKSHOP KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT	10.380.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	10.380.000, 00	10.380.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	358.797.000, 00	358.797.000, 00				

7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan — 93.40 — 557.089.000, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Pelayanan Publik Lainnya	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	B	SOSIALISASI DAN DESK REGISTRASI DALAM RANGKA JEMPUT BOLA	276.240.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	276.240.000, 00	276.240.000, 00	100, 00 (%)

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
						REGISTRASI PANGAN OLEHAN							
2.	BBPOM di Bandung	Pelayanan Publik Lainnya	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	C	BIMTEK BAGI PELAKU USAHA DAN DESK EVALUASI DOKUMEN	225.765.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	225.765.000, 00	225.765.000, 00	100, 00 (%)
3.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	D	OPERASIONAL MOBIL KELILING	55.084.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	55.084.000, 00	55.084.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	557.089.000, 00	557.089.000, 00				

8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan — 82.62 — 761.590.000, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Koordinasi	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	A	PERJALANAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR KINERJA PENINDAKAN OBAT DAN MAKANAN	63.820.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	63.820.000, 00	63.820.000, 00	100, 00 (%)
2.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A	PERJALANAN DALAM RANGKA PEMANTAUAN/EVALUASI/KOORDINASI UNTUK PENGELOLAAN DAN PENINGKATAN KINERJA PEMERIKSAAN	168.600.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	168.600.000, 00	168.600.000, 00	100, 00 (%)
3.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	X	PERJALANAN DALAM RANGKA PEMANTAUAN/EVALUASI/KOORDINASI UNTUK PENGELOLAAN DAN PENINGKATAN KINERJA BAGIAN TATA USAHA	193.500.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	193.500.000, 00	193.500.000, 00	100, 00 (%)
4.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan koordinasi	A	KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	110.660.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	110.660.000, 00	110.660.000, 00	100, 00 (%)

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
5.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	A	PERJALANAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN/EAVLAUSI/KOORDINASI UNTUK PENGELOLAAN DAN PENINGKATAN KINERJA LABORATORIUM	184.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	184.000.000, 00	184.000.000, 00	100, 00 (%)
6.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	B	PERJALANAN KOORDINASI PENINGKATAN KINERJA LABORATORIUM	14.660.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	14.660.000, 00	14.660.000, 00	100, 00 (%)
7.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	C	FOOD SECURITY	26.350.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	26.350.000, 00	26.350.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	761.590.000, 00	761.590.000, 00				

9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT — 91 — 459.238.500, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Pelayanan Publik Lainnya	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A	AUDIT SARANA DALAM RANGKA SERTIFIKASI	600.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	300.000.000, 00	300.000.000, 00	50, 00 (%)
2.	BBPOM di Bandung	Pelayanan Publik Lainnya	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	D	KEGIATAN ADMINISTRASI SEKSI SERTIFIKASI	43.377.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	21.688.500, 00	21.688.500, 00	50, 00 (%)
3.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	C	PENGUJIAN SAMPEL PIHAK KE-3	175.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	87.500.000, 00	87.500.000, 00	50, 00 (%)
4.	BBPOM di	Pelayanan Publik	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang	Penerbitan keputusan/sertifikat	B	KONSULTASI/KOORDINASI/PERJALANAN LAINNYA	100.100.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	50.050.000, 00	50.050.000, 00	50, 00 (%)

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
	Bandung	Lainnya	Diselesaikan oleh UPT	layanan publik									
Total					0, 00		0, 00	0, 00	459.238.500, 00	459.238.500, 00			

10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	181.360.000, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C	PENELUSURAN KASUS/TINDAK LANJUT	83.680.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	83.680.000, 00	83.680.000, 00	100, 00 (%)
2.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E	PENGAWASAN DALAM RANGKA TINDAK LANJUT/ KASUS	32.480.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	32.480.000, 00	32.480.000, 00	100, 00 (%)
3.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B	PESERTA FORUM/FGD/PERTEMUAN YABF DIADAKAN PUSAT ATAU LINTAS SEKTOR	65.200.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	65.200.000, 00	65.200.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00		0, 00	0, 00	181.360.000, 00	181.360.000, 00			

11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	205.782.000, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	G	EVALUASI DESK CAPA HASIL PENGAWASAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	48.100.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	48.100.000, 00	48.100.000, 00	100, 00 (%)
2.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka	E	PERTEMUAN LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PENINGKATAN	94.780.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	94.780.000, 00	94.780.000, 00	100, 00 (%)

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
			Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	pemeriksaan sarana		EFEKTIFITAS PENGAWASAN BERSAMA KABUPATEN/KOTA							
3.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	F	PERTEMUAN SOSIALISASI PERATURAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TERKINI BERSAMA LINTAS SEKTOR	37.478.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	37.478.000, 00	37.478.000, 00	100, 00 (%)
4.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	AB	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAK NON FISIK POM	25.424.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	25.424.000, 00	25.424.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00		0, 00	205.782.000, 00	205.782.000, 00				

12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	459.238.500, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Pelayanan Publik Lainnya	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A	AUDIT SARANA DALAM RANGKA SERTIFIKASI	600.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	300.000.000, 00	300.000.000, 00	50, 00 (%)
2.	BBPOM di Bandung	Pelayanan Publik Lainnya	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	B	KONSULTASI/KOORDINASI/PERJALANAN LAINNYA	100.100.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	50.050.000, 00	50.050.000, 00	50, 00 (%)
3.	BBPOM di Bandung	Pelayanan Publik Lainnya	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	D	KEGIATAN ADMINISTRASI SEKSI SERTIFIKASI	43.377.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	21.688.500, 00	21.688.500, 00	50, 00 (%)
4.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	C	PENGUJIAN SAMPEL PIHAK KE-3	175.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	87.500.000, 00	87.500.000, 00	50, 00 (%)
Total					0, 00		0, 00	459.238.500, 00	459.238.500, 00				

13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	844.339.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A	ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN	38.579.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	38.579.000, 00	38.579.000, 00	100, 00 (%)
2.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN	533.280.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	533.280.000, 00	533.280.000, 00	100, 00 (%)
3.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, BAHAN BAKU OBAT DAN PRODUK BIOLOGI	179.280.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	179.280.000, 00	179.280.000, 00	100, 00 (%)
4.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C	PEMERIKSAAN BERSAMA INSPEKTUR PUSAT	43.760.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	43.760.000, 00	43.760.000, 00	100, 00 (%)
5.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D	SAKSI PEMUSNAHAN PRODUK	18.720.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	18.720.000, 00	18.720.000, 00	100, 00 (%)
6.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	F	PENGAWASAN DALAM RANGKA KEAMANAN VAKSIN	30.720.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	30.720.000, 00	30.720.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	844.339.000, 00	844.339.000, 00				

14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	1.128.940.000, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan	Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN MAKANAN	1.071.500.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	1.071.500.000, 00	1.071.500.000, 00	100, 00 (%)

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
			Makanan yang Diperiksa oleh UPT										
2.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B	PEMANTAUAN IKLAN	57.440.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	57.440.000, 00	57.440.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	1.128.940.000, 00	1.128.940.000, 00				

15.	Indeks Pelayanan Publik UPT							4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	119.100.000, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Pelayanan Publik Lainnya	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	A	PERJALANAN KOORDINASI LAYANAN PUBLIK	44.200.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	44.200.000, 00	44.200.000, 00	100, 00 (%)
2.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan koordinasi	J	FOCUS GROUP DISCUSSION STANDAR PELAYANAN PUBLIK	74.900.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	74.900.000, 00	74.900.000, 00	100, 00 (%)
Total						0, 00	0, 00	0, 00	119.100.000, 00	119.100.000, 00			

16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	15	20	30	40	50	55	65	75	85	95	79	130.548.000, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	A	MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN	3.760.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	3.760.000, 00	3.760.000, 00	100, 00 (%)
2.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Advokasi dan Pendampingan UMKM	A	RAPAT KOORDINASI DENGAN LINTAS SEKTOR	3.525.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	3.525.000, 00	3.525.000, 00	100, 00 (%)
3.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan	Advokasi dan Pendampingan UMKM	B	BIMTEK DALAM RANGKA PENDAMPINGAN UMKM	79.443.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	79.443.000, 00	79.443.000, 00	100, 00 (%)

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
		UMKM	standar oleh UPT										
4.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Advokasi dan Pendampingan UMKM	C	BIMTEK DALAM RANGKA PENDAMPINGAN UMKM OBAT TRADISIONAL	10.070.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	10.070.000, 00	10.070.000, 00	100, 00 (%)
5.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Advokasi dan Pendampingan UMKM	D	BIMTEK DALAM RANGKA PENDAMPINGAN UMKM KOSMETIKA	16.910.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	16.910.000, 00	16.910.000, 00	100, 00 (%)
6.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Advokasi dan Pendampingan UMKM	E	AUDIT DALAM RANGKA PENDAMPINGAN UMKM	16.840.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	16.840.000, 00	16.840.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	130.548.000, 00	130.548.000, 00				

17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.70	95.70	95.70	95.70	95.70	95.70	95.70	95.70	95.70	95.70	95.70	95.70	23.136.986.000, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi Masyarakat	A	ADMINISTRASI KEGIATAN BIDANG INFOKOM	49.401.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	49.401.000, 00	49.401.000, 00	100, 00 (%)
2.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi Masyarakat	B	PENYULUHAN ATAS PERMINTAAN PIHAK KE-3	14.600.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	14.600.000, 00	14.600.000, 00	100, 00 (%)
3.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi Masyarakat	D	SOSIALISASI PROGRAM INOVASI BALAI BESAR POM DI BANDUNG	27.565.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	27.565.000, 00	27.565.000, 00	100, 00 (%)
4.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi Masyarakat	E	SOSIALISASI PEMILIHAN DUTA KOSMETIK	26.920.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	26.920.000, 00	26.920.000, 00	100, 00 (%)
5.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi Masyarakat	F	KIE OBAT DAN MAKANAN UNTUK GENERASI MILENIAL	45.800.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	45.800.000, 00	45.800.000, 00	100, 00 (%)

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0	10	20	30	30	35	40	50	60	70	85	112	1.005.602.000, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
6.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi Masyarakat	G	KEGIATAN LAYANAN DI MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP)	35.880.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	35.880.000, 00	35.880.000, 00	100, 00 (%)
7.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi Masyarakat	H	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) OBAT DAN MAKANAN	22.929.620.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	22.929.620.000, 00	22.929.620.000, 00	100, 00 (%)
8.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi Masyarakat	C	SOSIALISASI MELALUI WEBINAR KEPADA MASYARAKAT	7.200.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	7.200.000, 00	7.200.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00		0, 00	0, 00	23.136.986.000, 00	23.136.986.000, 00			

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Intervensi keamanan PJAS	A	SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN	347.940.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	347.940.000, 00	347.940.000, 00	100, 00 (%)
2.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Intervensi keamanan PJAS	B	BIMTEK KEAMANAN PANGAN DI SEKOLAH	133.080.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	133.080.000, 00	133.080.000, 00	100, 00 (%)
3.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Intervensi keamanan PJAS	C	ADMINISTRASI PELAKSANAAN PROGRAM PJAS	87.400.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	87.400.000, 00	87.400.000, 00	100, 00 (%)
4.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Intervensi keamanan PJAS	D	OPERASIONAL MOBIL LABORATORIUM KELILING	85.122.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	85.122.000, 00	85.122.000, 00	100, 00 (%)
5.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Intervensi keamanan PJAS	E	SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN	34.040.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	34.040.000, 00	34.040.000, 00	100, 00 (%)

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
6.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Intervensi keamanan PJAS	F	PENGADAAN KIT EDUKASI	113.400.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	113.400.000, 00	113.400.000, 00	100, 00 (%)
7.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Intervensi keamanan PJAS	H	PENGAWALAN SEKOLAH YANG SUDAH DIINTERVENSI KP PJAS	100.440.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	100.440.000, 00	100.440.000, 00	100, 00 (%)
8.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Intervensi keamanan PJAS	I	PENDAMPINGAN PERSIAPAN LOMBA SEKOLAH	9.960.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	9.960.000, 00	9.960.000, 00	100, 00 (%)
9.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Intervensi keamanan PJAS	G	MONITORING DAN EVALUASI PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH	12.480.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	12.480.000, 00	12.480.000, 00	100, 00 (%)
10.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Koordinasi lintas sektor	A	ADVOKASI KEAMANAN PANGAN LINTAS SEKTOR	81.740.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	81.740.000, 00	81.740.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	1.005.602.000, 00	1.005.602.000, 00				

19.	Jumlah desa pangan aman	0	10	15	20	40	45	60	75	85	90	95	37	1.149.720.000, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Desa Pangan Aman	Perkuatan kapasitas desa	A	WORKSHOP MONEV PELAKSANAAN PROGRAM KEAMANAN PANGAN LINTAS SEKTOR	149.500.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	149.500.000, 00	149.500.000, 00	100, 00 (%)
2.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Desa Pangan Aman	Pemberdayaan komunitas desa	A	BIMTEK KADER KEAMANAN PANGAN DESA	257.575.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	257.575.000, 00	257.575.000, 00	100, 00 (%)
3.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Desa Pangan Aman	Pemberdayaan komunitas desa	B	BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN PELAKU USAHA PANGAN DESA	416.835.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	416.835.000, 00	416.835.000, 00	100, 00 (%)
4.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Desa Pangan Aman	Pengawasan keamanan pangan desa	A	OPERASIONAL PELAKSANAAN GERAKAN KEAMANAN PANGAN DESA	28.800.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	28.800.000, 00	28.800.000, 00	100, 00 (%)

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
5.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Desa Pangan Aman	Pengawasan keamanan pangan desa	B	FASILITASI KEAMANAN PANGAN BAGI KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN DESA	272.540.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	272.540.000, 00	272.540.000, 00	100, 00 (%)
6.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Desa Pangan Aman	Pengawasan keamanan pangan desa	C	VERIFIKASI DALAM RANGKA LOMBA DESA	3.400.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	3.400.000, 00	3.400.000, 00	100, 00 (%)
7.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Desa Pangan Aman	Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	A	PENGAWALAN DESA DALAM RANGKA MONITORING DAN EVALUASI	21.070.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	21.070.000, 00	21.070.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	1.149.720.000, 00	1.149.720.000, 00				

20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	839.020.000, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Produk	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIKA, SUPLEMEN KESEHATAN	839.020.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	839.020.000, 00	839.020.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	839.020.000, 00	839.020.000, 00				

21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	654.232.000, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Produk	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	Pengujian laboratorium sampel	A	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL MAKANAN	43.172.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	43.172.000, 00	43.172.000, 00	100, 00 (%)
2.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Produk	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Pengujian laboratorium sampel makanan	A	ADMINISTRASI KEGIATAN	17.721.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	17.721.000, 00	17.721.000, 00	100, 00 (%)
3.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Produk	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Pengujian laboratorium sampel makanan	B	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL MAKANAN	593.339.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	593.339.000, 00	593.339.000, 00	100, 00 (%)

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	8	15	22	28	32	38	44	49	56	62	66	70	1.259.188.000, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
Total					0, 00		0, 00	0, 00	654.232.000, 00	654.232.000, 00			

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Koordinasi	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	A	WORSHOP INTELIJEN STRATEGIS	150.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	150.000, 00	150.000, 00	100, 00 (%)
2.	BBPOM di Bandung	Koordinasi	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	D	ADMINISTRASI KEGIATAN PENYIDIKAN	9.600.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	9.600.000, 00	9.600.000, 00	100, 00 (%)
3.	BBPOM di Bandung	Koordinasi	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	E	PEMUSNAHAN BARANG BUKTI	224.224.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	224.224.000, 00	224.224.000, 00	100, 00 (%)
4.	BBPOM di Bandung	Koordinasi	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	A	WORKSHOP INTELIJEN STRATEGIS	150.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	150.000, 00	150.000, 00	100, 00 (%)
5.	BBPOM di Bandung	Koordinasi	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	C	PERTEMUAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR UNTUK PENGUATAN INTELIJEN DI DAERAH	4.648.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	4.648.000, 00	4.648.000, 00	100, 00 (%)
6.	BBPOM di Bandung	Koordinasi	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	D	EVALUASI OPERASI SIBER DAN COACHING CLINIC	1.490.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	1.490.000, 00	1.490.000, 00	100, 00 (%)
7.	BBPOM di Bandung	Perkara Hukum Badan Usaha	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI UPT	Operasi Intelijen	A	Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	6.300.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	6.300.000, 00	6.300.000, 00	100, 00 (%)
8.	BBPOM di Bandung	Perkara Hukum Badan Usaha	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI UPT	Operasi Intelijen	B	Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	270.060.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	270.060.000, 00	270.060.000, 00	100, 00 (%)
9.	BBPOM di Bandung	Perkara Hukum Badan Usaha	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI UPT	Operasi Intelijen	C	Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	5.040.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	5.040.000, 00	5.040.000, 00	100, 00 (%)

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
10.	BBPOM di Bandung	Perkara Hukum Badan Usaha	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI UPT	Gelar Kasus dan Pelaporan	A	Gelar Kasus dan Pelaporan	6.300.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	6.300.000, 00	6.300.000, 00	100, 00 (%)
11.	BBPOM di Bandung	Perkara Hukum Badan Usaha	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI UPT	Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	A	Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP	6.300.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	6.300.000, 00	6.300.000, 00	100, 00 (%)
12.	BBPOM di Bandung	Perkara Hukum Badan Usaha	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI UPT	Operasi Penindakan	A	Operasi Penindakan	235.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	235.000.000, 00	235.000.000, 00	100, 00 (%)
13.	BBPOM di Bandung	Perkara Hukum Badan Usaha	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI UPT	Operasi Penindakan	B	Penangkapan dan Penahanan	62.700.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	62.700.000, 00	62.700.000, 00	100, 00 (%)
14.	BBPOM di Bandung	Perkara Hukum Badan Usaha	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI UPT	Pemberkasan	A	Pemberkasan	286.120.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	286.120.000, 00	286.120.000, 00	100, 00 (%)
15.	BBPOM di Bandung	Perkara Hukum Badan Usaha	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI UPT	Pemberkasan	B	Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	25.040.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	25.040.000, 00	25.040.000, 00	100, 00 (%)
16.	BBPOM di Bandung	Perkara Hukum Badan Usaha	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI UPT	Pemberkasan	C	Gelar Perkara	8.520.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	8.520.000, 00	8.520.000, 00	100, 00 (%)
17.	BBPOM di Bandung	Perkara Hukum Badan Usaha	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI UPT	Pemberkasan	D	Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	18.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	18.000.000, 00	18.000.000, 00	100, 00 (%)
18.	BBPOM di Bandung	Perkara Hukum Badan Usaha	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI UPT	Pemberkasan	E	Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	80.600.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	80.600.000, 00	80.600.000, 00	100, 00 (%)
19.	BBPOM di Bandung	Koordinasi	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	C	FORUM KOORDINASI INTELIJEN	6.466.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	6.466.000, 00	6.466.000, 00	100, 00 (%)
20.	BBPOM di Bandung	Koordinasi	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	D	FORUM KOMUNIKASI PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN	2.480.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	2.480.000, 00	2.480.000, 00	100, 00 (%)

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
Total					0, 00	0, 00	0, 00	1.259.188.000, 00	1.259.188.000, 00				

23. Indeks RB UPT 84.80 4.570.325.000, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	Layanan Umum UPT	A	JASA PERLENGKAPAN KANTOR	75.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	75.000.000, 00	75.000.000, 00	100, 00 (%)
2.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	AL	AUDIT INTERNAL QMS ISO 9001:2015	19.800.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	19.800.000, 00	19.800.000, 00	100, 00 (%)
3.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan koordinasi	H	WORKSHOP PENYELENGGARAAN KEARSIPAN (WORKSHOP IMPLEMENTASI SPBE BIDANG KEARSIPAN)	2.230.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	2.230.000, 00	2.230.000, 00	100, 00 (%)
4.	BBPOM di Bandung	Sarana di Bidang Kesehatan	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Pengadaan kendaraan bermotor	A	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 2	35.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	35.000.000, 00	35.000.000, 00	100, 00 (%)
5.	BBPOM di Bandung	Sarana di Bidang Kesehatan	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	188.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	188.000.000, 00	188.000.000, 00	100, 00 (%)
6.	BBPOM di Bandung	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A	PERJALANAN KOORDINASI PIMPINAN/KONSULTASI/PERJALANAN LAINNYA	385.350.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	385.350.000, 00	385.350.000, 00	100, 00 (%)
7.	BBPOM di Bandung	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B	PERJALANAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR	132.110.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	132.110.000, 00	132.110.000, 00	100, 00 (%)
8.	BBPOM di	Layanan Dukungan	Layanan Perkantoran	Operasional dan	G	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	242.960.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	242.960.000, 00	242.960.000, 00	100, 00 (%)

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
	Bandung	Manajemen Internal		Pemeliharaan Kantor									
9.	BBPOM di Bandung	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H	OPERASIONAL PERKANTORAN	2.197.140.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	2.197.140.000, 00	2.197.140.000, 00	100, 00 (%)
10.	BBPOM di Bandung	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L	ADMINISTRASI KEGIATAN	188.650.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	188.650.000, 00	188.650.000, 00	100, 00 (%)
11.	BBPOM di Bandung	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M	LANGGANAN DAYA DAN JASA	978.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	978.000.000, 00	978.000.000, 00	100, 00 (%)
12.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	AN	INTERNALISASI PEMENUHAN INDIKATOR WBK/WBBM	2.400.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	2.400.000, 00	2.400.000, 00	100, 00 (%)
13.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	AP	SOSIALISASI DAN INTERNALISASI FRAUD CONTROL PLAN (FCP) REGIONAL	4.530.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	4.530.000, 00	4.530.000, 00	100, 00 (%)
14.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	AQ	RAPAT KERJA DAN KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN POM	1.840.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	1.840.000, 00	1.840.000, 00	100, 00 (%)
15.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	AW	ASISTENSI DALAM RANGKA PIPK	2.400.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	2.400.000, 00	2.400.000, 00	100, 00 (%)
16.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	V	PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBBM	90.115.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	90.115.000, 00	90.115.000, 00	100, 00 (%)
17.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan koordinasi	G	WORKHOP AWARENESS QMS ISO 9001:2015	20.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	20.000.000, 00	20.000.000, 00	100, 00 (%)

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
18.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan koordinasi	M	SURVEILLAN QMS ISO 9001:2015	4.800.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	4.800.000, 00	4.800.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	4.570.325.000, 00	4.570.325.000, 00				

24. Nilai AKIP UPT 88 367.522.000, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	AK	EVALUASI SAKIP REGIONAL	4.530.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	4.530.000, 00	4.530.000, 00	100, 00 (%)
2.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	AR	REVIU	2.400.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	2.400.000, 00	2.400.000, 00	100, 00 (%)
3.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	Y	MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN	288.432.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	288.432.000, 00	288.432.000, 00	100, 00 (%)
4.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	Z	MONITORING DAN EVALUASI TEMATIK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	13.172.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	13.172.000, 00	13.172.000, 00	100, 00 (%)
5.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan koordinasi	C	RAPAT EVALUASI NASIONAL BPOM TAHUN 2023	48.176.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	48.176.000, 00	48.176.000, 00	100, 00 (%)
6.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan koordinasi	D	RAPAT KERJA NASIONAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR	10.812.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	10.812.000, 00	10.812.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	367.522.000, 00	367.522.000, 00				

25. Indeks Profesionalitas ASN UPT 81 24.954.377.000, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di	Pelayanan Publik	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang	Penerbitan keputusan/sertifikat	C	PENINGKATAN KOMPETENSI BAGI PETUGAS SERTIFIKASI	29.385.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	29.385.000, 00	29.385.000, 00	100, 00 (%)

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
	Bandung	Lainnya	Diselesaikan oleh UPT	layanan publik									
2.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	AD	PENGADAAN CASN	15.800.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	15.800.000, 00	15.800.000, 00	100, 00 (%)
3.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	AF	PEMBINAAN DAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	700.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	700.000, 00	700.000, 00	100, 00 (%)
4.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	B	SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN LAKIP	15.534.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	15.534.000, 00	15.534.000, 00	100, 00 (%)
5.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	C	SOSIALISASI PENGELOLAAN BMN	6.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	6.000.000, 00	6.000.000, 00	100, 00 (%)
6.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C	BIMTEK INTERNAL FOOD INSPECTOR DASAR	25.790.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	25.790.000, 00	25.790.000, 00	100, 00 (%)
7.	BBPOM di Bandung	Koordinasi	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	B	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN PETUGAS INTELIJEN BADAN POM	1.290.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	1.290.000, 00	1.290.000, 00	100, 00 (%)
8.	BBPOM di Bandung	Koordinasi	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	C	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN PETUGAS INTELIJEN LANJUTAN BADAN POM	1.290.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	1.290.000, 00	1.290.000, 00	100, 00 (%)
9.	BBPOM di Bandung	Koordinasi	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	B	BIMBINGAN TEKNIS OPERASIONAL SIBER KEPADA UPT BADAN POM	1.300.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	1.300.000, 00	1.300.000, 00	100, 00 (%)
10.	BBPOM di Bandung	Koordinasi	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	E	PELANTIKAN PPNS	320.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	320.000, 00	320.000, 00	100, 00 (%)
11.	BBPOM di Bandung	Koordinasi	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	B	PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA	103.155.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	103.155.000, 00	103.155.000, 00	100, 00 (%)
12.	BBPOM di	Layanan Dukungan	Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	A	GAJI DAN TUNJANGAN	23.766.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	23.766.000.000, 00	23.766.000.000, 00	100, 00 (%)

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
	Bandung	Manajemen Internal											
13.	BBPOM di Bandung	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F	PENGADAAN PAKAIAN KERJA PEGAWAI	199.200.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	199.200.000, 00	199.200.000, 00	100, 00 (%)
14.	BBPOM di Bandung	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I	PEMERIKSAAN KESEHATAN	199.800.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	199.800.000, 00	199.800.000, 00	100, 00 (%)
15.	BBPOM di Bandung	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J	MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	199.920.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	199.920.000, 00	199.920.000, 00	100, 00 (%)
16.	BBPOM di Bandung	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	D	BIMTEK INTERNAL CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK (CDOB) JUNIOR	21.860.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	21.860.000, 00	21.860.000, 00	100, 00 (%)
17.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	A	BIMTEK SAKIP DAN MONEV ONLINE	700.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	700.000, 00	700.000, 00	100, 00 (%)
18.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	AC	BIMTEK AWARENESS QMS ISO 9001:2015 BPOM	8.820.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	8.820.000, 00	8.820.000, 00	100, 00 (%)
19.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	AE	RAPAT KOORDINASI NASIONAL DALAM RANGKA PERKUATAN SDM UNGGUL	6.318.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	6.318.000, 00	6.318.000, 00	100, 00 (%)
20.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	D	SOSIALISASI KEUANGAN	6.300.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	6.300.000, 00	6.300.000, 00	100, 00 (%)
21.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	E	SOSIALISASI/BIMTEK KEPEGAWAIAN	3.900.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	3.900.000, 00	3.900.000, 00	100, 00 (%)
22.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	G	PELATIHAN LEAD AUDITOR	1.960.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	1.960.000, 00	1.960.000, 00	100, 00 (%)
23.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	F	SOSIALISASI PENGELOLAAN KEARSIPAN	3.600.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	3.600.000, 00	3.600.000, 00	100, 00 (%)

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
24.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	H	DIKLAT PEGAWAI TELADAN	4.250.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	4.250.000, 00	4.250.000, 00	100, 00 (%)
25.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	M	PELATIHAN K3	19.800.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	19.800.000, 00	19.800.000, 00	100, 00 (%)
26.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	N	DIKLAT/SEMINAR ASN	28.920.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	28.920.000, 00	28.920.000, 00	100, 00 (%)
27.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	Q	ASISTENSI PENYUSUNAN PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN, BIMBINGAN TEKNIS SAI DAN LAPORAN KEUANGAN DI UPT POM PERENCANAAN KINERJA UPT BPOM	5.580.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	5.580.000, 00	5.580.000, 00	100, 00 (%)
28.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	O	WORKSHOP INFORMASI DAN KOMUNIKASI	3.920.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	3.920.000, 00	3.920.000, 00	100, 00 (%)
29.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	T	PENINGKATAN MENTAL DAN SPIRITUAL MELALUI PENINGKATAN JASMANI DAN ROHANI	31.600.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	31.600.000, 00	31.600.000, 00	100, 00 (%)
30.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	A	PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM BIDANG KIMIA OBAT DAN NAPZA	5.630.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	5.630.000, 00	5.630.000, 00	100, 00 (%)
31.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	B	BIMBINGAN TEKNIS PENGUJIAN KIMIA KOSMETIK	5.630.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	5.630.000, 00	5.630.000, 00	100, 00 (%)
32.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	C	BIMTEK PENGEMBANGAN PENGUJIAN KIMIA OBAT TRADISIONAL, OBAT KUASI DAN SUPLEMEN KESEHATAN	5.630.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	5.630.000, 00	5.630.000, 00	100, 00 (%)
33.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	D	WORKSHOP REGIONALISASI DI BALI	6.926.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	6.926.000, 00	6.926.000, 00	100, 00 (%)

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
34.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	E	PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI	5.630.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	5.630.000, 00	5.630.000, 00	100, 00 (%)
35.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	F	BIMTEK/DIKLAT TEKNIS/SEMINAR/WORKSHOP PENGUJIAN	37.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	37.000.000, 00	37.000.000, 00	100, 00 (%)
36.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	G	BIMBINGAN TEKNIS/MAGANG STAF PENGUJI	20.190.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	20.190.000, 00	20.190.000, 00	100, 00 (%)
37.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	H	BIMBINGAN TEKNIS INTERNAL LABORATORIUM KOSMETIK	28.915.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	28.915.000, 00	28.915.000, 00	100, 00 (%)
38.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	I	BIMBINGAN TEKNIS INTERNAL LABORATORIUM OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	28.915.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	28.915.000, 00	28.915.000, 00	100, 00 (%)
39.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	J	BIMBINGAN TEKNIS LABORATORIUM KIMIA PANGAN DAN AIR	29.240.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	29.240.000, 00	29.240.000, 00	100, 00 (%)
40.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	K	BIMBINGAN TEKNIS LABORATORIUM KIMIA OBAT DAN NAPZA	29.715.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	29.715.000, 00	29.715.000, 00	100, 00 (%)
41.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	L	BIMBINGAN TEKNIS KIMIA MIKROBIOLOGI	30.040.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	30.040.000, 00	30.040.000, 00	100, 00 (%)
42.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan	D	TOT PEGAWAI BPOM DALAM RANGKA PENINGKATAN DAYA SAING UMKM OBAT DAN MAKANAN	7.904.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	7.904.000, 00	7.904.000, 00	100, 00 (%)

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
Total					0, 00		0, 00	0, 00	24.954.377.000, 00	24.954.377.000, 00			

26. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP — 89 — 8.811.085.000, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Sarana Bidang Kesehatan	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	A	PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	6.689.340.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	6.689.340.000, 00	6.689.340.000, 00	100, 00 (%)
2.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Peningkatan ruang lingkup pengujian	A	PENGEMBANGAN TEKNIS PENGUJIAN MELALUI UJI PROFISIENSI	64.500.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	64.500.000, 00	64.500.000, 00	100, 00 (%)
3.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Peningkatan ruang lingkup pengujian	B	UJI KOLABORASI METODA ANALISA / BAKU PEMBANDING	60.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	60.000.000, 00	60.000.000, 00	100, 00 (%)
4.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Peningkatan ruang lingkup pengujian	C	PENGADAAN REFFERENCE STANDARD	60.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	60.000.000, 00	60.000.000, 00	100, 00 (%)
5.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Peningkatan ruang lingkup pengujian	D	JAMINAN MUTU HASIL PENGUJIAN	50.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	50.000.000, 00	50.000.000, 00	100, 00 (%)
6.	BBPOM di	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan	Peningkatan ruang lingkup pengujian	E	VALIDASI / VERIFIKASI METODA	50.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	50.000.000, 00	50.000.000, 00	100, 00 (%)

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
	Bandung		Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice			ANALISIS							
7.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Peningkatan ruang lingkup pengujian	F	KAJI ULANG DOKUMEN MUTU ISO 17025:2017	5.060.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	5.060.000, 00	5.060.000, 00	100, 00 (%)
8.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Peningkatan ruang lingkup pengujian	G	WORKSHOP AWARENESS ISO 17025:2017	11.300.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	11.300.000, 00	11.300.000, 00	100, 00 (%)
9.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Peningkatan ruang lingkup pengujian	H	SURVEILAN LABORATORIUM OLEH KAN BSN	65.750.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	65.750.000, 00	65.750.000, 00	100, 00 (%)
10.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Peningkatan ruang lingkup pengujian	I	PENDAMPINGAN PEMENUHAN KEMAMPUAN LABORATORIUM BB/BALAI POM	2.400.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	2.400.000, 00	2.400.000, 00	100, 00 (%)
11.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Peningkatan ruang lingkup pengujian	J	KALIBRASI ALAT LABORATORIUM	106.100.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	106.100.000, 00	106.100.000, 00	100, 00 (%)
12.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	E	PENINGKATAN LAYANAN PENGUJIAN DENGAN LINTAS SEKTOR DAN INTERNALISASI SISTEM MUTU	7.480.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	7.480.000, 00	7.480.000, 00	100, 00 (%)

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
13.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A	ADMINISTRASI KEGIATAN DUKUNGAN TEKNIS DAN MANAJEMEN LABORATORIUM YANG DILAKSANAKAN	10.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	10.000.000, 00	10.000.000, 00	100, 00 (%)
14.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	B	PENGADAAN BAHAN PENDUKUNG LABORATORIUM	717.695.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	717.695.000, 00	717.695.000, 00	100, 00 (%)
15.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	F	PENGELOLAAN LABORATORIUM	824.610.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	824.610.000, 00	824.610.000, 00	100, 00 (%)
16.	BBPOM di Bandung	Standarisasi Lembaga	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	G	PENGELOLAAN LIMBAH LABORATORIUM	86.850.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	86.850.000, 00	86.850.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	8.811.085.000, 00	8.811.085.000, 00				

27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	300.400.000, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Perangkat pengolah data dan komunikasi	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	75.400.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	75.400.000, 00	75.400.000, 00	100, 00 (%)
2.	BBPOM di Bandung	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	Layanan Umum UPT	B	PENGELOLAAN JARINGAN	225.000.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	225.000.000, 00	225.000.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	300.400.000, 00	300.400.000, 00				

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		25	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95.60	1.598.116.000, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	AJ	REVIU-LK BMN REGIONAL	2.330.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	2.330.000, 00	2.330.000, 00	100, 00 (%)
2.	BBPOM di Bandung	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR	219.200.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	219.200.000, 00	219.200.000, 00	100, 00 (%)
3.	BBPOM di Bandung	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D	PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN	462.300.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	462.300.000, 00	462.300.000, 00	100, 00 (%)
4.	BBPOM di Bandung	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E	PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS	282.018.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	282.018.000, 00	282.018.000, 00	100, 00 (%)
5.	BBPOM di Bandung	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	N	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI)	19.800.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	19.800.000, 00	19.800.000, 00	100, 00 (%)
6.	BBPOM di Bandung	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	O	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN	228.128.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	228.128.000, 00	228.128.000, 00	100, 00 (%)
7.	BBPOM di Bandung	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	P	PERJALANAN KOORDINASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	55.800.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	55.800.000, 00	55.800.000, 00	100, 00 (%)
8.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	AA	SOSIALISASI PERATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA	1.960.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	1.960.000, 00	1.960.000, 00	100, 00 (%)
9.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	AS	AISTENSI DALAM RANGKA PEMERIKSAAN BPK	2.400.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	2.400.000, 00	2.400.000, 00	100, 00 (%)
10.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	AT	PENDAMPINGAN PEMERIKSAAN BPK	2.400.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	2.400.000, 00	2.400.000, 00	100, 00 (%)

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	10	20	25	40	50	60	70	90	90	90	18	348.351.000, 00

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
11.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	S	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	4.920.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	4.920.000, 00	4.920.000, 00	100, 00 (%)
12.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	W	PEMUTAKHIRAN DATA BMN	7.840.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	7.840.000, 00	7.840.000, 00	100, 00 (%)
13.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan koordinasi	E	WORKSHOP PENGADAAN BARANG/JASA BADAN POM	2.500.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	2.500.000, 00	2.500.000, 00	100, 00 (%)
14.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan koordinasi	K	KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN	32.100.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	32.100.000, 00	32.100.000, 00	100, 00 (%)
15.	BBPOM di Bandung	Pemantauan Produk	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan koordinasi	L	KOORDINASI PENGELOLAAN BMN	22.140.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	22.140.000, 00	22.140.000, 00	100, 00 (%)
16.	BBPOM di Bandung	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K	SEWA RUMAH DINAS	252.280.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	252.280.000, 00	252.280.000, 00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	1.598.116.000, 00	1.598.116.000, 00				

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Pasar aman dari bahan berbahaya	Pengadaan peralatan pendukung	A	PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG	60.191.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	60.191.000, 00	60.191.000, 00	100, 00 (%)
2.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Pasar aman dari bahan berbahaya	Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A	SURVEI PASAR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	34.450.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	34.450.000, 00	34.450.000, 00	100, 00 (%)
3.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Pasar aman dari bahan berbahaya	Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	B	BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS PENGELOLA PASAR DALAM	29.400.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	29.400.000, 00	29.400.000, 00	100, 00 (%)

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
						RANGKA PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA							
4.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Pasar aman dari bahan berbahaya	Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	C	PENYULUHAN KEPADA KOMUNITAS PASAR DAN KAMPANYE PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	6.000.000,00	0, 00	0, 00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100, 00 (%)
5.	BBPOM di Bandung	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Pasar aman dari bahan berbahaya	Pemantauan dan evaluasi	A	SAMPLING DAN PENGUJIAN SAMPEL DI PASAR	218.310.000,00	0, 00	0, 00	0,00	218.310.000,00	218.310.000,00	100, 00 (%)
Total					0, 00	0, 00	0, 00	348.351.000,00	348.351.000,00				

Total 75.260.350.000, 00

Bandung, 28 Desember 2022

Kepala Balai Besar POM di Bandung

Sukriadi Darma, S.Si., Apt., SH.